



PDRRI

Pemerintah Daerah Republik Indonesia

DIKAJI ULANG

MASYARAKAT SEJARANAN INDONESIA

M. S. I

1990

DAFTAR ISI

PRAWACANA

SAMBUTAN-SAMBUTAN

1. Sambutan Tertulis Presiden RI. 7.
2. Mr. T. Moh. Hasan, "PDRI sebagai Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Persatuan Bangsa, dan Objek Studi Sejarah". 10.
3. Abdurrachman Surjomihardjo, "Sebuah Seminar Plus". 12.
4. Emil Salim, "Makna PDRI". 15.

REKONSTRUKSI DAN PERSEPSI

1. Sartono Kartodirdjo, "Makna PDRI dalam Revolusi Indonesia". 23.
2. Taufik Abdullah, "PDRI dalam Sejarah Perang Kemerdekaan". 30.
3. JR. Chaniago, "Lintasan Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1948 - 1949)". 38.
4. Nazaruddin Sjamsuddin, "Aceh pada Masa PDRI". 51.
5. Saleh A. Djamhari, "Pemerintah Darurat RI di Jawa (1949)". 63.
6. Yuwono Sudarsono, "Segi-segi Luar Negeri PDRI". 71.
7. Tanggapan dan Masukan. 75.
8. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, "Tugas Pemerintah Darurat RI". 115.
9. Mr. T. Moh. Hasan, "PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)". 118.
10. Laksamana Moh. Nazir, "Butir Renungan pada Masa Revolusi di Sumatra Barat". 130.
11. Komodor H. Soejono, "Kisah Perjalanan KSAU PDRI". 135.
12. Let. Kol. A.E. Kawilarang, "Pengalaman Bulan-bulan Akhir 1948 sampai dengan Akhir 1949". 143.
13. Komodor Wiweko Soepono, "Kegiatan AURI selama PDRI di Burma". 146.
14. Baharudin Djaka, "Pengalaman Bersama PDRI". 148.

DARI SUMBER-SUMBER YANG TERCECER

1. Machfudi Mangkudilaga, "PDRI dalam Sumber Belanda". 159.
2. PDRI dalam Arsip Belanda. 163.
3. Terjemahan Arsip Belanda tentang PDRI. 214.

4. Daftar Arsip PDRI.	260
5. Arsip PDRI.	263

LAMPIRAN

1. Rumusan Seminar PDRI.	297.
2. Nama Pelaku yang Menyumbang Tulisan dalam Rangka Seminar PDRI.	300.
3. Seminar PDRI dalam Pemberitaan Pers.	305.
4. Panitia Seminar PDRI.	307.

ooooo O ooooo

1.

SAMBUTAN TERTULIS PRESIDEN
PADA SEMINAR SEJARAH PEMERINTAH DARURAT
REPUBLIK INDONESIA
PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1989
DI JAKARTA

Hadirin yang saya hormati;

Hari ini Saudara-saudara sekalian berkumpul di sini untuk membahas sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Meskipun saya tidak dapat hadir sendiri secara pribadi, saya sangat bersyukur bahwa Saudara-saudara dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama mengkaji suatu bagian dari sejarah bangsa kita yang penting.

Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di sini dijumpai peserta dari bermacam kalangan; yakni para pelaku yang berperan 40 tahun yang lalu, para sejarawan dan ilmuwan lainnya, serta generasi muda.

Kehadiran para pelaku kita syukuri, karena mereka dapat melengkapi bahan sejarah PDRI yang selama ini kurang terekam dengan baik. Mereka mempunyai peranan penting dalam pengkajian sejarah ini, karena merekalah yang dapat memberikan darah dan daging dari tulang kerangka sejarah yang Saudara bahas, pandangan dan visi yang menjiwai perjuangan gerilya kita waktu itu.

Kehadiran para sejarawan di sini mutlak diperlukan, karena mereka tidak terlibat secara emosional dalam kejadian waktu itu, sehingga dapat mengadakan analisa yang lebih tajam. Dari mereka kita dapat memetik gambaran dan makna yang lebih menyeluruh dari potongan-potongan sejarah yang diketahui pelaku perorangan.

Sedangkan kehadiran wakil-wakil dari generasi muda yang tidak kalah pentingnya. Pelaku sejarah hanya menjalani perjuangan untuk menjadi bahan sejarah. Ilmuwan hanya merangkum, mengadakan rekonstruksi, serta akan menjadi sejarah yang betul-betul mempunyai arti, jika dipahami dan dicamkan maknanya oleh generasi muda sekarang dan yang akan datang. Sejarah dibuat untuk generasi muda; merekalah pewaris sejarah, yang akan memanfaatkan sejarah, pemetik kearifan sejarah.

Kearifan sejarah ini ingin saya garis bawahi bagi kita semua dan seluruh generasi muda yang dewasa ini memikul tanggungjawab yang makin besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kearifan sejarah memberikan kepada suatu generasi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal, tanpa dia harus melalui dan mengalami sendiri peristiwa itu. Semua pengalaman dan pahit derita yang telah dilewati tidak perlu dialami sendiri, dan terulang kembali, jika kita semua mempunyai kearifan sejarah.

Karena itu pula, saya menghimbau, agar kita juga mengembangkan kearifan sejarah di samping mengkaji dan merekam sejarah. Dari pengalaman yang dilalui Pemerintah Darurat, kita dapat memetik sari pati, makna dan hikmah yang sangat berguna bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara kita untuk selanjutnya.

Saudara-saudara;

Apakah kearifan sejarah dan hikmah yang dapat kita petik dari sejarah perjuangan kemerdekaan selama masa Pemerintah Darurat? Pertanyaan ini hendaknya merupakan dasar pemikiran dari seluruh peserta seminar dalam dua hari ini.

Perjuangan semasa Pemerintah Darurat tersebut merupakan kurun waktu yang relatif singkat, antara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, ketika Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Panglima Besar Soedirman kembali dari perang gerilya dan menyerahkan mandatnya kembali kepada Kabinet Republik Indonesia yang utuh. Namun masa yang hanya tujuh bulan itu mempunyai makna penting karena berlangsung ketika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta anggota kabinet lainnya ditangkap Belanda dalam keadaan darurat seperti ini Pemerintah Republik Indonesia beserta Angkatan Bersenjata tetap tegak dan terus berjuang.

Perjuangan singkat waktu itu menanamkan kearifan sejarah mengenai arti pentingnya perjuangan dan kekuatan rakyat dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Kurun waktu yang singkat itu merupakan bukti sejarah, bahwa Kemerdekaan Nasional kita yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia mendapat dukungan, dipertahankan dan ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyatlah yang memungkinkan suatu pemerintahan darurat berjalan seperti suatu pemerintahan yang layak. Merekalah yang melindungi para pemimpin sipil dan militer, termasuk Panglima Besar Soedirman, dari pengejaran musuh, sehingga pada akhirnya Tentara Nasional Indonesia mampu menyusun kekuatan dan membuat serangan-serangan balik.

Saudara-saudara sekalian;

Menjelang masa akhir tugas historisnya, Angkatan '45 dan generasi muda masa kini perlu pula menuntaskan tugas sejarahnya, yaitu melengkapi perekaman sejarah perjuangan kemerdekaan. Masih banyak bagian penting dari sejarah tersebut yang belum direkam, dikenal atau dipahani secara memadai. Salah satunya yang paling dirasakan adalah yang menyangkut Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini.

Sejarah perjuangan semasa PDRI ini menyangkut perjuangan rakyat bersama TNI dan aparat sipil di hampir semua daerah di Indonesia. Ia menyangkut perjuangan di bagian-bagian wilayah Republik Indonesia yang tidak pernah jatuh ke tangan Belanda dalam Perang Kemerdekaan; seperti Aceh, Tapanuli serta daerah pedesaan di berbagai propinsi di sebagian besar Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lainnya. Namun belum dikenal secara luas.

Saya mendorong usaha-usaha seperti ini, agar generasi depan mendapatkan gambaran yang obyektif dan perspektif yang lengkap, mengenai keseluruhan, sehingga dapat menghayati sejarah dan makna kemerdekaan ini dengan baik. Saya melihat, bahwa generasi muda sekarang banyak yang kurang merasakan relevansi perjuangan, karena terasa jauh dari segi ruang dan waktu.

Pengenalan dan pengakuan terhadap perjuangan rakyat di berbagai daerah akan memberi kebanggaan bagi generasi depan mengenai peranan pendahulu-pendahulu mereka, orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka, memberi makna mengenai arti kemerdekaan, dan sekaligus memperkuat rasa kesatuan dan persatuan antara semua daerah, antara semua golongan dan kalangan masyarakat kita yang sangat majemuk ini.

Karena itu saya menganjurkan agar semua pihak membantu upaya melengkapi sejarah ini, agar kita jangan sampai melupakan sejarah dan menjadi bangsa yang kerdil.

Adalah dengan harapan ini saya mengucapkan selamat berseminar kepada semua peserta seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan berdoa agar seminar ini dapat memberi hasil yang berguna bagi pengembangan nusa dan bangsa kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 25 September 1989.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

2. PDRI SEBAGAI PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN,
PERSATUAN BANGSA, DAN OBJEK STUDI SEJARAH *)

Oleh : Mr. T. Moh. Hasan

Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili teman-teman seperjuangan saya untuk memberikan sambutan pada pembukaan seminar ini. Peristiwa hari ini bagi kami merupakan hari yang berbahagia. Ruangan ini bukan saja dapat menemukan teman-teman yang sudah lama tidak saling berjumpa, tetapi juga kami bisa mendengar pakar-pakar sejarah mendiskusikan aktivitas teman seperjuangan kami dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Tentu saja para pelaku sejarah yang hadir di sini sangat terbatas. Kami yang datang ke seminar ini bukanlah mewakili ribuan pendukung dan pembela PDRI. Kami di sini hanyalah sebagian dari teman-teman yang masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sekedar menyumbangkan pengalaman-pengalaman pribadi pada seminar yang terhormat ini.

Bilamana saya berdiri di sini, hati dan perasaan saya kembali ke suasana perjuangan sekitar empat puluh tahun yang lalu, ketika ibukota kita diduduki dan Presiden serta wakil Presiden ditawan Belanda, para pejuang kemerdekaan yang berhasil meloloskan diri memutuskan untuk tetap membela Republik Indonesia. Apapun yang terjadi dengan para pemimpin kita, eksistensi Republik tidak boleh hilang. Jika secara historis Pemerintah Darurat Republik Indonesia hanya terlihat di Jawa, Sumatra, dan di beberapa tempat di luar negeri, hal itu tidak berarti bahwa teman-teman di wilayah lain tidak berjuang. Republik Indonesia menurut Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 kita adalah dari Sabang sampai Merauke, dan aktivitas Pemerintah Darurat Republik Indonesia ditujukan untuk mewujudkan cita-cita itu.

Sebagai peristiwa sejarah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah berlalu. Namun sebagai alat untuk membina wawasan kebangsaan, sebagai salah satu bahan perekat persatuan bangsa, dan sebagai objek studi yang menarik bagi para ilmuwan, sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia akan tetap abadi. Karena itulah, ketika saya bersama beberapa orang teman menghadap Bapak Presiden pada tgl 4 Januari 1989 yang lalu kami sangat terkesan akan kearifan beliau yang menempatkan PDRI dalam wawasan tersebut. Sebagai negarawan, pak Harto telah menempatkan peristiwa sejarah pada proporsi sebenarnya. Bahkan kita sangat berterima kasih dan menghargai kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan amanat tertulis yang sebentar lagi akan kita dengarkan.

Tidak kalah pentingnya adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan Prof Dr Emil Salim. Beliau bukan hanya telah berusaha keras dan mendorong agar

*) Diolah dari Sambutan Mantan Wakil Ketua PDRI pada pembukaan Seminar.

2. PDRI SEBAGAI PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN,
PERSATUAN BANGSA, DAN OBJEK STUDI SEJARAH *)

Oleh : Mr. T. Moh. Hasan

Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili teman-teman seperjuangan saya untuk memberikan sambutan pada pembukaan seminar ini. Peristiwa hari ini bagi kami merupakan hari yang berbahagia. Ruangan ini bukan saja dapat menemukan teman-teman yang sudah lama tidak saling berjumpa, tetapi juga kami bisa mendengar pakar-pakar sejarah mendiskusikan aktivitas teman seperjuangan kami dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Tentu saja para pelaku sejarah yang hadir di sini sangat terbatas. Kami yang datang ke seminar ini bukanlah mewakili ribuan pendukung dan pembela PDRI. Kami di sini hanyalah sebagian dari teman-teman yang masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sekedar menyumbangkan pengalaman-pengalaman pribadi pada seminar yang terhormat ini.

Bilamana saya berdiri di sini, hati dan perasaan saya kembali ke suasana perjuangan sekitar empat puluh tahun yang lalu, ketika ibukota kita diduduki dan Presiden serta wakil Presiden ditawan Belanda, para pejuang kemerdekaan yang berhasil meloboskan diri memutuskan untuk tetap membela Republik Indonesia. Apapun yang terjadi dengan para pemimpin kita, eksistensi Republik tidak boleh hilang. Jika secara historis Pemerintah Darurat Republik Indonesia hanya terlihat di Jawa, Sumatra, dan di beberapa tempat di luar negeri, hal itu tidak berarti bahwa teman-teman di wilayah lain tidak berjuang. Republik Indonesia menurut Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 kita adalah dari Sabang sampai Merauke, dan aktivitas Pemerintah Darurat Republik Indonesia ditujukan untuk mewujudkan cita-cita itu.

Sebagai peristiwa sejarah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah berlalu. Namun sebagai alat untuk membina wawasan kebangsaan, sebagai salah satu bahan perekat persatuan bangsa, dan sebagai objek studi yang menarik bagi para ilmuwan, sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia akan tetap abadi. Karena itulah, ketika saya bersama beberapa orang teman menghadap Bapak Presiden pada tgl 4 Januari 1989 yang lalu kami sangat terkesan akan kearifan beliau yang menempatkan PDRI dalam wawasan tersebut. Sebagai negarawan, pak Harto telah menempatkan peristiwa sejarah pada proporsi sebenarnya. Bahkan kita sangat berterima kasih dan menghargai kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan amanat tertulis yang sebentar lagi akan kita dengarkan.

Tidak kalah pentingnya adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan Prof Dr Emil Salim. Beliau bukan hanya telah berusaha keras dan mendorong agar

*) Diolah dari Sambutan Mantan Wakil Ketua PDRI pada pembukaan Seminar.

Oleh : *Abdurrachman Surjomihardjo* *)

Masyarakat Sejarawan Indonesia di seluruh tanah air secara khusus ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus hati atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan amanatnya, dan membuka Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Hari ini berkumpul para Menteri, para pejuang kemerdekaan Bangsa Indonesia, para tokoh masyarakat, para sejarawan Indonesia, yang menurut catatan terakhir semuanya berjumlah 300 orang. Bila dirinci dari luar kota Jakarta hadir 42 orang, dan dari dalam kota Jakarta hadir 258 orang. Mereka yang hadir dari luar kota Jakarta datang dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Malang, Jember, Singaraja, Ujung Pandang, dan Surabaya. Sebagian besar dari mereka adalah para pengajar perguruan tinggi setempat. Mereka datang sendiri tanpa biaya panitia.

Kita semua berkumpul di sini untuk mengingat kembali, untuk mengaji kembali suatu episode yang penting dalam rangkaian tumbuhnya Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia. Suatu episode yang merupakan bagian dari proses sejarah Republik Indonesia, timbul dari situasi sejarah yang menciptakan suasana hidup atau mati bagi banyak pejuang kemerdekaan dan rakyat pedesaan, yang dirangkaikan oleh peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain, dalam kurun waktu 1945 - 1949. Terpancar dari dalam proses itu harga diri dan martabat Bangsa, kepercayaan kepada diri sendiri ditugasi sejarah, untuk meninggikan derajat, untuk meningkatkan hidup kemanusiaan. Juga sebagai usaha bersama mewujudkan dambaan umat manusia setelah Perang Dunia II yaitu : kemerdekaan, hapusnya penindasan bangsa atas bangsa lain, hapusnya penindasan manusia atas manusia lain. Sebagai bagian dari proses sejarah, maka episode Pemerintah Darurat Republik Indonesia pun mempunyai latar belakang dan juga perspektif ke masa depan. Lahir dari dalam situasi sejarah, keterlibatan para pelaku revolusi di dalam perbedaan dan pertentangan politik adalah suatu kewajaran belaka. Itu terjadi di mana saja, kapan saja dalam situasi sejarah yang sama.

Situasi konflik pada saatnya bisa mengaburkan pandangan, menghalangi wawasan jernih, namun apabila telah menyejarah maka distansi waktu dapat menumbuhkan obyektivitas yang subyektif maupun subyektivitas yang obyektif. Di antara dua sudut pandang itu tumbuhlah keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang ihwal sejarah, berupa minat biasa sampai kepada yang

*) (Diolah dari Sambutan Ketua Umum MSI/Ketua Panitia Pengarah Seminar).

serius mengadakan pengajian historis. Sudah beberapa bulan terakhir ini, para sejarawan membagi waktunya untuk menyepi diri, membaca dan membuat catatan, mengadakan refleksi diri, mendiskusikan dengan teman-teman seprofesi, bertanya kepada para pelaku sejarah. Hasilnya akan disajikan dalam seminar ini dalam suasana yang lain dari yang lain.

Betapa tidak? Seminar ini adalah Seminar Plus, gabungan dari para peminat, pelaku sejarah dan sejarawan. Para pelaku sejarah, khususnya yang mengalami masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia juga sibuk menyambut seminar ini, sebagian mulai mengeluarkan kenang-kenangannya secara tertulis, memberikan informasi mengenai bahan-bahan otentik, dan keterangan-keterangan nostalgia yang menggambarkan suasana waktu itu. Bahan-bahan yang penting itu telah diterima MSI. Sebetulnya masih ada bagian besar pelaku sejarah yang tidak bisa bicara: teman seperjuangan yang telah gugur dan rakyat pedesaan yang mendukung para pejuang dengan apa saja yang dipunyainya. Tidak jarang mereka memberikan jasa yang sulit dilakukan "orang kota" seperti mengangkut peralatan memberikan konsumsi, penunjuk jalan di hutan belukar, sebagai pengintai datangnya musuh secara mendadak, memberikan contoh kesabaran, keberanian dan ketabahan menghadapi situasi.

Seminar ini juga dapat diadakan berkat bantuan banyak pihak: para donatur pemerintah yang memberikan iklim dan suasana untuk pekerjaan seperti ini, para sejarawan junior yang bersemangat untuk merampungkan tugas-tugas kepanitaan, dan masih banyak lagi yang seharusnya disebut pada kesempatan ini. Kepada mereka semua Masyarakat Sejarawan Indonesia, segenap Panitia Pengarah dan Penasehat mengucapkan banyak terima kasih.

Seiring dengan itu segenap Panitia juga meminta maaf sebesar-besarnya, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para hadirin di dalam penyelenggaraan seminar ini. Seminar ini akan menyajikan delapan makalah sesuai dengan daftar acara. Dua makalah menyangkut pemikiran, teori dan pemahaman untuk mendekati masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dua makalah menyangkut usaha rekonstruksi sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia ditingkat nasional, yang bersandar kepada bahan sumber Indonesia, dan yang lain menggunakan bahan sumber Belanda. Tiga makalah akan menyoroti aspek khusus yang tumbuh dalam konteks lokal, tetapi berperspektif nasional seperti di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, dan di Jawa. Satu makalah akan membahas aspek internasional Pemerintah Darurat Republik Indonesia, suatu aspek penting bagi perjuangan Negara Bangsa, yang relevansinya juga dapat kita saksikan sampai hari ini. Semua itu dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kerangka pemikiran bagi usaha rekonstruksi sejarah PDRI, yang juga pernah dibahas dalam seminar sejarah, yang telah diselenggarakan oleh MSI Cabang Yogyakarta, Agustus 1988.

MSI tidak akan berhenti dengan seminar ini, karena memang bertekad untuk menerbitkan bahan seminar dan diskusi dalam penerbitannya. Suatu buku yang berupa rekonstruksi sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia juga menjadi agenda kegiatannya di masa datang. Berkaitan dengan ini dapat

kami beritahukan bahwa Arsip Nasional RI, pada kesempatan seminar hari ini mengedarkan publikasi tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Khasanah Kearsipan, walaupun belum lengkap isinya. Dibagikan gratis kepada para hadirin. Suatu pameran untuk umum mengenai PDRI juga diadakan di gedung Arsip Nasional, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Semua itu menambah dimensi seminar ini sebagai Semirar Plus.

4.

MAKNA P.D.R.I.

Oleh : *Emil Salim* *)

Jika kita sudah sampai pada akhir seminar ini perlu kita jawab mengapa Seminar Pemerintah Darurat Republik Indonesia diadakan sekarang ini dan apa latar belakangnya.

Pada tanggal 4 Januari 1989 berlangsung suatu pertemuan antara perutusan yang dipimpin oleh Mr. Tengku Moh. Hasan dengan Bapak Presiden. Dalam pertemuan itu disepakati untuk menyelenggarakan suatu seminar tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Sejak Januari 1989 sampai September 1989 waktu diisi dengan menentukan subyek pembahasan dan menyusun makalah untuk kemudian diambil langkah-langkah persiapan menyelenggarakan seminar ini.

Sebab kedua mengapa seminar diadakan adalah karena sudah terbentang waktu lewat 40 tahun, yakni suatu jarak waktu yang cukup memadai untuk menghimpun informasi yang lebih lengkap. Arsip Nasional telah menerbitkan dan membuka arsip yang ada, sehingga terbuka kesempatan untuk memperoleh data-data otentik. Waktu 40 tahun juga memberi kesempatan bagi para pelaku yang masih hidup memberikan keterangan lisan mengenai pengalaman dalam PDRI.

Seminar ini diadakan bukan sekedar mengungkapkan sejarah yang terjadi, tetapi juga mendapatkan masukan langsung dari para pelaku. Itulah yang oleh Bapak Abdurrachman, Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia disebutnya sebagai seminar-plus, seminar sejarah yang juga mengharap masukan dari para peserta yang sebagian besar dihimpun dari para pelaku sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Waktu 40 tahun juga memberikan cukup waktu untuk mengambil jarak, sehingga obyektivitas dapat dipelihara, dan emosi dapat diredam. Waktu 40 tahun memberi kesempatan untuk mengadakan suatu analisa tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang se-obyektif mungkin.

Pertanyaan berikut adalah untuk apa seminar ini dilakukan. Mengapa tiba-tiba ada keperluan mengungkapkan Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pertama, melalui seminar sejarah ini ingin dilakukan pendekatan ilmiah menjawab pertanyaan pokok : apakah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia merupakan fase yang berarti di dalam sejarah perjuangan bangsa; apakah Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu merupakan suatu fase sejarah yang mempunyai arti penting di dalam sejarah perjuangan bangsa?. Pertanyaan inilah mendorong kita mengadakan seminar ini.

*) (diolah dari sambutan Emil Salim pada penutupan seminar).

Kedua, seminar ini diselenggarakan untuk memperoleh hasil dari dialog dengan pelaku, serta menimba kearifan sejarah (historical wisdom) sebagai bahan untuk bisa belajar dari sejarah.

Kita belajar dari sejarah untuk menarik hikmah, untuk dijadikan sumber inspirasi, sumber pelajaran, bahkan memberikan sumber pendidikan bagi generasi muda kita.

Periode Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak dikenal oleh guru, oleh murid, oleh anak-anak muda. Karena itu mendesaklah keperluan menyelenggarakan seminar ini, apalagi jika kemudian telah terbukti bahwa peristiwa ini merupakan fase yang penting di dalam sejarah perjuangan bangsa.

Maka masalah pokok yang ingin digali, adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, bagaimanakah fase itu di dalam sejarah perjuangan bangsa ?. Apakah fase itu bagaikan kapal yang se-kedar lewat di malam hari ataukah punya makna yang dalam?.

Dari makalah, dari diskusi dan dari ungkapan terselip lima hal yang menonjol dalam memberi jawaban atas pertanyaan: bagaimanakah kedudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam sejarah perjuangan bangsa.

Maka menonjol *pertama* adalah legitimasi kehadiran PDRI bagi perjuangan kemerdekaan kita di luar negeri. Dengan gamblang terungkap, andai-kata Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak ada, maka sulit memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di luar negeri.

Sulit untuk meneruskan suatu perjuangan diplomasi yang harus berdampingan dengan perjuangan fisik. Tanpa Pemerintah Darurat Republik Indonesia sulit dibayangkan bagaimana dilakukan perjuangan diplomasi, sehingga sekaligus kehadiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia memberikan legitimasi atas keberlanjutan Republik Indonesia di forum internasional.

Hal *kedua* adalah kehadiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah. Pemimpinnya bisa tertangkap, Presiden-nya bisa ditawan, tapi Pemerintah Republik Indonesia tetap tegak, tegar berdiri. Ini bukan hanya ungkapan biasa. Bisa dibuktikan oleh adanya dukungan masyarakat yang berjuang dan adanya tentara Republik Indonesia dibelakang Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Maka benar bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia berjuang bukan untuk lokal Sumatra Barat, bukan berjuang untuk lokal Aceh, tapi berjuang untuk kepentingan seluruh bangsa kita.

Hal *ketiga*, mengapa Pemerintah Darurat Republik Indonesia penting dalam sejarah ?. Karena PDRI merupakan wahana, memberikan kesempatan pada rakyat dan bangsa Indonesia untuk berjuang terus. Pemerintah Darurat Republik Indonesia menjadi faktor pemersatu seluruh rakyat Indonesia menyalurkan hasratnya untuk merdeka. Kalau tidak ada Pemerintah Darurat

Republik Indonesia, Indonesia bisa terpecah, bercerai-berai dan masyarakat kita tidak punya alat mengungkapkan hasrat kemerdekaannya.

Maka PDRI menjadi wahana, menjadi faktor integratif untuk mengungkapkan hasrat rakyat untuk merdeka. Dan hasrat merdeka itu tercermin dalam perbuatan heroik. Batusangkar dapat direbut, walaupun untuk beberapa jam oleh seorang Datuk dengan 500 orang rakyatnya. Dengan semangat heroik perjuangan dilakukan dengan senjata yang lengkap dan senjata modern. Semangat heroik telah berkembang, dan itu perlu dikenal oleh generasi muda kita. Bahwa perjuangan Republik Indonesia bukan hadiah dari Amerika Serikat seperti ada dituduhkan orang.

Kehadiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia juga mencerminkan, apa yang disebut oleh Bapak Tjokropranolo, semangat pantang menyerah. Pemimpin bisa jatuh, pemimpin bisa ditawan, pemimpin bisa dikurung, tapi semangat merdeka, semangat pantang menyerah tetap menyala di dada rakyat kita dari Sabang sampai Merauke.

Ciri lain yang juga menonjol dalam semangat perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini adalah semangat tanpa pamrih. Ada yang membawa kekayaan, membawa candu yang berharga ratusan juta rupiah. Ada yang menyelundup menghasilkan devisa. Banyak hal yang terjadi, yang bisa menjadikan orang itu kaya raya. Tetapi kepentingan pribadi tidak penting dalam perjuangan ini. Candu, smokkel, senjata, perdagangan, seluruhnya dikerahkan untuk tegaknya Republik Indonesia ini. Orang tidak tanya berapa kau sumbang. Orang tanya berapa kau perlukan untuk berjuang. Maka rakyat Aceh menyumbang lebih dari 500.000 dollar, tatkala ekonomi kita belum mengenal peraturan devisa perdagangan dengan luar negeri. Dan orang berjuang, orang menyumbang, karena apa ?. Karena dibalik perjuangan ini adalah suatu pemerintah yang sah: suatu Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Hal keempat adalah peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia menegakkan semangat persatuan dalam perjuangan bangsa kita. Dalam fase perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak dikenal kelompok Islam dan non Islam. Bapak Kasimo adalah seorang Katolik dan diterima menjadi komisaris Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Jawa. Orang tidak tanya kau dari mana, Masyumi-kah, PSI-kah, partai politik apakah, yang ditanya adalah apakah kau mau berjuang untuk Republik Indonesia. Perbedaan partai politik dalam masa itu sirna, hilang tak ada. Juga tidak ditanyakan, mengapa di sana ABRI menjadi gubernur, mengapa di sini sipil. Pada saat itu tidaklah relevan apakah kau ABRI atau sipil. Pada saat itu ABRI dan sipil lebur menjadi satu menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu persatuan, kehadiran diri sebagai pejuang kemerdekaan bangsa menyala kuat.

Kemudian muncullah Pernyataan Roem—Royen, ada pemerintah yang ditawan, ada tracee Bangka. Anda! kata ketika itu para pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak punya kearifan dan hikmah kebijaksanaan, apa yang dapat terjadi ? Perpecahan bangsa. Pecah Sumatra dengan Jawa, pecah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan Sukarno-Hatta. Pecah sana pecah sini dan Republik Indonesia bisa berantakan.

Kalau para pemimpin Pemerintah Darurat Republik tidak punya wisdom dan pada waktu yang tepat tidak kembali kepangkuan mengakui Sukarno-Hatta, maka sejarah Indonesia bisa berlainan. Maka yang tersimpul pada saat itu bukan mempersoalkan legalitas, siapa pemimpin pemerintah yang sah, Sukarno-Hatta yang sedang ditawan atau pemimpin PDRI. Bukan itu yang tampil kedepan untuk dipersoalkan. Yang tampil kedepan ketika itu adalah apa yang baik untuk Republik Indonesia, apa yang paling tepat untuk Republik Indonesia, apa yang seharusnya untuk ketegaran berdirinya Republik Indonesia. Itu yang menjadi patokan. Karena itu Sjafruddin kembali ke Yogyakarta, Sudirman kembali ke Yogyakarta, dan menyatu dengan Sukarno-Hatta demi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia.

Kelima berkat perkembangan semua ini secara jelas tampil kemuka adalah bahwa lahir Republik Indonesia sebagai bangsa, sebagian nation. A nation has born, suatu bangsa tumbuh bangkit. Dan dia tumbuh bangkit sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia. Hasil darah, keringat dan air mata rakyat kita.

Dalam kaitan itu kalau masih ada keragu-raguan di antara kita dan punya kesan bahwa dalam perjuangan Roem—Royen dan dalam perjuangan diplomasi-diplomasi, peranan Amerika Serikat penting memberi tekanan-tekanan sana-sini, lalu lahir pendapat seolah-olah kemerdekaan Indonesia merupakan belas-kasih Amerika Serikat, walaupun ada pendapat demikian, maka saya minta perhatian terhadap kenyataan bahwa ratusan ribu rakyat telah berjuang mengucurkan darah, keringat dan air matanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga menjadi saksi bahwa Republik ini tidak merupakan hadiah bangsa asing manapun.

Amerika bisa berkuasa di sana-sini, tetapi kalau rakyat tidak mendukung perbuatan-perbuatan pemimpin kita, maka kemerdekaan tidak akan tegak di masyarakat bangsa kita. Maka jangan ada kesangsian di hati siapapun bahwa Republik Indonesia ditegakkan dengan darah, keringat dan air mata rakyat Indonesia.

Maka jelaslah bagaimana peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam sejarah perjuangan bangsa. Penting peranannya dalam perjuangan luar negeri; penting peranannya untuk melanjutkan kehadiran Pemerintah yang sah dan menjadi wahana perjuangan masyarakat bangsa kita; penting peranannya dalam menimbulkan semangat persatuan bangsa dan kemudian ikut menjadi pendorong terciptanya suatu nation, sehingga a nation has born, suatu bangsa lahir.

Demikianlah posisi Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam sejarah kemerdekaan ini, dalam sejarah perjuangan bangsa. Hikmah apakah yang bisa kita tarik dari sejarah ini ?

Pertama bahwa mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa adalah syarat penting tidak saja bagi kemarin dan hari ini, tetapi juga bagi masa depan. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berkelahi di dalam memperjuangkan ide, tapi kesatuan dan persatuan bangsa jangan sampai dirobek-robek. Ini adalah hikmah pertama dari sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berlaku bagi bangsa sekarang dan masa depan.

Hikmah *kedua* adalah perlu dinyalakan dan dipelihara api yang telah membakar, api yang telah menyala di dalam dada setiap pejuang Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut. Api yang tidak kenal menyerah, api semangat tanpa pamrih perlu kita kembangkan sekarang dan untuk masa depan.

Hikmah *ketiga* adalah hubungan rakyat, pemerintah dan ABRI. Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah gabungan ketiga-tiga kekuatan besar ini, yaitu rakyat, Pemerintah dan ABRI. Selama tiga kekuatan ini tidak sampai bisa diputus dan dipecahkan maka Republik Indonesia tegar berdiri. Kalau orang mau menghancurkan Republik, patahkanlah hubungan rakyat-Pemerintah-ABRI. Maka demi tetap tegarnya, berdirinya Republik, peliharalah hubungan rakyat-Pemerintah-ABRI.

Dalam hubungan ini ditengah-tengah masyarakat terdapat perbedaan politik, terdapat perbedaan pendapat, terdapat aliran lain. Tapi satu hal perlu ditarik dari sejarah PDRI pada saat itu loyalitas kepada keiompok berhenti pada saat loyalitas pada bangsa bermula.

Demikianlah tiga hikmah pokok yang bisa kita tarik dari sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini. Jika demikian halnya apa tindak lanjut kita, apa tindak lanjut kita besok, lusa, tahun depan setelah seminar ini berakhir.

Kita perlu menghimpun semua data-data otentik. Karena itu saya berbesar hati bahwa Bapak Maladi telah menyanggupi untuk secara resmi menyerahkan data-data, dokumen otentik yang beliau simpan selama ini kepada Arsip Nasional melalui Menteri Negara Sekretaris Negara. Kita perlukan data itu, kita perlukan data otentik untuk dapat membuktikan bahwa sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia bukan sekedar ngomong biasa, tapi didukung oleh data yang ditandatangani Letjen Sudirman. Ada dokumen tertulis dari ajudan Sudirman, ada instruksi tertulis dan lain sebagainya. Dokumen sejarah yang menjadi bukti kehadiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini.

Langkah berikut adalah untuk menerbitkan buku, tidak hanya menerbitkan makalah yang disampaikan, tetapi juga bahan-bahan yang disampaikan secara lisan dalam seminar dan masih harus diolah oleh Masyarakat Sejarah.

wan Indonesia. Kita minta Masyarakat Sejarawan Indonesia menggunakan ilmu mereka untuk dapat disaring mana yang "Warheit" mana "Dichtung", mana cerita sesungguhnya, mana emosi yang meluap-luap. Yang kita minta adalah penerbitan satu buku obyektif, buku sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rentetan atau lintasan sejarah perjuangan bangsa.

Kemudian kita perlu menghimpun masukan bagi pemerintah, sebagai masukan bagi guru-guru yang mengajar sejarah agar punya informasi sejarah yang benar. Perlu masukan bagi generasi muda yang mungkin tidak mengerti apa itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dan ini juga berlaku bagi generasi akan datang agar memahami apa yang pernah dibuat oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Sederhana apa yang kita harap menjadi tindak lanjut seminar ini. Yang penting adalah agar seminar ini dapat menangkap api semangat yang menyala dibalik semangat perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini. Untuk itu kepada para pelaku saya sampaikan hormat dan terima kasih saya. Untuk itu kepada yang muda saya harap, mari kita pelajari lebih mendalam kurun waktu sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini. Untuk itu kepada Masyarakat Sejarawan Indonesia saya minta mari semua ungkapan, ucapan yang tumbuh lahir di sini kita jadikan masukan bagi buku sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia agar dapat bermanfaat bagi keberlanjutan negara kita sepanjang masa.

REKONTRUKSI DAN PERSEPSI

1. MAKNA PDRI DALAM REVOLUSI INDONESIA

Oleh
Sartono Kartodirdjo *)

I. Pengantar

Pertanyaan : Mengapa PDRI didirikan? dan Apakah makna PDRI bagi bangsa Indonesia dan perjuangannya? Jawaban teologis tidak terlalu sukar diberikan, yaitu, Itu adalah Kehendak Tuhan. Namun bagi penganut serta pengkaji sejarah rupanya jawaban tidak cukup berhenti di situ. Eksplanasi dan interpretasi sejarah menuntut supaya berdasarkan data empiris serta pemikiran diskursif dapat diungkapkan kausalitas historisnya yang mencakup motivasi, intensi, alasan nalar, serta tujuannya. Dengan demikian dapat dibuat suatu rekonstruksi "logika situasional"nya atau "logika diplomasi serta perjuangan" perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam mengeksplorasi pelbagai permasalahan sekitar PDRI dipakai di sini optik historis yang bertolak dari perspektif revolusi Indonesia sebagai perjuangan total yang mencakup seluruh kekuatan sosial beserta seluruh sumber daya alamiah dan manusiawinya dengan tujuan tunggal ialah mem-bela kemerdekaan seperti yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam perjuangan total itu setiap usaha, besar atau kecil, lewat diplomasi atau bergerilya, sipil dan militer, pusat dan daerah, elite dan rakyat, kesemuanya memberikan sumbangan kepada revolusi.

Apakah Republik Indonesia akan bertahan, seandainya PDRI tidak dibentuk? Secara historis pertanyaan ini tidak relevan dan tidak perlu dijawab oleh karena gejala itu adalah fakta keras dan peristiwa sekali terjadi tidak dapat diiadakan. Secara spekulatif suatu jawaban mungkin dapat diberikan sekedar untuk menegaskan pentingnya fungsi fenomenon itu.

Bertolak dari logika situasional dalam konteks historis, sejarah perjuangan revolusioner Indonesia perlu memperhitungkan faktor-faktor kondisional, ialah :

- (1) politik kolonial dan strategi militer Belanda;
- (2) perkembangan gerakan nasionalis Minangkabau; dan
- (3) proses dialektik antara diplomasi dan perjuangan bersenjata.

Perlu ditambahkan di sini bahwa Revolusi Indonesia pada hakekatnya adalah gerakan dari atas yang diprakarsai dan dipimpin oleh elite politik. Menyusul segera gerakan massa di kalangan rakyat yang sangat spontan dan penuh entusiasme. Kekuatan sentrifugal itulah merupakan kejutan bagi pihak Belanda yang buta informasi mengenai perkembangan politik pada jaman Jepang, sewaktu propaganda, agitasi serta indoktrinasi anti-sekutu mampu membangkitkan kesadaran anti-imperialis dan nasional.

*) Guru Besar Ilmu Sejarah, Fak Sastra, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa sehabis Perang Dunia Kedua berakhir Belanda hendak menanam kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia dengan tidak mengindahkan Pidato Ratu Wilhemina tahun 1940 dan "Declaration of Human Rights" tahun 1945. Pembentukan NICA mengekspresikan hasrat dan ambisi politiknya. Strategi VOC dianut secara setia, yaitu dengan pengepungan pada umumnya serta isolasi dari dunia luar dengan menutup hubungan lewat laut. "Aksi polisionil" pertama menampilkan dengan jelas pola strategi itu, sehingga aksi kedua pun dapat diduga sebelumnya akan pasti terjadi. Perundingan Hoge Veluwe, Linggajati dan Renville adalah taktik belaka untuk melakukan persiapan *clash* kedua. Bahwasanya pada para pemimpin RI ada *foresight* mengenai penyerbuan Belanda ke Yogyakarta dapat dipastikan. Sehubungan dengan itu munculnya gagasan pembentukan PDRI dapat diduga secara logis terjadi.

Strategi menduduki ibukota RI dan menawan para pemimpin negara adalah satu hal, hal lain ialah menaklukkan seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama tidak dengan sendiri mengakibatkan yang kedua. Dilupakan oleh Belanda bahwa kekuasaannya sebelum Perang Dunia Kedua pada umumnya hanya dapat dilaksanakan dengan perantaraan pamong praja pribumi. Selanjutnya dilancarkan perang gerilya daerah pedesaan beserta rakyatnya sukar dikuasanya. Lagi pula pemberian mandat oleh Pemerintah Pusat RI kepada tokoh-tokoh di Sumatra Barat dan kepada beberapa pemuka Indonesia di India, pendudukan Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin sama sekali tak berarti penaklukan RI.

Dipandang dengan wawasan strategi perjuangan itu pendirian PDRI mempunyai fungsi sangat penting. Baik secara riil maupun secara simbolik, peran kunci perjuangan total ada pada PDRI di samping Perwakilan RI di luar negeri dan perjuangan gerilya. Ketiganya merupakan manifestasi eksistensi RI di mata dunia internasional. Siasat *Blitzkrieg* Belanda gagal dan waktu ada di pihak RI, tidak lain karena opini dunia internasional semakin banyak mendukung Indonesia. Ketiga pihak tersebut di atas perlu bertahan dalam eksistensinya sampai forum Internasional mengakui legitimasi eksistensi RI.

- II. Politik dan Strategi Belanda pada hekekatnya penuh dengan kontradiksi dan paradoks. Datangnya kembali ke Indonesia didasarkan atas *historis recht* (hak sejarah) maka mengingkari hak *self-determination* bangsa-bangsa. Belanda tidak tahu atau tidak mau tahu tentang perkembangan politik di Indonesia selama Perang Dunia II. Situasi seperti yang dibayangkan sama dengan keadaan sebelum perang tidak ada lagi, rakyat telah mempunyai kesadaran akan identitas serta harga dirinya. Lagi pula suasana kemerdekaan telah dialami sejak Proklamasi sehingga semangat meluap-luap untuk mempertahankannya.

Ekses-ekses kebebasan di mata Belanda merupakan anarkhi, petualangan dan perbanditan, suatu penggambaran situasi yang dipakai untuk melegitimasi tindakan-tindakan militernya yang disebut sebagai "aksi polisionil".

nil". Semboyan lama "*Rust en Orde*" muncul lagi, satu-satunya dalih untuk menegakkan kembali kolonialismenya. Rupanya okupasi negeri Belanda selama Perang Dunia II belum cukup untuk mengubah mentalitas politik dan pandangan dunianya.

Secara tidak tanggung-tanggung Belanda membuat taruhan besar di dalam percaturan politik dunia, dan dengan sikapnya "*bersitegang*" (*diehard*) bertekad menghancurkan Republik Indonesia. Dengan demikian dia terjebak dalam jebakan politik revivalisme kolonial, suatu politik menentang arus jaman.

Beberapa kesalahan perhitungan dapat diungkapkan secara ringkas sebagai berikut :

- (1) Perang gerilya mengubah seluruh wilayah Indonesia sebagai medan perang, sehingga pendudukan ibukota RI bahkan kota-kota lain tidak berarti Republik telah ditaklukkan. Kalau di negeri Belanda yang seluas seperempat Jawa "*barisan di bawah tanah*" mampu membuat perlawanan terhadap tentara Nazi teroris itu, rakyat Indonesia semestinya lebih leluasa menjalankan perlawanannya;
- (2) Dalam masa Revolusi proses strukturasi lembaga-lembaga pemerintahan masih cukup luwes (*flexible*) sehingga lembaga-lembaga itu dapat *mancala putra mancala putri* (berubah-ubah bentuk atau wujud). Prinsip ini memberikan dinamisitas dan mobilitas pengembalian kekuasaan, maka pendudukan Yogyakarta dan penangkapan pucuk pimpinan pemerintahan tidak berarti lenyapnya RI. Munculnya PDRI adalah strategi yang tepat di samping adanya wakil-wakil pemerintah di daerah gerilya dan di luar negeri. Pemerintah Belanda dalam pengungsian juga tidak mengakibatkan menyerahnya kepada tentara Nazi-Jerman,
- (3) Kira-kira seabad sebelumnya ada dua medan perang yang dihadapi Belanda: (1) Perang Diponegoro di Jawa Tengah, dan (2) Perang Padri di Sumatera Barat. Kedua medan terpisah sama sekali satu sama lain dan tidak diketahui seberapa jauh pihak masing-masing mengetahui usaha pihak lain. Isolasi semacam ini sangat menguntungkan Belanda. Pada masa perang kemerdekaan isolasi itu tidak lagi dapat dijalankan oleh karena komunikasi sudah maju dan pelbagai pihak dapat saling berhubungan secara terus-menerus, walaupun cukup banyak hambatan dan gangguan terjadi. Proses sentrifugal dan proliferasi kekuasaan terjadi tanpa merusak suverainitas negara.
- (4) Perang kolonial modern dengan alat-senjata modern, meskipun "*lungsuran*" (habis-pakai) dari tentara US sukar menundukkan rakyat dan tentara gerilyanya. Perang Vietnam juga telah membuktikannya. Terorisme yang dilakukan tentara dan nefisnya tidak berhasil mengintimidasi rakyat, bahkan menambah kebenciannya serta semangat

perjuangannya. Perbedaan yang menyolok ialah bahwa pada jaman perang Kumpeni rakyat belum berperan serta secara aktif dalam perjuangan melawannya.

- (5) Dalam Perang Kolonial gaya lama yang dihadapi Belanda terutama barisan rakyat dari daerah tertentu berdasarkan ikatan solidaritas etnik atau komunal tertentu. Hal ini tidak dapat diberlakukan bagi perang Kemerdekaan. Coraknya sudah nasional dengan mencakup satuan-satuan yang mengintegrasikan pelbagai unsur, jadi mencerminkan perubahan struktural yang fundamental. Kalau dahulu taktik "*divide et impera*" mudah diterapkan, pada perang kemerdekaan hal itu sulit dilakukan, meskipun masih ada satuan-satuan etnik Indonesia yang tercakup dalam tentara kolonial.

Dipandang dengan perspektif itu kita tidak lagi berbicara tentang perang Aceh, perang Jawa, perang Minangkabau seperti nama-nama menurut pihak Belanda menyebutkannya, melainkan yang terjadi adalah Perang Kemerdekaan yang bersifat nasional. Perlawanan di bawah pimpinan PDRI merupakan "perang nasional". Masa krisis sungguh-sungguh meningkatkan solidaritas nasional, maka perjuangan PDRI merupakan manifestasi solidaritas itu.

III. Peranan PDRI dalam Revolusi Indonesia

Seandainya PDRI tidak dibentuk, bagaimanakah kesudahan Revolusi Indonesia? Apakah eksistensi RI dapat dipertahankan? Pertanyaan berdasarkan "*if-theory*" itu yang berasal dari *the New Economic History* dari Fogel sesungguhnya berfungsi untuk menonjolkan peran gejala historis yang diandaikan tidak terjadi itu sebagai faktor yang amat menentukan. Jadi di sini pertanyaan itu tidak relevan untuk dijawab ya atau tidak. Berpangkal pada kerangka pemikiran historis suatu peristiwa bersifat *einmalig* yang kehadirannya dalam perkembangan historis adalah mutlak dan yang sesungguhnya hanya dapat diterangkan dengan kausalitas historis, sebagai deretan sebab-akibat yang menimbulkan peristiwa itu. Menurut historisisme itu PDRI memang hanya dapat diterangkan dengan mengungkapkan urutan kejadian-kejadian yang akhirnya menghasilkan pembentukan PDRI itu.

Dalam rangka presentasi yang bersifat reflektif ini tidak akan disajikan ungkapan deskriptif mengenai proses pembentukan PDRI serta tindakan-tindakannya selama eksistensinya. Lebih diutamakan di sini secara umum peranan yang dilakukan sebagai fungsi-fungsi esensial dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara.

Dapat dibayangkan bagaimana kekacauan yang dihadapi tubuh pemerintahan RI setelah Yogya diduduki Belanda dan para pemimpin ditawannya. Lagi pula Bukittinggi dan daerah seanteronya dikuasai Belanda juga. Dalam situasi krisis semacam itu terasa sangat dibutuhkan pusat komando,

koordinasi dan komunikasi dari mana unsur-unsur pemerintahan yang cerai-berai dapat dihubungi untuk diarahkan dan diberi informasi sehingga struktur dan organisasi pemerintahan secara minimal dapat dipertahankan agar sistem politik tetap berjalan. Dengan aksi militernya kedua tujuan Belanda tidak hanya melumpuhkan tetapi membinasakan sistem itu, namun selama kira-kira 6 bulan (19 Desember 1948 - Juli 1949) sistem itu tetap berjalan dengan PDRI sebagai pusatnya. Yang jelas ialah bahwa tidak pernah terjadi *vacuum of power*. Baik PDRI maupun pimpinan sipil dan militer di Sumatera dan Jawa berfungsi selaku pengembal/mandataris kekuasaan pemerintah RI, bahkan ada sebagian yang didelegasikan kepada perwakilan RI di New Delhi.

Sejauh situasi dan media komunikasi memungkinkan PDRI melakukan koordinasi antara penguasa sipil—militer di daerah-daerah, mengeluarkan instruksi, maka jalur komunikasi dipertahankan mati-matian. Lebih-lebih untuk melakukan contra-propaganda terhadap sistem penerangan Belanda, amat diperlukan sistem komunikasi dengan dunia luar.

Kontak dengan perwakilan di New Delhi membuka jalur komunikasi untuk menyalurkan informasi-informasi penting dengan tujuan membuktikan eksistensi PDRI sebagai pusat pemerintahan RI. Bagaimanapun keras usaha Belanda untuk menumpas sistem siaran itu, namun pejuang PTT dan Radio dengan bantuan rakyat dan tentara dapat mempertahankan diri sampai akhir masa PDRI.

PDRI yang bersifat mobil itu berfungsi sebagai pusat yang memperoleh pengakuan semua perwakilan dan pelaku pemerintahan Sumatera dan Jawa sehingga dapat dicegah kesimpangsiuran dalam pemerintahan, lebih-lebih konflik internal atau perebutan kekuasaan. Rupanya kepatuhan kepada instruksi PDRI tidak pernah menjadi masalah; setelah semua pihak mengetahui bahwa Sjafruddin Prawiranegara dengan PDRI—nya mendapat mandat dari Presiden dan Wakil Presiden.

Peran PDRI juga tidak terlepas dari proses dialektik antara diplomasi dan perjuangan bersenjata. Pembentukan PDRI, Konperensi New Delhi, Sidang Dewan Keamanan PBB Januari 1949, Serangan Umum 1 Maret, Sidang DK PBB Maret 1949, perundingan Roem-Royen, kesemuanya merupakan suatu deretan thesis-antithesis serta proses umpan-balik yang berakhir pada genjatan senjata dan peristiwa Yogya dan Bukittinggi kembali.

Peranan PDRI adalah peranan kunci dalam mengatur aliran informasi sehingga mata-rantai komunikasi tak terputus-putus. Di belakang mata rantai tersebut sebenarnya tidak dapat diabaikan peranan rakyat pedesaan yang secara spontan dan sukarela membantu perjuangan revolusi, antara lain memberi tempat berteduh, bahan makanan, menyumbangkan tenaga pengangkut, kesemuanya menopang perjuangan, dari nasi bungkus (*nuk*), pengangkutan alat-alat penyiaran, membuat jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Di sini kita benar-benar menghadapi semangat juang dan pengabdian *tanpa pamrih*. Response rakyat pedesaan Minangkabau ter-

hadap perjuangan tidak berbeda dengan rakyat di Jawa. Tanpa dukungan rakyat perang gerilya pasti mengalami banyak hambatan. Di sini perlu kita memberi *saluut* kepada para pahlawan yang tak dikenal.

Pada tingkat pimpinan rupanya proses integrasi politik kaum elite telah memungkinkan proses pelembagaan pemerintah nasional. PDRI menjadi manifestasi hal itu. Sejak kebangkitan nasional kaum inteligensia Minangkabau ada di ujung tombak pergerakan nasionalis. Baik kebudayaan rantau-nya maupun nasionalisme agamanya meningkatkan kecenderungan struktural bagi Sumatra Barat menjadi arena politik di satu pihak dan di pihak lain menciptakan peran serta sentral dalam perjuangan nasionalis dan revolusi. Tanpa jaringan politik itu agak sulit diterangkan pembentukan PDRI.

Akhirnya, wawasan *Symbolic interactionism* dapat menegaskan fungsi simbolis PDRI dalam revolusi Indonesia. Negasi Belanda terhadap keberadaan RI didengung-dengungkan dalam forum internasional untuk melegitimasi hak historisnya. Aksi militer kedua bertujuan menghancurkan RI sama sekali. Justru eksistensi PDRI mengkontra gambaran Belanda itu. Sebagai simbol eksistensi RI maka PDRI perlu dipertahankan secara matematis serta siaran radio ke dunia luar tentang hal itu adalah sangat vital.

IV. Penutup

Mengenai PDRI banyak pertanyaan dapat diajukan, tetapi di sini hanya beberapa dapat dijawab. Beberapa butir pokok permasalahan PDRI ialah :

- (1) Masalah PDRI adalah masalah *to be or not to be*. Persamaannya ialah eksistensi RI sama dengan eksistensi PDRI, sudah barang tentu fakta ini berlaku untuk periode enam bulan sejak Aksi Militer Kedua.
- (2) PDRI sebagai gejala sejarah merupakan fakta yang bernilai tidak lain karena PDRI adalah wahana untuk mempertahankan kemerdekaan. Tak dapat diingkari bahwa nilai perjuangan PDRI adalah mempertahankan nilai kebebasan sebagai nilai *ultimate* (tertinggi) bagi umat manusia.
- (3) Lokasi bisa saja di Sumatra dan di Jawa, akan tetapi sifat perjuangan PDRI adalah nasionalistis, yaitu berkualitas, format dan skala nasional.
- (4) Revolusi Indonesia sebagai gerakan total mencakup segala kekuatan sosial dan sumber daya politik nasional dan merupakan proses dialektis antara diplomasi dan perjuangan (senjata). Di satu pihak ada fakta senjata (*wapenfeiten*), seperti 10 November dan 1 Maret, di pihak lain Perundingan Linggajati, Renville, dan Roem-Royen, Konperensi New Delhi, PDRI, kesemuanya faktor-faktor penentu keberhasilan perjuangan nasional.
- (5) Sejarah Nasional pada umumnya dan Sejarah Revolusi khususnya, adalah penuh heroisme. Sifat heroik adalah potensi latent pada setiap

lam teks-teks sejarah perang kemerdekaan. Meskipun karya Nasution *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (jilid 10) membicarakan hubungan PDRI dengan pimpinan militer khususnya sikap mereka terhadap Roem-Royen tetapi tidak menjadikan PDRI lebih dikenal. Dalam penulisan sejarah perang kemerdekaan "nasib" PDRI tak jauh berbeda dengan pergumulan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia bagian Timur, yang berada di bawah dimnasi militer Belanda -- keduanya hampir-hampir terabaikan. Keduanya dan episode lain, telah jadi "korban" suatu struktur dominasi kesadaran. Jika "Indonesia Timur" terlupakan karena berada di luar *mainstream* sejarah yang berpusat di Yogyakarta, maka PDRI memperlihatkan betapa penulisan sejarah dikuasai semangat romantisasi revolusi yang didukung oleh kekuasaan dan ideologi.

Proklamasi adalah suatu tindakan heroik, yang bertolak dari keyakinan akan kepastian jalan yang akan ditempuh. Maka sejarah yang mengikutinya adalah suatu epos, yang tidak menghamparkan kegelisahan para "pencari", tetapi untaian tindakan para "pahlawan". Sebagai epos, revolusi dan perang kemerdekaan, menghasilkan simbol-simbol yang integratif dan sekaligus dianggap sebagai manifestasi dari romantisme revolusi. Maka di atas segala pergumulan para aktor -- yang masing-masing dibimbing oleh rasa-kepastian yang metafisis -- kemenangan akhir pasti datang, meskipun hari ini dan esok tak pasti -- dwitunggal Sukarno--Hatta makin memantapkan diri sebagai simbol. Mereka ditangkap, PDRI tampil menggantikan. Bahkan sebelum ditangkap pun mereka telah memberi mandat penuh, Namun ketika mereka diajak berunding oleh Belanda, mereka menerima, meskipun secara formal tak lagi berkuasa. Sikap legalistik-formal serta legitimasi yang bertolak dari peranan sebagai pemerintahan yang syah di saat Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri ditangkap dan ditawan menjadi lebur, karena integrasi bangsa telah dipersonifikasikan oleh Dwitunggal. Bahkan konsesi diberikan kepada Belanda, akibat perundingan dilakukan oleh "para tawanan", sebagaimana dikatakan oleh para menteri PDRI dan Jenderal Sudirman, tidak lagi fungsional. Maka, Yogya pun "kembali" dan mandat PDRI kembali diserahkan. Dalam sejarah, PDRI diperlakukan sebagai *interlude* belaka, bukan suatu episode sejarah yang utuh pada dirinya. Pengakuan akan keabsyahannya dijadikan sebagai pengganggu keutuhan simbol, yang romantik. Tak lama setelah PDRI menyerahkan mandatnya proses penafiannya dalam ingatan kolektif bermula pula. Apalagi simbol telah makin mengokohkan diri sebagai kekuasaan yang riil. Tak sekalipun Bung Karno, presiden dan simbol persatuan, menyebut kehadiran, jangankan peranan yang dimainkan oleh Pemerintah Darurat ini, ketika ia, yang menjanjikan untuk memimpin gerilya, ditawan Belanda. PDRI telah tenggelam di bawah suatu struktur dominasi.

Jika nanti *discontinuity* dari keutuhan simbol romantik dalam perjalanan sejarah diungkapkan, maka PDRI pun tetap merupakan "suara yang terbenam". Struktur dominasi lain telah muncul. *Continuity* dalam sejarah, sejak Orde Baru tak lagi bisa dilihat dari kepemimpinan Sukarno, tetapi dari peranan ABRI,

bangsa, bila ada tantangan dahsyat dihadapinya, seperti agresi Belanda aktualisasi heroisme terjadi di mana-mana. Sejarah PDRI sebagai bagian pokok Sejarah Revolusi penuh dengan heroisme pula.

2. PDRI DALAM SEJARAH PERANG KEMERDEKAAN

Oleh : *Taufik Abdullah* *)

Barangkali benar juga anggapan yang mengatakan bahwa sejarah adalah ingatan kolektif. Bukankah sejarah selalu menyangkut kehidupan suatu masyarakat dalam rentangan waktu? Tidakkah pula sejarah itu bersifat selektif? Artinya tak semua hal yang diingat dan tak semua peristiwa yang dijadikan sebagai bagian dari "sejarah". Hanya yang berkesan yang diingat dan hanya yang penting yang diperlakukan sebagai sejarah.

Jika demikian halnya memang tak pula terlalu mengherankan kalau proses seleksi tentang hal yang pantas diingat dan harus dianggap penting itu dapat menimbulkan perdebatan. Yang penting dan benar bagi suatu golongan masyarakat, belum tentu merupakan sesuatu menyenangkan bagi golongan lain. Tak salah sebenarnya anggapan lama bahwa keutuhan sosial tak lain daripada kemampuan untuk mengingat banyak hal dan melupakan banyak hal lain. Akan tetapi proses seleksi tetap suatu problematik. Dalam proses inilah akhirnya bisa juga terjadi dominasi terhadap ingatan selektif yang disebut sejarah itu.

Artinya seleksi sejarah telah makin ditentukan oleh kekuatan dan kesadaran yang dominan dalam masyarakat. Pada tahap yang agak ekstrim tanpa disadari barangkali, sejarah menjalankan "politik pembisuan" terhadap hal-hal yang dianggap "tak penting dan tak relevant" dan yang diperkirakan "mengganggu". Pada tahap ini pula "sejarah" menaikkan status peristiwa yang ingin diingat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, makin terkaburlah "sejarah" sebagai usaha rekonstruksi peristiwa di hari lalu, dengan keharusan nilai yang berlaku di hari kini. Sejarah pun mengalami peralihan dari suatu problematik tentang pemahaman dinamika sosial dalam dimensi waktu menjadi plot dari skenario tentang terwujudnya situasi kini yang sedang dinikmati. Maka kita pun kadang-kadang dikejutkan oleh suara-suara yang mengingatkan betapa proses mitologisasi telah mengancam eksistensi sejarah itu sendiri.

Proses dialektik antara "sejarah" dan "mitos" tak terlalu aneh. Bisa saja mitos selalu berperan sebagai salah satu landasan etos sosial dalam peralihan pola perilaku. Tetapi "sejarah" yang telah "memerdekakan" diri dari dominasi kekuatan hari kini mempunyai kemungkinan untuk mengungkapkan kearifan yang terlupakan dan kekayaan pengalaman yang bermanfaat.

Seandainya kecenderungan yang agak umum ini dikenakan kepada ingatan kolektif bangsa terhadap pengalaman historis yang teramat penting yaitu "revolusi nasional" atau "perang kemerdekaan" suasana apakah yang paling dominan di dalamnya? Jawab yang bersifat teleologis telah tersedia. Seteiah 17 Agustus 1945, dengan melalui "darah, doa, dan air mata", serta di-

*) Ahli Peneliti Utama pada Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI.

warnai oleh dinamika "perjuangan dan diplomasi" akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia berdiri utuh. Kenyataan historis yang terakhir ini adalah suatu terminal yang dituju oleh peristiwa Proklamasi, maka jadilah pula ia ukuran dalam proses seleksi sejarah. Kenyataan bahwa akhirnya negara kesatuan berdiri kokoh akhirnya menjadi patokan skenario dari penulisan sejarah. Negara Kesatuan adalah kenyataan historis yang menjadi landasan bagi penyusunan unsur-unsur yang semestinya diingat secara kolektif. Bahkan lebih daripada itu, hal inipun menjadi paradigma yang harus selalu dipertahankan validitasnya.

Maka, semacam struktur dominasi telah tercipta. Sejarah resmi perang kemerdekaan dimulai pada saat Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan dan mulai berakhir ketika Hatta (di Den Haag) dan Sri Sultan (di Jakarta) menerima (kembali) kedaulatan negara. Dan dianggap selesai ketika Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS. Akhirnya cita-cita tercapai setelah RIS bubar dan Negara Kesatuan (Agustus 1950) dimaklumkan kembali. Apa yang terjadi? Sebuah pola dominasi sejarah telah terbentuk, yang berkisar pada axis Jakarta-Yogyakarta. Kemenangan telah didapatkan. Dan kisah sejarah pun disesuaikan dengan pola dan struktur dominan jni. Peristiwa yang terjadi dalam periode empat setengah tahun (1945 - 1950) barulah mendapat tempat berdasarkan ukuran dari Proklamasi sampai terwujudnya negara kesatuan Proklamasi.

Jika buku-buku sejarah "revolusi" atau "perang kemerdekaan" diperhatikan, maka kita akan menemukan juga tema yang utama. Pertama, kisah perang dan kepahlawanan — perampasan senjata Jepang, pertempuran 5 hari di Semarang dan Palembang, 10 Nopember, Medan Area, "6 jam Yogya" dan sebagainya. Kedua, pergolakan politik intern — peralihan dari kabinet presidential menjadi parlementer, perdebatan "diplomasi dan perjuangan", dan akhirnya pada situasi yang paling ekstrim "penghianatan Madiun". Ketiga, berbagai perundingan, mulai dari Hoge Veluwe, Linggajati, Renville, sampai akhirnya Rum-Royen, dan K.M.B. Dan di sela-sela ketiga tema itu kisah pembentukan negara-negara federal dan, "revolusi sosial" di berbagai daerah (Jawa Tengah, Sumatra Utara, Aceh dan sebagainya) ditemukan juga. Tetapi dimanakah tempatnya penetrasi cita-cita nasionalisme yang revolusioner ke masyarakat desa? Bagaimanakah kita dapat memahami bahwa pada saat-saat genting "nasi bungkus" yang disiapkan rakyat, serta kesediaan untuk berperan sebagai pendukung para pejuang yang bergerilya menjadi tulang punggung perjuangan? Bagaimanakah kita dapat memahami hubungan "pusat", yang selalu bergolak dengan inisiatif "lokal", yang harus bergumul dengan situasi militer dan ekonomi yang telah dipaksakan oleh tentara pendudukan kolonial? Akhirnya seberapa jauh yang nasional itu adalah "nasional" sedangkan yang "lokal" adalah lokal tetapi sekaligus adalah refleksi dari yang "nasional". "Rakyat berjuang" ternyata bukanlah sekedar hasil abstraksi dari gejala umum sejarah, tetapi "pembisuan" dari dinamikanya yang empiris.

Seandainya urutan peristiwa dan rentangan waktu diperhatikan, maka tampaklah betapa "periodisasi" sejarah ditentukan pula oleh suasana perasaan yang bercorak romantisme — apapun mungkin kecenderungan ideologinya.

Periode pertama, masa-masa awal Proklamasi, selalu tampil memukau. *Dichtung und Wahrheit*, kata Hatta, terlalu terbaur dalam suasana romantisasi peristiwa "detik-detik" Proklamasi. Tetapi memang inilah saat ketika etos "kemudaan" memperlihatkan coraknya yang paling murni. "Zaman bersiap" dilihat bukan sekedar saat pemuda aktif menyusun barisan, mengambil inisiatif mengibarkan bendera Merah Putih, merampas senjata Jepang, tetapi adalah pula suasana "peralihan", ketika yang "muda" menjadi "dewasa", sebelum waktunya, menurut ukuran tradisional. *Merdeka atau mati* dan slogan lain menghiasi dinding-dinding. Bambu runcing dan ikat kepala berwarna merah putih adalah lambang "kepemudaan", yang kini telah berarti "kepahlawanan yang patriotik". Krawang-Bekasi tidak lagi sekedar wilayah geografis, tetapi adalah suasana, tempat "tulang-tulang berserakan", "yang tak lagi bicara", tetapi bertanya apakah mereka mati untuk cita-cita atau "tidak untuk apa-apa". Dan berapa sajak dan novel yang telah dilahirkan oleh suasana patriotisme ini? Akhirnya, 10 Nopember terjadi, hijrah ke Yogyakarta harus dilakukan, dan Bandung pun menjadi "lautan api". Periode kedua telah dimasuki.

Yogyakarta tidak pula sekedar ibukota perjuangan tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi "pemberhentian sementara" menuju front. Bukan lagi suara "tulang-tulang" yang ingin didengar. Tetapi kereta api yang datang dari Jakarta, mampir di stasiun Yogya, ketika hari "hampir malam", untuk menuju "medan perwira". Dan Malioboro adalah sekaligus pusat perjuangan dan suasana yang kadang-kadang menyangsikan keutuhan tekad. "Perjuangan" tidak lagi satu-satu jalan, "diplomasi" adalah jalan lain yang juga bisa ditempuh. Begitulah maka perundingan ke perundingan diadakan -- mula-mula dengan sekutu kemudian dengan Belanda saja.

Sebagai akibat rentetan perundingan, yang mencapai puncaknya ketika konflik Indonesia-Belanda menjadi masalah internasional, dalam perundingan Renville, Republik Indonesia hanya *de facto* di Sumatra dan Jawa. Tetapi, memang perundingan, yang menjanjikan plebisit sepenuhnya bertolak dari keyakinan bahwa nasionalisme yang telah merata akan mengembalikan keutuhan Republik Proklamasi. Namun, periode kedua ini sangat rawan. Kekuatan militer Belanda makin menaik, sementara usaha konsolidasi kekuatan R.I. selalu tergoncang oleh perdebatan strategi dan ideologi. Apakah "perjuangan" harus menggantikan "diplomasi"? Apakah "revolusi sosial" harus sekaligus mengiringi "revolusi nasional"? Maka "peristiwa 3 Juli" pun terjadi. Dan, akhirnya ketika rasionalisasi kekuatan revolusi harus mulai dijalankan untuk menggantikan patriotisme yang tanpa struktur, krisis politik mencapai puncaknya dengan pengkhianatan Madiun. Tak lama kemudian, setelah perundingan berlarut-larut agresi Belanda kedua dilancarkan. Periode ketiga telah dimulai.

Inilah zaman gemanya, ketika kota-kota telah diduduki dan di saat sebagian besar para pemimpin pemerintahan telah ditawan. Tetapi, sementara berbagai kegiatan militer di Jawa telah dicatat dengan baik oleh Nasution dan dikisahkan pula oleh Simatupang, dan peristiwa 1 Maret telah di film-kan oleh Usmar Ismail dalam *Enam Jam di Yogya*. Akan Tetapi PDRI, terlupakan da-

lam teks-teks sejarah perang kemerdekaan. Meskipun karya Nasution *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Jilid 10) membicarakan hubungan PDRI dengan pimpinan militer khususnya sikap mereka terhadap Roem-Royen tetapi tidak menjadikan PDRI lebih dikenal. Dalam penulisan sejarah perang kemerdekaan "nasib" PDRI tak jauh berbeda dengan pergumulan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia bagian Timur, yang berada di bawah dimnisi militer Belanda -- keduanya hampir-hampir terabaikan. Keduanya dan episode lain, telah jadi "korban" suatu struktur dominasi kesadaran. Jika "Indonesia Timur" terlupakan karena berada di luar *mainstream* sejarah yang berpusat di Yogyakarta, maka PDRI memperlihatkan betapa penulisan sejarah dikuasai semangat romantisasi revolusi yang didukung oleh kekuasaan dan ideologi.

Proklamasi adalah suatu tindakan heroik, yang bertolak dari keyakinan akan kepastian jalan yang akan ditempuh. Maka sejarah yang mengikutinya adalah suatu epos, yang tidak menghamparkan kegelisahan para "pencari", tetapi untaian tindakan para "pahlawan". Sebagai epos, revolusi dan perang kemerdekaan, menghasilkan simbol-simbol yang integratif dan sekaligus dianggap sebagai manifestasi dari romantisisme revolusi. Maka di atas segala pergumulan para aktor -- yang masing-masing dibimbing oleh rasa-kepastian yang metafisis -- kemenangan akhir pasti datang, meskipun hari kini dan esok tak pasti -- dwitunggal Sukarno--Hatta makin memantapkan diri sebagai simbol. Mereka ditangkap, PDRI tampil menggantikan. Bahkan sebelum ditangkap pun mereka telah memberi mandat penuh, Namun ketika mereka diajak berunding oleh Belanda, mereka menerima, meskipun secara formal tak lagi berkuasa. Sikap legalistik-formal serta legitimasi yang bertolak dari peranan sebagai pemerintahan yang syah di saat Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri ditangkap dan ditawan menjadi lebur, karena integrasi bangsa telah dipersonifikasikan oleh Dwitunggal. Bahkan konsesi diberikan kepada Belanda, akibat perundingan dilakukan oleh "para tawanan", sebagaimana dikatakan oleh para menteri PDRI dan Jenderal Sudirman, tidak lagi fungsional. Maka, Yogya pun "kembali" dan mandat PDRI kembali diserahkan. Dalam sejarah, PDRI diperlakukan sebagai *interlude* belaka, bukan suatu episode sejarah yang utuh pada dirinya. Pengakuan akan keabsyahannya dijadikan sebagai pengganggu keutuhan simbol, yang romantik. Tak lama setelah PDRI menyerahkan mandatnya proses penafiannya dalam ingatan kolektif bermula pula. Apalagi simbol telah makin mengokohkan diri sebagai kekuasaan yang riil. Tak sekalipun Bung Karno, presiden dan simbol persatuan, menyebut kehadiran, jangankan peranan yang dimainkan oleh Pemerintah Darurat ini, ketika ia, yang menjanjikan untuk memimpin gerilya, ditawan Belanda. PDRI telah tenggelam di bawah suatu struktur dominasi.

Jika nanti *discontinuity* dari keutuhan simbol romantik dalam perjalanan sejarah diungkapkan, maka PDRI pun tetap merupakan "suara yang terbenam". Struktur dominasi lain telah muncul. *Continuity* dalam sejarah, sejak Orde Baru tak lagi bisa dilihat dari kepemimpinan Sukarno, tetapi dari peranan ABRI,

yang konsisten sebagai pembela negara Proklamasi. Seperti Sukarno, ABRI bukan saja simbol, tetapi juga struktur kekuasaan.

Akan tetapi, setelah empat puluh tahun waktu berjalan, di saat sejarah perang kemerdekaan telah lebih dimungkinkan dilihat dalam suatu jarak dan ketika peralihan generasi telah makin merupakan keharusan alamiah, kalau bukan ideologis, sejarah tak lagi bisa dijadikan sebagai simbol atau legitimasi. Di saat ini unsur-unsur dan episode-episode yang tertutup serta terlupakan oleh struktur dominasi kesadaran, yang didukung oleh keharusan akan keutuhan kekuasaan dan mitos integratif yang mendukungnya, sudah semestinya mengalami "pembebasan". Bukan saja hal ini pertanda dari proses pendewasaan intelektual, tetapi lebih penting lagi, kemestian untuk memperdalam dan memperkaya pemahaman tentang dinamika kehidupan bangsa. Pemahaman yang telah diperkaya inilah pula yang akan mempertajam kearifan sejarah -- suatu kearifan yang bertolak dari refleksi terhadap masa lalu yang telah dialami dan dilalui. Dan PDRI adalah contoh yang paling menonjol yang bisa memperdalam pemahaman akan dinamika sejarah perjuangan kemerdekaan.

Jika historiografi perang kemerdekaan memperlihatkan betapa keharusan akan kontinuitas dari berlakunya mitos integratif dan dominasi kesadaran, yang didukung oleh suatu sistem kekuasaan telah menyebabkan terlupakannya episode-episode tertentu dari sejarah sebagai suatu - pengalaman - empiris, maka apakah yang bisa dipelajari, dari episode yang terlupakan yang ingin "dibebaskan" itu? Jika PDRI yang akan dibicarakan, ada beberapa hal yang menonjol akan segera tampil ke permukaan.

Sudah direncanakan, memang, jika situasi di Jawa tambah parah, maka Sumatra akan menjadi pusat perjuangan. Dengan pikiran inilah Hatta membawa beberapa orang menteri ke Bukittinggi, tetapi tak lama ia harus kembali ke Yogya, dan tinggallah Syafruddin Prawiranegara. Di saat inilah Yogya diduduki dan para pemimpin pemerintahan ditawan. Sesuai dengan rencana, Syafruddin segera mengambil inisiatif mendirikan PDRI, tanpa mengetahui bahwa sebelum ditawan Presiden telah memberinya mandat. Berita bahwa PDRI telah berdiri, segera disambut oleh jenderal Sudirman, yang menyatakan pengakuannya. Tetapi, meskipun radio memainkan peranan penting, perhubungan yang sulit menyebabkan setiap daerah harus berbuat sesuai dengan tuntutan setempat. Maka, suatu aspek terpenting dari sejarah perang kemerdekaan kita menampilkan dirinya dengan lebih jelas -- hubungan "pusat" dan "daerah", "nasional" dan "lokal", lebih ditentukan oleh keterikatan bersama kepada cita-cita perjuangan dan landasan strategi yang telah digariskan.

Kecenderungan ini juga kelihatan dalam pembagian kerja, kewajiban, dan wewenang yang bersifat horizontal. Ketua PDRI, dalam telegramnya, segera menyetujui usul Menteri Kasimo agar di samping penunjukan Menteri-menteri yang berkedudukan di Jawa, dibentuk pula komisariat PDRI, yang "statusnya tak lain sebagai satu bagian dari PDRI". Karena menyadari betapa sulitnya perhubungan di daerah gerilya, usul Susanto (Menteri Kehakiman) agar menteri-menteri saling mengisi tugas masing-masing, juga diterima oleh Ketua PDRI.

Kiai Maskur, Menteri Agama, mengusulkan pula agar tugas-tugas Menteri Agama di Sumatra dijalankan oleh Teuku Moh. Hasan.

Panglima Besar Jenderal Sudirman, adalah yang pertama menerima keabsyahan PDRI. Iapun menerima pula penolakan Ketua PDRI atas usulnya bahwa dalam suasana perang keputusan terakhir harus berada di tangan Panglima Tertinggi. Sesuai dengan usul menteri-menteri di Jawa PDRI menetapkan Panglima Besar serta para komando Jawa dan Sumatra, sebagai penasehat pada masing-masing komisariat.

Pada tingkat lokal, situasi yang membayangkan corak kolegialitet yang bercorak horizontal, daripada vertikal yang kaku, juga kelihatan jelas. Dalam situasi seperti inilah "peristiwa 6 jam di Yogya" (1 Maret) bisa pula dipahami. Strategi *Wehrkreise* dan perang rakyat semesta, telah memungkinkan pemimpin atau komando lokal untuk membuat inisiatif.

Suasana gerilya adalah saat terkaburnya batas-batas sipil - militer -- sesuatu yang sebelumnya ingin diperjelas dalam usaha meletakkan struktur dan tradisi baru Republik. "Militerisasi" jabatan pemerintahan menjadi suatu keharusan perang. Dalam proses inilah terjadi perbedaan di Jawa dan Sumatra. Barangkali karena Jawa baru saja terlepas dari krisis militer, yang ditimbulkan oleh pemberontakan Madiun, dan Sumatra adalah pusat kedudukan PDRI, maka "militerisasi" kedua wilayah Republik itu berbeda. Di Jawa "militerisasi" adalah pelaksanaan tugas yang kemudian akan dikenal sebagai "dwifungsi ABRI" yang diwujudkan dalam dominasi militer dalam pelaksanaan pemerintahan di waktu perang. Sebaliknya di Sumatra, para tokoh sipil dijadikan sebagai pejabat yang mempunyai wewenang militer. Gubernur militer Jawa Tengah adalah kolonel Gatot Subroto, di Sumatra Selatan jabatan yang sama dipegang oleh Dr. A.K. Gani. Namun, sementara itu Mr. Wongsonagoro tetap berperan sebagai gubernur, hal yang sama tak terjadi di Sumatra.

Sesuai dengan keputusan Ketua PDRI (17 Mei no. 22 dan no. 23) di tangan para gubernur militer inilah terpusat kekuasaan sipil dan militer buat sementara waktu. Para gubernur lama diangkat sebagai komisaris, yang berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah pusat PDRI.

Tradisi "dwifungsi" tak pernah lagi hilang. Nanti, di akhir 1950-an ketika negara kembali dalam bahaya akibat pertentangan politik, dan undang-undang bahaya perang diperlakukan, "militerisasi" jabatan pun dimunculkan kembali dalam bentuk yang baru. Hanya saja kali ini TNI mempunyai "hak sejarah" dan di saat kehidupan partai sedang merosot, maka pengalaman sejarah di Jawa, bukannya pengalaman sejarah di Sumatra yang tampil dominan. Akan tetapi, melihat kembali kepada sejarah perang kemerdekaan, dominasi TNI dalam "militerisasi" jabatan pemerintahan di Jawa tidaklah sekedar kekecewaan atas kegagalan pemerintahan sipil, yang bersedia ditawan Belanda. Dominasi militer adalah pula keharusan diplomasi perjuangan. Secara tegas ingin diperlihatkan, bahwa apapun yang terjadi TNI adalah milik Republik yang tak bisa ditawar, meskipun perundingan gagal dan Agresi Kedua dilancarkan

Belanda. Dengan begini TNI bukan saja ingin membuktikan kebenaran garis diplomasi Syahrir-Hatta, tetapi juga memperkuat patokan dasar dalam setiap kemungkinan penyelesaian konflik bersenjata -- TNI adalah milik mutlak Republik. Dan, inilah pula satu-satunya hal yang tak pernah bisa dikompromikan dalam perundingan KMB.

Dalam masa tugas yang tak lebih dari tujuh bulan, PDRI yang sepenuhnya didukung oleh TNI, bukan saja telah mempertahankan eksistensi pemerintahan yang syah, mengadakan koordinasi perjuangan mengadakan kontak-kontak diplomasi, dan bahkan juga mengadakan reorganisasi pemerintahan daerah (terutama di Sumatra), tetapi juga, menyusun organisasi pemerintahan perang. Dalam hal yang terakhir ini kelihatanlah betapa kepekaan terhadap situasi kehidupan rakyat dan tradisi serta adat setempat telah memungkinkan

PDRI mengadakan mobilisasi daya dan dana secara optimal. Kepekaan ini menyebabkan politisasi masyarakat desa menyebar dengan relatif baik. Hal ini pula yang menyebabkan ketergantungan "orang kota" kepada "orang desa" dapat beralih menjadi *partnership* yang nanti, ketika kesadaran telah berubah, menyebabkan "orang kota" ingin kembali ke desa "membayar hutang keramahan".

Sejarah pergerakan kebangsaan dan tradisi perlawanan terhadap kekuasaan Belanda serta keterlibatan putra-putra daerah dalam kepemimpinan nasional memang merupakan benteng yang ampuh dalam menghadapi agresi Belanda di Sumatra Barat. Tetapi hal-hal ini barulah modal dasar yang masih memerlukan pengelolaan yang seksama, apalagi dalam situasi ketika daerah ini menjadi "tuan rumah" dari pusat pemerintahan perjuangan nasional. Maka eksperimen yang dijalankan oleh Gubernur Militer memang perlu juga diperhatikan. Pembentukan badan-badan resmi yang merupakan forum, tempat bertempuk bertemunya unsur-unsur pemerintahan dengan masyarakat, adalah suatu kisah sukses.

Para Kepala daerah, sesuai dengan hirarki pemerintahan, adalah ketua Markas Pertahanan Rakyat (daerah, kecamatan, dan nagari), yang terdiri dari unsur-unsur golongan politik dan sosial. Dibentuk pada tanggal 25 Maret 1945, MPRN (Markas Pertahanan Rakyat Nagari), yang diketuai oleh Wali Nagari Perang, antara lain bertugas sebagai pembina BPNK (Badan Pengawas Nagari dan Kota). Dalam kedudukan ini MPRN harus menjalin kerjasama yang erat dengan kesatuan TNI, karena BPNK adalah organisasi semi-militer dari pemuda desa, yang bertanggung jawab dalam keamanan. Sejalan dengan sikap PDRI bahwa dalam situasi perang kekuasaan sipil dan militer tak bisa dipisahkan, maka Wali Nagari Perang adalah pula Ketua DPN (Dewan Harian Negeri). Pada tingkat yang lebih atas dari Nagari, struktur yang sama diulang juga.

Struktur ini memperlihatkan satu hal yang jelas. Perjuangan kemerdekaan adalah kepentingan bersama, dan karena itu harus selalu ditemukan perimbangan yang ideal antara kekuasaan "negara" dan hak "masyarakat". Hal ini ingin dicapai dengan menjadikan forum yang bisa menjembatani dunia "ke-

kuasaan" (negara) dan wilayah "nilai" (masyarakat). Jika pengalaman selama masa gerilya akan diperhatikan lagi diberbagai daerah (khususnya Jawa dan Sumatra), kelihatanlah bahwa ketika perimbangan yang ideal antara kedua unsur tersebut terganggu secara ekstrim dan di waktu jembatan yang menghubungkan kedua telah terputus, maka krisis pun terjadi. Insiden-insiden kecil, ataupun besar, memang adalah pula "bunga-bunga" dalam taman sejarah. Akan tetapi, meskipun mengganggu, memberi pelajaran yang berguna.

Demikianlah dengan memperhatikan kembali sejarah PDRI dan periode ketiga dari sejarah perang kemerdekaan, berbagai hal dapat ditemukan. Tidak saja *continuity* sejarah telah semakin utuh dan bukan pula sekedar sesuatu yang terlupakan bisa diingat kembali dalam ingatan kolektif bangsa, tetapi lebih dari itu. Zaman gerilya, yang secara formal di bawah pimpinan PDRI, adalah saat terkaburnya segala batas. "Orang kota" telah harus jadi "orang desa", militer memegang jabatan sipil, dan sipil menjadi penguasa militer, menteri-menteri saling mengisi jabatan, dan sebagainya. Kekaburan batas ini bukanlah anarki, tetapi kesediaan memikul tanggungjawab bersama, demi cita-cita bersama. Ketika tekanan militer Belanda telah mengepung semua wilayah Republik dan sejauh mungkin memutuskan hubungan logistik, perimbangan kekuasaan dan pembagian tanggungjawab antara "pusat" dan "daerah" yang wajar tidak saja makin meneguhkan keterikatan pada cita-cita dan strategi bersama, tetapi juga makin memberi peluang bagi masing-masing untuk mengadakan inovasi yang kreatif. Di saat para pemimpin pemerintahan dan simbol persatuan bangsa telah ditawan, terjaganya perimbangan yang ideal antara bobot "dunia kekuasaan" dan "dunia nilai" telah tampil sebagai kekuatan revolusi yang luar biasa. Maka, herankah kita, kalau baik pemimpin-pemimpin PDRI ataupun para panglima TNI kaget dan marah, akan apa yang mereka anggap sebagai konsesi yang berlebihan terhadap tuntutan Belanda dalam Roem-Royen agreement?

Akhirnya dari sudut moral, perjuangan PDRI dan jenderal Sudirman menunjukkan contoh yang tak terlupakan. Apakah artinya "benar" dari sudut keharusan formal dan segi logika, jika semuanya akan merugikan perjuangan dan mengancam integrasi bangsa? PDRI mengembalikan mandat dan Sudirman kembali ke Yogyakarta.

Dan jarak antara Sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah ternyata cukup lebar. Yang pertama sekali terjadi tak akan kembali lagi, dilupakan atau dikenang. Yang kedua akan mengisahkan apa yang ingin dikisahkan. Ternyata PDRI cukup lama tak terkisahkan.

LINTASAN SEJARAH
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (1948 - 1949)
PDRI

JR. Chaniago *)

Bukittinggi masih tidur nyenyak ketika sebuah mustang Belanda berputar-putar di atas kota pada dinihari 19 Desember 1949. Sebagian orang mengira bahwa pesawat itu sedang mencari landasan pacu Pangkalan AURI Gadut. "Presiden RI akan singgah dalam kunjungan kerja ke India sebagaimana yang sudah direncanakan Kabinet beberapa waktu sebelumnya", pikir mereka. Untuk itu sejumlah mobil buru-buru menuju pangkalan yang berjarak sekitar 5 Km dari pusat kota Bukittinggi. Maklum pangkalan ini belum memiliki fasilitas lampu landasan yang bisa membimbing pilot untuk mendarat tepat di tengah landasan pacu.

Akhirnya semua menjadi jelas, karena pesawat itu bukan ingin mendaratkan Presiden yang akan singgah tapi sebuah pesawat militer Belanda yang sedang mengintip instalasi sipil dan militer yang dimiliki Republik. Keesokan harinya, bersamaan dengan penyerbuan ke Ibukota RI Yogyakarta, Bukittinggi didatangi lagi. Kali ini dibom. Sasaran yang sudah dilihat beberapa jam sebelumnya dijadikan objek penembakan.¹

Sebagian penduduk panik dan berusaha mencari perlindungan atau bersiap-siap untuk mengungsi ke luar kota. Sebagian lagi mencoba memonitor siaran radio dalam dan luar negeri. Beritapun menjadi simpang siur. Benarkah Ibukota Yogyakarta telah diduduki, dan bagaimana nasib para pemimpin RI di sana. Sebagian ingin mengetahui kepastian berita itu. Di antara kesibukan itu, Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI yang sudah berada di Bukittinggi mengikuti rombongan Bung Hatta sejak akhir bulan Nopember 1949 adalah salah seorang yang berusaha menkonfirmasi berita radio itu. Jika benar Yogyakarta telah diduduki tentu harus ada tindakan sesuai dengan petunjuk Bung Hatta yang sudah kembali ke Yogya beberapa minggu sebelumnya bahwa jika terjadi apa-apa dengan Yogyakarta, Sumatra akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pemimpin yang sedang berada di luar kota dapat mengambil inisiatif tanpa menunggu perintah Presiden dan Wakil Presiden.² Petunjuk Bung Hatta ini tentu sudah dirumuskan sebelumnya oleh Dewan Siasat Militer yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan Pemerintah untuk menjadikan Sumatra menjadi pusat pemerintahan karena faktor daya tahan ekonominya dan lokasinya yang dekat dengan luar negeri yang memungkinkan mengadakan kontak-kontak dengan negara tetangga.³

*) Sejarah Lisan, Arsip Nasional RI.

Mungkin karena kesepakatan lisan itu atau karena inisiatif Sjafruddin sendiri, kemudian yang bersangkutan bersama Kolonel Hidayat mendatangi rumah Komisaris Pemerintah Pusat (Kompempus) Mr T Moh Hasan untuk mendiskusikan jalan keluar dari situasi yang belum jelas pada pemerintahan dan keadaan di kota Bukittinggi sendiri.

Menurut Sjafruddin mereka berdua sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk pemerintah darurat. Waktu itu Mr Sjafruddin mengusulkan bahwa karena belum diketahui nasib pemimpin-pemimpin RI di Yogyakarta, apakah tidak lebih baik didirikan pemerintah darurat yang diketuai oleh Sjafruddin (karena beliau adalah salah seorang anggota Kabinet Hatta) dan Mr. T. Moh. Hasan sebagai wakil ketua.⁴ Mungkin karena hasil pertimbangan ini memerlukan pendapat tokoh yang lain dan berhubung situasi kota Bukittinggi yang tidak aman, tindakan pertama yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengungsi ke luar kota. Dengan demikian keputusan akan dapat diambil dengan tenang. Belum diketahui siapa yang merencanikan; yang jelas sebagian pembesar RI yang berada di kota Bukittinggi menuju ke bekas perkebunan Belanda di Halaban, Barat Laut Payakumbuh.

Sementara itu di Yogyakarta juga terjadi pembicaraan yang monumental tentang cara-cara menyelamatkan Pemerintah RI. Walaupun tentara kerajaan Belanda sudah menduduki Pangkalan Udara Maguwo (sekarang Adisucipto) sejak pagi hari 19 Desember 1949, namun sebelum mereka sampai di pusat kota Kabinet masih sempat bersidang. Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Mandat yang sama juga diberikan kepada dr Soedarsono, LM Palar, dan AA Maramis yang sedang berada di India untuk membentuk Pemerintah RI di pengasingan jika Sjafruddin gagal membentuk pemerintah darurat di Sumatra.⁵ Dengan demikian ada dua peristiwa yang mirip sama dengan dua tempat yang berbeda. Diskusi untuk membentuk pemerintah darurat telah berlangsung bukan hanya di Yogyakarta tapi juga di Bukittinggi yang kemudian susunan lengkapnya dibicarakan di Halaban setelah semua pemimpin berkumpul.

Salah seorang dari pemimpin yang ditunggu itu adalah Mr Moh Rasjid yang waktu itu menjadi Residen Sumatra Barat merangkap Komisaris Urusan Keamanan Dalam Negeri untuk Sumatra yang sehari sebelum dilancarkannya Agresi Belanda II sedang pergi ke Pariaman untuk melihat tiga buah kapal dari Singapura yang membawa keperluan bagi Kresidenan Sumatra Barat. Dengan caranya sendiri Rasjid akhirnya berhasil kembali ke Bukittinggi dan mengadakan rapat-rapat sebelum meninggalkan kota menyusul Sjafruddin ke Halaban.

Rasjid sampai di Halaban pada dinihari 22 Desember 1949. Setelah memberikan konfirmasi tentang pendudukan Yogyakarta, hadirin kemudian bersepakat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang lebih populer dengan singkatan PDRI.⁶ Susunan selengkapnya dari PDRI

adalah sebagai berikut :

Ketua, merangkap menteri
Pertahanan, Penerangan, dan
Luar Negeri Ad Interim : Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Wakil Ketua, merangkap
Menteri Dalam Negeri, Pen-
didikan & Kebudayaan dan
Agama : Mr. T. Moh. Hasan

Menteri Keamanan, merangkap
Menteri Sosial, Pembangunan,
Pemuda dan Perburuhan : Mr. Moh. Rasjid

Menteri Keuangan merangkap
Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Hakim

Menteri Pekerjaan Umum
merangkap Menteri Kesehatan : Ir. Mananti Sitompul

Menteri Perhubungan merangkap
Menteri Kemakmuran : Ir. Indratjahja

Sekretaris : Mardjono Danubroto

Susunan Kabinet PDRI ini kemudian dilengkapi dengan pejabat-pejabat penting lainnya seperti :

Letnan Jenderal Sudirman : Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.

Kolonel A.H. Nasution : sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD).

Kolonel Hidayat : sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra (PTTS).

Kolonel Nazir : sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Kolonel H Soejono : sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Komisaris Besar Polisi Umar Said : sebagai Kepala Kepolisian Negara

KONSOLIDASI

Selain harus mencari tempat yang relatif aman dalam mengendalikan pemerintahan, persoalan mendesak yang dihadapi PDRI adalah bagaimana mengatur dan memperoleh pengakuan ke luar dan ke dalam. Persoalan ini tentu saja tidak mudah karena tempat tinggal pemimpin yang satu berbeda dengan yang lain. Khusus mengenai tokoh-tokoh pendiri PDRI setidaknya terdapat dua konsentrasi : pertama di Bidar Alam (di perbatasan Sumatra Barat dan Jambi) dan sebagian lagi dekat Payakumbuh. Mr Sjafruddin, Mr T Moh. Hasan, dan sejumlah tokoh lainnya berada di Bidar Alam, sementara Mr. Moh. Rasjid, Ir Sitompul berada di pedalaman Sumatra Barat. Disinilah peranan komunikasi radio dan kurir sangat menentukan.

Khusus ke Jawa hampir seluruh hubungan dilakukan melalui radio dengan memanfaatkan stasiun radio yang dimiliki AURI dan sebagian lagi dengan bantuan PTT. Dengan corak hubungan seperti itu sudah dapat diperkirakan bahwa tingkat kerahasiaannya tidak begitu tinggi, karena pancaran radio bisa disadap lawan atau kode yang dirancang secara khusus dapat dipecahkan rahasianya oleh Belanda. Karena itulah kode-kode ini seringkali dirubah. Terlepas dari itu peranan stasiun radio ini sangat menentukan dalam usaha konsolidasi PDRI.⁷

Sejumlah radiogram telah dikirim Ketua PDRI ke berbagai tempat, baik di Sumatra, Jawa, maupun ke luar negeri. Dalam radiogram itu selain berisi mengenai susunan PDRI, juga meminta pendapat tentang berbagai persoalan.⁸

Pada umumnya para Menteri Kabinet Hatta yang berhasil meloloskan diri dari Yogyakarta dan ikut bergerilya memberikan sokongan mereka terhadap PDRI. Hal yang sama juga bisa dilihat dari berbagai radiogram Panglima Besar Sudirman kepada Ketua PDRI. Salah satu dari radiogram itu dikirimkan Panglima Besar kepada Ketua PDRI tanggal 23 Maret 1949.⁹ Panglima Besar menjelaskan sikap TNI : " ... sikap seluruh TNI sebagai angkatan Perang Republik Indonesia—Pemerintah beserta rakyat seluruhnya meneruskan perjuangan dan perlawanan selaku belum ada keadilan dunia yalah lenyapnya sifat dan bentuk penjajahan serta penindasan, pimpinan APRI telah bersatu faham-tekad, sikap dan tindak dengan PDRI serta berkeyakinan bahwa kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia yang didirikan di atas timbunan ribuan korban jiwa serta harta benda rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia apapun juga ttk . . . " Pada radiogram yang lain Panglima Besar mencatat bagaimana sebaiknya hubungan angkatan perang dengan PDRI. Menurut Panglima Besar soal politik dan pertahanan tidak dapat dipisah-pisahkan karena pertahanan menjadi tulang punggung politik. Dalam situasi perang Panglima Besar mempunyai *beslissend stem* dalam menentukan politik status negara atau soal-soal lain yang bersangkutan dengan pertempuran. Disebutkan juga pengalaman-pengalaman yang merugikan perjuangan pada masa-masa sebelumnya. Pada bagian lain beliau menyebutkan " ... karena pengalaman yang sangat pahit itu disebabkan oleh karena kekeliruan langkah dan tindakan maka kesalahan-kesalahan itu jangan sampai terulang kembali supaya kita dapat kuat keluar

dan ke dalam maka antara PDRI dengan pucuk pimpinan angkatan perang jangan sampai dapat dipisah-pisahkan, tetapi harus mempunyai kesatuan paham-tekad-sikap dan tindak tdk ...

Sikap angkatan perang ini merupakan modal utama dalam konsolidasi PDRI. Karena sebagian besar hubungan radio kepada para menteri kabinet yang berada di Jawa dilaksanakan melalui fasilitas radio yang dimiliki angkatan perang.

Agak berbeda adalah hubungan radio yang dilakukan ke luar negeri. Keterbatasan daya pancar radio mengakibatkan berita radio dilakukan secara estafet. Di Jawa sekurang-kurangnya terdapat tiga sender radio yang cukup kuat yakni di Playen-Wonosari, Kulonprogo, dan sebuah lagi yang berpangkalan di lereng Gunung Lawu. Sedangkan di Sumatra pemancar yang agak kuat terdapat di Ranau Sumatra Selatan, di Bidar Alam, di Kototinggi, di Tungkal-Riau, di Rao Pasaman, di Siborong-borong Tapanuli, di Tangse Aceh, kemudian berkembang menjadi Radio Rimba Raya, di Bireun Tabengon Aceh dan di Kutaraja. Semua berita radio umumnya dilakukan lewat saluran ini. Bilamana hendak ke luar negeri, maka pos terdepannya adalah pemancar AURI yang berada di Kutaraja yang mampu ditangkap oleh para teknisi Seulawah yang berada di Rangoon. Dari Indonesia ke Myanmar (Burma) berita-berita radio itu masih dikirim secara rahasia. Tapi dari Rangoon ke New Delhi - India, di tempat mana perwakilan kita berada sudah dikirimkan melalui fasilitas PTT setempat. Dari India-lah berita-berita penting mengenai aktivitas Republik disebarluaskan ke penjuru dunia. Baru bulan-bulan terakhir dari PDRI beberapa stasiun radio berhasil memperkuat daya pancarnya dan mengadakan berbagai hubungan juga ke luar negeri.

Sejak semula Panglima Besar telah menetapkan Sumatra dan Jawa dalam masing-masing satuan di bawah komando seorang panglima. Jika di Jawa terdapat Panglima Tentara & Teritorium Djawa (PTTD), maka di Sumatra juga ada Panglima Tentara & Teritorium Sumatra (PTTS). Para komandan tentara yang berada di bawah jajaran PTTD setelah Belanda melakukan Agresi II kemudian membentuk Gubernur Militer, sedangkan di Sumatra sebagian Gubernur Militer berasal dari aparat sipil dengan wakil Gubernur dari kalangan militer. Dengan demikian di Sumatra terdapat Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo di bawah Tgk Daud Bereueh, di Sumatra Timur dan Tapanuli di bawah Dr. Ferdinan Lumban Tobing, di Sumatra Barat di bawah Mr. St. Moh. Rasjid, di Riau RM Oetojo, dan Sumatra Selatan dan Jambi di bawah dr Adnan Kapau Gani. Sedangkan di Jawa terdapat tiga Gubernur Militer yakni : Gubernur Militer Jawa Barat di bawah Kolonel Sadikin, di Jawa Tengah di bawah Kolonel Gatot Subroto, di Jawa Timur di bawah Koionel Sungkono.

Pada dasarnya konsolidasi terhadap aparat sipil dilakukan oleh para Gubernur Militer, sementara tentara melakukan konsolidasi sendiri pula. Usaha para gubernur militer dalam mengkoordinasikan aparatatur pemerintahan relatif dipermudah dengan telah adanya berbagai persiapan di bidang kepamongprajaan menjelang meletusnya Agresi Belanda II, umpamanya saja di Jawa dengan sistem *Wehrkreise* yang menjadikan kecamatan sebagai satuan atau kantong.

Selain usaha mempertahankan de facto pemerintahan sipil Republik, *Wehrkreise* juga bertugas dalam pertahanan.¹⁰ Dalam sistem ini para camat dan lurah harus berusaha berada dalam daerahnya guna bisa menegakkan pemerintahan gerilya dan menjadi basis garis belakang tentara. Dari sini terlihat bahwa keberhasilan perjuangan sangat ditentukan oleh kerjasama antara aparat sipil dengan para komandan satuan tentara setempat.

Di Sumatra prinsip perang semesta juga dilaksanakan, umpamanya terwujud dalam sistem Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) di Kresidenan Sumatra Barat yang sudah terbentuk jauh sebelum Agresi Belanda II. Sistem pertahanan semacam ini tentu saja mempermudah konsolidasi, karena wadahnya sudah tersedia.

Dalam kenyataan konsolidasi aparat pemerintahan dan kemiliteran dapat diselesaikan sekitar dua tiga bulan. Setelah itu kelihatan bahwa TNI sudah mulai memperlihatkan kekuatannya. Salah satu di antaranya sebagaimana tergambar dengan Serangan 1 Maret ke Yogyakarta.

Dalam susunan PDRI itu sendiri masih banyak masukan yang diberikan dari Jawa. Setelah konsultasi lewat udara dirasakan cukup, maka tanggal 31 Maret 1949 Ketua PDRI mengumumkan penyempurnaan susunan PDRI sebagai berikut :

Ketua, merangkap Menteri Pertahanan, dan Penerangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Wakil Ketua, merangkap Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri Luar Negeri : Mr. A.A. Maramis

Menteri Dalam Negeri, merangkap Menteri Kesehatan : dr. Sukiman
Menteri Keuangan : Mr. Lukman Hakim
Menteri Kemakmuran, termasuk PMR (Pengawas Makanan Rakyat). : I Kasimo
Menteri Agama : Kiai Haji Masykur
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan : Mr. T. Moh. Hasan
Menteri Perhubungan : Ir. Inderatjahja
Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Mananti Sitompul
Menteri Perburuhan dan Sosial : Mr. St. Moh. Rasjid

Kemajuan yang dicapai oleh TNI dan PDRI tentu saja meresahkan Belanda. Hal ini ditambah lagi dengan tekanan-tekanan internasional terhadap Pemerintah Belanda. Kedua faktor ini setidaknya mendorong Belanda untuk mencari jalan keluar yang kemudian bermuara dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh Republik yang ditawan Belanda di Bangka.

Untuk kesekian kalinya kembali dua delegasi yang sederajat dipertemukan. Kali ini adalah antara Mr. Moh. Roem yang ditunjuk berdasarkan mandat Sukarno-Hatta yang ditawan di Bangka dengan Van Royen yang mewakili Belanda. Muara dari pembicaraan mereka adalah Pernyataan Roem-Royen 7 April 1949.

Jika disatu pihak Belanda telah menemukan jalan terhormat untuk keluar dari tekan gerilya Indonesia, maka di pihak lain Pernyataan Roem-Royen memunculkan debat berkepanjangan di kalangan pemimpin Republik. Panglima Besar Soedirman sebagaimana tertuang dalam radiogram beliau mendesak PDRI agar secara tegas menolak perundingan itu.¹¹ Tokoh-tokoh PDRI saling bertukar pendapat melalui udara. Akhirnya para menteri yang berada di Sumatra bersepakat untuk berkumpul di Sumpur Kudus (sebagian pelaku menyebutkan tempatnya bukan di Sumpur Kudus tetapi di Ampalu). Pertemuan ini diperkirakan berlangsung sekitar minggu ketiga bulan April 1949.

Pertemuan Sumpur Kudus ini selain mendiskusikan secara mendalam tentang Pernyataan Roem-Royen juga persoalan lain dalam pemerintahan. Dalam situasi dimana pihak gerilya merasa semakin kuat memang sukar untuk menerima Pernyataan Roem-Royen itu. Karena itu adalah beralasan kalau Panglima Besar Soedirman mengusulkan agar realisasi perundingan Roem-Royen khususnya masalah pengosongan Yogyakarta sekitar 5 Km supaya ditolak. " ... Pemerintah Pusat wajib bersikap yang tegak dan tegas, ialah menolak hal tersebut ...," kata Soedirman dalam radiogramnya kepada PDRI.¹²

Sikap PDRI dan pucuk pimpinan APRI sudah jelas. Namun dengan sikap semacam itu persoalan baru kemudian muncul, bahwa jika kebijaksanaan "tracee Bangka" untuk berunding dengan Belanda tetap ditolak oleh PDRI maka keutuhan negara dan bangsa Indonesia akan terancam. Dalam situasi inilah Bung Hatta bersikap simpatik dengan usaha beliau untuk bertemu dengan tokoh-tokoh PDRI di Aceh pada awal Juni 1949. Walaupun meleset, karena Hatta mengira bahwa tokoh PDRI berada di Kutaraja padahal mereka tetap berada di wilayah Sumatra Barat, namun niat baik itu adalah modal bagi pendekatan berikutnya.

Sesampainya di Jakarta dan sebelum kembali ke Bangka, Bung Hatta telah meminta kepada dr J Leimena, dr A Halim, dan Moh Natsir untuk menjemput pemimpin PDRI ini ke Sumatra. Setelah melalui perundingan yang melelahkan, Leimena cs akhirnya berhasil meyakinkan Sjafruddin dan kawan-kawan, sehingga mereka bersedia kembali ke Yogyakarta. Jika Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh yang ditawan di Bangka pada tanggal 6 Juli 1949 sudah kembali ke Yogyakarta, Sjafruddin dan kawan-kawan, serta Panglima Besar dengan jajarannya baru menyusul beberapa hari kemudian. 13 Juli

1949, Ketua PDRI Mr Sjafruddin Prawiranegara secara resmi mengembalikan mandat yang diterimanya sejak tanggal 19 Desember 1948. Hari itu PDRI mengakhiri tugas nasionalnya, dan hari itu Yogyakarta kembali menjadi pusat pemerintahan kita.

RENUNGAN ULANG

Deskripsi di atas sebagian besar merupakan pengulangan dari bahan-bahan yang sudah banyak diketahui. Karena itu penyajian dalam kesempatan ini hanyalah sebagai alat untuk memancing kenangan para pelaku terhadap berbagai pengalaman yang sesungguhnya dialami mereka. Kenangan itu tentu saja akan sangat berguna dalam penyusunan sejarah PDRI yang lebih komprehensif.

Menjelang kegiatan semacam itu bisa dilakukan barangkali kita perlu mencatatkan bahwa ternyata bahan sumber mengenai berbagai aspek Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sangat melimpah. Bahan itu bukan hanya bisa diperoleh di dalam negeri tetapi juga dari sumber Belanda sekalipun. Sumber itu bukan hanya berbentuk sumber tertulis tetapi juga kenangan pelaku sejarah baik dalam bentuk wawancara sejarah lisan maupun memoar. Sebagian dari sumber itu dengan kebijaksanaan Pimpinan Arsip Nasional telah disumbangkan kepada seminar ini, sehingga dengan demikian membantu kita dalam menganalisis berbagai aspek PDRI dan sekaligus sebagai pemancing ingatan para pelaku sejarah yang ikut berpartisipasi dalam seminar ini. Selain itu aktivitas seminar ini betul-betul telah merangsang dan memacu para pelaku baik yang waktu itu aktif di Jawa, di Sumatra, bahkan di luar negeri menuliskan kenangan mereka. Makalah ini secara tidak langsung telah diperkaya wawasannya oleh bahan-bahan yang terakhir ini. Hanya karena keterbatasan waktu sajalah tidak semua masukan itu dapat ditampilkan.

Belajar dari sumber-sumber itu barangkali ada baiknya kita menampilkan beberapa catatan umum yang tentu saja mungkin telah berkembang di masyarakat. Catatan pertama yang bisa diungkapkan dalam melihat aspek-aspek kelahiran PDRI adalah bertemunya antara inisiatif lokal dengan legalitas yang dirumuskan di tingkat nasional. Dari kaca mata ini kita bisa melihat pertautan antara rasa tanggungjawab untuk mempertahankan eksistensi Republik secara politik seperti yang tergambar pada aktivitas tokoh-tokoh Republik yang ketbetulan berada di Sumatra Barat dengan keinginan untuk memberikan dasar hukum bagi kegiatan Sjafruddin, Sudarsono, LN Palar, dan Maramis sebagaimana dirumuskan oleh mandat Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri menjelang mereka ditawan Belanda tanggal 19 Desember 1948.

Sjafruddin yang kurang merasa memiliki backing politik ketika berhadapan dengan rekan-rekannya pada awal pembentukan PDRI dipertemukan dengan pengakuan konstitusional dengan pengiriman mandat itu ke Sumatra, walaupun menurut cerita Sjafruddin kawat itu baru diketahuinya beberapa lama setelah PDRI terbentuk.

Tentu pengakuan konstitusional saja belum cukup; yang lebih penting barangkali adalah pengakuan aparat pemerintah dan rakyatnya. Dalam suasana perang bukan suatu hal yang mudah merumuskan pengaturan hubung-

an sipil-militer. Di sinilah letak luar biasanya pribadi Panglima Besar Soedirman. Sebagai tentara beliau loyal kepada pemimpin politik; dalam situasi dan corak bagaimanapun adanya. Sebagai intelektual Soedirman sangat arif menempatkan letak kepemimpinan politik tanpa mengurangi disiplin militer. Adalah Soedirman juga yang bukan hanya mengakui eksistensi PDRI, tetapi juga mengamankan garis politik pemerintahan yang sah. Maka yang terlihat adalah sebuah harmonisasi. Corak hubungan TNI-Rakyat-Pemerintah telah diwujudkan dalam sikap pribadi dan kenegarawanan Soedirman. Saling menghormati dan saling mempercayai rupanya merupakan modal yang tidak dapat dinilai dalam rangka pengamanan strategi perjuangan bersama.

Adapun PDRI itu sendiri relatif merupakan pemerintahan yang mobil. Sebagai pemerintahan mungkin getarannya tidak begitu langsung dirasakan seluruh rakyatnya. Tempatnya yang seringkali harus berpindah-pindah, gerakan yang penuh kerahasiaan, mempersulit corak hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Seringkali rakyat biasa tidak tahu persis dimana pemimpinnya sedang berada. Malah mungkin terjadi sang pemimpin berada di tengah rakyat atau lokalitas tertentu, namun masyarakat tidak mengetahuinya. Penyamaran adalah hal yang biasa dalam pengamanan seorang pemimpin. Namun dibalik itu semua situasi ini sekaligus memungkinkan munculnya inisiatif-inisiatif setempat. Dan memang suasana pada masa Agresi Belanda II itu memungkinkan berkembangnya inisiatif lokal. Paling tidak sampai diumumkan-nya Pernyataan Roem-Royen inisiatif setempat itu relatif sangat menonjol. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana rakyat lebih merasa dekat dengan komandan-komandan militer setempat dan tokoh-tokoh lokal ketimbang elite politik pada level yang sangat tinggi.

Dalam batas tertentu konsolidasi aparaturnya melalui Gubernur Militer lebih kelihatan daripada koordinasi teknis yang dilakukan oleh para menteri dalam tugasnya masing-masing. Jawatan-jawatan yang semestinya berada pada kendali sebuah kementerian karena situasi yang tidak memungkinkan dikordinir juga oleh pemerintah sipil setempat. Di sini terlihat lagi bagaimana inisiatif setempat sangat menentukan.

Kepekaan tokoh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat seringkali terdorong kebelakang oleh persoalan besar yang sedang dihadapi. Persoalan utama bagaimana perang harus dimenangkan, dan karena itu partisipasi dan mobilisasi berada di tempat terbatas. Disinilah pertautan itu terjadi. Dukungan yang melimpah dari rakyat menjamin bukan hanya tenaga juga tetapi tersedianya logistik.

Bagaimana hubungan dan koordinasi dilakukan. Periode PDRI memberikan masukan kepada kita bagaimana besarnya peranan stasiun radio dalam perang kemerdekaan. Jawa-Sumatra relatif dapat dipersatukan dalam lintas informasi dan koordinasi melalui berita-berita radio. Kecuali kurir yang seringkali harus berjalan kaki, peranan stasiun radio ini mampu menjembatani persoalan strategis yang dihadapi para Pemimpin Republik (sipil dan militer) yang berada di Jawa dan Sumatra bahkan dengan perwakilan kita di luar negeri.

Dalam batas-batas tertentu peranan radio ini juga mampu menghubungkan komandan satuan tertentu dengan lapisan yang berada di bawahnya.

Bilamana kita membaca salinan radiogram-radiogram yang dikirimkan para menteri, panglima, komandan satuan, gubernur militer, dan tokoh-tokoh lainnya di antara mereka dapat ditemukan hal yang menarik. Salah satu dari hal yang menarik itu adalah suasana keterbukaan di antara mereka. Tingkat intelektual yang tinggi menyebabkan mereka seperti equal dalam melihat berbagai persoalan perjuangan, umpamanya pertanyaan apa urgensi mengadakan perundingan. Masukan-masukan yang diberikan seperti tidak terlihat perbedaan tingkat di antara mereka. Namun di atas itu semua terlihat bahwa para pihak sangat menghormati fungsi masing-masing.

Belum jelas sampai sekarang kenapa Belanda memilih berhubungan dengan para pemimpin yang ditawan di Bangka ketimbang langsung dengan Panglima Besar Angkatan Perang atau tokoh PDRI dalam rangka mencari pemecahan penyelesaian Agresi Belanda II pada awal April 1949. Logikanya Belanda tentu punya alasan-alasan yang lebih strategis. Kecuali nama besar Sukarno-Hatta yang mampu memberikan jaminan internasional, sekurangnya dapat dianalisis bahwa Belanda mempunyai dua tujuan terselubung Pertama, ingin mengecilkkan posisi dan peranan Angkatan Perang RI serta tokoh-tokoh PDRI di mata dunia. Dengan berhubungan dengan "Tracee Bangka" yang relatif kurang informasi tentang kemampuan Angkatan Perang RI yang makin hari makin baik posisinya di berbagai front, Belanda merasa akan mampu mengarahkan jalannya perundingan ke tempat yang diinginkan mereka. Tentu saja, jika keinginan itu ada, tidak gampang untuk melaksanakannya, karena ternyata mereka berhadapan dengan juru runding Republik yang cukup ulung.

Kedua, dengan memilih berhubungan dengan "Tracee Bangka", Belanda sekaligus meninggalkan bom waktu bagi Republik. Karena hasil perundingan akan dipersoalkan oleh Angkatan Perang dan PDRI. Jika kita lihat perkembangan pada masa sesudah Roem-Royen, khususnya tanggapan Panglima Besar Soedirman dan PDRI terhadap Pernyataan Roem-Royen dan kembali ke Yogya, maka dugaan ini mungkin saja ada benarnya.

Terlepas dari dugaan ini, khususnya yang berhubungan dengan reaksi PDRI dan Panglima Besar terhadap Perundingan Roem-Royen dan Kembali ke Yogya, persoalan pokok sebetulnya adalah antara cara berpikir pragmatis dan legalistis. Berpegang pada mandat Sukarno-Hatta tanggal 19 Desember 1948, Pemerintahan yang sah adalah PDRI. Namun dari segi praktis mungkin Belanda lebih gampang berhubungan dengan Sukarno-Hatta di banding dengan tokoh PDRI yang mobil. Di sinilah kebesaran jiwa tokoh PDRI dan Panglima/komandan tentara dapat kita simak. Demi kepentingan negara dan bangsa, mereka melepaskan cara berpikir legalistis, dan menerima perumusan yang ditawarkan pemimpinnya. Dari sinilah sejarah mampu meneropong kesediaan Sjafruddin dan kawan-kawan kembali ke Yogya yang kemudian juga diikuti oleh kedatangan Panglima Besar Soedirman. Dari sudut kelampauan, peristiwa sejarah itu telah berlalu. Namun sejarah mampu memberikan makna bahwa perjuangan kemer-

dekaan bukanlah persoalan segelintir orang tetapi adalah nyawa seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kepentingan bersama lebih didahulukan adalah pelajaran sejarah yang dapat kita petik dari sebuah episode pendek dalam perang kemerdekaan kita.

Jakarta, 25 September 1989.

CATATAN BELAKANG

1. Marjono Danubroto, "kejar-kejaran dengan maut", Titian, 1, 1989, hal 29.
2. Wawancara dengan Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta 29 Mei 1979.
3. Wawancara dengan Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta 29 Mei 1979.
4. Moh. Rasjid, Di Sekitar PDRI, hal 12.
5. Isi Lengkap mandat bisa dilihat pada PDRI Khasanah Kearsipan.
6. Rasjid 70 tahun, hal 82.
7. Lihat PDRI dalam khasanah Kearsipan.
8. Ibid
9. Ibid
10. "Intruksi Pemimpin Pertahanan Rakjat" dalam PDRI dalam Khasanah Kearsipan.
11. Lihat Radiogram Panglima Besar, dalam PDRI dalam Khasanah Kearsipan.

DAFTAR BACAAN

B u k u

- Abdullah, Husnial Husin.* Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka dan Belitung. Jakarta : Karya UNI press, 1983.
- Anwar, Rosihan, H.* Kisah-kisah Zaman Revolusi. Jakarta : Aries Lima, 1977.
- Ibrahim, Muhammad. Mr. Teoekoe Moehammad Hasan,* Karya dan Pengabdianya. Jakarta : IDSN, 1983.
- Kamal, H et al.* Rasjid -70 Tahun. Jakarta : Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid, 1981.
- Nasution, AH.* Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung : Bulan Bintang, 1982.
- PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam khasanah kearsipan. Jakarta : Arsip Nasional RI, 1989.
- Rasid, St. Moh, Mr.* Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Jakarta : Bulan Bintang, 1982.
- , et al. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945—1950. Jakarta : BPSIM, 1978.
- Rosidi, Ajib.* 75 Tahun Sjafruddin Prawiranegara, Dalam Pandangan Tokoh-tokoh. Jakarta : Panitia Buku 75 Sjafruddin Prawiranegara, 1986.
- Sardjono, V, dan GL Marsadi.* Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia Jakarta: Tintamas, 1982.
- Simatupang, TB.* Laporan dari Banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan. Jakarta : Sinar Harapan, 1980.
- Sofyan, AF dan Saharuoedin.* Cuplikan Tentang Perkembangan RRI Bukittinggi Periode 1946—1949 dan Risalah Singkat Partisipasi Pemancar YBJ-6 Pada Masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948 — 1949. Bukittinggi : tp, 1973.
- Tugiyono, KS dan Eni Sukaeni.* Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Biografi Para Pejuang Bangsa.
- Yogya Benteng Proklamasi. Jakarta : Badan Musyawarah Museum Daerah Istimewa Yogya. Jakarta, 1984.
- Manuskrip, Artikel, Koran dan Majalah
- Amura, H.* "Minggu Hitam 19 Desember 1948, Yogyakarta diduduki Belanda, PDRI berdiri di Sumatra". Pelita, 20 Desember 1974.
- Bustamam,* "Beberapa catatan dari Medan Perang Kemerdekaan Ke II 1948 — 1949. Manuskrip.
- Danubroto, Mardjono,* "Kejar-kejaran dengan maut. Titian, 1, 1989.

Pendahuluan

Dalam agresi militernya yang kedua terhadap Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil merebut Yogyakarta dan sekaligus menangkap sejumlah pemimpin inti Republik, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Perkembangan ini telah melahirkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, Sumatera Barat. Kehadiran PDRI dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini cukup terasa di Aceh, yaitu satu-satunya daerah milik Republik yang benar-benar bebas dari kekuasaan Belanda.

Sebagai satu-satunya wilayah Republik yang bebas dari kekuasaan Belanda itu, maka Aceh tentu saja mempunyai peranan tersendiri dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peranan tersebut dilatarbelakangi oleh kesetiaan rakyat Aceh yang luar biasa terhadap Republik, dalam keadaan yang bagaimanapun. Kesetiaan itu juga tergambar dalam dukungan yang diberikan oleh rakyat Aceh terhadap PDRI. Jadi, dalam pandangan rakyat Aceh, PDRI merupakan suatu pemerintahan perjuangan yang mewakili Republik.

Dengan latarbelakang yang demikian, makalah ini bermaksud untuk melukiskan bagaimana perkembangan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Aceh pada masa PDRI itu. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan sendirinya meliputi peranan yang dilakukan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk memungkinkan berlangsungnya peranan tersebut. Atau dengan perkataan lain, makalah ini berbicara tentang apa yang dilakukan PDRI Daerah Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam hubungan ini, baik peranan yang dilakukan maupun langkah-langkah yang ditempuhnya, tidaklah terlepas dari suasana yang ada di Aceh pada waktu itu. Dengan demikian, sebelum menggambarkan apa yang dilakukan PDRI di Aceh, makalah ini terlebih dahulu akan memaparkan perkembangan yang ada di daerah tersebut pada masa sebelum PDRI. Uraian yang demikian, menurut hemat saya, akan memungkinkan kita untuk dapat memahami mengapa gambaran Aceh pada masa PDRI adalah sedemikian rupa.

Masa awal perjuangan

Dalam menggambarkan secara singkat keadaan Aceh pada masa awal revolusi, perhatian kita terpusat sekurang-kurangnya pada empat tonggak sejarah yang penting. Pertama, masa awal itu ditandai oleh suatu proses penyingkiran kaum

*) Staf Pengajar FISIPOL, UNIVERSITAS INDONESIA

bangsawan setempat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ulebalang*, dari panggung kekuasaan dan politik pada umumnya. Kedua, sejak itu, dan di sepanjang masa revolusi, panggung politik daerah tersebut didominasi oleh para ulama dan pendukung PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Ketiga, di bawah kepemimpinan PUSA itulah Aceh menjelma menjadi satu-satunya daerah Republik yang bebas dari kekuasaan dan pengaruh Belanda. Keempat, sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain, pada masa revolusi itu Aceh juga merupakan suatu daerah yang majemuk dalam arti politis.¹⁾

Peristiwa yang menjadi tonggak pertama itu berlangsung dalam waktu yang relatif sangat cepat dan dalam bentuk konflik fisik antara kekuatan-kekuatan ulama dengan *ulebalang*. Benih-benih konflik diantara kedua kekuatan ini sebenarnya sudah ada sejak Belanda berhasil menghancurkan Kesultanan Aceh dan kelak dipersubur lagi oleh sikap pemerintah pendudukan Jepang. Dalam hubungan ini, bilamana Belanda memperteguh dan melindungi kedudukan kaum *ulebalang* dalam pemerintahan daerah, maka Jepang kemudian memberi angin kepada kaum ulama, yang memang telah mempermudah masuknya Jepang ke Aceh dengan memelopori pemberontakan terhadap Belanda pada akhir Februari 1942.

Pertentangan antara ulama dan *ulebalang* meruncing dengan cepat begitu kedua belah pihak mengetahui bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu dan bahwa Belanda akan kembali ke sana. Kemungkinan kembalinya Belanda justru sangat dikawatirkan oleh kaum ulama PUSA, yang memang telah "berdosa" kepada Belanda itu, sehingga berita-berita tentang proklamasi kemerdekaan mereka sambut dengan gembira. Mereka tampil sebagai pendukung Republik, dan menuduh *ulebalang* sebagai golongan yang anti-Republik yang menghendaki tegaknya kembali kekuasaan Belanda. Para pemimpin PUSA berhasil meyakinkan rakyat dan pemerintah daerah, sehingga tertumpaslah kaum *ulebalang* dalam suatu pertarungan fisik yang berlangsung dari bulan November 1945 sampai Januari 1946.

Tonggak kedua, yaitu dominasi PUSA dalam gelanggang politik Aceh, ditandai oleh arus pembersihan yang dilancarkan oleh suatu kekuatan radikal pemuda PUSA dua bulan kemudian. Pembersihan yang dilakukan oleh TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) ini bergerak secara tak terbendung dari kabupaten Aceh Timur sampai ke Kutaraja (kini: Banda Aceh). Setelah berhasil mengambil alih komando militer di ibukota Aceh itu, TPR selanjutnya menyusuri pantai barat sehingga menguasai pula kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan. Di setiap tempat yang dilaluinya, gerakan ini mengenyahkan sisa-sisa kaum *ulebalang* yang anti-PUSA dari jajaran-jajaran sipil dan militer setempat, dan menggantikannya dengan unsur-unsur pro-PUSA. Sejak itu semua kekuatan Republik yang ada di Aceh, baik sipil maupun militer, berada

1) Untuk pembahasan yang mendalam tentang perkembangan ini, lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *The Course of the National Revolution in Aceh, 1945 - 1949* (tesis MA, Monash University, 1974).

di bawah dominasi PUSA. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan ini diakui sah oleh Pemerintah Pusat; pengakuan mana tersimbolkan dalam kenyataan bahwa selama masa revolusi, Pemerintah tidak pernah campur tangan dalam urusan daerah tersebut.

Munculnya rezim PUSA di Aceh itu membawa kita pada tonggak ketiga. Sebagaimana telah disebutkan diatas, di sepanjang perjalanan revolusi Aceh telah menjadi satu-satunya wilayah Republik yang tidak dapat dimasuki atau dikuasai kembali oleh Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan ini telah dimungkinkan oleh perjuangan tangguh rakyat, yang digalang oleh kepemimpinan PUSA, didalam menentang setiap usaha Belanda untuk kembali berkuasa di daerah itu. Dalam posisi yang demikian, para pejuang Aceh tidak hanya mempertahankan daerah mereka sendiri belaka, melainkan juga ikut berperang melawan Belanda di front Sumatera Timur. Selain memberikan sumbangan materi dan non-materi kepada Pemerintah Pusat dan daerah-daerah Republik lainnya, Aceh juga telah menjadi pintu bagi hubungan dengan dunia internasional, terutama dengan Malaya dan Singapura. Oleh sebab itu tidak mengherankan bilamana Presiden Soekarno ketika itu menjuluki Aceh sebagai "daerah modal".

Dalam tonggak keempat, Aceh benar-benar terlihat bersifat pluralis dalam arti politik. Pada masa revolusi di Aceh terdapat berbagai macam kelompok atau kekuatan politik, yang sering bertentangan satu sama lainnya untuk merebut pengaruh atau dominasi politik. Di kubu ulama sendiri, setelah tersingkirnya kaum ulebalang, orientasi PUSA terpecah antara golongan ulama, yang berorientasi pada Masyumi, dan golongan zuama (pemimpin-pemimpin yang tidak berstatus ulama) yang berorientasi pada PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Sementara itu para ulama reformis yang tergabung dalam PUSA masih pula berbeda pandangan, baik dari sudut keagamaan maupun politik, dengan para ulama tradisional yang berada di luar organisasi tersebut. Kelompok yang terakhir ini tentu saja didukung oleh unsur-unsur anti-PUSA lainnya yang ada dalam masyarakat Aceh ketika itu.

Garis-garis pluralis itu belumlah lengkap bilamana ia tidak diwarnai oleh kehadiran kelompok-kelompok yang beraliran kiri yang mengungsi dari Sumatera Timur ke Aceh pada masa agresi Belanda yang pertama, tahun 1947. Kelompok yang bergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat) ini dengan sendirinya pun menentang PUSA, selain menentang kekuatan-kekuatan anti-kiri lainnya. Di samping itu, sebagaimana pula halnya dengan di daerah-daerah lain, di Aceh pun para penjuang kemerdekaan terdiri atas dua kelompok besar, yakni tentara reguler dan kelasykaran. Kenyataan yang terakhir ini juga membawa dampak-dampak tertentu terhadap keadaan di daerah itu pada masa revolusi.

Kendati demikian, di sepanjang masa revolusi terbukti bahwa Aceh benar-benar merupakan suatu kekuatan yang tangguh. Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Teungku, Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama dan pemimpin PUSA, tampaknya terlalu kuat untuk digoyahkan oleh polarisasi-polarisasi politik yang ada dalam masyarakat. Pemerintah daerah berhasil

mengerahkan kekuatan-kekuatan politik itu untuk memprioritaskan perjuangan menentang Belanda, meskipun arena politik tidak pernah sepi dari bentrokan-bentrokan di antara sesama mereka. Dalam keadaan yang demikianlah Aceh dapat menghindari agresi militer pertama yang dilancarkan Belanda pada tahun 1947.

Menghadapi agresi fisik

Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua ketika Dewan Perwakilan Sumatera Utara baru saja menyelesaikan sidangnya di ibukota Aceh Selatan, Tapaktuan. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam sidang Dewan tersebut adalah ditetapkannya Kutaraja menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara menggantikan ibukota sementara yang selama ini berkedudukan di Sibolga, Tapanuli Tengah. Disepakatinya Kutaraja menjadi ibukota provinsi ialah karena Medan masih dikuasai Belanda. Posisi Aceh dalam pemerintahan dan pertahanan semakin penting ketika kemudian komando pertahanan Sumatera pun dipindahkan ke Kutaraja. Yang memimpin markas komando angkatan darat di Aceh ketika itu adalah Kolonel Hidayat, sedangkan pimpinan angkatan laut dan angkatan udara disana pada waktu itu masing-masingnya adalah Kolonel Subiakto dan Kolonel Sujono¹⁾.

Dalam agresi militer ini, Belanda juga menyerang Aceh baik dari udara, laut, dan darat, sementara blokade laut yang memang telah berlangsung sejak lama itu semakin diperketat. Dari udara dan laut Belanda menembaki pemusatan-pemusatan militer Republik di Langsa, Lhokseumawe, dan Banda Aceh. Umpamanya saja, pertahanan pantai dan udara yang ada di Lhok Nga, dekat Kutaraja, telah diserang dari laut dan udara tidak kurang dari 40 kali selama masa agresi kedua. Perlawanan yang diberikan oleh para pejuang telah menyebabkan tiga kapal perang Belanda (masing-masing Jan van Galen, Jan van Bukker, dan Banda) mengalami kerusakan, dan dua pesawat terbangnya ter-tembak. Selama masa itu pula pasukan kita di Lhok Nga mengalami beberapa korban jiwa, selain amunisi dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 10 ton.²⁾

Hanya dari udara dan lautlah Belanda dapat memperlumkan kepada rakyat Aceh tentang adanya agresi tersebut, dan itu pun tak lebih dari sekadar membombardir dan menembaki pemusatan-pemusatan kekuatan Republik di sana. Di darat, pasukan Belanda benar-benar berada di luar perbatasan. Dan justru di daerah-daerah perbatasan itu terjadi pertempuran sengit di antara kedua kekuatan. Hal itu karena di satu pihak, Belanda berusaha keras untuk menerobos garis pertahanan Aceh untuk dapat memasuki daerah itu, di lain pihak para pejuang yang tergabung dalam pasukan Divisi X yang berasal dari Aceh tidak hanya berusaha mempertahankan Aceh dari serbuan Belanda, melainkan juga

- 1) Insider (pseud.), *Atjen Sepintas Dalu* (Jakarta: Fa. Archapada, 1950), h. 40 dan 47.
- 2) Indonesia, *Dua Windhu Kodam—I/Iskandar Muda* (Banda Aceh: Sejarah Militer Kodam-I/Iskandar Muda, 1972), h. 151; sumber ini selanjutnya dikutip sebagai *Dua Windhu*.

bertekad untuk merebut kota Medan dari tangan Belanda. Betapa kerasnya usaha tersebut cukup tersimbolkan dalam satu front legendaris ketika itu bagi rakyat Aceh khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya: Medan Area.

Medan Area merupakan suatu medan pertempuran yang sangat penting baik bagi pihak Belanda maupun Republik. Bagi Belanda, front Medan Area bukan hanya merupakan sekedar suatu medan pertempuran saja, melainkan juga menyangkut masalah reputasinya di tingkat internasional. Adanya Aceh sebagai suatu wilayah Republik yang betul-betul merdeka sudah cukup "men-coreng kening" Belanda di mata internasional, konon pula bila Medan jatuh ke tangan Republik. Sebaliknya, bagi para pejuang dari Aceh mempertahankan front Medan Area tidak hanya merupakan suatu reputasi semata-mata, tetapi juga suatu faktor yang akan menentukan mampu tidaknya Belanda mempertahankan kekuasaannya di tanah air.

Ketatnya pertempuran di Medan Area di satu pihak memang mengikat Divisi X di front tersebut, akan tetapi di lain pihak tidak memungkinkan Belanda untuk memasuki Aceh melalui Sumatera Timur. Terlepas dari ada tidaknya keinginan Belanda untuk menguasai Aceh pada masa agresi kedua itu, sebagaimana yang mungkin dipersoalkan sebahagian orang, tetapi memang ternyata bahwa Belanda telah berusaha menerobos Aceh melalui Keresidenan Tapanuli pada bulan-bulan Maret dan April 1949. Usaha-usaha ini berhasil digagalkan oleh Resimen III/Divisi X, dibawah pimpinan Mayor T. Manyak, yang memukul mundur pasukan Belanda dalam pertempuran-pertempuran sengit di Tiga Lingga-Sidikalang dan Barus.¹⁾ Dalam bulan Mei dan Juni 1949 Angkatan Laut Belanda masih terus membombardir pantai Barat Aceh, dengan sasaran antara lain Meulaboh (ibukota Aceh Barat) dan Tapak Tuan (ibukota Aceh Selatan),²⁾ mungkin untuk memecah konsentrasi Aceh di front Sumatera Timur.

Dengan demikian, untuk menghadapi Belanda dalam agresinya yang kedua ini, Aceh tidak saja berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat barisan perjuangan di luar perbatasannya. Menjelang berlangsungnya agresi tersebut, Panglima Divisi X, Kolonel Husein Jusuf, telah mempersiapkan pasukannya yang berada di Sumatera Timur. Dalam hubungan ini, selain menyempurnakan taktik gerilya berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari agresi pertama Belanda, Divisi X mengirimkan lebih banyak lagi pasukan bersenjata dari Aceh ke daerah Langkat dan Tanah Karo. Sedangkan untuk mempertahankan Aceh, selain pasukan infantri telah pula diintensifkan pasukan-pasukan artileri untuk pertahanan pantai dan udara.³⁾

1) Ibid., h. 151.

2) Mr S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari Masa Lempau* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 101.

3) *Dua Windhu*, h. 150.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan para pejuang Aceh cukup dapat mengimbangi kekuatan Belanda di front Sumatera Timur pada khususnya, meskipun tidak berhasil merebut Medan, dan mencegah kembalinya Belanda ke Aceh pada umumnya. Faktor pertama adalah dukungan besar yang diberikan oleh para ulama terhadap Republik. Khusus menyambut agresi kedua pada tanggal 23 Desember 1948 para ulama Aceh telah mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa perjuangan menentang agresi Belanda itu merupakan perjuangan *fi sabilillah*, sehingga wajib bagi setiap orang untuk memberikan harta dan jiwanya.¹⁾ Pernyataan ini merupakan pengulangan dukungan yang diberikan oleh para ulama Aceh kepada Republik sebelumnya. Dalam hubungan ini, para ulama Aceh telah menyatakan dukungan mereka secara terbuka kepada Republik melalui sebuah maklumat yang dikeluarkan di Kutaraja pada tanggal 15 Oktober 1945.²⁾ Kesemua ini memperlihatkan bahwa di kalangan ulama tiada perbedaan pandangan tentang dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Faktor kedua adalah kenyataan bahwa pemimpin-pemimpin Aceh memang sudah memperkirakan kalau-kalau Sumatera Timur akan menjadi suatu medan pertempuran yang penting di Sumatera Utara. Oleh karena itu, pada akhir Desember 1946, jadi sebelum Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama terhadap Republik, komando perjuangan di Aceh telah membentuk sebuah Resimen Istimewa Medan Area (RIMA). Resimen ini mempunyai fungsi yang khusus, yaitu mengkonsolidasikan perjuangan menentang Belanda di Sumatera Timur.

Faktor yang ketiga, atau terpenting dalam pandangan saya, adalah bahwa Aceh telah berhasil mempersatukan organisasi militer disana beberapa bulan sebelum Belanda melancarkan agresi keduanya. Sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah telah berhasil menyusun kembali organisasi militer di daerah itu pada bulan Juni 1948, dengan menyeleksi dan melebur lasykar-lasykar rakyat yang bermutu kedalam pasukan reguler yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semula adalah sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan ini di Aceh, sebab lasykar rakyat, seperti Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dipimpin oleh Ali Hasjmy, justru menolak untuk digabungkan kedalam barisan reguler. Dengan dalih bahwa mereka lebih terlatih dan mempunyai persenjataan yang lebih lengkap daripada TRI (Tentara Rakyat Indonesia), mereka menuntut agar merekalah yang dijadikan TNI, sedangkan TRI hanya boleh bergabung dalam TNI setelah melalui proses seleksi. Akan tetapi, pada akhirnya, Gubernur Militer Daud Beureueh berhasil menekan lasykar-lasykar tersebut untuk bergabung kedalam

1) Lihat Amin, *op.cit.*, h. 112.

2) Lihat, "Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh", bertanggal Kutaraja, 15 Oktober 1945; maklumat itu ditandatangani oleh dua orang ulama tradisional (Hasan Krueng Kalee dan Jafar Sidik) dan dua ulama reformis (Hasballah Indrapuri dan Daud Beureueh).

TNI. Sejak itu, organisasi perjuangan menentang kekuatan militer Belanda menjadi lebih terorganisir lagi.

Perang non--fisik

Kenyataan bahwa Aceh masih tetap berada di luar wilayah kekuasaannya sangatlah tidak menyenangkan bagi Belanda. Buat Belanda bahkan dapat dikatakan bahwa Aceh telah menjadi duri dalam daging. Di satu pihak, sekalipun ada serangan-serangan dari angkatan laut dan udara Belanda, Aceh tetap merupakan daerah yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Seperti yang telah disinggung diatas, sebagai suatu daerah yang merdeka, Aceh tidak hanya memusatkan perhatian pada usaha untuk mempertahankan diri sendiri belaka; jauh dari itu, Aceh malah mengirimkan pasukannya untuk menghadapi Belanda di luar perbatasannya. Tentu saja hal ini sangat mengganggu strategi militer Belanda yang ingin cepat-cepat dapat menguasai front Sumatera Timur.

Akan tetapi, lebih dari itu, adanya Aceh yang bebas dari kekuasaan Belanda itu telah menjadi suatu simbol bagi eksistensi Republik. Dengan demikian, kehadiran Republik di persada ini tidak hanya ditandai oleh masih adanya perlawanan-perlawanan terhadap kekuatan militer Belanda saja, melainkan juga dibuktikan oleh fakta adanya suatu wilayah dimana Republik itu benar-benar berdaulat. Posisi Aceh yang demikian, setidak-tidaknya telah memungkinkan aparat pemerintah sipil di Sumatera untuk mempertahankan kewibawaan.¹⁾

Namun demikian, di lain pihak, Belanda nyaris tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Aceh, selain daripada sekedar mengganggu dengan serangan-serangan yang terbatas sifatnya, dan mungkin pula sambil menunggu tumbuhnya sikap yang menentang Republik disana. Kenyataan itulah yang tidak dapat diterima oleh Belanda, terutama jika dikaitkan dengan superioritas kekuatan militernya di mata internasional, terutama karena Belanda saat itu sedang berusaha meyakinkan PBB bahwa Republik bukan lagi merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan.²⁾

Oleh karena itu Belanda mengupayakan untuk menundukkan Republik dengan segala macam cara. Tidak berhasilnya agresi militernya mencapai target yang diharapkan, menyebabkan Belanda menerapkan kembali taktik *divide et impera* yang memang telah menjadi sesuatu yang klasik dalam sejarah Indonesia. Kali ini taktik itu hendak diterapkan dengan gagasan membentuk negara-negara federal di Sumatera. Begitulah, negara-negara federal dukungan Belanda itu akan dicapai melalui apa yang dinamakan "Muktamar Sumatera", yang direncanakan oleh Dr Tengku Mansur, Wali Negara Sumatera Timur. Aceh dengan sendirinya menjadi salah satu sasaran Belanda dalam hal ini.

1) Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Anthony J.S. Reid dalam bukunya, *Indonesian National Revolution 1945-50* (Hawthorn, Victoria: Longman Australia, 1974), h. 154.

2) *Ibid.*, h. 158.

Dalam rangka itulah, pada pertengahan Maret 1949 sebuah pesawat Belanda menjatuhkan sepucuk surat di Kutaraja. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Militer Daud Beureueh itu mengundangnya untuk menghadiri "Muktamar Sumatera" yang menurut rencana akan diadakan di Medan pada tanggal 28 Maret 1949. Selain surat itu, Belanda juga menyebarkan ribuan selebaran di udara Aceh; melalui pamflet tersebut Belanda menghasut rakyat Aceh agar mendesak pemimpin mereka untuk menghadiri muktamar itu. Di samping Aceh, Dr Mansur juga mengundang pemimpin-pemimpin dari Tapanuli, Nias, Minangkabau, Lampung, Inderagiri, Bengkalis, Bangka, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Akan tetapi, sebagaimana yang mungkin telah dapat diperkirakan, Daud Beureueh dengan tegas menolak ajakan tersebut dan menyatakan tetap setia kepada Republik. Pernyataan Daud Beureueh ini diumumkan dalam surat kabar *Semangat Merdeka*, yang terbit di Kutaraja, pada tanggal 23 Maret 1949.¹⁾

Sudahlah jelas bahwa adanya Aceh sebagai simbol eksistensi Republik tidak dikehendaki oleh Belanda. Oleh karena itu, mungkin untuk menghancurkan semangat perlawanan para pejuang di front Medan Area, pada awal Januari 1949 Belanda menyiarkan berita bahwa Aceh telah dapat dikuasainya. Dalam hubungan ini Radio Medan memberitakan bahwa kota-kota seperti Kutaraja, Langsa, dan Sigli telah jatuh ke tangan Belanda.²⁾ Berita yang kebetulan juga ditangkap di Aceh, segera dibantah oleh radio para pejuang di sana.

Sebagaimana halnya dengan para pejuang di daerah-daerah lain, Aceh juga memiliki pesawat pemancar radio yang cukup kuat. Melalui pemancar yang dioperasionalkan oleh Divisi X ini Aceh dapat berkomunikasi dengan pusat PDRI di Suliki (Sumatera Barat), di samping dengan Kepala Staf Angkatan Perang yang berkedudukan di Jawa, Jenderal Mayor T.B. Simatupang, dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri. Bahkan oleh karena kecilnya kekuatan pemancar PDRI di Suliki itu, maka radio Divisi X itu telah berfungsi sebagai perantara didalam menyampaikan pesan-pesan dari Sumatera Barat kepada KSAP serta pemimpin perwakilan Republik di India, Dr. Sudarsono dan di PBB, L.N. Palar. Selain itu, radio itu juga setiap hari, mulai jam 17.00 hingga jam 06.00 pagi, menyiarkan berita-berita perkembangan perjuangan di Indonesia ke seluruh dunia melalui gelombang 15, 19, dan 61 meter, dengan call-sign "Radio Rimba Raya" dan "Radio Tentara Divisi X". Untuk audiensi yang luas itu warta berita disiarkan dalam bahasa Indonesia, Inggeris, Arab, Urdhu, dan Mandarin.³⁾

1) *Dua Windhu*, h. 152-154.

2) T. Ibrahim Alfian et al., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, (Banda Aceh: Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982), h. 96.

3) Husein Jusuf, "Detik Proklamasi di Atjeh", dalam Indonesia, *Modal Revolusi 45* (Kutaraja: Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960), h. 49, dan *Dua Windhu*, *op. cit.*, h. 156-157.

Pentingnya peranan radio yang dimiliki oleh para pejuang di Aceh itu terbukti dari adanya usaha Belanda yang berkali-kali untuk menghancurkan pemancar tersebut, sebagaimana yang juga dialami oleh pejuang-pejuang di daerah lainnya. Oleh sebab itu berkali-kali pula pemancar tersebut harus dipindahkan. Setelah berpindah lokasi beberapa kali, pada akhirnya selama masa PDRI pemancar itu ditempatkan di Rimba Raya, sebuah desa pegunungan lebih kurang 60 kilometer di selatan Bireuen, sehingga tidak terlalu jauh dari konsentrasi pasukan Divisi X di kota itu. Pemancar itu adalah salah satu barang yang diselundupkan dari Singapura oleh Mayor (AL) John Lie ke Aceh, dan barangkali merupakan salah satu pemancar terkuat yang ada dalam tangan Republik ketika itu. Tidak saya ketahui dengan pasti bagaimana perbandingannya dengan radio yang dimiliki para pejuang di Jawa, akan tetapi pemancar itu jelas lebih besar daripada radio yang dimiliki oleh PDRI di Suliki.¹⁾

Membiayai Republik

Persembahan dua buah pesawat terbang dari rakyat Aceh kepada Republik, sebagaimana yang diminta oleh Presiden Soekarno ketika berkunjung ke daerah itu pada bulan Juni 1948, terjadi pada masa sebelum PDRI. Persembahan itu kini telah dianggap sebagai monumen sumbangan dan kesetiaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pada masa revolusi. Monumen itu akan tampak lebih berkesan lagi bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa permintaan yang sama telah pula diajukan oleh pemerintah kepada daerah-daerah lain, akan tetapi hanya di Aceh saja permintaan itu yang terkabulkan. Walaupun demikian, sesungguhnya sumbangan itu tidaklah seberapa nilainya, karena masing-masing pesawat terbang itu "hanya" berharga 120.000 dan 140.000 dollar Malaya.²⁾

Bantuan keuangan yang diberikan Aceh kepada Republik pada masa PDRI adalah jauh lebih besar lagi daripada yang dikesankan oleh kedua pesawat terbang itu. Umpamanya, dalam tahun 1949 saja, dalam waktu lebih kurang tiga bulan setengah, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan uang sejumlah 500.000 dollar Singapura untuk keperluan pemerintah di Yogyakarta.

1) Data lebih jauh tentang asal usul dan keadaan pemancar di Aceh itu, lihat *Dua Windhu*, h. 156. Pemancar ini diberi call-sign "Radio Rimba Raya" karena memang dipancarkan dari desa Rimba Raya: call-sign ini kemudian diubah menjadi "Sumatera Radio Republik Indonesia". Kekuatan radio PDRI di Suliki adalah 40 watt untuk siaran dan 160 watt untuk telegrafi; lihat, Ani Marni Malay S.H., "Pemerintah Darurat Republik Indonesia Benang Merah Proklamasi (Penyelamat Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia)", (1989), h. 22.

2) Menurut Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, yang menjadi ketua panitia pembelian pesawat terbang, pada bulan Agustus 1948 ia telah menerima telegram dari pimpinan angkatan udara komando Sumatera yang menyatakan bahwa uang untuk membeli kedua kapal terbang itu telah diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara di Yogyakarta, Komodor Suryadharma; lihat, Alfian, *op. cit.*, h. 101.

Dari jumlah itu, 100.000 dollar diberikan kepada perwakilan di luar negeri (Mr. Maramis), 50.000 dollar diberikan kepada perwakilan di Singapura, 250.000 dollar untuk Angkatan Perang, dan 100.000 dollar untuk keperluan mengembalikan Pemerintahan ke Yogyakarta.¹⁾

Kemampuan Aceh untuk ikut membiayai kegiatan Republik tergantung pada kegiatan dagang yang dilakukan oleh para saudagar daerah itu dengan pedagang-pedagang di Singapura dan Penang, dengan menembusi blokade ketat Belanda di Selat Malaka. Mereka mengirimkan produk-produk perkebunan dan pertambangan ke Singapura dan Penang, dan pada waktu kembali dari sana mereka memasukkan aneka macam barang, termasuk senjata, ke Aceh. Tampaknya kegiatan ini telah membuat perekonomian Aceh lebih stabil pada masa itu.

Keadaan ekonomi yang relatif stabil itu misalnya tercermin dari kemantapan nilai uang kertas yang dikeluarkan di Aceh pada waktu itu. Dalam hubungan ini, kesulitan komunikasi dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, dan dengan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera, telah menyebabkan Aceh mengeluarkan uang kertas Daerah Keresidenan Aceh. Kemudian ketika Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada akhir 1948, maka dikeluarkanlah Oripsu (Uang Republik Indonesia Sumatera Utara) di Kutaraja. Karena tidak dapat dipertahankannya keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan produksi, maka stabilitas Oripsu tidak dapat dipertahankan kemudian. Oleh karena itu pada tanggal 16 Mei 1949, uang sejumlah 500 juta Oripsu ditarik dari peredaran.²⁾

Konsolidasi Politik dan Pemerintahan

Sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh PDRI pada tanggal 16 Mei 1949, maka sistem pemerintahan di Aceh mengalami perubahan. Guna memperkuat pertahanan, melalui Ketetapan no. 21/Pem./PDRI, PDRI mengadakan perubahan sistem pemerintahan di seluruh Indonesia dengan menyatukan kekuasaan sipil dan militer dalam setiap daerah militer istimewa dalam tangan Gubernur Militer. Provinsi Sumatera Utara dijadikan dua daerah militer, yaitu Aceh, Langkat, dan Tanah Karo berada dalam satu daerah militer dengan Gubernur Militernya Jendral Mayor (Tituler) Teungku Muhammad Daud Beureueh, sedangkan daerah militer Tapanuli dan Sumatera Timur berada di bawah pimpinan Gubernur Militer Dr Ferdinand Lumbantobing.³⁾

Dengan ketetapan itu, maka Provinsi Sumatera Utara yang meliputi keresidenan-keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli, dihapuskan. Dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 17 Mei 1949, nomor 23/Pem./PDRI, ketiga bekas Gubernur di Sumatera, yaitu Mr S.M. Amin

1) Amin, *op. cit.*, h. 103.

2) *Ibid.*, h. 107.

3) *Ibid.*, h. 69.

di Sumatera Utara, Mr M. Nasrun di Sumatera Tengah, dan Dr M. Isa di Sumatera Selatan, dialihkan fungsi menjadi Komisaris Pemerintah untuk masing-masing daerah tersebut.¹⁾

Sesuai dengan ketentuan PDRI, untuk menyelenggarakan pemerintahan sipil, Gubernur Militer dibantu oleh sebuah Dewan Pertahanan Daerah. Untuk menjalankan pemerintahan sipil itu, Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Utara menetapkan Residen Teuku Daudsjah sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah tersebut, dengan anggota-anggota yang terdiri dari M. Nur el-Ibrahimi, M. Junan Nasution, Jahja Siregar, dan Amelz. Dalam bidang militer, ia dibantu oleh komandan sub-territorial yang bertanggungjawab sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian jelaslah bahwa segala kekuasaan, baik sipil maupun militer, berada di tangan Gubernur Militer.²⁾

Akan tetapi, dalam keadaan perang seperti itu tidaklah mungkin bagi Gubernur Militer untuk menjalankan tugasnya dengan baik di ketiga daerah kekuasaannya yang begitu luas. Oleh karena itu diangkatlah wakil-wakilnya di Langkat dan Tanah Karo. Untuk daerah Langkat, Kapten Nip Karim diangkat sebagai petugas di bidang kemiliteran, dan untuk menangani urusan pemerintahan sipil diangkat Tengku Maimun Habsjah. Di Tanah Karo, Mayor Djamin Ginting ditugaskan sebagai perwira yang bertanggungjawab dalam bidang kemiliteran, sedangkan Bupati Rakutta Sembiring diangkat menjadi petugas dalam bidang pemerintahan sipil disana.³⁾

Sejauh menyangkut Aceh, tampaknya tujuan pembentukan daerah-daerah militer istimewa oleh PDRI itu, yaitu untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, telah tercapai. Aceh tidak hanya dapat mempertahankan diri secara militer terhadap Belanda, melainkan dapat pula memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda di front Sumatera Timur. Di bidang pemerintahan, kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Gubernur Militer telah dapat menjinakkan kekuatan-kekuatan kelompok kiri, sehingga perhatian dapat dipusatkan pada perjuangan menentang Belanda.

Penutup

Secara sekilas kita telah melihat bahwa sebagaimana pada masa sebelumnya, pada masa PDRI pun Aceh masih bebas dari cengkeraman kekuatan militer Belanda. Situasi yang menguntungkan ini telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Republik, antara lain dengan menjadikan Aceh sebagai tumpuan harapan. Oleh karena itu, Aceh muncul sebagai basis perlawanan terhadap Belanda di Sumatera. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki daerah Aceh, baik dalam arti politik maupun ekonomi, telah memungkinkan rakyat Aceh untuk

1) *Ibid.*, h. 70.

2) *Ibid.*,

3) *Ibid.*, h. 70 - 71.

Sekurang-kurangnya sejak Juni 1948 pimpinan Angkatan Perang sudah mempunyai estimasi bahwa Belanda akan mengulangi lagi serangannya. Trauma pada waktu agresi pertama berupa kegagalan sistem pertahanan linier yang tidak didukung oleh persenjataan yang lengkap, mendorong pimpinan Angkatan Perang untuk menyusun konsep strategi perlawanan baru. Strategi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi waktu itu ialah *attrition strategy* (strategi menguras kekuatan lawan sampai mereka jemu berperang) sebagai lawan dari *annihilation strategy* (strategi penghancuran) yang dilakukan oleh Belanda. Konsep strategi itu dirumuskan dalam Rencana Perintah Siasat No. 1/Stop/-1948 (Juni 1948) dan secara definitif disahkan menjadi Perintah Siasat No. 1 (November 1948).

Pada dasarnya, perlawanan dilakukan secara semesta (totaliter) oleh rakyat dan tentara tanpa mengenal front. Organisasi perlawanan dan pertahanan dibentuk di daerah-daerah yang tersusun dalam *wehrkreise* (*Wehrkreise stelsel*)¹⁾. Taktik yang digunakan ialah gerilya.

Kemungkinan terulangnya serangan Belanda bukannya tidak dipertimbangkan oleh pimpinan pemerintahan dan politisi. Akan tetapi prinsip penyelesaian melalui perundingan masih mereka pegang teguh dan konsisten. Perundingan lanjutan Renville di Kaliurang dan jaminan KTN., tampaknya menjadi "gantungan" Pemerintah Hatta yang tetap percaya bahwa Belanda akan menghormati perundingan. Di pihak lain, pimpinan negara berulang kali menyatakan akan memimpin perang gerilya apabila Belanda menyerang.

Semacam konsensus tercapai dengan dikeluarkannya Instruksi Panglima Besar tanggal 9 November 1948 yang disetujui oleh kabinet tentang keharusan meninggalkan kota bagi para pejabat pemerintah. Akan tetapi apa yang terjadi di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 memperlihatkan bahwa konsensus itu tidak seluruhnya ditaati. Baik pimpinan Pemerintahan dan Angkatan Perang memberikan respon yang berbeda. Dalam sidang kabinet pagi hari itu sebagian pimpinan mengambil keputusan untuk tetap tinggal dalam kota, walaupun dengan resiko ditawan musuh. Sedangkan pimpinan Angkatan Perang meninggalkan kota untuk memimpin perang. Salah satu pertimbangan untuk tetap tinggal dalam kota ialah agar dapat berhubungan dengan KTN, dan dengan demikian perundingan politik dengan Belanda dapat dibuka kembali. Keputusan lain yang diambil dalam sidang kabinet ialah memberi mandat kepada Men-

*) Staf Pusat Sejarah ABRI

teri Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat. Mandat lainnya diberikan kepada Dr. Sudarsono di India untuk membentuk *exile government* apabila usaha Sjafruddin tidak berhasil.

Sebelum meninggalkan Istana Kepresidenan, atas saran Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Order Harian Presiden yang ditujukan untuk seluruh Angkatan Perang dan aparat pemerintah. Order harian yang menjadi dasar legal bagi kelanjutan perjuangan itu antara lain berbunyi, "Mungkin pemerintah di Yogya terkepung dan tidak dapat melakukan kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan pemerintahan di Sumatera. Apapun yang terjadi dengan orang-orang pemerintah di Yogyakarta, perjuangan diteruskan".²⁾

Sementara itu Panglima Besar Jenderal Soedirman mengeluarkan Perintah Kilat yang pada hakikatnya adalah instruksi pelaksanaan bagi Perintah Siasat No. 1. Dengan demikian mandat Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara melahirkan Pemerintah Darurat RI, sedangkan Perintah Kilat Panglima Besar melahirkan pemerintahan militer. Keduanya saling berkaitan dan saling membantu dalam perjuangan menghadapi Belanda selama agresi militer kedua.

2

Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta, beberapa orang menteri sedang berada di luar kota. Secara kebetulan, walaupun untuk keperluan yang berbeda-beda, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Menteri kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Pemuda Supeno, dan Menteri Kemakmuran/Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo, ada di Surakarta. Berempat di Balaikota Surakarta, tanggal 20 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri pula oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suharjo Harjowardoyo. Tanpa mengetahui adanya mandat Presiden kepada Syafruddin, tetapi sudah memperoleh informasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda, para menteri ini memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo diangkat sebagai ketua, sedangkan Susanto Tirtoprojo sebagai wakil ketua. Menurut rencana mereka akan mengadakan pertemuan dengan Sri Susuhunan dan Mangkunagara keesokan harinya. Akan tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan. Sore hari tanggal 20 Desember mereka terpaksa meninggalkan Surakarta sebab pasukan Belanda sudah mendekati kota itu. Keputusan ini mungkin didasarkan kepada hasil sidang Kabinet tanggal 16 Desember 1948 yang menetapkan bahwa karena Presiden akan ke India, dan wakil Presiden/PM Hatta sedang sakit dan akan cuti, maka selama kedua pemimpin negara itu berhalangan, pimpinan pemerintahan dijalankan oleh dr. Soekiman, Mr. Soesanto, dan Ir. Djoeanda. Setelah mengetahui ada mandat kepada Syafruddin dan setelah terbentuknya Pemerintah Darurat RI di Sumatera, mereka kemudian menyesuaikan diri.³⁾

Setelah meninggalkan Surakarta dan menempuh perjalanan yang sulit, rombongan "pemerintah darurat Surakarta" ini untuk sementara waktu berkemah di daerah Gunung Lawu. Sekitar Hari Natal 1948 diperoleh berita

tentang telah terbentuknya Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Untuk memudahkan hubungan dengan PDRI, rombongan yang telah bertambah dengan beberapa orang tokoh lain tetapi tanpa Susanto dan Supeno yang terpisah di Tawangmangu, pindah ke daerah Wonosari sebab di sini terdapat pemancar radio.

Sementara itu Kolonel Simatupang menyampaikan saran melalui radio kepada PDRI supaya di Jawa dibentuk satu "direktorium" yang anggota-anggotanya terdiri atas Jenderal Soedirman dan para menteri yang ada di daerah gerilya (Kasimo, Masykur, Susanto, Supeno dan Sukiman).⁴⁾ Akan tetapi tidak mendapat jawaban atas saran itu. Dalam laporan tanggal 2 Januari disebutkan bahwa pada tanggal tersebut sudah terbentuk Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa (KPPD) yang merupakan wakil dari PDRI.⁵⁾ Ada kemungkinan saran Simatupang disetujui oleh PDRI, tetapi jawabannya langsung disampaikan kepada rombongan menteri yang ada di Wonosari. Dengan demikian, agak dapat dipastikan bahwa KPPD terbentuk di Wonosari. Rupanya keputusan Surakarta tetap dipertahankan, khususnya mengenai jabatan ketua dan wakil ketua. Akan tetapi setelah Sukiman masuk kota (Yogya) dan Susanto bergerilya di daerah Jawa Timur, praktis kegiatan sehari-hari KPPD dipimpin oleh Kasimo. Sementara itu rombongan sudah bertambah dengan hadirnya beberapa tokoh lain seperti Menteri Agama Masykur, R.P. Suroso, Suharjo Harjowardoyo Prawoto Mangkusasmito, Zainul Arifin dan lain-lain.

3

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jawa disampaikan kepada PDRI melalui pemancar radio, baik oleh aparat militer maupun oleh KPPD. Dalam laporan tanggal 2 Januari 1949 Kolonel Simatupang menyebutkan bahwa KPPD telah menyerahkan pimpinan perjuangan militer sehari-hari kepada Panglima Tentara Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution yang telah mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa sejak tanggal 22 Desember 1948.⁶⁾ Dalam laporan yang sama Simatupang juga menyebutkan bahwa Kolonel Nasution telah mengangkat Letkol Abimanyu sebagai Gubernur Militer Jawa Barat, dan beberapa orang residen (Letkol Eri Sudewo untuk Banten, Letkol Sadikin untuk Jakarta, Letkol Kusno Utomo untuk Bogor, Letkol Edhi Sukardi untuk Priangan dan Mayor Sentot (Iskandardinata) untuk Cirebon). Selanjutnya tanggal 29 Januari 1949 Simatupang melaporkan tentang rapat yang diadakan antara KPPD dan pimpinan militer. Dalam rapat ini dibahas cara-cara untuk menyempurnakan pemerintahan militer di Jawa. Selanjutnya dilaporkan pula bahwa politik non-kooperasi sudah semakin teratur dan usaha Belanda untuk membuka sekolah menemui kegagalan sebab sebagian para pelajar turut berjuang.⁷⁾

Kolonel Nasution selaku PTTD dan Kepala Pemerintahan Militer di Jawa pada tanggal 12 Februari 1949 melaporkan situasi di daerah-daerah pendudukan Belanda dan tentang pengangkatan residen-residen militer.⁸⁾ Dalam laporan yang sama disebutkan pula tentang pembagian pekerjaan antara anggota KPPD

untuk mengurus wilayah pemerintahan (Sukiman dan Kasimo untuk Jawa Tengah, Susanto, Supeno dan Masykur untuk Jawa Timur). Sama dengan Simatupang, Nasution juga melaporkan pertemuan yang diadakan antara anggota KPPD dan pimpinan Angkatan Perang.

Laporan lain yang disampaikan kepada PDRI ialah hasil pembicaraan antara Menteri Susanto dan Kolonel Simatupang tentang perkembangan pemerintahan di Jawa. Sesuai pembicaraan itu diusulkan agar PTTD diangkat sebagai salah seorang penasehat PDRI dan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai pemimpin perjuangan seluruh RI.⁹⁾

Dari pihak KPPD, tanggal 15 Februari 1949 Kasimo melaporkan bahwa para menteri tidak berkumpul di satu tempat.¹⁰⁾ Dalam laporan dua hari kemudian ia menguraikan keberhasilan pemerintahan gerilya di Jawa dan ketataan rakyat di luar daerah yang dikuasai Belanda terhadap pemerintah RI. Kasimo mengusulkan perubahan nama PDRI menjadi Pemerintah Pusat karena nama pemerintah darurat dapat menimbulkan keraguan akan sahnya pemerintahan tersebut.¹¹⁾ Diusulkan pula agar para menteri di Jawa tidak merupakan komisariat, tetapi masing-masing menteri dalam keadaan mendesak berhak mengatur hal-hal yang termasuk kekuasaan menteri lain, misalnya Menteri Keuangan dapat menandatangani surat-surat atau keputusan yang seharusnya ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dengan atas nama. Tentang politik luar negeri, ia setuju menteri di Sumatera mengambil keputusan sendiri dengan syarat tetap mempertahankan prinsip-prinsip sebelum terjadinya agresi militer Belanda kedua.

Laporan yang cukup banyak itu agak terlambat ditanggapi oleh PDRI. Barulah tanggal 14 Maret 1948 PDRI memberikan tanggapan, khususnya tentang penyempurnaan pemerintahan militer.¹²⁾ Ketua PDRI ternyata kurang setuju dengan pengangkatan gubernur militer dan residen-residen militer di beberapa daerah di Jawa Barat. Ia juga tidak setuju dengan penunjukan Ir. Ukar (Bratakusumah) oleh pemerintah militer sebagai komisaris untuk Jawa Barat. Dalam tanggapan itu disampaikan pula susunan PDRI. Saran Susanto Tirtoprojo tentang pembagian tugas antara anggota KPPD disetujui oleh Ketua PDRI, dan ditegaskan bahwa para menteri di Jawa tetap sebagai komisariat PDRI. Perseetujuan juga diberikan dalam hal pengangkatan PTTD dan Panglima Besar sebagai penasehat KPPD dan hal yang sama berlaku pula bagi Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS).

Situasi dan kondisi perjuangan di Jawa berbeda dengan di Sumatera. Di Jawa aktivitas pemerintahan militer lebih menonjol daripada KPPD. Hal itu disebabkan oleh persiapan yang matang sebelum terjadi agresi militer Belanda. Akan tetapi seperti dikatakan Simatupang, adanya KPPD sekurang-kurangnya "memberikan perasaan bahwa pemerintah masih tetap ada dan tetap berada di tengah-tengah rakyat dan tentaranya yang sedang berjuang". Nasution menyebutkan adanya hubungan yang akrab antara KPPD dan MBKD di mana informasi antara kedua pihak biasanya dilakukan dengan perantara kurir.

Adalah hal yang lumrah bila terdapat perbedaan pandangan mengenai hal-hal tertentu, misalnya reaksi keras Jenderal Soedirman karena dalam KPPD

ia dan PTTD hanya didudukkan sebagai anggota. Setelah mempelajari semua tembusan telegaram PDRI untuk KPPD, pada tanggal 23 Maret 1949 Jenderal Soedirman menyatakan sikap TNI kepada PDRI sebagai berikut : 13)

1. Soal politik dan soal pertahanan tidak dapat dipisah-pisahkan karena pertahanan menjadi tulang punggungnya politik.
2. Dalam keadaan perang maka *opperrbevel hebber* atau Panglima Besar mempunyai *beslissende stem* (suara pemutus) dalam menentukan politik status negara atau soal lainnya yang bersangkutan dengan pertempuran.
3. Perintah penghentian tembak-menembak hanya dapat dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi setelah berunding dengan PDRI, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan selama Panglima Tertinggi masih dalam tawanan musuh. Jawa tidak akan tunduk pada perintahnya orang-orang yang berada dalam tawanan. Jika perintah dikeluarkan dan tidak dapat dilaksanakan berarti jatuhnya prestise PDRI ke luar dan ke dalam.
4. Jika ada perundingan mengenai penghentian tembak-menembak atau mengenai status negara, maka harus berkumpul PDRI-Staf AP, dan Panglima Tertinggi (jika telah merdeka betul) dan beberapa anggota KNIP.
5. Cara bekerja pemerintah yang lama harus dirobah sama sekali, karena ternyata menyebabkan penderitaan pahit, sebagaimana kita alami bersama semenjak tanggal 19 Desember 1948, karena dulu politik dengan pertahanan sama sekali dipisah. Dalam membicarakan soal-soal politik terutama dalam menentukan status negara kita pimpinan AP sama sekali diabaikan. Perpisahan nampak sekali dan akibatnya sampai di daerah-daerah. Jika dahulu antara pusat pemerintahan dengan pimpinan Angkatan Perang benar-benar satu lahir batinnya yang berarti soal politik dan pertahanan satu, maka tidak mungkin sampai *overrompeld* oleh serangan Belanda. Diingatkan oleh Soedirman agar PDRI tidak mengulangi kekeliruan yang lalu dan agar PDRI dan Pimpinan Angkatan Perang tidak dipisah-pisahkan.

Jawaban dari Ketua PDRI disampaikan pada hari itu juga, tanggal 23 Maret 1949.¹⁴⁾ PDRI "mengingatkan" Panglima Besar Soedirman mengenai masalah wewenang, siapakah yang berhak memberikan keputusan. Syafruddin menyatakan bahwa soal politik dan militer memang erat hubungannya, tetapi tidak benar kalau Panglima Besar (Soedirman) mempunyai suara pemutus dalam menentukan sikap politik. Sikap Soedirman dinilai keliru karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab pada KNIP. Namun PDRI akan selalu mencari hubungan baik dengan pihak ketentaraan dan Soedirman tetap sebagai penasehat, karena Panglima Besar tidak memiliki suara yang menentukan politik.

Sekalipun perbedaan pendapat ini tidak sempat berkembang namun perlu dicatat penafsiran bahwa TNI menolak perlakuan hanya sebagai alat

negara, menolak pendapat bahwa dalam alam demokrasi TNI tidak mempunyai suara yang ikut menentukan nasib dan status negara. Sebaliknya Panglima Besar Soedirman mengakui dan loyal pada PDRI, selama PDRI tidak mengulangi kekeliruan pemerintah Hatta, yang memisahkan masalah-masalah politik dan pertahanan dalam menentukan nasib negara.

Aktivitas-aktivitas gerilya yang semakin meningkat baik di Jawa maupun di Sumatera, mendorong Belanda untuk memulai kembali perundingan politik dengan pihak RI berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Dalam hal ini pendekatan mulai diadakan dengan pimpinan pemerintahan yang ditawarkan di Bangka tanpa mengindahkan sama sekali PDRI. Pertengahan April 1949 perundingan mulai diadakan antara delegasi RI dan Belanda. Empat hari kemudian reaksi datang dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dalam radiogram kilat sekali kepada PDRI tanggal 19 April 1949 Panglima Besar menyatakan: (5)

1. Tidak dapat menerima keinginan Belanda untuk mengosongkan daerah Yogya hanya strook lima kilometer, sebab dalam daerah yang sesempit itu pemerintah tidak akan dapat menjalankan tugasnya. Jika Belanda tetap pada pendiriannya, maka perundingan harus dibatalkan.
2. Dalam menentukan sikap pemerintah pusat hendaknya meninjau keadaan gerakan dalam negeri dan pergolakan luar negeri, terutama negara tetangga.
3. Pertahanan makin hari makin kuat dan teratur, semangat perjuangan rakyat dan tentara semakin naik, lebih-lebih setelah pasukan Belanda terbagi-bagi atas pasukan-pasukan kecil.

Dalam radiogram yang sama Panglima Besar mempertanyakan apakah orang-orang yang ada dalam tawanan dan pengawasan Belanda berhak merundingkan, lebih-lebih memutuskan sesuatu hal yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara, padahal sudah ada PDRI.

Akan tetapi perjalanan sejarah menentukan lain. Bagaimanapun, pamor Sukarno-Hatta masih tetap diakui oleh pihak luar. Perundingan yang akhirnya menghasilkan Roem-Royen Statement itu mengkesampingkan sama sekali PDRI dan pimpinan Angkatan Perang.

4

Uraian dalam makalah ini merupakan pembahasan awal dari studi sejarah PDRI di Jawa. Sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun uraian ini sangat terbatas, umumnya hanya laporan-laporan telegrafis dan sedikit catatan pribadi tokoh-tokoh. Kiranya diperlukan studi yang mendalam tentang kegiatan PDRI di Jawa, dalam hal ini KPPD.

Dari uraian singkat ini dapat diambil kesimpulan bahwa eksistensi PDRI di Jawa cukup dirasakan, walaupun terbatas hanya pada golongan tertentu,

khususnya pimpinan Angkatan Perang. Rakyat pada umumnya tidak mengenal KPPD, tetapi mengenal tokoh-tokohnya sebagai menteri atau pejabat pemerintah.

Jakarta, September 1989.

Catatan Belakang :

1. "Instruksi Pimpinan Pertahanan Rakyat", PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Khasanah Kearsipan. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989, hal 88.
2. "Order Harian Wakil Presiden Republik Indonesia merangkap Menteri Pertahanan a.i. Mohammad Hatta, 19 Desember 1948", *Ibid*, hal 100.
3. "Radiogram Menteri I. Kasimo kepada Ketua PDRI di Sumatera tentang keadaan Menteri-menteri yang ada di Djawa setelah Yogyakarta diduduki Belanda, 17 Februari 1949", *Ibid*, hal 114.
4. "Kawat Menteri I. Kasimo kepada Ketua PDRI tentang Komisariat Pusat Pemerintah Djawa, 7 Maret 1949", *Ibid*, hal 143.
5. "Kawat Kolonel Simatupang kepada Ketua PDRI/Kolonel Hidayat tentang Komunike pembentukan Komisariat Pusat RI untuk Jawa yang diumumkan pada tanggal 29 Januari 1949, 12 Maret 1949", *Ibid*, hal 144.
6. *Ibid*.
7. "Seruan yang ditujukan kepada para pelajar", *Ibid*, hal 106.
8. "Laporan Kolonel Nasution kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara dan dr. Sudarsono di New Delhi tentang keadaan pemerintahan, tentara dan rakyat setelah satu bulan perang Kolonial, 12 Pebruari 1949" *Ibid*, hal 141.
9. "Kawat menteri I. Kasimo kepada Ketua PDRI tentang Komisariat Pusat Pemerintah Djawa, 7 Maret 1949", *Ibid*, hal 143.
10. "Radiogram Menteri I. Kasimo kepada Ketua PDRI tentang pembentukan Komisariat PDRI bagi Jawa, 28 Pebruari 1949", *Ibid*, hal 116.
11. "Radiogram menteri I. Kasimo kepada Ketua PDRI di Sumatera tentang keadaan menteri-menteri yang ada di Jawa setelah Yogyakarta diduduki Belanda, 17 Pebruari 1949", *Ibid*, hal 115.
12. "Radiogram Ketua PDRI tentang susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia serta pembagian tugas diantara para anggota yang ada di Jawa dan Sumatera, 14 Maret 1949", *Ibid*, hal 116.

*Juwono Sudarsono *)*

Sebagaimana kita ketahui dari rekaman sejarah dan diskusi tentang latarbelakang berdirinya PDRI, hakikat PDRI adalah fungsinya sebagai salah satu unsur hukum internasional yang mensyaratkan adanya *pemerintah* yang mewakili negara dan bangsanya.

Setelah agresi militer II Belanda, perdebatan tentang PDRI berkisar pada tiga hal :

1. Apakah PDRI itu merupakan tambahan/sambungan dari Pemerintah RI dibawah pimpinan Soekarno-Hatta?
2. Apakah PDRI adalah suatu pemerintah "kebetulan" yang lahir akibat keadaan genting, yakni tertawannya pimpinan RI oleh pihak Belanda ?
3. Apakah PDRI "bukan apa-apa" ?

Apapun yang diperdebatkan, eksistensi PDRI merupakan upaya untuk tetap menghidupkan pemerintah yang dapat mewakili dan secara sah membawa suara "Rakyat Indonesia" yang tersebar diseluruh pelosok Tanah Air.

Sebagaimana dapat kita baca dari karya St. Mohammad Rasjid (1982: 17) ada dua kawat yang di kirim dari Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Kawat pertama ditujukan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara yang memuat klausul pokok "... jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya, kami menguasai kepada ...", sehingga setelah tanggal 22 Desember 1948 diketahui dengan pasti bahwa Soekarno-Hatta ditawan Belanda, keadaan de facto ini mengukuhkan pernyataan de jure yang tersimpul dalam kawat yang di kirim.

Kawat kedua lebih kondisional lagi, yakni "Jika ikhtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Sumatra tidak berhasil kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk exile government Republik Indonesia di India ...". Kawat itu juga meminta perwakilan RI di New Delhi untuk menghubungi Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Dari uraian St. Mohammad Rasjid dan salinan kawat yang tersimpan di Arsip Nasional dapatlah diketahui bahwa New Delhi merupakan titik sambung untuk meluaskan jaringan informasi tentang agresi militer 19 Desember 1948 yang dilakukan oleh Belanda dan tentang eksistensi PDRI di Sumatra.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan Mr. A.A. Maramis ditunjuk sebagai menteri luar negeri untuk mengambil salah satu portofolio yang di sandang Mr Sjafruddin Prawiranegara. Setelah kontak-kontak liwat pemancar-pemancar di Sumatra berhasil menyebarkan berita-berita tentang eksistensi PDRI, maka salah satu unsur penting dalam politik internasional telah terjalin:

*) Dekan Fak. Ilmu Sosial Politik, UI.

Republik Indonesia berjalan terus dengan salah satu unsur hukum internasionalnya tetap dipertahankan, yakni adanya pemerintah. Bisa dipersoalkan apakah pengakuan unsur ini tidak sepenuhnya "diterima" masyarakat internasional apabila unsur masyarakat internasional yang dimaksud adalah pihak sekutu-sekutu Belanda.

Akan tetapi langkah Mr. A.A. Maramis kemudian menunjukkan betapa semangat juang itu tersebar pula dikalangan perwakilan RI diluar negeri, meskipun keadaan keuangan jauh dari mencukupi. Dari tempatnya di New Delhi dikukuhkan berdirinya Pemusatan Keuangan untuk Keperluan Perbelanjaan yang dihadiri dan ditanda-tangani oleh :

- Mr. A.A. Maramis (menteri luar negeri);
- Dr. Sudarsono, wakil Republik di India ;
- Mr. Utojo, wakil Republik di Singapura dan Malaya ;
- Dr. Soemitro Djojohadikusumo, wakil Delegasi RI di USA ;
- Dr. H.M. Rasjidi, wakil Republik di Timur Tengah ;
- Mr. Idham, wakil Republik di Pakistan ;
- Marjunani, wakil muda Republik di Burma ;
- Ubani, wakil muda Republik di India ;

Pemusatan Keuangan tersebut di sahkan di New Delhi tanggal 19 Januari 1949 menjelang Asia Relations Conference yang diprakarsai oleh wakil-wakil pemerintah Burma dan India 1).

Dari daftar nama dan alamat pusat-pusat perwakilan Republik di luar negeri itu terungkap usaha untuk menjalin hubungan penerangan luar negeri yang mewakili bagian terbesar dari negara-negara yang kemudian merupakan unsur penting dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955.

Dr. H.M. Rasjidi memusatkan kegiatannya pada negara-negara utama Timur Tengah, khususnya Mesir, Irak, Arab Saudi dan Suriah. Usaha ini dilakukannya bukan hanya atas dasar jalinan hubungan rakyat-rakyat yang pemeluknya sebagian terbesar adalah agama Islam tetapi terutama karena agresi militer II Belanda merupakan ikhtiar Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan membongceng kemenangan Sekutu di Eropa dan di Pasifik.

Mr. Utojo bergerak disekitar Singapura dan Malaya karena dua tempat itu merupakan pusat perdagangan dan komunikasi internasional yang cukup penting dalam usaha Republik mempertahankan kekuatan diplomatik di forum internasional. Kota Singapura adalah pusat pemancar berantai (relay station) untuk siaran radio BBC maupun kantor berita berpengaruh seperti Reuters dan Associated Press.

Dr. Soemitro Djojohadikusumo memainkan peranan sangat strategis berkenaan dengan kedudukannya di New York. Selain pusat diplomasi internasional yang bemarkas di Lake Success (tempat ia juga mempertahankan eksistensi Republik pada agresi Belanda I Juli 1947). Lake Success adalah tempat bersidang Dewan Keamanan PBB, tempat gugatan terhadap "ancaman terhadap perdamaian internasional" disampaikan oleh rangkaian perjuangan bangsa tertindas.

Disamping itu, New York adalah tempat strategis untuk menggalang pendapat umum Amerika terhadap masalah hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang ingin merdeka. Akan tetapi, situasi internasional terasa cukup berat, mengingat bahwa pada tahun-tahun itu (1948 - 1949) Perang Dingin sedang memuncak, Amerika tengah menggalang kerjasama militer NATO melalui Perancis, Inggris dan Belanda, tiga negara Eropa yang disokong kuat oleh kelompok-kelompok turunan Eropa di Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, usaha Soemitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dan Soedarpo Sastrosatomo cukup membawa hasil karena sebahagian pers Amerika yang mereka garap akhirnya memberi dukungan terhadap Indonesia bebas merdeka.

Asia Relations Conference di New Delhi menghasilkan Resolusi New Delhi 28 Januari 1949 yang menuntut Belanda untuk menarik diri dari kere-sidenan Yogyakarta (bukan hanya kota Yogyakarta), yang kemudian disepakati oleh pemerintah-pemerintah India, Australia, Cina, Kuba, Norwegia dan Amerika Serikat. Sebenarnya Asia Relations Conference bermula dari dukung-an moril yang diberikan oleh India, Sri Lanka, Birma dan Pakistan pada 21 Desember 1948 yang menghasilkan kesepakatan pemboikotan pelayanan kapal-kapal terbang Belanda singgah di bandara-bandara Sri Lanka, Pakistan dan India dalam perjalanan pergi-pulang Eropa-Indonesia. Konferensi ini juga membantu usaha Dr. H.M. Rasjidi di Kairo untuk menggalang pendapat Liga Arab menuntut agar agresi Belanda dihentikan.

Yang masih agak kabur adalah apakah ada kerjasama baik antara PDRI Sumatra dengan wakil-wakil Republik di luar negeri mengingat bahwa seringkali kawat dan berita yang dilakukan kedua pihak tertahan atau hilang di tengah jalan. Meskipun demikian, dari salinan kawat yang dikirim PDRI²⁾ diketahui bahwa "keluar PDRI" telah mendapat kedudukan sebagai satusatunya pemerin-tah pusat sementara". Ini menunjukkan bahwa sekecil-kecil usaha, keabsahan PDRI diluar negeri diakui juga.

Dalam berbagai forum internasional, yang paling mengesankan bagi pemerintah-pemerintah di luar negeri ialah adanya gagasan untuk mendirikan pemerintah darurat sebagai sambungan/pengganti pemerintah Republik. Karena itu, yang menarik ialah bahwa kedua unsur pemerintah Indonesia, baik yang diwakili Soekarno-Hatta maupun yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin dan kawan-kawan, sama-sama menyebut *Republik* sebagai satuan bangsa-negara yang harus dipertahankan. Apakah ini suatu hal yang kebetulan ataukah sengaja dirumuskan untuk menghindarkan adanya "dualisme" antara "pemerintah yang ditawan" dengan "pemerintah yang bergerilya" (istimewa yang di Sumatra) tidaklah terlalu penting.

Pihak luar negeri memandang adanya unsur pemerintah yang tetap berada di Tanah Air dan yang perwakilan-perwakilannya diluar negeri diakui sebagai perutusan yang sah dari *Republik* sudahlah cukup untuk merepotkan Belanda bukan saja di negara-negara yang kemudian menjadi pelopor Kelompok Asia-Afrika dan kelompok Negara Non-Blok, tetapi juga di beberapa sekutu penting seperti Amerika Serikat, Australia bahkan di Inggris sendiri.

Keberhasilan itu untuk sebahagian adalah usaha diplomasi di berbagai pusat penting seperti New York, New Delhi, Kairo dan Singapura, tetapi dari segi strategi ekonomi dan militer hal yang paling pokok ialah adanya pengu- rangan bantuan Amerika kepada Belanda sekalipun cukup banyak kelompok berkepentingan di Amerika Serikat yang di lobby secara intensif oleh orang- orang Belanda. Gagasan exile government untuk sebahagian barangkali diambil dari konsep pemerintah pelarian Charles De Gaulle yang bermarkas di London setelah Perancis diserbu dan diduduki Jerman—Pasis tahun 1940an. 3)

Sisa-sisa dari gagasan "pemerintah sah yang sukar ditangkap dan di- padamkan" inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa sampai saat ini pemerintahan yang "sah" mencari kekuasaan nyata dan pemerintah yang ber- kuasa mencari "keabsahan". PDRI adalah salah satu dari bentuk politik inter- nasional yang pertama.

Catatan belakang :

1. Rasjid, Arsip Nasional, Kawat 120, 6 Mei 1949.
2. Arsip Nasional, 155/PDRI, 15/2/49.
3. MacMahon, *cold war and colonialism*, 1982 : 254.

7. TANGGAPAN PARA PESERTA TERHADAP MAKALAH-MAKALAH

1). *Makalah Sartono Kartodirdjo*

a. Tjokropranolo

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai pertanyaan, apakah PDRI itu perlu didirikan atau tidak. Menurut saya, (jika) dilihat dari (sudut) sejarah memang perlu didirikan. Kenapa? Karena (kalau) dilihat dari (sudut) sejarah itu justru menentukan; bahwa Republik Indonesia tidak pernah menyerah kepada Belanda. Ini penting, karena de jurenya sudah kepada PDRI, bukan lagi kepada Bung Karno atau (kepada) pimpinan lain. "Semangat itu harus kita punyai sebagaimana halnya (terdapat) dalam TNI. TNI sampai akhir jamanpun tidak akan menyerah. (Hal ini) seharusnya menjadi pedoman dari semua orang di luar TNI.

Tidak mengenal menyerah itu banyak artinya; tidak hanya dalam menghadapi musuh kayak Belanda, juga dalam cita-cita '45. Semangat ini penting bagi kita sekalian.

b. Dr Ahmad Syafe'i Ma'arif.

Sekiranya Sjafruddin masih hidup suasana (seminar ini) akan lebih gaya lagi. Tapi ada wakilnya, Bapak Tengku Muhammad Hasan. Pertanyaan saya yang (minta) dijawab pak Sartono, saya rasa (melalui) pak Ibrahim, yang menjadi duplikatnya: sudah hampir empat puluh tahun PDRI dilupakan sejarah, dibawa dalam debu sejarah, kok tahu-tahu sekarang pada tahun 1989 dimunculkan kembali oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia, dan pak Harto memberikan sambutan. Bagi saya ini gejala menarik. Barangkali pak Ibrahim bisa mengomentari pertanyaan ini.

c. Soedjatmoko

Saya ingin menambah beberapa fakta sejarah, sehubungan dengan perjuangan kita di PBB, Ketika Yogya diserbu Belanda, saudara Palar, saya sendiri, saudara Sudarpo, pada waktu itu ada di Paris. Waktu itu (sedang berlangsung) sidang Dewan Keamanan. Umurnya sidang umum PBB diadakan di Paris.

Kita dapat berita tentang penyerbuan atau pendudukan Yogya oleh Belanda. (Dengan peristiwa itu) maka kedudukan kita sebagai wakil Republik Indonesia bisa dipertanyakan Belanda; sebab kekuatiran kita ialah bahwa Belanda akan menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. (Jika itu dilakukan Belanda) maka perwakilan RI di PBB juga tidak akan berhasil untuk duduk di sidang (Dewan) keamanan. Dan kami sudah siap-siap (angkat kaki). Seandainya tidak ada PDRI, kedudukan legal kita memang sangat sulit, bisa dipersoalkan, Jadi justru

karena ada PDRI, kita bisa mempertahankan kedudukan RI. Untungnya Belanda tidak mengajukan masalah itu ke sidang PBB, sehingga tidak ada suatu (masa) krisis mengenai kehadiran kita di sana. Cuma mereka (atau Belanda) samasekali tidak memperhitungkan betapa marahnya Dewan Keamanan itu, karena mereka merasa dihina oleh tindakan Belanda, (penyerbuan) dilakukan pada waktu perundingan masih dianggap berjalan terus. Bahkan Cochran kalau tidak salah sehari sebelum Belanda mulai bergerak (menyerbu Yogyakarta) masih bicara sama Bung Hatta di Kaliurang. Jadi yang ingin saya kemukakan di sini adalah fakta bahwa adanya PDRI memberikan landasan legal bagi kita untuk meneruskan perjuangan kita di PBB.

d. Djoeir Moehammad.

Pada umumnya makalah yang disampaikan kepada kita memang mempunyai arti luas (dan) saya dapat menerimanya. Cuma yang menjadi pertanyaan saya ialah seminar ini ditujukan untuk keperluan apa : apakah sekedar untuk penulisan sejarah, sekedar ilmu, atau nostalgia dari pejuang. (Hal) ini mesti jelas dahulu. Sebab sebelum Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sjafruddin Prawiranegara meninggal, kedua mereka tadi mengadakan pertemuan di Prapatan 42, di mana saya sendiri hadir pada waktu itu. Saudara Sjafruddin menjelaskan kepada almarhum Sri Sultan (tentang) perlunya mendirikan satu monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Karena dengan monumen itu akan dapat diingat oleh generasi yang akan datang. Monumen itu dilengkapi dengan data-data perjuangan, (sejak) dari lahirnya Pemerintah Darurat, dan begitu juga pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dua kali pertemuan mereka adakan, dan dua kali (pula) saya hadir. Waktu itu malah saya mengusulkan supaya saudara Sjafruddin jangan maju ke depan, sebab tidak begitu disenangi, dan dia waktu itu setuju. Saya mengusulkan supaya Bapak

Tengku Muhammad Hasan maju ke depan sebagai panitia pembangunan monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Halaban. Begitu juga saya bilang, saudara Rasjid juga jangan maju dulu. (Hal) ini semua untuk mendapatkan sarana dan bantuan yang baik dari yang berkuasa untuk mendirikan monumen nasional ini. Karena kedua mereka telah lengkap dengan gagasan dan rancangannya, tetapi tidak bisa (lagi) meneruskannya, oleh sebab itu kepada hadirin dan kepada MSI saya harapkan dapat diteruskan untuk mendirikan suatu monumen PDRI. Dan makalah-makalah yang telah kita lihat ini semuanya menyokong. Malah dari pidato Presiden sendiri sangat juga menyokong adanya PDRI ini.

Di samping itu sebagaimana telah dikemukakan saudara Sudjatmoko tentang eksistensi PDRI, (maka) harus dikaji kembali data perjuangan diplomasi dari PDRI, sokongan yang diberikan negara Asia (seperti) dengan adanya Konferensi di New Delhi, gerakan-gerakan

buruh, dan pernyataan pemerintah-pemerintah sosialis. Selain itu juga perlu digali tentang susunan pertahanan rakyat.

Saya sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Sartono yang menegaskan bahwa justru selama pemerintahan PDRI rakyatlah sebetulnya yang membekali perjuangan itu dengan cara yang ada pada mereka. Daerah yang penting dan strategis dalam perjuangan PDRI yaitu Yogyakarta, Sumatra Barat, dan daerah Aceh, dimana Belanda tidak bisa mendirikan satu pemerintahan boneka. Ketiga daerah ini menjadi modal bagi eksistensi PDRI. (Hal) ini juga harus dikaji lebih mendalam.

e. Maladi.

Waktu saya menerima surat dari Emil Salim, apakah saya masih ada data-data mengenai PDRI, karena akan diadakan seminar PDRI, maka secara spontan dan sangat gembira saya menyerahkan satu buku berisi enam-puluh delapan dokumen foto-foto, untuk bisa dipakai sebagai bahan manakala bahan-bahan itu memang tidak terdapat di instansi lain.

(Menyinggung) pertanyaan dari pak Tjokropranolo, apakah PDRI perlu ada atau tidak. Saya mengatakan itu sangat vital. Sangat perlu untuk diketahui bahwa tanpa PDRI sebenarnya perjuangan Republik pada tahun 48—49 itu tidak sempurna, karena tidak ada pemerintahan. Jadi perlu agar bisa diketahui dunia dan sesuai dengan sistem mekanisme pemerintahan : ada pemerintahan yang sah, tentara Republik Indonesia yang sah, dan adanya rakyat yang berjuang. Adanya pemerintahan sipil yang bekerja bisa dibuktikan dengan komunikasi antara pemerintah pusat yaitu PDRI yang meneruskan (informasi perjuangan) pada dunia internasional, sebagaimana dikemukakan (Soedjatmoko) di PBB juga diketahui adanya PDRI. Nah inilah sebenarnya isi pentingnya PDRI (yang) meneruskan seluruh dokumen perjuangan dari rakyat Indonesia : dari Jawa dan Sumatra ke PBB atau ke dunia luar. Jadi

tidak benar bahwa PDRI hanya mengurus Sumatra. PDRI adalah pemerintahan nasional. Kebetulan saya waktu itu menjabat perwira penerangan Markas Besar Komando Jawa, (merangkap) kepala jawatan radio Republik Indonesia, dan perwira penerangan Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto yang bemarkas di Gunung Lawu. Di tempat ini ada tiga pemancar. Pemancar yang satu RRI yang spesial untuk luar negeri. Pemancar kedua adalah (untuk) hubungan antara Jawa dengan Sumatra, dan antara Jawa dengan Jawa. Mula-mula hubungan itu dilakukan Wonosari, yaitu pemancar AURI pak Budiardjo. Tapi pada tanggal 10 Maret 1949, Wonosari diduduki Belanda, sehingga sejak itu tidak ada lagi hubungan antara Wonosari dengan PDRI. Nah pada saat itu juga kita oper dari Gunung Lawu—Balong, sehingga ada hubungan antara PDRI dengan PBB, militer, dan PDRI (di Sumatra). Hal itu bisa dibuktikan dengan kawat-kawat, radiogram dan sebagainya yang ditulis sendiri oleh Panglima Besar Sudirman dan oleh Kolonel Nasution dan

sebagainya. (Hal) ini yang penting bahwa kita bisa menyatakan pada dunia bahwa PDRI itu adalah pemerintah yang memimpin seluruh kegiatan negara, peperangan, dan sebagainya. Kalau tidak salah Panglima Besar Sudirman juga anggota (pimpinan) PDRI. Kedua, apakah PDRI itu datang sekonyong-konyong karena keadaan, atau direncanakan. Hal ini perlu diketahui. Ya memang perjuangan republik waktu itu kadang-kadang kebetulan, tapi juga ada perencanaannya. Mohon perhatian dari sejarawan untuk mencari dokumen penting yaitu Perintah Siasat Nomor 1 Stop. Stop itu (singkatan) staf operasi kalau tidak salah. (Dokumen) itu dulu ketinggalan di Markas Besar di Yogya tanggal 19 Desember, tapi (dokumen) itu disinggung dalam verslag tahun 50-an oleh Kolonel Nasution sebagai Panglima Komando Djawa untuk Dewan Siasat RI. Tanggal (dokumen) 20 Mei 1948, didahului dengan persiapan yang berbunyi sebagai berikut : medio 48 persisnya Mei 48. Markas Besar Angkatan Perang mengeluarkan perintah siasat no 1 1948; yang jadi dasar aksi pertahanan pada pokoknya pengalaman perang kolonial ke satu. (Untuk perang kolonial kedua) berdasarkan pertahanan rakyat total yang berwujud wehrkreise dan dipimpin oleh TNI. (Mengikuti) rencana perintah siasat itu, secara militer Indonesia dibagi dalam dua : Sumatra dan Jawa. Mengapa diadakan (pembagian) ini. Karena berdasarkan Renville Januari 1948, kabinet sudah mencanangkan program lima pasal : pembangunan, pemilihan umum, dan sebagainya.

Pada tanggal 18 Nopember 1948, sesudah pemberontakan (komunis) itu ditumpas, Perdana Menteri Hatta pergi ke Bukittinggi membawa Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Kolonel Hidayat yang (sebelumnya) fungsinya wakil Kepala Staf Angkatan Perang dipindah ke Sumatra untuk menjadi Panglima Komando Sumatra.

Perencanaan waktu itu adalah kalau terjadi serbuan Belanda maka Presiden Sukarno akan memimpin perjuangan di New Delhi. Nah (hal) ini bisa dibuktikan dengan kawatnya Nehru (berupa) undangan kepada Presiden Sukarno untuk datang ke New Delhi. Sebelum itu, pada bulan Juli 1948 Bung Karno sudah datang ke Sumatra. Saya masih menyimpan fotonya pak Tengku Moh. Hasan dengan Bung Karno yang saya kira juga membicarakan soal pengumpulan uang untuk membeli pesawat Dakota. Nah begitulah rencananya semuanya. Bung Karno akan berada di luar negeri, di New Delhi, dan pemerintahan diserahkan kepada Hatta, dan beliau memilih Sumatra. Itulah sebabnya Bung Hatta pergi ke Sumatra tanggal 18 Nopember (dengan) membawa sekalian sebagai persiapan pak Sjafruddin dan pak Hidayat. Rencana itu gagal, karena pesawat yang (akan) menjemput Presiden ditahan di Kemayoran sehingga tidak bisa ke Yogya maka diadakan pembicaraan lebih lanjut. Sekitar tanggal 17 atau 18 Desember sudah dikeluarkan keputusan: tiga menteri diberi kekuasaan untuk memimpin pemerintahan manakala Presiden dan Wakil Presiden tidak hadir. Ketika 19 Desember datang,

dan Bung Hatta tidak bisa ke Sumatra, maka (diputuskan) lebih baik Sjafruddin ditugaskan untuk menjabat ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah berita itu dikirimkan melalui sandi Deparlu. Itu sangat rahasia. Tapi pengiriman itu sudah terlambat karena pemancarnya sudah tidak jalan. Jadi kawat-kawat itu ada, tapi tidak sampai. Hal inilah yang perlu saya tambahkan, supaya kita tahu bahwa PDRI itu memang direncanakan bukan dibentuk seperti (pendapat) itu. Kami bisa membantu dengan dokumen-dokumen PDRI berupa kawat, pengumuman, dan lain sebagainya. Kebetulan masih saya simpan dan akan diserahkan pada Pemerintah untuk menjadi bahan sejarah yang benar. Berdasarkan dokumen dulu yang ditulis (Belanda) untuk dunia luar, saya kira Belanda mengira kita tidak ada pemerintahan, kalau toh ada PDRI (mereka anggap) ya pengungsi. Pak Dirman yang sakit masak bisa memimpin TNI. Nah dengan dokumen (baru) itu bisa jelas bahwa pak Dirman memimpin, memberikan instruksi-instruksi pada semua divisi dan kepada Kolonel Hidayat. Hubungan (radio) dengan PDRI membuktikan pada dunia luar bahwa kita waktu peperangan yang semajalan bulan itu, yakni dari 19 Desember 1948 sampai dengan 11 Agustus 1949 benar-benar berjuang sebagai negara dengan pemerintahan yang sah

f. Zainal Nur.

Saya ingin menambahkan sedikit dari pengalaman sendiri. Saya mulai dengan mensitir (ucapan) Bung Hatta kepada Lukman Hakim. Waktu itu Bung Hatta sudah menjabat sebagai PM RIS, Lukman Hakim dari RI Yogyakarta, dan saya sebagai (mantan) Pusat Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau P3 PDRI yang mengurus candu. Candu itu dibawa Sjahrir dari Jakarta ke Yogya, (kemudian) oleh Bung Hatta (dibawa) ke Bukittinggi dengan alasan satu saat dibutuhkan. Candu itu dipergunakan untuk devisa dan (keperluan) pembayaran waktu perang. Dan saya datang ke Jakarta waktu itu untuk mempertanggungjawabkan tugas saya. Hatta mengatakan, "saudara Zainal saya tidak berhak menandatangani (dokumen itu) dengan Bung Karno, karena kami ini RIS. Kalau saudara-saudara tidak ada, tidak ada yang meneruskan (berita) dari Sumatra ke luar negeri, kalau tidak ada Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berhasil menerobos sampai ke luar negeri (dan) suaranya dibawa ke PBB, tak tahulah saya bagaimana Republik Indonesia jadinya sampai sekarang". Begitu kata Bung Hatta kepada saya. "Pergilah saudara ke Yogyakarta" (Kata Hatta). Setelah itu saya pergi ke Lukman Hakim yang RI Yogyakarta. "Ok lah Zainal, saya tandatangi ini karena PDRI itu berdiri sendiri, keluar dan ke dalam menerobos sendiri. Begitulah gambaran dua orang (tokoh) yang satu sudah RIS yang satu RI Yogyakarta yang dengan ikhlas dan kerendahan hati mengakui Pemerintah Darurat Republik

Indonesia Jadi yang belum saya dengar adalah bahwa faktanya PDRI itu sambung menyambung dengan yang lain

g. Zanan Zamzami.

Kira-kira dua tahun yang lalu oleh Pusat Sejarah ABRI di Jalan Gatot Subroto hampir setiap bulan diadakan seminar mengenai sejarah perjuangan. Selain perwira yang hadir antara lain bekas perwira seperti saya. Penceramah berganti-ganti setiap bulan seperti pak Ruslan Abdulgani, A.H. Nasution, dan TB Simatupang.

Pada giliran ceramah TB Simatupang, dan waktu diadakan tanya jawab saya mengajukan pertanyaan singkat. Pak Jenderal kata saya, maaf, karena yang diceritakan pada umumnya adalah sejarah yang terjadi di Jawa saja. Saya menanyakan (kepada) pak Jenderal sampai ke mana sih peranan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam perjuangan proklamasi kita. Jawabannya singkat: "ah itu soal kecil, masih memerlukan penelitian lebih lanjut" (katanya).

Saya adalah Tentara Pelajar di daerah Aceh antara lain juga dibina oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan, SM. Amin, dan pak Hidayat. Jawaban (dari Jenderal Simatupang) itu mengganggu pikiran saya. Saya menemui saudara Bustaman, dan kemudian Mr. Moh. Rasjid mantan menteri PDRI. Beliau memberikan kepada saya buku mengenai PDRI, dan langsung saya antarkan ke Pusat Sejarah ABRI.

Jika pak Soedjatmoko berbicara de jure, maka saya berbicara de facto yang saya lihat sendiri di daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yaitu Aceh. (Daerah ini) oleh Bung Karno dinamakan daerah modal Republik Indonesia. Ternyata perintah yang datang dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu dipatuhi oleh rakyat Aceh; dipatuhi oleh penguasa yang ada waktu itu di bawah Gubernur Militer Mayor Jenderal Tengku Daud Beureuh. Buat saya itu suatu bukti de facto. Karena itu pertanyaan soal itu sekarang semua habis, hilang

h. Amura

Saya ingin mengajukan pikiran dan pendapat . . . bahwa sebelum tanggal 19 Desember 1948 Bukittinggi mempunyai empat posisi. Pertama, sebagai ibukota kabupaten Agam. Kedua, sebagai ibukota Propinsi Sumatra Tengah. Ketiga, sebagai Ibukota Sumatra karena Mr. T. Moh. Hasan sebagai Komisaris Pemerintah Pusat atau Kompempus untuk Sumatra (berada di sini). Keempat, kedudukan Wakil Presiden Moh. Hatta. Jadi pada waktu itu seolah-olah sudah sebagai tempat ibukota Republik Indonesia kedua. Karena itu tidak mengherankan kalau PDRI bersifat nasional, karena memang sudah demikian adanya. Bukittinggi sudah merupakan tempat kedudukan secara nasional ketika itu.

... pada saat itu PDRI tidak bicara lagi masyarakat Minangkabau tapi sudah masyarakat (Indonesia) paling sedikit Sumatra, kalau bisa kita harus katakan memang sama dengan rakyat Jawa

i. Ibu guru Mustainah dari Perguruan Islam Al Azhar.

... kami ingin menanyakan jika dilihat dari keberadaan PDRI, apakah hasil perundingan Roem—Royen itu sah ?. Karena saya baca dari buku Arsip Nasional ini bahwa Mohammad Roem ditunjuk sebagai ketua delegasi oleh Sukarno. Kalau memang perundingan ini tidak sah, kenyataan berbicara bahwa (kebijaksanaan) yang dilanjutkan untuk mewujudkan Republik ini adalah jejak-jejak dari perundingan Roem—Royen sampai KMB, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, kenapa Presiden Sukarno mau berhubungan dengan Belanda . . .

j. Ismaun.

Saya dari IKIP Bandung, murid pak Sartono, sekarang jadi guru sejarah. Menyimak sambutan Bapak Presiden Suharto dan makalah Prof. Sartono bahwa kita tidak hanya perlu memahami sejarah juga perlu memiliki kesadaran sejarah, wawasan sejarah, dan kearifan sejarah. Fakta (menunjukkan) bahwa peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi. Namun kesulitan kami sebagai guru, bilamana terdapat perbedaan (seperti) interpretasi dan kepentingan, di mana wewenang seorang guru sejarah untuk mengolahnya.

k. Nyonya Hutasoit.

... sebagai rakyat waktu itu (PDRI), saya ingin menyampaikan pengalaman pendek saya. Waktu clash kedua saya berada di Bukittinggi. Menjelang tentara Belanda mau masuk kota, malam itu pak Rasjid mengadakan rapat, (memutuskan) supaya anggota pemerintah keluar dari Bukittinggi dan kota akan dibumihanguskan. Kami segera ke luar rumah, (karena) takut ada bumihangus.

(Karena) diperintahkan semua ke luar, tidak ada seorangpun anggota pemerintah yang tertangkap. Suami saya juga ke luar, dan saya masih dalam kota, menjadi badan penghubung. Apa saja bisa saya kirim ke pedalaman. Sebagai penghubung saya minta obat-obatan dari rumah sakit dan malahan minta tenaga medis. Dokter-dokter itu menanyakan kepada saya siapa yang bisa menjamin (keselamatan) dokter dan suster kalau mereka pergi ke luar kota, umpamanya ke Sungai Jaring di mana waktu itu sedang berjangkit cacar dan diare. Saya katakan, saya akan jamin, walaupun saya tahu saya tidak bisa menjamin mereka. Tapi saya beranikan diri, supaya dapat obat-obatan.

(Satu ketika) di pinggir jalan (arah) ke Koto Gadang Belanda membuat penjagaan. (Sehingga) saya tidak bisa lagi bergerak, tapi harus ada usaha. Saya (kemudian) pindah ke Koto Gadang. Saya tinggal

di situ, tetapi Belanda tahu, karena suami saya (sedang) dikejar, karena dia Bupati perjuangan.

l. Marwan Zein.

... menurut penilaian saya, PDRI ini seolah-olah suatu matarantai sejarah yang nyaris putus, sebab hampir tidak (pernah) disebut-sebut lagi. Sebagai generasi muda saya berharap kiranya seminar ini bisa melas (patri) matarantai yang hampir putus itu agar tidak putus. Baru empat-puluh tahun jarak dari peristiwanya, sudah demikian rancu pengertian tentang PDRI, apalagi seabad sesudahnya, barangkali generasi berikutnya disebutpun barangkali tidak akan tahu. Dengan demikian kita semua berharap dalam mengangkat suatu peristiwa sejarah hendaknya jangan dipengaruhi oleh situasi tertentu...

m. Maruli.

... dalam makalah pak Sartono ditulis tentang sumbangan rakyat dalam perjuangan seperti : mengangkut alat penyiaran, membuat jalan dan jembatan. Kalau kita bicara mengenai kurun waktu PDRI, khusus mengenai jembatan yang terjadi bukan pembangunan tetapi pengrusakan. Rakyat bersedia merusak apa yang dia bangun asalkan hal itu dapat menyumbang perjuangan. Jalan-jalan dirusak, lobang digali pada tempat-tempat tertentu sebagai perangkap tank, jalan-jalan menuju Koto Tinggi (misalnya) pohon-pohon sepanjang jalan dipotong untuk merintang pasukan Belanda. Jadi kita lihat dukungan rakyat kepada pejuang itu *all-out*. Karena sikap rakyat itulah PDRI dapat mencapai hasilnya (seperti) yang kita rasakan sekarang ini. Jika Soedjatmoko mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan di luar negeri tidak akan dapat berjalan sekiranya PDRI tidak ada; begitu pula PDRI tidak akan ada jika tidak ada dukungan dari rakyat. Saya kira hal ini perlu ditonjolkan (dan) memberi tempat yang wajar kepada rakyat kita.

n. Subadio Sastrosatomo.

Rakyat Indonesia dan seluruh dunia mengakui PDRI sebagai pemerintah. Tetapi peranan Komisi Jasa-jasa baik minta peperangan dihentikan dan diadakan UNCI yang hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta. (Karena itu) mereka minta supaya Sukarno-Hatta dibebaskan dan dikembalikan ke Yogya. Sikap ini terutama dari Cochran dan Thomas Crichtley. Kita menyokong PDRI dan mengakui pemerintahan Sjafruddin Prawiranegara, (karena itu) Sjahrir diminta untuk menjadi anggota delegasi atau penasehat ... (dan) saya menggugat hasil Roem-Royen dalam sidang KNIP.

Jadi persoalannya adalah sikap UNCI dan pimpinan kita yang dibuang (Belanda) ke Bangka. Di sini yang dominan sebenarnya adalah

pengaruh Amerika. Amerika mendesak Belanda supaya kita dikasih kemerdekaan, supaya Belanda (bisa) dikasih Marshal (Plan). Jadi sebenarnya (seperti) yang kasih kemerdekaan kita ini (adalah) Amerika. Dalam pidato saya di KNIP saya ngomong ini, tidak benar semua ini, bukan percaya pada kekuatan sendiri melainkan atas desakan Amerika. (Masalah) ini (bukan hanya sekedar) perkara sah (atau) tidak sah, tapi ini artinya lebih jauh . . .

o. Catatan Prof. Dr. Ibrahim Alfian (pembaca makalah Sartono).

Pertanyaan Dr. Sjafe'i Ma'rif (tentang kenapa seminar PGRI diadakan), sesungguhnya Sjafe'i sendiri sudah tahu jawabannya.

Bahwa topik atau fenomena sejarah menarik perhatian orang tergantung dari pertanyaan: apa yang ingin diketahui jawabnya. Jadi setiap generasi atau generasi yang sama senantiasa mengemukakan berbagai macam pertanyaan terhadap fenomena sejarah yang pernah dilalui baik oleh bangsa sekarang atau oleh generasi sebelumnya. Jadi senantiasa tergantung kepada minat, tapi andaikata minat ada-misalnya minat ini muncul pada tahun 1956-1957 tak akan mungkin bisa dilaksanakan. Tentulah ada beberapa hal (sumber) yang pada masa itu tertutup yang belum dapat terbuka. Nah jadi minat perhatian itu akan tergantung juga kepada sumber-sumber, kepada dana, dan sebagainya. Jadi semua faktor-faktor ini menentukan (bagi) si peneliti sejarah untuk melakukan penelitiannya, termasuk masalah timingnya.

Misalnya masalah dana. John Smail, ahli sejarah, Prof dari University of Wisconsin. Dia meneliti tentang *Bandung in the early revolution*. Dia ingin tahu jawaban, bagaimana Bandung pada awal revolusi, Bandung Lautan (Api). Lalu dia buat penelitian. Dia cari semua sumber pada saksi hidup, kemudian dia berikan interpretasi. Tidak mungkin ada eksplanasi sejarah tanpa ada deskripsi. Jadi dia rekonstruksi dulu masa lampau itu.

Sehubungan dengan pertanyaan itu, selalu saja kita tidak puas terhadap penulisan sejarah yang ada. Jadi (perlu) *justification*, alasan pembenaran terhadap penulisan kembali sejarah, *the rewriting of history*; pertama, ditemukannya sumber-sumber yang dahulu belum pernah ditemukan (*untouched information*). Walaupun orang berkeinginan menulis, tapi kalau dokumen tidak ada, tidak ada sumber sejarah, tidak akan tertulis sejarah; karena kita bukan penulis novel.

Sekarang, kelihatannya apa yang oleh instansi yang berwenang atau oleh beberapa pejabat dahulu belum dapat ditemukan, alhamdulillah sekarang masanya (sudah datang). Mantan Menteri Penerangan, pak Maladi sudah ingin memberikan (koleksi pribadinya). Hal itu berarti bahwa *untouched information sekarang sudah touched information*, artinya krannya sudah dibuka.

Kalau sumber-sumber baru (sudah) ditemukan, berarti kita menulis (lagi), dan berarti kalau di buku Sejarah Nasional (jilid) yang keenam itu (hanya) memuat sekian halaman tentang PDRI, sekarang tentunya akan sekian kali lipat halamannya, karena makin banyak sumber yang ditemukan. Bahan-bahan yang dulu belum dimasukkan sekarang sudah ada, berarti timbul fakta sejarah, tidak lain statement atau pernyataan terhadap sumber-sumber setelah diteliti dengan kritis. Kalau fakta sudah muncul berarti kemudian ada interpretasi sejarah yang baru.

Penulisan kembali sejarah juga bisa terjadi karena adanya fakta yang salah di masa lampau. Orang sadar, wah . . . salah ini, maka diperbaiki faktanya, (dan) berarti ada interpretasi baru. Ketiga, (penulisan ulang) bisa terjadi karena ada orang membuat pertanyaan terhadap masalah, ada dialog.

Alhamdulillah, sekarang ini munculnya tepat, ketika tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa itu masih hidup. . . . ketika dokumen dan saksi hidup masih ada, dan kita yang bekerja sebagai tukang-tukang sejarah merekamnya, kemudian merekonstruksi peristiwa itu, memberikan eksplanasi tentang peristiwa dan maknanya untuk generasi sekarang dan yang "akan" datang. Dengan satu dua kalimat Presiden sudah menyampaikan tentang kearifan sejarah. Makin banyak bahan-bahan, tidak saja mengenai PDRI, apa saja tentang masa lampau bangsa Indonesia, hal itu akan membuat kita bertambah arif dan dengan demikian berarti kesatuan dan persatuan bangsa pastilah dapat terjaga sebagai akibat penulisan yang dilakukan teman-teman.

Kecuali apa yang disampaikan Presiden mengenai kearifan sejarah, sebagai akhir jawaban, saya ingin mensitir pujangga Cicero yang mengatakan : "tidak mengenal sejarah berarti akan tetap menjadi kanak-kanak untuk selama-lamanya".

2). *Tanggapan terhadap makalah JR. Chaniago*

a. Tjokropranolo

Atas desakan kawan-kawan kami akan menyampaikan (komentar tentang) apa yang diutarakan (Subadio) bahwa kita harus terima kasih kepada Amerika. Maaf, saya katakan itu tidak benar; yang benar bahwa di dalam kehidupan kenegaraan ada negara yang melihat segi-segi (kepentingan luar negeri) dari sudutnya. Kalau Amerika melihat kita, (mereka) itu melihat dari sudut dia, bukan dari sudut kita. Jadi jangan *keposok*. Amerika tahun 1948 melihat bahwa kita bisa menumpas PKI tanpa bantuan negara manapun. Apakah Belanda atau negara yang dibonekakan itu bisa ?, menjadi pertanyaan dia. (Karena itu) lebih baik memihak TNI yang bisa menghancurkan PKI tanpa bantuan sesenpun atau senjata apapun dari luar negeri. Jadi jangan keposok, terima kasih pada Amerika; terima kasihlah kepada diri kita sendiri, percaya kepada

kekuatan kita sendiri (sebagaimana) yang dikatakan oleh Pak Dirman, jangan dibalik-balik.

Saya merasa bangga bahwa seorang yang tidak ikut berkelahi, dengan bangga menyatakan TNI-nya; lho kok yang malah ikut perang, tidak menyatakannya; ini *qumun* saya. Untung masih ada pemuda yang mengutarakan kebaikan pak Dirman dan TNI-nya. Kedudukan kita harus jelas.

Belanda mau berunding karena adanya TNI dan legalitas dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. (Hal) ini harus jelas bahwa legalitas dan kekuatan ada. Karena perang memang hanya atas dua (faktor) yaitu ada legalitas dan adanya kekuatan (tentara) termasuk kekuatan rakyat yang memberikan bantuan. Tanpa rakyat tidak mungkin, dan ini sudah berulang kali saya katakan bahwa saya selalu *menyaur* (membayar) utang (pada) mereka, atas kebaikan mereka.

Mengenai Roem-van Royen (dan) isu bahwa pak Dirman mem-bangkang; itu juga salah. Pak Dirman selalu menyatakan pandangannya. Kalau (sesuatu) diputuskan (atasan) beliau selalu ikut. Waktu pak Dirman meninggal Bung Hatta berpidato :

" . . . saya kenal beliau sebagai seorang yang keras hati, tetap ke-mauan. Dalam melakukan kewajibannya, ia tak pernah mengingat dirinya sendiri, malahan senantiasa berpedoman kepada cita-cita negara. Demikian hebat ia mementingkan kewajibannya, sehingga ia menyia-nyiaikan kesehatannya . . .

Jarang kuketahui orang begitu keras dan begitu setia memenuhi kewajibannya. Sebagai Wakil Presiden RI dan Menteri Pertahanan selama tahun 1948 aku banyak sekali berhubungan dengan Soedirman; saya kenal ia dalam segala sifatnya. Sebagai seorang yang mempunyai cita-cita nasional dan seorang yang cinta pada tanah airnya, Jenderal Soedirman tidak segan-segan mengeluarkan pendapatnya terhadap politik yang dijalankan oleh Pemerintah.

Sering-sering orang menyangka, bahwa ia adalah seorang yang sukar dikemudikan, seorang yang "lastig". Tetapi siapa yang mengenal dia dari dekat, sebagaimana saya mengenalnya, mengakui bahwa Soedirman adalah seorang yang keras hati yang suka membela pendiriannya dengan bersemangat. Tetapi apabila Pemerintah telah mengambil keputusan, ia selalu taat dan menjalankan keputusan itu dengan sepenuh-penuhnya . . ." (foto copy koleksi pribadi sebagaimana terlampir dalam surat Tjokropranolo kepada Panitia Seminar)

Jadi jangan salah terka tentang pak Dirman. Jika mengikuti cerita pak AH Nasution, satu ketika Bung Karno, pak Dirman, dan Nasution harus menyelesaikan persoalan yang *crucial*. Karena tidak bisa menemukan solusi, akhirnya tiga-tiganya menangis, dan pak Dirman mengajukan pengunduran diri. Tapi pak Nas bilang : " kalau pak Dirman mundur, kacaulah kita semua". Demi kepentingan nasional pak Dirman tidak

jadi mundur. (Dengan cara itu) persatuan dan kesatuan bangsa bisa dijaga. Hal ini perlu ditekankan, karena penting buat generasi kita

b. RH Hidayat

Bagi yang sudah kenal saya, saya kira sudah tahu bahwa saya tidak bisa berpidato dan memberikan sanggahan. Karena itu mungkin mengecewakan dan oleh sebab itu pula saya kirim tulisan kepada panitia seminar berupa catatan pribadi mengenai pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Dalam tulisan saya itu tertulis : ". . . setelah Divisi Siliwangi hijrah pada tahun 1948, pernah disampaikan suatu memorandum oleh Letnan Kolonel Daan Jahja (kepada staf Divisi Siliwangi) kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, mengenai perlunya diadakan persiapan membentuk suatu Pemerintah Darurat di Sumatra, bilamana akibat suatu agresi Belanda yang baru, Pemerintah Pusat di Yogyakarta tidak dapat diper-tahankan lagi berhubung wilayah Republik Indonesia di pulau Jawa ter-lampau sempit untuk memungkinkan keleluasaan manuver gerilya yang aman bagi kelanjutan perjuangan Negara Republik Indonesia. Bersama-an dengan itu, di kalangan Pemerintah Pusat terkilas pula pikiran me-nyusun "terugval basis" di daerah Republik Indonesia di pulau Sumatra bahkan bila perlu juga di luar negeri . . . Untuk itulah pada pertengahan (Nopember) 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta, didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel R. Hidayat mengunjungi Bukittinggi. Kemudian dalam rangka persiapan itu, jabat-an Panglima Komando Sumatra ditimbang terimakan dari tangan Mayor Jendral Suhardjo kepada Kolonel Hidayat Segera setelah menerima berita radio dalam dan luar negeri tentang penyerbuan Belanda ke Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 dan tertawannya Kepala negara serta anggota Kabinet, pada sementara pihak di Bukittinggi timbul perasaan akan urgensinya merealisasi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia untuk memelihara kesinambungan perjuangan kemerdekaan . . . Berhubung perkembangan situasi dirasakan urgensi-nya mengadakan tindakan darurat tersebut. Keadaan ini telah memaksa Kolonel R Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorial Sumatra dan ajudannya Kapten Islam Salim, dengan disaksikan oleh Mr. T.M. Hasan, pada sore hari tanggal 19 Desember memberi desakan kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawira Negara untuk melaksanakan tindakan darurat tersebut Menteri Kemakmuran Sjafruddin akhirnya dapat mengatasi keengganan, dan bersedia menghubungi pimpinan teras Republik Indonesia di Sumatra Tengah, untuk melaksanakan pem-bentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia . . ."

Jadi saya hanya mendesak, karena maaf tentara tidak berpolitik. Setelah itu saya ikut pak Sjafruddin dan pak Hasan sampai ke Halaban, kemudian berpisah, supaya kalau ada usaha penangkapan, tidak semua

ditangkap (Belanda, bisa) hilang PDRI. Saya dengan ajudan saya dan seorang teman lagi (Jusuf Ramli) pernah menjadi pembantu Menteri Keuangan pergi ke utara. Di situ saya menyaksikan realisasi pertahanan semesta, di mana pak Kawilarang, Bejo, dan beberapa gerilya lainnya, menghajar satu truk Belanda dan merebut senjata mereka.

Saya terharu mendengar teman-teman tadi bercerita. Seolah-olah saya ini berjasa, padahal saya hanya berjalan kaki dua ribu kilometer sampai di Aceh. Makan dan minum di ladang. Setelah sampai di Aceh juga ingin ke selatan untuk memeriksa pertahanan pak Simbolon di Sumatra Selatan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Gubernur Militer Sumatra Selatan ketika saya perintahkan pembumihangusan ladang minyak sebelum Belanda datang.

Sampai akhirnya Bung Hatta datang ke Aceh untuk mencari Sjafruddin. Ketika itu Bung Hatta dengan bijaksana menceritakan bahwa ada suatu tujuan khusus dengan adanya Roem—van Royen. Beliau menanyakan sikap saya, apa keberatan berunding dengan Belanda. Saya ketika itu agak keras dengan mengatakan bahwa saya keberatan. Saya katakan kita mempunyai de facto di sini, dan Belanda tidak berani masuk. Kita akan teruskan perjuangan ini sampai merdeka betul. Bung Hatta menjadi marah : "apa saudara sebagai militer memiliki konsepsi politik". Saya belum pernah dengar istilah konsepsi politik. Saya katakan : saya siap pak. Itulah catatan pribadi saya . . .

c. Tanu Suherly

Dari beberapa sumber yang saya baca, pada Pemerintah Republik Indonesia ada (badan) yang disebut Dewan Siasat Militer. Semua strategi yang akan dijalankan negara sudah dipolakan (terlebih dahulu) oleh Dewan Siasat Militer; diantaranya (tentang) mengapa pak Hidayat dikirim ke Sumatra. Begitu juga pak Kawilarang, dan lain sebagainya. Direncanakan juga Presiden akan ke India, dan Bung Hatta akan memimpin gerilya di Sumatra. Jadi saya rasa masalah berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia sudah dipolakan juga. Hanya yang tidak dapat diperkirakan kapan Belanda itu akan menyerang Republik. Jadi masalah pak Sjafruddin yang tidak menerima kawat, sebagaimana kata pak Hidayat sudah otomatis melakukan tindakan di Sumatra. Andaikata terjadi (penyerbuan), akan berdiri badan perjuangan, kebetulan namanya PDRI. Hal itu sudah otomatis karena sudah dipolakan

Kalau kita lihat kedudukan para pemimpin pada waktu itu, kita lihat Bung Karno, Agus Salim, dan Sjahrir di Prapat (sedangkan) Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Mohammad Roem, ada di Bangka. Ir Djuanda bebas di Yogyakarta, Leimena bebas di Jakarta, dan Sjafruddin berada di Sumatra memimpin PDRI. Di Pulau Jawa ada Soekiman, Kasimo, Supeno, Susanto Tirtoprodjo, dan KH Masjoer. (Hal) itu semuanya sudah terpolakan juga. Saya kira sudah jelas. Hanya saja yang menjadi

persoalan untuk kepentingan pendidikan, memang masalah PDRI sangat sedikit sekali.

d. Mahyudin.

Saya ingin mengoreksi sedikit makalah yang disampaikan pak Chaniago pada halaman 6 bahwa radio di Aceh itu (berada) di Tangse. Sebenarnya bukan di Tangse, tetapi radio rimba raya di Biereun Takengon.

Hal yang lain adalah bahwa kita tahu daerah Aceh itu adalah daerah yang terjauh dari pusat Pemerintahan Republik di Yogyakarta pada waktu itu. Tapi Pemerintah Daerah Aceh berjalan sebagaimana biasa, baik sebelum Belanda menyerang maupun sesudah terbentuknya PDRI. Malah adanya PDRI memberikan (fungsi khusus) pada Kutaraja. Komando Angkatan Laut di bawah Kolonel Subiyakto berada di Kutaraja. Begitu juga Panglima Tentara dan Teritorial Sumatra Kolonel Hidayat berkedudukan di Kutaraja. Pak Martadinata berkedudukan di Banda Aceh. Dalam penerbitan Arsip Nasional masih sedikit (dijumpai) arsip mengenai Gubernur Militer Aceh. Kami berharap Arsip Nasional dapat menelusuri arsip Gubernur militer ini, kemana dipindahkan. Kita tahu di Aceh ada perubahan dari Gubernur Militer yang dibentuk pak Sjafruddin menjadi bagian dari Gubernur Sumatra Utara. Saya ingin agar arsip itu dicari dan dikumpulkan.

e. Chairul Basri.

Saya ingin menambahkan beberapa informasi. Saya waktu itu adalah komandan intelijen, staf pak Hidayat. Pertama, di Komandemen Sumatra sebetulnya sudah ada satu strategi bagaimana menghadapi Belanda. Kita membayangkan (pulau) Sumatra dari atas sampai ke bawah kita bisa lihat tiga sumbu. Sumbu pertama adalah Medan, Pematang Siantar, terus ke Sibolga. Sumbu kedua adalah Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru. Sumbu ketiga adalah Palembang terus ke Bengkulu.

Dalam pikiran kita, di Sumatra Belanda kekurangan pasukan, karena konsentrasi penyerangan itu adalah di Jawa. Jawa harus ditundukkan dulu (baru) Sumatra menyusul. Karena Belanda kekurangan pasukan, (maka) dia hanya akan menduduki kota-kota besar saja. Diperkirakan yang akan diduduki mereka adalah sumbu Medan, Pematang Siantar terus ke Sibolga. Kemudian sumbu Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru. Ketiga adalah sumbu Palembang, kalau bisa terus ke Bengkulu. Menurut perkiraan kita Belanda tidak akan bisa menerobos dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Artinya Belanda tidak akan mampu berangkat dari Medan ke Kutaraja; begitu juga tidak akan mampu menghubungkan Sibolga dengan Bukittinggi atau sebaliknya. Berdasarkan perkiraan itu, kalau Belanda menyerang,

12
kita harus mundur ke utara, tidak ke arah sumbu itu. Pak Tengku Muhammad Hasan (yang ke selatan) menderita sekali oleh serangan Belanda, karena beliau dalam jalur sumbu yang diikuti oleh Belanda itu. Sementara Komandemen Sumatra mundur ke utara sebagaimana diceritakan pak Hidayat. Waktu tanggal 19 Desember sore, pak Hidayat menanyakan kepada saya: "kemana kita harus mundur", saya katakan, kita harus mundur ke utara, karena di sana tempatnya yang paling aman. Di sana masih bisa dibentuk basis antara Tapanuli Utara dengan Bukit-tinggi. Tambahan lagi daerah ini mempunyai hubungan dengan Sungai Rokan, Riau, ke Bengkalis, terus ke Singapura. Jadi daerah ini memang sudah dipersiapkan . . . Komandemen Sumatra adalah suatu komando yang mundurnya teratur. Ketika tanggal 20 Desember (1948) pak Hidayat memerintahkan untuk mundur, dan yang mundur itu seluruhnya, sampai kertas dan mesin ketik di bawa, seluruhnya lengkap. Jadi waktu mundur, komandemen utuh sebagai satu kesatuan dengan pasukan-pasukannya. Karena mundurnya teratur, pasukannya dan perhubungannya tidak saja mobil juga taktis. Siaran-siaran PDRI yang tidak sampai di Kutaraja, dibantu siarannya oleh Komandemen Sumatra untuk ke Aceh dan New Delhi. Begitu juga ke Jawa. Di samping mempunyai siaran sendiri, Komandemen Sumatra membantu siaran PDRI. Hal (semacam) itu yang tidak disebut (dalam makalah ini). Basis siaran itu ada di Rao. Di sana semua siaran, baik ke Jawa maupun ke Aceh (diperkuat) di tempat ini. Pak Hidayat itu bukan hanya berjalan ke utara, tapi juga menghubungi Kolonel Simbolon (di selatan). Menghubungi PDRI yang masuk hutan di Bangkinang, memperingatkan agar tidak terus, karena di sana terlalu banyak macan dan gajah. Waktu itu berbahaya.

Sebuah tambahan lagi tentang perjalanan pak Hidayat ke utara. Beliau membuat sepatu dan celana (khusus) agar tidak dapat dimasuki lintah. Perlu dicatat bahwa perjalanan pak Hidayat itu dalam satu daerah di mana beliau belum dikenal. Karena beliau panglima baru, belum dikenal oleh pasukan. Jadi (setiap saat) harus selalu memperkenalkan diri: "saya adalah Panglima Sumatra". Saya pikir (hal semacam) luar biasa.

f. Umar Said Noor.

Saya orang teknik, jadi saya akan menjelaskan secara teknik pula. Ada dua catatan kecil saya. Pada halaman 5 ceramah (Chaniago) tersebut tertulis (dua) konsentrasi: konsentrasi PDRI pertama di Bidar Alam, dan konsentrasi kedua di Payakumbuh. Kalau konsentrasi di Bidar Alam itu hanya tiga bulan dari 204 hari masa PDRI, yakni dari tanggal 22 Desember (1948) sampai dengan 13 Juli (1949). 90 hari di Bidar Alam, 104 hari di lain tempat, dan 20 hari di Kototinggi. Jadi kalau mau dikatakan konsentrasi, maka itu adalah konsentrasi yang

bergerak. Kalau konsentrasi dekat Payakumbuh adalah tempat pak Rasjid dan pak Sitompul selama 204 hari.

Kemudian koreksi dari pembicara terdahulu (Mahyudin) mengenai PHB TNI Angkatan Udara yang waktu itu di Tangse dan Takengon, (hal) itu benar. Pernah melewati Tangse kira satu bulan, karena ada satu peristiwa, kemudian dipindahkan ke Takengon. Tapi persis (tanggal) 1 Maret (1949) masih ada di Tangse, sehingga berita (Serangan) 1 Maret yang dikirim dari Yogya adalah melalui Tangse dari Bidar Alam.

Berikutnya pada halaman 9 alinea terakhir mengenai rapat Pleno PDRI. Sidang Pleno kedua bukan di Sumpur Kudus, tetapi di Tanjung Ampalu, di sebuah kampung bernama Calau. Di Calau ini ada sebuah kenangan; seorang ibu melahirkan (bayi), dan kita beri nama Aurina Rajawati atau radio AURI. Waktu saya ketemu (anak) itu tahun 1985, Aurina sudah punya anak tiga.

Kemudian dalam buku pak Rasyid tertulis bahwa rombongan pak Sjafruddin sampai di Kurinci. Rombongan pak Sjafruddin tidak pernah sampai di Kurinci, hanya sampai di Bidar Alam. (Sebab) kalau mau ke Kurinci harus melalui Muara Labuh. Muara Labuh itu kira-kira 18 Km dari Bidar Alam.

... Mengenai peranan perhubungan radio yang dipegang oleh AURI perhubungan ini dikonsentrasikan sesuai dengan konsentrasi PDRI. Pertama, di Koto Tinggi yang dipimpin oleh seorang komandan yang bukan orang PHB, yaitu M. Yakoeb. Di sana ada jembatan yang dinamakan "Jembatan air mata si Yakuik" (air mata Yakceb), karena alatnya yang segede gerobak jatuh ke sungai, dan pak Yakoeb satu malam menunggu di sana yang oleh rakyat dikatakan menangis, sehingga jembatannya disebut jembatan air mata si Yakoeb. Pak Yakoeb inilah yang me-

layani rombongan pak Rasyid. Kebetulan yang melayani dari TNI Angkatan Udara. Waktu tahun 1985 saya melihat di rumah gonjong yang dulu pernah ditempati pak Yono (Kolonel Soejono) tertulis: "di sini dulu RRI dan PTT yang melayani pak Rasyid", itu tidak benar. Kami himbau supaya diluruskan dan dibetulkan.

Konsentrasi yang bergerak dipimpin oleh seorang teknisi radio Kapten Siddik Tamimy. Pangkat saya waktu itu berada nomor dua seteah Kapten Tamimy. Pak Udoyo, Kusnadi, dan Zainal Abidin, ikut melayani PDRI selama 204 hari itu.

Mengenai keterangan (Maladi) bahwa Wonosari di bom 10 Januari, itu betul. Tapi kita tidak berhubungan dengan pak Maladi, tetapi selalu dengan radio AURI yang sudah berkeliling, akhirnya ke Playen. RRI hanya menyiarkan (berita), tidak mengirimkan radiogram ke Bidar Alam. Berita yang diterima Bidar Alam diteruskan Tangse-Kutaraja, waktu itu belum ke Takengon. Dari Kutaraja ke Rangoon. Pak Wiweko dan pak Sumarno sampai pinjam radio dari Angkatan Darat Burma (Myanmar), minta ijin sama Jenderal Newin. Berita-berita yang diterima dikirim via pos dan telegraf kemana saja, seperti ke India dan Amerika..

g. Wangsawidjaja.

. . . Tanggal 19 Desember 1948 Belanda sudah di Maguwo dan Yogyakarta terkepung. Pada jam sepuluh Presiden Sukarno (dan) Bung Hatta mengadakan rapat kabinet, dihadiri oleh sebagian kecil menteri, karena banyak yang di luar kota. (Sidang ini) juga dihadiri Bung Sjahrir.

Dalam sidang kabinet itu dibicarakan bahwa Yogyakarta pasti diduduki, dan kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus membentuk pemerintah darurat dan diputuskan pemerintahan darurat itu diadakan di Sumatra dan dipimpin oleh saudara Sjafruddin Prawiranegara yang kebetulan sebagai Menteri Kemakmuran sedang berada di Sumatra. Perintah itu disusun, dan diperintahkan pada Ir. Djuanda, waktu itu Menteri Negara, supaya disampaikan kepada Sjafruddin di Bukittinggi. Ir. Djuanda menghubungi kantor telepon, dan mengirimkan kawat (juga) kepada Radio Republik Indonesia.

Kira-kira jam 12 rapat selesai. Bung Hatta dan saya pulang ke rumah. Bung Karno tetap di rumahnya (di istana). Jam 3 (sore) Belanda memasuki Yogyakarta dan menawan Bung Karno. Kemudian Mr. Gafar Pringgodigdo (sekretaris negara) disertai tentara Belanda datang ke rumah Bung Hatta, di mana kami bersama pembesar lain (seperti) Kepala Kepolisian Negara berkumpul dan terus ditahan dan dibawa ke istana. Semua dikurung di istana. Kira-kira tiga hari kemudian (baru) Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Gafar, Agus Salim, Asaat, dibawa ke Maguwo, terus dibuang. Kami yang ditahan dibebaskan pulang ke rumah. Barangkali seminggu dimasukkan Wirogunan.

Jadi pemerintahan PDRI itu sudah ditetapkan oleh Kabinet (di) Yogyakarta pada hari itu. Kebetulan juga ada inisiatif dari Mr. Sjafruddin dan lain-lain yang kebetulan (berada) di Sumatra mendirikan (PDRI) itu. Jadi sesuai dengan perintah dari Yogyakarta. Demikianlah untuk menambahkan, supaya jangan dilupakan bahwa Yogyakarta waktu itu sudah menetapkan akan ada Pemerintah Darurat di Sumatra.

h. Rusdi Muchtar (saran tertulis).

Perlu diadakan studi mendalam mengenai peranan radio dalam PDRI, baik dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, maupun sebagai media massa. Bagaimana dampaknya peran komunikasi tersebut terhadap masyarakat ketika itu ?;

i. Awaluddin (tertulis)

Walaupun Jawa dan Sumatra sebagian besar diduduki Belanda pada waktu clash II, tetapi Aceh tidak pernah diduduki mereka. Garis demarkasi setelah clash I adalah Gebang (dekat Pangkalan Brandan) di Sumatra Timur. Timbul pertanyaan, mengapa Belanda tidak menyerbu ke daerah Aceh seperti yang dilakukannya ke daerah-daerah Republik Indonesia lainnya. Analisis saya: pertama, daerah Aceh bukan merupa-

kan basis ekonomi yang potensial yang bisa dengan cepat menghasilkan dana yang diperlukan oleh Belanda untuk membiayai operasi militernya. Sesudah Pangkalan Brandan (sebagai pusat penggilingan minyak kepunyaan BPM) dibumi hanguskan oleh pejuang sesudah clash I, maka Belanda tidak bernafsu lagi maju ke Pangkalan Brandan, terus ke Aceh, tetapi tetap di garis demarkasi di Gebang. Memang ada perkebunan karet di Langkat utara dan Kabupaten Aceh Timur. Tetapi tidak seberapa luas, sehingga kurang menarik bagi Belanda. Kedua, Belanda "takut" pada semangat heroik Aceh. Perang Aceh-Belanda tahun 1873 - 1914 merupakan pengalaman pahit bagi Belanda. Kedua alternatif di atas sampai saat ini belum terjawab. Mungkin karena sudah ada perundingan Roem-Royen, maka masalah penyerbuan ke Aceh tidak dipikirkan lagi oleh Belanda. Ada sementara informasi bahwa Belanda akan menyerbu ke Aceh pada bulan September 1949. Pasukan Belanda sudah mulai dikonsentrasikan di Sabang. Tetapi karena ada Roem-Royen, maka rencana itu tidak direalisasikan. Sampai dimana kebenaran informasi ini ?

j. Jawaban JR. Chaniago sebagai pemrasaran.

Kalau yang berbicara tokoh-tokohnya sendiri, saya mau kasih komentar apa lagi. Terima kasih atas tambahan bahan, nanti yang belum ada akan disempurnakan.

Dari pembicara pertama sampai pembicara yang terakhir, saya makin yakin akan kesimpulan saya bahwa ada pertautan antara inisiatif lokal dengan masalah legalistis. Jadi di satu pihak ada strategi yang ditetapkan sidang kabinet, dan di pihak lain ada usaha untuk mendirikan dan mempertahankan eksistensi Republik. Kedua-duanya kok namanya sama yakni Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

3). *Tanggapan atas makalah Machfudi Mangkudilaga **

a. Abdul Halim

Apa yang saya utarakan ini tulisannya sudah ada pada panitia, namun barangkali perlu saya jelaskan. Jabatan saya ketika (clash II) itu adalah Kepala Staf Tentara Teritorium Sumatra Barat. Pertanyaan yang empat puluh tahun tidak bisa saya jawab adalah tentang serangan Belanda. Kalau di Yogyakarta (Belanda) melakukan serangan *blitzkrieg* militer dengan terlebih dahulu menerjunkan pasukan payungnya di Maguwo, dan pada sore harinya menguasai Yogyakarta, menangkap Presiden, Wakil Presiden, dan sebagian besar Menteri, anehnya kenapa hal serupa tidak mereka lakukan di Sumatra. Maksud saya (dengan

* lihat naskah pada hal

serupa adalah pelabuhan udara Maguwo berjarak kira-kira 10 Km dari Yogya, di Bukittinggi (yang merupakan) pusat pemerintahan Sumatra, pusat militer, pusat perjuangan rakyat, di sini juga ada pelabuhan terbang Gadut (yang) jaraknya cuma 5 Km dari Bukittinggi. (Padahal) Gadut ini sangat berjasa dan berperan menghubungkan Jawa dan Sumatra. Mengapa mereka tidak melakukan strategi dan taktik yang sama dengan menjatuhkan pasukan Payung di Gadut. Saya pikir tengah hari Bukittinggi (mungkin) sudah dikuasai. Mereka justru menerjunkan pasukan payungnya di danau Singkarak, dan memusatkan pasukannya di Sumani, di Ombilin, dan Batutebal. Dengan menjatuhkan pasukan payung melalui Catalina di (danau) Singkarak yang jaraknya sekitar 50 Km dari Bukittinggi maka mereka baru mencapai Bukittinggi pada hari keempat. Sedangkan pasukan yang menerobos dari front utara baru sampai di Bukittinggi pada hari kesepuluh. Padahal kalau mereka langsung ke Bukittinggi, mungkin tidak bisa pak Sjafruddin, Tengku Moh Hasan, membikin embrio PDRI pada sore hari tanggal 19 Desember, karena seluruh jalan keluar sudah dikuasai, (umpamanya) jalan raya Bukittinggi—Lubuk Sikaping itu bersebelahan dengan lapangan terbang Gadut. Begitu juga jalan Bukittinggi—Payakumbuh (masih) dalam jangkauan, dekat sekali. Satunya alternatif keluar adalah jalan Bukittinggi—Matur menuju Maninjau. Dan itu juga (hampir) tidak mungkin karena dalam waktu pendek (jalan) itu bisa mereka kuasai . . . Jadi gerak cepat yang mereka lakukan dengan berhasil di Yogya, gagal di Sumatra. Sehingga maksud untuk mengeliminir Pemerintah Republik (juga) tidak berhasil.

Saya pernah melakukan pembicaraan dengan Letnan Kolonel Raebei, Komandan Resimen Prinses Irene di Bukittinggi. Kita bertemu di rumah dr. Yusuf ketika kita sudah masuk kota. Dia berlari mengejar saya dan berkata: "Letkol Halim ya". Ya kata saya, saudara tentu overste Raebel. "oh ya" katanya. Lantas kita bersalaman. Waktu itulah ia menerangkan kekesalan (dan) kekecewaan terhadap opsir stafnya. Mengapa, saya bertanya. "Tuan tahu", katanya, "pada waktu kami sampai di Padang Panjang (pada) hari Selasa pukul 6 sore, saya pribadi ingin meneruskan gerakan ke Bukittinggi malam itu juga. Opsir saya mendapatkan bahan dari intelijen bahwa antara Bukittinggi dan Padang Panjang ada sekitar 10.000 pasukan TNI bersenjata lengkap dan siap bertahan untuk menangkis setiap serangan Belanda. Dengan pertimbangan itu, saya tidak mau melakukan", katanya. Saya pikir Komandan Brigade I sejak semula memang tidak bertindak sendiri (tetapi) bertindak atas instruksi komandan militer di Jawa, di Batavia. Jadi menurut pendapat saya, sejak mulai clash II itu, (tentara) Belanda di Padang memiliki perkiraan yang salah terhadap kekuatan TNI di Sumatra Barat. Karena takut menghadapi *debacle militair* mereka tidak menjatuhkan pasukan payung di Bukittinggi, tetapi mendaratkannya

lewat Catalina di Danau Singkarak dan memasukkan pasukan-pasukan mereka di desa-desa Sumani, Ombilin, dan Battegal. Jadi ketidaktepatan intelijen Belanda; mengakibatkan PDRI bisa dilahirkan dengan selamat..

Interupsi Moh Rasjid.

Saya ingin tanya, nanti saudara Halim jawab, karena ini penting. Belanda mendarat di Singkarak, hari ketiga baru sampai di Padang Panjang, 21 Desember jam 6 sore. Ya memang waktu itu keluarga saya masih di Padang Panjang. Saudara Eny Karim yang mengambil keluarga saya (dan membawanya ke Bukittinggi sekitar setengah enam.

Jarak (lapangan terbang) Tabing ke Bukittinggi sekitar 80 Km. Berapa jarak Magelang—yogyakarta. Coba saudara Halim jawab.

Keterangan lanjutan A. Halim

Saya mesti tanya pak Budiardjo. Kalau jarak Tabing dan Bukittinggi yang dimaksud pak. Rasjid bukan 80 Km tapi 90 Km. Garis Renville berada di Sungai Tapakis sekitar 5 Km dari Lubuk Alung, artinya Sungai Tapakis itu berada pada kilometer empat puluh. Kalau diambil dari Tapakis ini, jarak ke Bukittinggi cuma 50 Km.

Komentar Machfudi Mangkudilaga

Komentar saya begini. Pada Aksi Militer II itu sebetulnya Belanda (kekuatannya) kurang daripada waktu Agresi Militer I. Pada waktu Agresi I mereka mempunyai marinir satu brigade, sedangkan pada Aksi militer II hanya batalyon ampibi saja. Lagi pula Belanda menganggap lawannya adalah Yogya, karena itu mereka mengkonsentrasikan serangan payungnya pertama-tama Yogya dulu. Kita tahu pasukan payung Belanda tidak banyak, hanya (kesatuan) kompi saja. Belanda berpikir juridis formal, dengan ditangkapnya Sukarno—Hatta, *the republic does not exist anymore*; propaganda mereka *de republiek bestaat niet meer*

b. A.E. Kawilarang.

Jawaban dari pembicara terdahulu (A Halim) saya rasa begini. Pertama, tujuan Belanda adalah menduduki Yogya untuk menangkap Sukarno—Hatta (dan) kalau bisa juga menangkap Panglima Besar. Agar bisa segera menduduki Yogya perlu *airborne* artinya dengan pasukan payung. Tapi pasukan payung mereka tidak terlalu banyak, tidak ada dua ratus (orang) dan untuk itu perlu sepuluh DC-3. Dan dua ratus orang itu tidak cukup untuk menyerang Yogyakarta, untuk itu perlu *lucht infanterie* yang hanya beberapa batalyon. Sebetulnya kalau Belanda cukup kaya, bisa dengan glider, tapi mereka tidak punya glider. Karena itu dipakai semua DC-3 seluruh Jawa. Setelah mendaratkan *lucht infanterie* satu atau dua batalyon di lapangan terbang Maguwo,

barulah mereka menyerang Yogyakarta. Jadi tidak cukup dengan airborne forces saja diperlukan ML (Militaire Luchtvaart).

Mereka juga siapkan pasukan payung untuk menangkap Panglima Besar (dengan) mendaratkan pasukan itu di selatan Yogya. Pasukan yang datang dari arah Magelang tidak bisa mencapai Yogyakarta dalam satu hari, karena di situ ada pasukan TNI yang kuat. Mereka perlu satu atau dua batalyon untuk menyerbu Yogyakarta. Laporan ini kami peroleh dari seorang Kapten Belanda yang bernama Kapten Visser, yang kemudian menjadi warganegara Indonesia, dan menjadi pelatih School troop of parachutes (pasukan parasut) di Cimahi

c. Tjokropranolo.

. . . Keterangan pak Kawilarang itu benar, karena pamflet yang membenarkan ketika itu yang berbunyi Sukarno-Hatta, dan Soedirman harus ditangkap. Tidak ada pamflet yang berbunyi PDRI harus dihancurkan

d. Marah Yunus Boy.

. . . Saya ingin menceritakan satu episode draft gencatan senjata sebelum KMB. Waktu itu saya sebagai *liaison officer allied local joint committee* Sumatra Barat, (pada) daerah yang (untuk) pertama diserahkan, khususnya di Payakumbuh, (dan) bagaimana menghadapi kendala, (seperti) ada prajurit kita yang ditembak. Waktu itu *stanavast*. Kita berunding dengan mayor Stopper dan Kepala staf Brigade I Mayor van Horn. Waktu kita membicarakan kemungkinan serah terima, dia bersikeras tidak mau. Ia ingin memancing ketegangan, sehingga perundingan gagal. Kita juga keras terhadap mereka . . . tapi kita punya satu *troef*; kita mempunyai dua tawanan tentara Belanda letnan Pekchet dan seorang sersan mayor . . . mereka juga kaget. Pak Rasjid yang berunding dengan orang Belanda ketika itu mempunyai satu counter proposal. Kalau tahanan mereka dilepaskan, tahanan kita juga harus dilepaskan, seperti Marzuki Yatim, dan lain-lain. Pak Rasjid juga menambahkan agar mereka memberikan 50 atau 500 ton beras. Kemudian ada kesesuaian, dan kita mengeluarkan tahanan itu. Payakumbuh merupakan daerah yang pertama yang diserahkan . . .

Hal lain adalah strategi pertahanan rakyat yang dibuat sebelum clash II. Kita sudah mempopulerkan gerilya - politik - ekonomi (gerpolek). Kita bentuk semacam pagar betis yang diberinama Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK). Pemuda di kampung-kampung mendapat tugas mengawasi kedatangan musuh dan memandu tentara yang mau kemana (ke suatu tempat) yang arahnya tidak diketahui. Kita mengadakan gerilya bukan pada satu tempat saja, tetapi di seluruh pojok kota yang mereka duduki. Bahkan pernah saudara Rasidin Rasjad men-

duduki kota Batusangkar satu malam. Belandanya lari, dan posnya dibakar, kemudian pasukan kita kembali lagi

e. Eny Karim.

Saudara pembawa makalah mengetengahkan mengenai sumber-sumber Belanda, dan sumber-sumber itu dapat kita pakai sebagai cermin. Tetapi karena kita kaya dengan budaya lisan hendaknya tokoh-tokoh PDRI yang sekarang dimanfaatkan sepanjang mereka masih hidup; didengarkan ucapannya dan dipakai. Sebab bapak-bapak ini tidak sempat menulis banyak. Hampir seluruh cerita yang dikemukakan (dalam seminar ini) militer saja yang dibicarakan, sipil (hampir) tidak ada. Kenapa? Salah satu keputusan rapat tanggal 19 Desember (1948) di Bukittinggi yang dipimpin Tengku Moh. Hasan, adalah diundurnya pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 . . . Peranan sipil juga tidak sedikit. Dalam masa sulit para Bupati juga melaksanakan tugasnya : kita menyediakan padi, jagung, air, tempat tidur, daging, ikan, entah apa lagi. Dalam satu rapat yang dipimpin Gubernur Militer Moh. Rasjid saya pernah bertanya : berapa ton padi yang telah kita makan, (tetapi) belum dibayar, sudah berapa empang (ikan) yang sudah kosong, dan berapa kerbau yang sudah dipotong. Kenapa seminar ini tidak menyediakan satu atau dua halaman (untuk menceritakan) berapa sebenarnya sumbangan mereka. Saya minta ada satu bagian (tentang) sipil, entah bagaimana caranya . . . mudah-mudahan buku yang akan disusun memuat sejarah yang indah tentang Republik Indonesia, supaya guru tidak marah lagi ketika muridnya tidak tahu tentang PDRI.

Penjelasan Taufik Abdullah sebagai moderator.

Pertama, anjuran agar orang yang masih hidup dimanfaatkan, dapat diterima seratus persen. Soalnya kadang-kadang para sejarawan seringkali tidak tahu siapakah aktor itu, inilah salah satu sebab mengapa seminar ini diadakan; untuk mengetahui siapakah mereka itu yang masih hidup sekarang. Segala usaha untuk mengumpulkan keterangan lisan atau yang disebut sejarah lisan, sejarawan sadar bahwa ia *running against time*, ia berlomba dengan waktu. Dan dalam perlombaan itu biasanya mereka yang kalah. Nah yang diusahakan selalu memperkecil kekalahan. Karena itu kalau ada orang dari Arsip Nasional RI datang sediakan diri untuk berbicara pada kaset rekaman . . . Kedua, mengenai sipil itu benar. Waktu (kami) merencanakan seminar ini ada beberapa kemungkinan terbuka. Pertama, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa PDRI itu termasuk salah satu episode dalam sejarah yang hampir-hampir terlupakan. Sekarang bagaimana caranya sesuatu yang hampir terlupakan itu (dapat) diingat kembali. Nah ada beberapa kemungkinan dalam merencanakan seminar. Pertama kita bisa memakai pendekatan tematis dilihat dari aspek tertentu, misalnya: aspek militer PDRI,



aspek pemerintahan PDRI/ aspek ekonomi dan sebagainya. Kedua, selain pendekatan tematis, juga bisa melakukan pendekatan kronologis atau urutan-urutan waktu. Kita bisa mulai dari awal PDRI umpamanya *critical atmosphere* sampai kepada PDRI harus menghadapi Roem-Royen. Hal seperti itu juga bisa. Kemungkinan ketiga, dengan pendekatan tempat atau daerah. Kita bisa lihat bagaimana PDRI di Sumatra Utara, di Sumatra bagian Tengah, di Jawa, dan sebagainya.

Nah akhirnya yang dipilih adalah pendekatan ketiga. Soalnya sederhana saja. Kalau kita memakai pendekatan tematis, kita memerlukan bahan-bahan yang banyak mengenai ekonomi, berapa kecamatan yang membikin revolusi, berapa propinsi yang menggunakan Oerip sendiri, berapa rumah yang dibakar, berapa gaji Bupati perang, dan sebagainya. Kita akan membutuhkan bahan yang banyak. Karena itulah diambil pendekatan daerah. Kita bisa bertolak dari bermacam-macam aspek tapi dalam ruang lingkup daerah tertentu. Tetapi suasananya memang gerilya, sebetulnya tidak usah heran kalau yang keluar lebih banyak masalah perang

f. Mr. Moh. Rasjid.

Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk sebentar berdiri, guna menghormati arwah almarhum Sjafruddin Prawiranegara yang meninggal pada hari Rabu, 5 Pebruari 1989, Jenderal Soedirman yang meninggal tahun 1950, dan para pahlawan yang meninggal sesudah tahun 1945. Sebaiknya dipimpin saudara ketua sidang.

. . . Ada beberapa tambahan dari saya (untuk) menghilangkan salah pengertian, umpamanya ada yang bertanya kenapa Sjafruddin tidak ada di Kototinggi. Sebetulnya Sjafruddin dua kali ke Kototinggi. Pertama, ketika kita akan berembuk dengan wakil (yang dikirim) Pemerintah pusat, Hatta. Hatta kan pergi ke Aceh tanggal 4 Juni (1949) karena dikira kita ada di Aceh, padahal kita di tengah-tengah Belanda. Hatta kemudian mengutus Leimena, Natsir, dan A. Halim tanggal 5 Juli ke Padang, terus ke Payakumbun, dan ke Kototinggi. (Sebelumnya) 1 Juli kita sudah berunding dengan Sjafruddin di Sungai Naning, kemudian kita terus ke Baruh Gunung, Buah Datar, Kototinggi, dan Padang Jepang. Habis berunding (dengan mereka) selama dua hari yakni tanggal 6 - 7 Juli, tanggal 7 Juli malam saya bawa Sjafruddin ke Kototinggi (selama) tiga malam. Tanggal 10 Juli (baru) Sjafruddin dan Lukman Hakim kembali ke Yogyakarta, dan 13 Juli menyerahkan mandatnya kepada Hatta. Pak Dirman belum setuju ketika itu, dan kalau berontak ketika itu sebetulnya gampang saja. Tapi buat apa, kita kan mau menyelamatkan negara.

4). *Tanggapan terhadap Makalah Nazaruddin Sjamsuddin dan Adrial Adly/ Ishaq Thaher.*

a. Achmad Husein.

. . . Perlu diketahui oleh peserta seminar bahwa daerah Sumatra tengah dulu merupakan gabungan dari Sumatra Barat dan Riau. Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Halaban cuma dua hari, setelah itu menuju Riau melalui jalur Mahat Bangkinang. (Di sini) tidak lebih lima hari kemudian ke selatan melalui Lipat Kain, Kiliranjao, Sungai Dareh, dan ke Bidar Alam. (Tidak dapat dipastikan) apakah Belanda sebelumnya sudah mencium Pemerintah Darurat ini berada di Bangkinang, sehingga dibom oleh Belanda. Saya gambarkan lokasi ini agar bisa melihat dengan jelas. Sebab dari segi militer Sumatra Barat dibagi atas tiga komando. Pertama yang disebut Sub Komando A, meliputi daerah utara. Sub Komando B, meliputi daerah timur dari Batusangkar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, dan Padang Area. Sub Komando C di daerah Pesisir Selatan. Kebetulan saya menjadi Komandan Sub Komando B itu.

Di waktu (rombongan) Pemerintah Darurat menuju ke Bidar Alam di wilayah Sub Komando B kami sedang berada di daerah Sungai Selasi. Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa Belanda sudah mengkonsentrasi pasukan di daerah Solok. . . . Dalam pengamatan kami, dari info yang masuk Belanda mengetahui Bergeraknya (rombongan) Pemerintah Darurat Republik Indonesia dari Riau menuju wilayah Sumatra Barat. Hal itu terbukti sekitar tanggal 15 Januari 1949 Belanda mengadakan gerakan besar-besaran di wilayah Kabupaten Solok dan menutup jalur Sawahlunto-Sijunjung. Dengan mengirim satu kompi baret hijau, Belanda ingin menerobos ke jantung Kabupaten Solok di sepanjang Bukit Barisan dan menuju Sijunjung dan Sungai Dareh. Dari Lubuk Selasi kami naik ke atas, dan berhasil menahan terobosan Belanda dengan korban dipihak mereka sebelas orang. Saya hampir tewas dalam pertempuran itu. Salah seorang korban dari pihak kita adalah Kapten Hasibuan dari Komandemen Sumatra Timur.

Dengan pencegahan pasukan kita, tujuan Belanda yang hendak menuju Sijunjung untuk memotong jalur Riau dengan Sumatra bagian selatan terhalang di sana. Setelah itu kami ke Bidar Alam untuk menemui Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Diperjalanan kami bertemu dengan pak Suyono dari AURI, dan Panglima Divisi Banteng Darian Ibrahim. Rupanya beliau baru kembali menemui Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bidar Alam. Saya meneruskan perjalanan ke Bidar Alam yang kebetulan berada di bawah Sub Komando B. Setelah menginap satu malam di Bidar Alam saya terus ke Muara Labuh tanggal 19 Januari (1949), kota Muara Labuh yang merupakan lumbung padi Sumatra Barat dibom Belanda. Muara Labuh-Bidar Alam bisa ditempuh dua hari perjalanan. Pak Sjafruddin sedang berada di



suatu tempat bernama Padang Aru. Kami kembali dan melapor pada pak Sjafruddin dan minta beliau agar tidak usah ke Muara Labuh karena Belanda rupanya sedang menuju ke sana. Memang benar, lima hari kemudian Muara Labuh diserbu dari Alahan Panjang dan kemudian diduduki

(Sebelumnya) ada yang mengatakan bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia paling lama tinggal di lokasi Bidar Alam, itu benar. Kita atur keamanan, dan suplai mereka, rakyat membantu seperti digambarkan sebagai BPNK (Badan Pengawal Negeri dan Kampung). (Hal) itu satu (cuma) ada di Sumatra Barat. Di samping (BPNK) itu ada lagi yang dinamakan Pasukan mobil teras, yakni pasukan yang terdiri dari pemuda-pemuda kampung yang bergerak di sekitar kampung sendiri. Ditinjau dari segi pengamanan, pengaturan suplai dan kurir ke daerah pendudukan Belanda memiliki variasi tersendiri . . . Pemerintah kabupaten, kecamatan, semuanya dimiliterisasikan. Jadi bupatinya bukan militer dijadikan sipil, tetapi sipil yang dimiliterisasi, Bupati militer tapi dari sipil. Hal ini memang unik. Mr. Moh. Rasjid orang sipil adalah Gubernur Militer bukan Ismail Lengah yang panglima divisi. Bupati militernya bukan Ahmad Husein yang militer tetapi Haji Darus-taram, Eny Karim, yang sipil. Semuanya itu mencerminkan gaya Sumatra Barat. (Mungkin karena itu) Belanda tidak pernah berhasil mendirikan negara boneka seperti negara Sumatra Timur, Sumatra Selatan, dan sebagainya . . .

Selain itu sesuai dengan tujuan seminar untuk memperoleh masukan tentang berbagai persoalan yang belum diketahui dengan baik, saya rasa tujuan seminar ini bukan hanya membuat sebuah buku bunga rampai perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tapi ada kelanjutannya. Kita berkumpul bukan hanya untuk ngomong, ngoceh, berdebat, dan menyampaikan kejadian yang kita anggap benar, tapi hendaknya ada artinya bagi generasi yang akan datang.

b. Djoeir Moehammad.

Saya ingin memberikan tanggapan atas kedua makalah. Pertama adalah tentang Aceh pada masa PDRI. Saya akan menitik beratkan pada masalah-masalah politik dan penyusunan pemerintahan. Daerah ini agak unik, dan agak berbeda dengan daerah lain. Tahun 1953 saya pernah mengajukan mosi di DPR agar memberikan Aceh status otonom dan istimewa karena berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam otonomi yang luas itu Pemerintah pusat hanya menguasai masalah pertahanan dan luar negeri, sedangkan masalah lainnya diserahkan pada Aceh. Puluhan tahun Aceh mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Kita lihat juga bagaimana peranan alim ulama dalam kepemimpinan Aceh.

Aceh bukan hanya pintu gerbang komunikasi PDRI ke luar negeri tetapi juga penyedia dana bagi kegiatan kita di luar negeri. Aceh juga berhasil menghadiahkan sebuah pesawat terbang buat Republik. Karena itulah kita tidak hanya melihat peranan militer di Aceh. Dalam hal PDRI di Aceh banyak hal yang perlu dikaji. (Masalah) yang menjadi pertanyaan kita apakah PDRI sudah memasyarakat di Aceh; dan pertanyaan yang sama juga bisa diberikan buat daerah lain.

Kenapa Belanda tidak meneruskan serangannya ke Aceh. Apakah betul Belanda tidak mempunyai cukup kekuatan sehingga mereka tidak bisa sampai daerah Sumatra Utara dan Timur dengan perkebunan besar dan pelabuhan besarnya. Aceh sebetulnya sangat strategis bagi Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang membuka jalan kepada perjuangan dan dukungan internasional. Sifat karakteristik yang istimewa ini hendaknya dikaji lebih lanjut (sebagaimana) kita juga harus melihat bagaimana penyusunan pertahanan di daerah Aceh, (umpamanya) apakah disusun menurut ketentuan Dewan Pertahanan Negara nomor 85 di mana laskar-laskar harus berada di bawah komando TNI. Apakah hal semacam itu berjalan di Aceh (seperti) di Sumatra Barat yang dijalankan betul oleh Dewan pertahanan Daerah-nya.

Mengenai PDRI di Sumatra Barat saya hanya akan menyinggung dari segi politiknya. Kegagalan Belanda mendirikan negara boneka di Sumatra Barat, Aceh, dan Yogyakarta merupakan sumbangan berharga bagi Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Sumatra Barat tidak merasakan revolusi sosial seperti yang terjadi di Sumatra Timur dan mungkin juga di Aceh. Semua pamongpraja dari segala macam apakah pernah bekerja dengan Belanda atau tidak sesudah Proklamasi Kemerdekaan semua ikut dalam Republik Indonesia Hal ini mungkin disebabkan karena sejak Pergerakan Nasional gerakan politiknya sudah bersifat nasional. Sedikit sekali yang bersifat lokal (seperti) yang bergerak di lapangan sosial saja. Tokoh-tokoh Minangkabau yang melibatkan diri pada pergerakan nasional di Indonesia, jalan pikirannya mempengaruhi masyarakat Minangkabau.

Ada satu kejadian yang cukup penting untuk menggambarkan semangat nasional ini. Satu ketika Bung Karno yang ditahan Belanda di Bengkulu dipindahkan ke Padang dimana beliau bersama tokoh-tokoh Sumatra Barat membentuk Komite Rakyat untuk kemerdekaan. Menjelang Bung Karno akan dibawa Jepang ke Jawa kita mengadakan rapat. Setian pimpinan komite di daerah Sumatra Barat hadir termasuk saya yang menjadi Ketua Komite Rakyat Daerah Agam di Bukittinggi. Pada permulaan pidatonya Bung Karno mengejutkan kita semua yang hadir. Bung Karno berkata : "saudara semuanya. Saya sangat kecewa betul, karena sebelum saya berangkat ke rapat ini, tasnya Ibu Inggit dicopet orang ketika berbelanja ke pasar. Tas tersebut berisi perhiasan dan uang yang saya kumpulkan selama dalam tahanan Belanda".



Semua hadirin termasuk tokoh-tokoh dan alim ulama menaruh kasihan terhadap kejadian itu. Dengan dibelopori oleh Anwar Sutan Saidi semuanya memberikan sumbangan kepada Bung Karno, sehingga dapat uang tiga kali lipat dari harga perhiasan Ibu Inggit yang hilang.

Waktu diadakan rapat lagi keesokan harinya Bung Karno kelihatan cerah. Bung Karno bercerita: "saudara-saudara . . . waduh saya kagum sekali sama orang Minang ini. Tas yang dicopet kemarin sudah dikembalikan seutuhnya tidak satupun yang hilang. Di daerah Minang ini, biarpun tukang copet tetapi kesadaran nasionalnya tinggi". Saya tidak lupa dengan ucapan Bung Karno itu, tukang copet saja masih tinggi kesadaran nasionalnya.

Begitulah masyarakatnya memang berbeda dengan yang lain. Penyusunan pertahanan rakyat sesuai dengan penetapan Dewan Pertahanan negara no 85 itu . . . Di sinilah kita harus salut kepada almarhum Chatib Sulaiman yang berjasa dalam (memberikan) pemikirannya tentang bagaimana cara-cara penyusunan pertahanan rakyat dari yang paling bawah yang disebut Markas Pertahanan Rakyat Negeri; begitu juga BPNK, dan BPKKP yang merupakan badan perlengkapan.

c. Mahyudin.

Saya berasal dari daerah Aceh. Saya bukan mau membantah saudara Nazaruddin Syamsudin yang juga berasal dari Aceh, tetapi ingin menambah kekurangannya. Saya ingin mengoreksi pada halaman 6 bahwa yang memimpin Markas Komando Angkatan Darat di Aceh adalah Kolonel Hidayat. Sebenarnya yang memimpin adalah Tengku Daud Beureuh sebagai Panglima Divisi. Pak Hidayat datang ke sana sebagai Panglima PTTS.

Kemudian tentang Kolonel Suyono. Di Aceh yang terkenal adalah mayor Suyono Karseno yang lebih terkenal sebagai mas yos.

Kemudian pada halaman 5 tentang dominasi Pusat dalam pemerintahan. Di Aceh memang ada dua grup, yaitu dari golongan ningrat Uleibalang (Hulubalang) dan alim ulama. Tidak semua hulubalang itu berpihak pada Belanda. Hulubalang yang baik diterima oleh masyarakat dan tetap terus memerintah. Mr. Rasjad dan Mr. Teuku Moh. Hasan diterima sepenuhnya. Bagi yang berpihak pada Belanda itulah yang dihabisi dalam revolusi sosial dalam bulan Nopember, Desember, dan Januari. Jadi menurut pikiran saya Belanda pada Agresi II tidak mendarat di Aceh karena kaki tangannya tidak ada lagi di Aceh. Hal ini perlu menyelidiki lebih lanjut.

Mengenai fatwa alim ulama tidak hanya terbatas pada waktu terjadinya clash II. Sejak Proklamasi para ulama di Aceh sudah mengeluarkan fatwanya bahwa perang melawan Belanda itu adalah perang Sabillillah.

Saya ingin menambahkan tentang kharisma Teuku Daud Beureuh. Beliau seorang kiai tetapi menjadi Gubernur Militer. Kiai waktu jaman

Belanda dan Jepang masih pakai sarung dengan baju (tradisional Aceh). Beliau pakai pentalon dan jas setelah jadi Gubernur Militer. (Jalan) pikiran beliau selain sebagai ulama juga sebagai orang nasionalis. Ketika Tengku Mansyur mengundang beliau untuk hadir dalam Mukhtamar Sumatera, beliau tolak mentah-mentah dan tetap setia pada Republik. Saking besarnya kharismanya, beliau bisa mempersatukan TRI dengan Laskar (seperti) Laskar Pesindo, Laskar Mujahidin, dan Laskar Tengku Mevobakom. Bahkan sebagai Panglima Divisi T Daud Beureuh mengambil kepala staf dari kalangan laskar, dan itu diterima oleh TRI. Kenapa? Karena sebagian besar para komandan resimen dan batalyon adalah bekas murid beliau waktu memimpin sekolah agama. Pemerintah di Aceh bukan hanya dimonopoli oleh golongan PUSA saja tetapi juga oleh golongan ningrat, dan orang-orang yang berasal dari luar Aceh. T Muhammad Ali, T Cik Muhammad Daud Residen Aceh adalah orang ningrat. Pak Sutikno yang berasal dari Taman Siswa, Raden Hendri yang memimpin PJKA bukan orang Aceh. Bahkan perwira yang membantu Gubernur Militer seperti Letkol Azhari, Letkol Suryo Sularto, Mayor Syofian Harun, Kapten Mujihardjo adalah orang yang bukan berasal dari Aceh.

d. Zamzami.

Saya berikan beberapa koreksi pada DR Nazaruddin. Pertama pada halaman 4 bahwa pergerakan perjuangan sampai Kutaraja. Tidak hanya sampai di situ tetapi juga sampai ke Aceh Barat dan Aceh Selatan. Sedangkan (ucapan) Presiden Sukarno yang mengatakan bahwa daerah Aceh sebagai daerah modal adalah pada tanggal 16 Juni 1948. Saya bisa katakan itu karena saya berada di depan beliau ketika diadakan rapat umum (ketika itu). Kedua, mohon dicantumkan sumbangan rakyat Aceh terhadap perjuangan.

e. Budiardjo.

Saya ada lima butir aspek atau tindak lanjut yang perlu kita raih dari seminar ini. Pertama, unsur komunikasi yang selalu di sebut-sebut. Saya ingin titip aspek komunikasi ini. Kita dulu belum berpikir strategis sekolah staf dan komando apalagi Lemhanas belum ada. Tetapi ternyata (komunikasi ini) manfaatnya ada dalam bidang politis, dan psikologis. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman dari Angkatan Darat bahwa di dalam perhubungan atau komunikasi telah dirintis cita-cita integrasi. Kedua aspek gerilya; yang lebih kelihatan hanya yang memanggu bedil saja. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak pernah menembak, bagaimana dengan mereka yang berjuang dalam kota seperti Yusuf Ronodipuro, Abu Bakar Lubis. Begitu juga aspek luar negeri. Dalam seminar perang gerilya yang diselenggarakan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jakarta pernah juga dipertanyakan apakah



gerilya menunjang diplomasi atau diplomasi menunjang gerilya. Sebetulnya keduanya tidak perlu dipisahkan. Tapi lepas dari itu aspek luar negeri perlu waktu untuk disoroti. Saya melihat banyak orang yang bisa dijadikan nara sumber, umpamanya T Darusman, Sunaryo, yang membawa alat radio dari Singapura atau Nurtanio di Rangoon, Petit Muharto di New Delhi dan lain sebagainya. Begitu juga Tamtomo anak buah Zulkifli Lubis yang dikirim ke luar negeri; dan Abu Bakar Lubis dari Deplu dan sebagainya . . . Kegiatan itu bisa juga ditampung dalam *oral history* Arsip Nasional.

5). *Tanggapan pada makalah Saleh A.D dan Yuwono Sudarsono.*

a. Soedarpo Sastrosatomo.

. . . Pertama kali saya tidak mau mengomentari pertanyaan pokok dari makalah Sdr. Yuwono tentang apakah ada kesengajaan tentang keadaan darurat. Saya kira hal itu jauh-jauh sudah dipersiapkan antara lain dengan keberangkatan ayah sdr. Yuwono ke New Delhi untuk mempersiapkan (sesuatunya) andakata ada serangan dari Belanda dan Pemerintah harus mengosongkan atau pindah ke sana. Jadi (rencana untuk) mengadakan Pemerintahan pengasingan, dan kedua pemimpin kita Sukarno—Hatta meyakini perlunya hal itu.

PDRI penting bagi kami di New York. Dengan adanya serangan Belanda dalam Aksi Militer II, (menurut Belanda) karena Pemerintah sudah ditangkap dan tempat-tempat strategis sudah diduduki maka tidak ada dasar lagi (untuk mengatakan bahwa) Pemerintah Republik Indonesia masih ada. Hal inilah yang dijawab oleh delegasi kita. Saya ingin koreksi sedikit makalah Yuwono bahwa pimpinan (perwakilan RI) di New York bukan pada Sumitro tetapi pada saudara LN Palar. Beliau adalah pemimpin dari delegasi kita yang menentukan strategi.

Delegasi kita menyangkal dengan keras (kesimpulan Belanda); Pemerintah tetap ada yaitu PDRI. Saudara Soedjatmoko sudah mengatakan kepada kita bahwa kita merasa lega menerima kabar tentang adanya pemerintah PDRI. Jadi secara hukum negara itu ada, ada wilayah, ada Pemerintah, ada tentara. Bukti bahwa kita masih menguasai daerah-daerah dikawatkan oleh Saudara Wibowo kepada Dewan Keamanan dari Singapura yang memonitor keadaan di Indonesia. Ada wilayah, ada Pemerintahan, dan aparat yang berjalan, (karena itu) tidak heran negara-negara itu mengakui adanya Republik Indonesia.

Amerika tidak dianuti; waktu itu antara lain Sumitro datang ke *State Department*. Sikap Pemerintah Amerika kurang lebih menyokong Belanda. Apapun yang kita ajukan mereka tidak mau menerimanya. Setahun sesudah itu sesudah KMB orang yang sama menerima kita sebagai orang yang terhormat.

Kenapa ada perubahan sikap Amerika. Menurut saya Amerika tidak begitu mengerti kolonialisme (Belanda di Indonesia) sehingga apa saja yang disajikan Belanda mereka terima saja. Namun pada pertengahan tahun 1949 keadaan internasional menggugah mereka untuk lebih mengenal faktor-faktor koloni itu. Para aparatnya (mengajukan pertimbangan) jangan sampai (Indonesia) dikuasai oleh komunis. Amerika tidak punya konsepsi dan sekutu-sekutunya seperti Inggris dan Prancis memberikan desakan maka berubahlah sikap Amerika. Cuma kalau berhubungan dengan Republik bagi mereka adalah Sukarno Hatta. Jadi lucu legalitasnya PDRI, cuma kalau mereka berhubungan dengan Republik itu (dengan) Sukarno—Hatta. Bagi Inggris dua soal yang jadi pegangan mereka : pertama Rapat Ikada 19 September 1945 dan Pertemuan Suwabaya, dimana hanya Sukarno yang bisa menguasai rakyat Indonesia. Jadi yang dilihat adalah prestise dan kekuatan Sukarno. Inggris yakin sekali akan hal itu. Oleh karena itu, saya yang waktu itu diutus oleh Delegasi (RI di New York) ke Bangka untuk mengunjungi dan menerangkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta sukar sekali untuk bicara tentang legalitas. Saya ajukan kenyataan demikian. Kalau legalitas wah tidak bisa kata Sukarno untuk menentukan perundingan. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Setelah Roem—Royen agreement selesai saya (kembali) lewat Bangkok. Saudara Kamil yang tinggal di Bangkok, mengirim kawat kepada Bung Hatta bahwa sesungguhnya Soedarpo tidak setuju hal itu dan mengajukan perundingan agar dimulai dengan PDRI. Jadi kalau kita simpulkan kenapa terjadi demikian, kenyataan yang ada itulah yang menentukan nasib kita. Dan politik luar negeri kalau tidak ada kenyataan-kenyataan dalam negeri tidak ada artinya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa grup saya yang jadi penentu. Gabungan dari faktor-faktor yang ada pada kita yang memungkinkan kemerdekaan kita.

b. Yusuf Ronodipuro.

Saya tidak langsung memberikan sumbangan yang menyangkut PDRI, karena saya tidak terlibat samasekali. Saya tidak akan menceritakan mengenai PDRI, cuma ingin menyumbangkan sebagai anca-ancang menjelang lahirnya PDRI.

Saya akan mulai sejak diadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara. Saya waktu itu ditugaskan sebagai liaison officer dengan saudara Muchtar dan Hadi Tayeb. Karena kedua mereka ini sudah berkeluarga dan saya masih single maka saya yang disuruh sebagai seksi repot.

Pada waktu itu perundingan dengan Belanda sedang gencar-gencarnya sesudah Persetujuan Renville; disepakati bahwa perundingan-perundingan dilakukan bergantian tempat, silih berganti satu bulan di Jakarta dan satu bulan di Kaliurang. Pada waktu itu kebetulan giliran perundingan di Kaliurang.



Intensitas perundingan itu sedemikian memuncak ditambah lagi dengan intensitas surat menyurat langsung antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Wakil pemerintah Belanda di Jakarta. Waktu itu dirasakan bahwa suhu ketegangan sangat meningkat. Kemungkinan Belanda akan mempergunakan kekerasan bersenjata mulai dibicarakan di masyarakat.

Pada pekan kedua bulan Desember giliran perundingan dilakukan di Kaliurang. Biasanya kita pindah semua ke Kaliurang, boyong semua sekretariat KTN dengan kereta api istimewa. Kecuali Cochran yang tinggal di Jakarta karena beliau sedang terlibat dengan tukar menukar surat, Tom Crichley Australia dan Herremans dari Belgia ikut. Dari delegasi kita yang masih tinggal karena ada urusan yang harus diselesaikan dan akan menyusul adalah Mr. Soepomo dan Mr. Soejono.

Pada tanggal 11 Desember 1949 dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda terhenti samasekali, sewaktu pihak Belanda memberitahu KTN bahwa *negotiation under the auspices of the committee at this stage are futile, as these would only lead to purposeless discussions.* (Perundingan di bawah pimpinan Komisi Tiga Negara pada taraf ini adalah tidak berguna sama sekali, karena ini hanya akan mengarah kepada pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada tujuannya). Jadi Belanda menganggap sia-sia untuk melanjutkan perundingan meskipun iklim sudah sangat memuncak. Tetapi karena adanya delegasi Belanda di Kaliurang dan lebih-lebih (adanya) KTN banyak dari kita memperkirakan Belanda tidak berani menyerang. Kalau toh mereka akan menyerang mungkin setelah delegasi Belanda dan KTN sudah kembali ke Jakarta.

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember, atas permintaan Bung Hatta kami kembali terbang ke Jakarta untuk berusaha meyakinkan Belanda agar pembicaraan bisa dibuka kembali. (Sementara) intensitas semakin meningkat pada hari Kamis tanggal 16 Desember saya mengikuti Cochran terbang ke Yogya lagi untuk menyampaikan tanggapan pihak Belanda yang menyatakan dalam suratnya bahwa kelanjutan perundingan itu tidak ada gunanya, kecuali kalau Pemerintah Republik Indonesia bersedia menerima usul Belanda mengenai masalah-masalah pokok yang menjadi pertentangan, terutama (mengenai) pelaksanaan gencatan senjata. Pemerintah Belanda menuntut agar Pemerintah Republik Indonesia memberikan jawabannya sebelum jam sepuluh pagi waktu Jakarta tanggal 18 Desember. Dus surat dibawa tanggal 16 (Desember), minta jawaban jam sepuluh pagi tanggal 18 Desember.

Cochran orangnya bergerak cukup lincah. Dia gemuk dan nampak kecapaian karena mondar mandir membawa surat. Dia kesal sama sikap Belanda ini. Mungkin Amerika simpati terhadap Belanda, tapi karena dia mengalami sendiri mondar mandir tanpa hasil, nampak sekali mukanya kesal. Ia tampak jengkel sekali membaca surat Belanda yang ultimatif itu. Oleh karena itu dia menulis surat pribadi kepada ketua

delegasi Belanda. Dalam suratnya antara lain disebutkan ; "you will agree, I am sure, that in such circumstances I cannot in justice press Dr. Hatta for an immediate reply to a letter which calls not for mere expression of willingness to resume negotiations, but rather for surrender to the position of your government on the every material point" (Saya yakin anda sependapat dengan saya, bahwa dalam keadaan seperti ini, dengan segala ketulusan saya tidak dapat menekan Dr. Hatta untuk segera memberi jawaban atas surat yang isinya tidak hanya sekedar menyatakan kesediaan untuk melanjutkan perundingan, tetapi malahan menuntut penyerahan diri pada posisi Pemerintah anda dalam semua masalah pokok) Jadi nadanya cukup tegas. Kitaanggapi, ya cukup positif.

Hari Jum'at tanggal 17 Desember, saya menyertai Cochran bersama Cutts (wakilnya Crithley) terbang kembali ke Jakarta membawa surat Bung Hatta untuk pemerintah Belanda. Hari Sabtu malam tanggal 18 Desember, kurang lebih jam sembilan malam saya menerima telepon dari Paleis Rijswijk, sekarang istana negara-sekretariat delegasi Belanda itu di sana yang meminta saya datang, karena ada surat untuk delegasi Indonesia yang saya harus ambil. Biasanya surat itu diantar, tetapi (kali ini tidak). Orang Jawa bilang ngelamat, ada kelainan. Kira jam sembilan seperempat saya sampai di Paleis Rijswijk. Teman Belanda yang pernah saya kenal dulu menyerahkan satu amplop yang sudah dilem. Ada asli ada copynya. Pada amplop ditulis *under de wnd Voorzitter van de Nederlandse Delegatie*

Segera saya bawa surat itu ke rumah Mr. Soejono yang waktu itu menjadi Sekretaris delegasi kita. Kita buka bersama. Kita semua terkejut membaca isinya. Isi surat itu adalah :

Nederlandse Delegatie
NO, 3897

Batavia 18 December 1948
Paleis Rijswijk

Ik heb de eer u mede te delen, dat aan de Commissie voor Goede Diensten op 18 December 1948 de navolgende mededelingen is gedaan :

I have the honour to refer to the numerous letters to the Committee of Good Offices from the Netherlands Delegation concerning violations of the Truce Agreement, a comprehensive list of which is appended, and furthermore to my letters of 11 and 16 December 1948 and the memorandum attached to the letter.

From the above mentioned documents and the evidence in support thereof submitted to your Committee it is abundantly clear that the Truce Agreement between the Government of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia, signed on 17 January 1948 and the Truce Regulation are not being observed by the Government of the Republic of Indonesia. The Netherlands Government is reluctantly compelled to notify your Committee, according to the provision of article 10 of

the Truce Agreement, that for this reason the said agreement should be terminated and is considered as no longer binding as from Sunday, 19 December, 1948, 00.00 hours Batavia time.

The Republican Government has been informed accordingly."

U gelieve dit schrijven te beschouwen als kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Republikeinse Regering, uit hoofde van Artikel 10 van de Bestandsovereenkomst, dat de Nederlandse Regering van oordeel is, dat de bestandsovereenkomst en de bestandsregelingen niet worden nageleefd door de Republikeinse Regering, deze overeenkomst derhalve dient te worden beëindigd en niet langer als bindend wordt beschouwd met ingang van Zondag, 19 December 1948, 00.00 uur Batavia tijd.

Aan den Voorzitter der
Republikeinse Delegatie,

De wnd. Voorzitter
van de Nederlandse

Prapatan 52,
Batavia.

Delegatie :
T. Elink Schuurman

Kemudian saya diminta untuk segera mengawatkan ke Yogya. Surat terima hampir setengah sepuluh. Padahal deadline—nya hanya beberapa jam lagi Saya tidak sempat membuat kawat, maka pada bagian atas saya coret tulisan Nederlandse Delegatie No, 3897 dan Batavia 10 December 1948 serta Paleis Rijswijk. Begitu juga bagian bawah yang bertuliskan Aan den Voozitter de Republikeinse Delegatie, Prapatan 52 Batavia Kemudian saya kasih (tambahan di atasnya sebagai berikut) :

Kepada Yang Mulia Wakil Presiden Jogjakarta ttk very urgent ttk 1234/5/dec. Kami sampaikan surat dari Delegasi Belanda No. 3897 tertgl. 18 December 1948 :

Dan saya bawa ke kantor kawat di Koningsplein, kalau sekarang (tempatnya) kurang lebih di Monas, sekarang. Saya tidak bisa kirim lagi (kawat itu) karena tidak diperkenankan oleh Paleis Rijswijk. (waktu itu kurang lebih pukul sepuluh malam. Saya berkeringat dingin, kaki lemas bukan main, karena satu-satunya hubungan waktu itu adalah PTT, dengan perkiraan tidak ada apa-apa antara PTT Republik dengan PTT Belanda. (Waktu) itu ada kerjasama (keduanya) meskipun punya pemancar gelap. Waktu itu tutup jam tujuh, ada sambungan lagi besok pagi jam tujuh atau jam delapan. Jadi kita tidak bisa apa-apa.

Timbul pikiran saya, bahwa yang bisa menolong adalah Cochran, karena dia ada di Hotel Des Indes. Waktu itu saya dapat pinjaman jeep Willis merah dari Belanda untuk lari kesana kemari.

Saya menuju Hotel Des Indes, dan mengetok paviliun Cochran yang ternyata sudah tidur. Saya ketok bolak balik, akhirnya keluar dengan pakaian tidur, dan matanya merah. Saya beritahu apa yang saya alami

dan saya kasi lihat kawat yang tidak dikirim ke Yogya. Melihat surat itu dia terkejut, dan mencoba menelepon Paleis Rijkswijk dengan maksud agar ultimatum itu bisa diundur, sehingga ada waktu untuk memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Yogya. Dia tidak berhasil, lantas dia putuskan agar kita berdua pergi ke Yogya. Sambil berpakaian, melalui sekretarisnya, ia mengintruksikan agar pesawat terbangnya disiapkan, dan memberikan pesan-pesan kepada Cutts yang telah datang atas panggilannya. Masih sempat juga dia melilpon Paleis Rijkswijk untuk berbicara dengan Elink Schuurman (wakil Ketua Delegasi Belanda) dengan nada keras meminta agar "dead-line" yang disebut dalam surat delegasi Belanda bisa diundur besok harinya, sehingga Pemerintah Indonesia di Yogya bisa diberitahu. Permintaan Cochran tidak bisa dipenuhi Elink Schuurman.

Kemudian kita berangkat ke Kemayoran dengan diantar Cutts dan Kolonel Myers, penasehat militer Amerika dan sampai kurang lebih jam sebelas. Sampai di sana diberitahu oleh pilot pesawat Angkatan Udara Amerika bahwa pesawatnya tidak diperkenankan tinggal landas. Cochran marah, dan omongannya tidak pantas saya sampaikan dalam sidang yang terhormat ini.

Kemudian kami kembali ke Hotel Des Indes. Baru sampai di sana surat Belanda diserahkan oleh seorang Kapten kepada Cochran. Dus apa yang dikatakan mereka dalam suratnya bahwa Belanda telah memberitahukan KTN, itu tidak benar. Dus diputar balik. Esoknya Yogya diserbu dan akhirnya PDRI lahir.

Kira-kira 25 Desember George Mc Turnan Kahin datang dari Yogya. Dia ditangkap (Belanda) di Yogya dan diusir, kemudian menemui saya di Jakarta. Saya terima dari Kahin (cerita) mengenai penyerbuan Yogya dan dua buah radiogram, pidato Presiden dan Wakil Presiden. Radiogram yang khusus untuk New Delhi, saya minta tolong kepada konsulat India yang saya kira besar sekali jasanya. Mereka memberikan kesempatan kepada kita kirim kawat ke New Delhi dengan mempergunakan Diplomatic bag. Mereka sangat berjasa menyalurkan berita-berita perjuangan kita baik dari PDRI maupun dari Jawa yang kantornya dekat Istana. Demikianlah.

c. Abu Bakar Lubis.

Saya akan menambah sedikit overview yang diberikan Yuwono tentang kedudukan dan kegiatan perwakilan kita di luar negeri semasa PDRI.

Konperensi yang diorganisir India di New Delhi setelah Agresi Belanda II disponsori oleh Burma. Tidak banyak orang tahu bahwa setelah Belanda menyerang Yogyakarta ada seorang wakil Pemerintah Burma yang sempat meninggalkan Indonesia dengan pesawat terbang terakhir yang meninggalkan Pulau Jawa dari Madiun. Pesawat ini terbang ke Manila.

Wakil Burma ini bernama Takin . . . Laporan Takin inilah yang akhirnya (membuat) Pemerintah Burma menyarankan agar diadakan Konperensi negara-negara Asia untuk membela Republik Indonesia.

Burma waktu itu sedang menghadapi pemberontakan komunis, dan negerinya terlalu kecil untuk bisa mengundang begitu banyak negara-negara Asia. Karena itu dikirimlah delegasi ke New Delhi yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan didampingi oleh Menteri Luar Negeri beserta dua orang menteri lain dan sekretaris parlemen Burma. Takin . . . sendiri meyakinkan Nehru dan usul Burma itu diterima dan dalam waktu singkat rapat dapat diadakan. Wakil-wakil kita di New Delhi hanya bisa memberikan keterangan-keterangan dan lobbying dengan wakil-wakil peserta, sebab kita sendiri tidak ikut serta. Kita sudah tahu hasilnya bahwa pokok-pokok resolusi Konperensi itu akhirnya menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersidang pada akhir bulan Januari 1949.

Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah peranan Burma dalam transportasi udara. Kebetulan Burma memerlukan transportasi udara tetapi mereka tidak memilikinya. Mereka bisa dapatkan dengan menggunakan pesawat Republik Indonesia yang dikelola Wiweko. (Kegiatan) ini memberikan pengalaman kepada pilot-pilot kita yang dilatih India, dan bisa menghasilkan devisa buat membiayai perjuangan di samping pengembangan usaha sendiri. Pesawat ini juga digunakan untuk membawa bantuan senjata dan amunisi dari Burma ke Aceh.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, hubungan radio memang penting. Kalau saya baca kawat-kawat yang dimuat dalam buku terbitan Arsip Nasional, rasanya sebagian saya pernah baca dan dipergunakan. Namun banyak yang kita tidak pernah terima. Kalau kita baca isinya sangat penting buat propaganda dan publikasi kita ketika itu.

Perwakilan luar negeri yang pertama kita kirim ke luar negeri, kalau tidak salah ke Singapura Mr. Utoyo dan dr. Soedarsono ke New Delhi. Dari New Delhi dibentuk lagi perwakilan kita di Rangoon dan Karachi. Dr. Soebandrio yang pada waktu itu dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Negeri Belanda ditahan di Singapura dan disuruh kembali ke London untuk membuka perwakilan. Saudara Soedjatmoko, Soedarpo, Soemitro, dan Charles Thambu dikirim ke New York.

Memang kalau kita lihat kesulitan kita sesudah Linggarjati ditandatangani, kita memberikan konsesi dalam banyak hal kecuali dua hal: dinas luar negeri dan satu lagi masalah tentara.

Dalam upaya saya sebagai kepala penerangan untuk memperkenalkan perlawanan rakyat kita, memang banyak bahan yang kita terima dari Bukittinggi dan Aceh yang bisa kita pergunakan. Kita tambahi dan kita bumbu sendiri. Selain itu berita pers Internasional juga banyak membantu. Kita menyadur berita-berita tersebut untuk kepentingan kita, bilamana kita tidak peroleh dari kalangan kita sendiri. Jadi kalau

kita terima dari PDRI kan lebih otentik dan kita lebih mudah mempergunakan kepada publik yang hendak kita capai. Jadi kegiatan diplomatik yang terbesar bagi kami kala itu adalah di India ketika diadakan konperensi Asia mengenai Indonesia dan kawan-kawan di New York ketika menghadapi sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Sedangkan kawan-kawan di Singapura, (mereka) itu betul-betul kegiatan gerilya, umpamanya dengan menghadapi bermacam kesulitan berhasil memasukan obat-obatan, senjata, amunisi, pakaian, spare part, yang diperlukan (para gerilyawan kita). Jadi benar apa yang dikatakan Budiardjo bahwa diplomasi itu sendiri adalah gerilya juga.

d. Ibu Miriam Budiardjo.

Saya sebetulnya tidak dapat memberikan sumbangan banyak, kecuali beberapa catatan pribadi. Saya pergi ke India antara tahun 1948 - 1950 bersama kelompok yang menjadi calon pilot AURI yang kemudian belajar di India. Dalam rombongan itu ada juga beberapa orang yang dikirim Departemen P & K untuk belajar di India, salah satu diantaranya adalah Sudibyso, suami dari Murwati Sudibyso. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa beberapa intelektual kita telah mendapat sumbangan dari India.

Saya sendiri bekerja di perwakilan RI (di New Delhi) dan salah satu tugas saya adalah mengirim dana kepada perwakilan-perwakilan kita di Cairo, Singapura, Rangoon, dan sebagainya. Sebab hal itu memerlukan prosedur khusus dan pemerintah India waktu itu mempunyai form exchange control, dan karena formulir itu kita terbatas untuk mengirim uang dari India. Jadi setiap bulan ada prosedur minta sekian banyak form exchange untuk dikirim ke perwakilan kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya India sebagai pusat kegiatan diplomasi kita keluar.

(Di sini) kita pernah melihat foto Bung Karno dalam jeep yang membawanya dari airport Bangka ke tempat pembuangannya. Dalam foto itu yang diambil dari jauh itu kok kelihatannya tersenyum. Jadi kami di luar negeri sangat terpukul karena gambar itu.

Satu ketika kantor (perwakilan) kita menerima telepon dari kantor Nehru. Kita bukan hanya (dekat) dengan Nehru tetapi juga dengan Indira Gandhi. Saya sendiri beberapa kali bertemu Indira Gandhi di rumahnya. Isi telepon itu adalah bahwa Nehru ingin bertemu dengan wakil kita Dr. Soedarsono atau biasanya dikenal dengan Oom Son. Waktu itu Oom Son tidak ada. Waktu mau pulang kantor saya lupa memberitahukan kepadanya. Dan esok harinya tentu saja dr. Sudarsono ditegur, kenapa tidak datang. Kemudian saya ditegur oleh dr. Sudarsono atas kejadian itu dan saya begitu menyesal, dan langsung minta dipulangkan ke Indonesia. Tapi karena waktu itu tidak mungkin, maka saya tetap dipertahankan sampai tahun 1950. Sesudah itu saya ke Amerika Serikat.

e. Mr. Moh Rasjid.

... Ketika kita bergerilya empat puluh tahun yang lalu kita banyak yang tidak tahu. Saudara-saudara yang di luar negeri yang membantu kita. Kawat kita sering tidak sampai, begitu juga kawat mereka kita tidak terima. Walaupun zender kita di Kototinggi sangat baik, kita kirim berita ke luar negeri lewat Singapura, dan Singapura yang meneruskan seperti ke New Delhi dan kemudian ke Amerika.

Masalah lain adalah berdirinya PDRI. Walaupun Bung Hatta mengirim kawat setelah sidang Kabinet, tetapi kita tidak tahu mengenai kawat itu. Jadi hal ini harap diperhatikan. Dari beberapa sumber saya baca bahwa kita membentuk Pemerintah Darurat setelah menerima kawat dari Yogyakarta, hal itu tidak ada. Kita membentuk (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) oleh usaha kawan-kawan dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa

6). *Tanggapan terhadap makalah Taufik Abdullah.*

a. Drs Surkani (Wagub Sumbar).

Kami berdiri di sini sekaligus mewakili Pemerintah Daerah Sumatra Barat. Kami ingin menyampaikan saran yang mungkin dapat dipertimbangkan. Namun sebelum itu kami ingin memberikan koreksi pada makalah dari rekan Universitas Andalas, khususnya mengenai masalah pemancar PTT saja yang berjasa.

Sebetulnya pemancar Angkatan Udara cukup berperan dalam masa PDRI. Saya bisa menyampaikan (pendapat) almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pada tahun-tahun terakhir sering sekali berkunjung ke Sumatra Barat, bahkan ada dalam satu tahun sampai tiga kali. Sampai kami menanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan beliau senang berkunjung ke Sumatra Barat. Menurut beliau, "saya senang ke mari karena saya tidak bisa melupakan peranan daerah Sumatra Barat khususnya Bidar Alam dan Kototinggi pada masa perjuangan PDRI. Kata beliau, karena adanya pemancar Angkatan Udara di Bidar Alam berita mengenai Serangan 1 Maret yang dikirim dari Wonosari dapat diteruskan ke Aceh, Rangoon, India, dan seterusnya ke PBB, sehingga propaganda Belanda di dunia luar mengenai Republik kita habis dan gagal". Karena itu beliau mengutus kalau tidak salah Ir. Soedarto pada tahun 1985 untuk membangun satu tugu dan sebuah taman kanak-kanak bagi rakyat Bidar Alam. Hal inilah yang saya tahu dari Sri Sultan yang melihat bagaimana pentingnya pemancar Bidar Alam. Kita akan teruskan keinginan beliau ini, dan tanahnya sudah kita sediakan. Mudah-mudahan pak Sudarto bisa melanjutkan usaha ini. Barangkali hal ini yang akan disampaikan oleh saudara Harmani Arief yakni harapan rakyat Bidar Alam yang selama 3 bulan membantu PDRI di wilayah mereka.

Kami melihat bahwa peranan Bidar Alam ini cukup menentukan di samping daerah-daerah lainnya. Untuk maksud itu kami memintakan perhatian kita semua bagaimana kalau di daerah ini dibangun satu monumen, sebaiknya tidak berbentuk tugu tapi barangkali berbentuk museum, dimana dokumentasi dan arsip selama PDRI ada di sini. Begitu benda-benda seperti zender radio dapat juga ditempatkan di sini, sehingga anak cucu kita bisa mengetahuinya. Kepada Departemen P & K kita mintakan untuk memeliharanya.

Selain itu para pelaku dapat pula mendirikan yayasan yang bisa memberikan beasiswa atau penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi umpamanya dalam penulisan sejarah dan sebagainya. Dengan cara itu mudah-mudahan PDRI tidak dilupakan lagi.

b. Harmani Arief.

Pada kesempatan ini usul saya cuma dua. Pertama, usul kepada pakar-pakar sejarah untuk mendudukan Bidar Alam itu ditingkat nasional, apakah sudah pantas menyebutkan bahwa Bidar Alam sebagai ibukota PDRI. Kedua, bagaimana realisasi dari monumen AURI di Bidar Alam apakah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

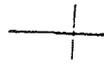
c. Hasan Basri.

Saya didesak oleh teman-teman agar Melayu Riau juga ikut bicara. Pak Husein, Djoeir Muhammad, dan pak Hidayat telah berbicara mengenai PDRI di Halaban. Waktu PDRI menuju Bangkinang saya sedang berada di basis komando Riau di Pasir Pangaraian. Basis ini ditetapkan sebelum Agresi Belanda II.

Kebetulan kepala staf saya sedang inspeksi pasukan di Bangkinang. Sebelumnya saya sudah dapat berita dari Payakumbuh bahwa pasukan Belanda menuju Pakanbaru dengan 36 truck, dan beberapa buah panser.

Kita agak heran, kita sendiri mau mundur dari daerah itu, kok PDRI datang. Saya temui pak T. Moh. Hasan di Bangkinang. Kita usulkan agar kembali memasuki daerah Sumatra Barat karena Belanda sedang menuju ke situ. Pak Syafruddin dan Moh. Hasan setuju. Mobil Bapak Moh. Hasan yang cantik itu tidak bisa menyeberang sehingga terpaksa dimasukkan ke Kali Kampar. Kemudian kita ganti dengan jeep dan dikawal sampai ke Taluk Kuantan.

Selain itu, entah dari mana pak Hidayat tahu tentang basis kami di Pasir Pangaraian, beliau datang ke sana. Tanggal 22 Januari saya diangkat sebagai wakil Gubernur Militer untuk daerah Riau. Gubernur militernya sendiri adalah RM Uroyo, seorang bangsawan Solo



d. Tjokropranolo.

Saya mohon perhatian atas istilah gaya Jawa (dan) gaya Sumatra, agar tidak disalahpahami orang. Kedua mengenai kegagalan perundingan karena TNI. Saya mohon diperbaiki agar tidak salah paham. Kegagalan perundingan itu apakah karena sikap TNI atau memang perundingan itu tidak akan ada hasilnya selama Belanda masih ingin menjajah kita. (Pandangan) itu akan berbeda kalau kita mengikuti pandangan pak Nasution dalam buku-buku beliau . . .

Pertama sekali yang saya tekankan yaitu pegangan bahwa PDRI itu harus diakui sebagai pemegang de facto dan de jure dengan dukungan TNI dan rakyat. Status utama PDRI adalah legalitas bahwa Pemerintah RI tidak pernah menyerah. Di sini letak kebanggaan kita pada PDRI.

Sebuah lagi yang saya mohon perhatian bahwa jangan mengecilkan PDRI dengan hanya membicarakan soal-soal lokal. Kita harus menjelaskan kepada generasi muda bahwa PDRI itu bersifat nasional. Saya kira yang dipindahkan kepada PDRI hanyalah kekuasaan Pemerintah, tetapi tidak ibukotanya. Tidak ada keputusan bahwa ibukota RI dipindahkan ke Minangkabau. Hal itu tidak mengurangi kebanggaan kita bahwa (komando) PDRI berada di sana. Namun jangan kita membicarakan gejala dan pertempuran lokal.

Terakhir mengenai istilah militerisasi dalam makalah. Saya kira perlu keterangan tambahan agar tidak disalah tafsirkan dan salah paham

e. Ibu Mustainah.

Saya ini seorang guru SMA, yang kebetulan mengajar PSPB. Jadi apa yang diseminarkan ini kamilah yang akan langsung menyampaiannya kepada para siswa. Sebagai guru PSPB merasa kekurangan bahan, karena dalam menyampaikan pelajarannya 25 % kwantitatif bahan sejarah, dan sisanya aspek afektifnya untuk memberikan kesadaran kepada siswa tentang tanggungjawabnya kepada negara. Bagi kami hal ini agak berat bahan-bahannya; apalagi PSPB diberikan tiga tahun dari kelas satu sampai kelas tiga, dan untuk semua jurusan. Yang kami coba lakukan adalah mencoba menyentuh perasaan siswa dengan menampilkan penderitaan-penderitaan yang dialami Bangsa Indonesia sejak jaman Jepang dengan ancaman-ancang beberapa periode sebelumnya. Hal ini diberikan dikelas satu. Tujuannya agar siswa tahu bahwa harkat Bangsa Indonesia tidak dihormati oleh bangsa lain. Di kelas dua baru diambil nilai-nilai positif yang diperoleh dari perundingan. Di sinilah kami memperoleh kesulitan karena bahan-bahannya susah. Kami coba dari 30 Tahun Indonesia Merdeka, tetapi kebanyakan foto-foto saja. Sedangkan kewajiban kami adalah mengungkit-ungkit nilai yang terkandung dalam peristiwa itu. Ada lagi materi (yang harus diajarkan) mengenai pers, tapi kita juga tidak punya bahan. Yang dilakukan adalah menyuruh siswa untuk menfoto copy istilah-istilah perjuangan ketika itu

seperti "Merdeka atau mati". Atau ada koran yang dua halamannya kosong. Apa yang bisa diambil dibalik cerita dua halaman kosong itu. Di kelas tiga memasuki bahan orde baru. Persoalannya makin berat, kadang-kadang kami harus bercerita sambil mencururkan air mata agar siswa bisa terharu. Contoh lain umpamanya dengan puisi Kerawang-Bekasi. Kami minta siswa agar mendiskusikan nilai-nilai apa yang bisa diambil dari isi puisi itu. Begitulah betapa susahnyanya mencari bahan untuk pelajaran PSPB.

Masyarakat ada yang mengatakan bahwa pelajaran PSPB itu pelajaran apa sih ?. Sebagai guru sejarah kami katakan bahwa pelajaran itu sangat perlu, karena generasi sekarang adalah generasi pengisi kemerdekaan. Kalau mereka tidak bisa menempatkan arti kemerdekaan itu, maka mereka tidak bisa mengatakan apa itu kemerdekaan dan bagaimana seharusnya mengisinya.

Kepada pak Taufik saya ingin tambahkan kalimat beliau "jurang antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah ternyata cukup lebar, yang pertama sekali terjadi tak akan kembali, dilupakan atau dikenang; yang kedua akan mengisahkan apa yang ingin dikisahkan; ternyata PDRI cukup lama tidak terkisahkan". Bagi saya kalimat itu belum titik, seharusnya . . . PDRI cukup lama tidak terkisahkan . . . dan sekarang dikisahkan, dan terus akan dikisahkan, dan nilai-nilainya harus diwariskan kepada generasi penerus.

f. **Eni Karim.**

Makalahnya sukar sekali ditangkap, saya mencoba mencocokkan frekuensinya. Mula-mula saya keberatan dengan makalah ini karena (judulnya) PDRI dalam sejarah perang kemerdekaan. Bagaimana kalau kata perang kemerdekaan itu diganti dengan melanjutkan kemerdekaan, karena PDRI adalah satu fase dalam kelanjutan pemerintahan secara keseluruhan, walaupun hanya tujuh bulan. Saya mengira Masyarakat Sejarawan ini dekat dengan Pemerintah, sehingga uraian saya yang ditulis berdasarkan himbauan Emil Salim dapat diteruskan.

Saya menangkap dari makalah Taufik ada otonomi yang luas yang diberikan dengan pertimbangan kepentingan lokal dan nasional dalam pemerintahan. Dan usul saya justru masalah tersebut yakni perimbangan yang nyata antara (kepentingan) daerah dan nasional.

ooooo O oooooo



Oleh : Sjafruddin Prawiranegara

Tatkala pada siang hari tanggal. 19 Dec. 1948 tersiar berita di Bukittinggi bahwa pada hari itu Belanda telah menduduki Yogya dan menangkap Presiden Soekarno, Wk. Presiden Hatta dan para Menteri yang ada di Yogya, oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang ada di Bukittinggi, berita itu diterima dengan keheran-heranan dan perasaan hampir-hampir tak percaya. Itulah sebabnya, mengapa Pemerintah Darurat Republik Indonesia baru dibentuk pada tanggal 22 Desember yang berikut dan tidak pada tanggal 19 Desember itu juga.

Disamping itu perlu dicatat bahwa Mr. Sjafruddin Prawiranegara sama sekali tidak mengetahui pada waktu itu bahwa telah diberi kuasa (mandat) oleh Presiden Soekarno dan Kabinet R.I. untuk membentuk Pemerintah Darurat R.I. Dia baru mengetahuinya beberapa bulan kemudian.

Bahwa Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam keadaan yang demikian toh memberanikan diri untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh sipil dan militer mem-proklamirkan Pemerintah Darurat R.I., hanya disebabkan oleh rasa tanggung jawab terhadap kelanjutan perjuangan kemerdekaan yang telah membawa korban begitu banyak.

Perjuangan ini tidak boleh dihentikan begitu saja dengan ditangkapnya Presiden dan Anggota-anggota Pemerintah R.I. lainnya. Menghentikan perjuangan berarti penghianatan terhadap cita-cita semula dan terhadap korban-korban yang telah jatuh mati atau cacat seumur hidup dimedan perjuangan. Dan mungkin Mr. Sjafruddin adalah satu-satunya anggota Kabinet yang tidak tertangkap oleh Belanda, sedangkan anggota-anggota Komisariat Pemerintah Pusat Mr. T.M. Hasan dan alm. Mr. Loekman Hakim juga masih utuh. Jadi merekalah merupakan pimpinan perjuangan yang logis sebagai pengganti Pemerintah R.I. di Yogya.

Kira-kira itulah perasaan yang meliputi semua anggota-anggota Pemerintah R.I. dan pembantu-pembantu utamanya yang bersama-sama membentuk Pemerintah Darurat itu.

Tidak ada diantara mereka itu yang berani mengharapkan bahwa Pemerintah Darurat akan bisa memperoleh kemenangan militer, dengan melanjutkan perjuangan itu. Tetapi sebaliknya mereka yakin, bahwa kita masih dapat melanjutkan perjuangan begitu rupa hingga Belanda pun tidak dapat memperoleh kemenangan militer.

Dari impasse itu dan dari kejemuan perang dipihak Belanda dan sekutu-sekutunya Pemerintah Darurat dapat lambat-laun *memaksa Belanda untuk kembali ke-meja perundingan.*

Dalam hal demikian maka kedudukan R.I. akan kuat sekali. Dan yang tidak dapat diperoleh dimedan pertempuran dapat dicapai dimeja perundingan yaitu penghapusan penjajahan Belanda sekaligus atau berangsur-angsur dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu lama. Pemimpin-pemimpin Pemerintah

Darurat yakin, bahwa sekurang-kurangnya kita dapat memperoleh hasil yang lebih memuaskan daripada hasil yang telah diperoleh dengan persetujuan Linggardjati (Nopember 1946) dan Renville (Januari 1948).

Pemerintah Darurat R.I. yakin, tujuannya itu bisa dicapai, kalau tidak dipersukar oleh Presiden Soekarno c.s. yang ditawan di Bangka. Tanpa persetujuan atau sekurang-kurangnya konsultasi dengan Pemerintah Darurat R.I. yang nota-bene didirikan berdasarkan kekuasaan dari Presiden dan Kabinet R.I. jadi merupakan satu-satunya Pemerintah R.I. yang sah dan yang paling mengetahui kekuatan R.I. yang sesungguhnya, mereka di Bangka itu mulai mengadakan perundingan dengan pihak Belanda pada tanggal 14 April 1949. Perundingan itu diakhiri dengan persetujuan Roem - Van Royen tanggal. 7 Mei yang sesungguhnya merupakan kekalahan bagi R.I. yang tidak perlu terjadi kalau perundingan itu dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Darurat R.I.

Belanda hanya bersedia mengembalikan daerah Yogya kepada Republik Indonesia dan pemimpin-pemimpin yang ditawan di Bangka akan dikembalikan ke Yogya kalau Pemerintah Republik bersedia mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak lebih dulu, yang disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Menurut persetujuan itu juga Pemerintah RI. akan bekerja sama dengan Belanda untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dan selanjutnya akan ikut serta dalam perundingan meja bundar dengan tujuan menentukan cara-cara menyerahkan kedaulatan kepada suatu Republik Indonesia Serikat. Lihat tentang persetujuan Roem-Van Royen : George Mc T. Kahin : Nationalism and Revolution in Indonesia, hal. 421 - 432.

Jadi menurut persetujuan itu Belanda hanya berkewajiban mengembalikan daerah kecil Yogyakarta (kecil kalau dibandingkan dengan daerah yang di-claim Pemerintah Republik yang meliputi Jawa dan Sumatera) dan membebaskan pemimpin-pemimpin yang ditawan, setelah Pemerintah RI. mengeluarkan penghentian tembak-menembak lebih dulu dan bersedia menerima beberapa hal lain yang telah disebut di atas.

Isi persetujuan Roem-van Royen itu sama sekali tidak mencerminkan kekuatan perjuangan R.I. yang dipimpin oleh Pemerintah Darurat. Setelah pasukan-pasukan kita dibawah pimpinan Let. Kol Soeharto - yang sekarang menjabat Presiden RI. - berhasil menduduki kota Yogya pada tanggal 1 Maret meskipun hanya buat satu malam saja, lawan dan kawan tidak ragu-ragu lagi tentang kekuatan RI. Lihat Kahin hal. 411.

Yang lebih mencerminkan kekuatan Republik adalah pernyataan Pemerintah Darurat R.I. tanggal 14 Juni 1949 yang bersedia menyokong persetujuan Roem-van Royen dengan syarat-syarat sbb :

- (1) T.N.I. harus tinggal tetap pada posisinya yang diduduki pada waktu itu.
- (2) Tentara Belanda harus berangsur-angsur ditarik kembali dari kedudukan-kedudukannya.
- (3) Pengembalian Pemerintah RI. ke Yogyakarta setelah daerah Yogyakarta dikosongkan harus mutlak dilaksanakan oleh Belanda.

(4) Belanda harus mengakui kedaulatan RI. atas daerah-daerah Jawa, Sumatera, Madura dan kepulauan-kepulauan sekitarnya sesuai dengan persetujuan Linggardjati.

Menurut kata-katanya yang berlaku adalah persetujuan Roem-van Royen Dan Pemerintah Darurat RI. tidak mempunyai pilihan lain daripada mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949, setelah Yogya dikosongkan oleh Belanda pada tanggal 30 Juni dan pemimpin Pemerintah Darurat kembali pada tanggal 10 Juli.-

Pemerintah Darurat R.I. tidak mempunyai pilihan lain, karena kuatir akan pecahnya persatuan dalam golongan yang pro dan yang anti persetujuan Roem - Van Royen, dan karena Presiden Soekarno bisa saja menarik mandaatnya kembali setelah Yogya dikosongkan oleh Belanda.

Tetapi pil pahit itu dimakan juga oleh Pemerintah Darurat R.I. berdasarkan keyakinan, bahwa akhirnya yang pada hakikatnya berlaku adalah pernyataan Pemerintah Darurat R.I. tanggal 14 Juni 1949 karena memang kekuatan kita tidak bisa disulap hilang begitu saja oleh persetujuan Roem - Van Royen.

Keyakinan itu dibenarkan oleh sejarah. Meskipun menurut tulisan di atas kertas Republik lemah, namun berkat kekuatannya de facto Republik Indonesia akhirnya menang. Tetapi kemenangan itu tidak perlu berliku-liku dan memakan waktu yang begitu lama; kalau dari semula yang mengadakan perundingan dengan Belanda adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kemenangan R.I. itu sesungguhnya tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan R.I. berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menghapuskan segala pengaruh politik Belanda dalam negara kita.

Dengan demikian maka sesungguhnya Pemerintah Darurat R.I. telah menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuannya.-

9. PDRI (PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA)

Oleh : *Mr. T. Moh. Hasan*

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 1948 pulau Sumatera berada dibawah pimpinan Komisariat Pemerintah Pusat N.R.I. (Negara Republik Indonesia) di Bukittinggi, yang dilantik Presiden Sukarno pada permulaan bulan Juni 1948. Komisariat terdiri dari Mr. T. Moehammad Hasan sebagai ketua, Mr. Gaffar Pringgodikdo, dan Mr. Lukman Hakim sebagai anggota.

Dewasa itu propinsi Sumatera Utara dipimpin oleh gubernur Mr. S.M. Amin, propinsi Sumatera Tengah dipimpin oleh gubernur Mr. Nasrun dan propinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh gubernur dr. M. Isa.

Komandemen Sumatera dipimpin oleh Kolonel Hidayat, menggantikan May. Jen. Suhardjo Hardjowardojo, dan Kepolisian Sumatera dipimpin oleh Komisaris Besar Umar Said. Yang menjabat Residen Sumatera Barat waktu itu adalah Mr. Sultan Mohamad Rasjid dan Panglima Divisi III adalah Kolonel Ismail Lengah.

Waktu Wakil Presiden Mohamad Hatta mengunjungi Sumatera dalam bulan November 1948, ikut Menteri kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam rombongannya, yang waktu pulang ke Jawa ditinggalkan di Bukittinggi dengan maksud supaya bisa membantu mengambil tindakan seperlunya, karena perundingan dengan Belanda sudah mulai menjadi genting dewasa itu.

19 Desember 1948.

Pagi hari Komisariat menerima berita bahwa tentara Belanda telah membom kompleks TNI di Bukittinggi, dan angkatan Udara Belanda telah mendarat di Danau Singkarak.

Berita ini segera disampaikan kepada pejabat-pejabat lain di Bukittinggi dan ± jam 9.00 pagi diadakan rapat kilat digedung Komisariat, yang dihadiri antara lain oleh ketua Komisariat, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Lukman Hakim, kolonel Hidayat, Komisaris besar Umar Said gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasrun dan lain-lain.

Rapat mulai membahas situasi yang gawat akibat serangan Belanda yang mendadak dan bermusyawarah tindakan apa yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Baru beberapa menit, rapat dimulai tiba-tiba terdengar bunyi tanda bahaya dan sesudah itu terdengar pula suara kapal terbang tentara Belanda yang terbang rendah diatas kota Bukittinggi. Dengan cepat rapat di Komisariat bubar, dan masing-masing menyelamatkan diri mencari lobang perlindungan disekitar kantor Komisariat, dan menunggu sampai keadaan aman kembali. Sesudah keadaan aman kembali diputuskan rapat ditunda sementara, karena

kemungkinan kapal terbang musuh akan muncul lagi dan masing-masing kembali ketempatnya.

Sore hari ± jam 6.00 datang Mr. Sjafruddin Prawiranegara beserta kolonel Hidayat mengunjungi ketua Komisariat ditempat kediamannya di jalan Atas Ngarai Bukittinggi. Mr. Sjafruddin menjelaskan bahwa beliau menjabat Menteri Kemakmuran dalam kabinet Hatta, dan dititip di Bukittinggi berhubung perundingan dengan Belanda menjadi genting.

Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa selain Bukittinggi tentu Jogjakarta telah dibom tentara Belanda, dan kemungkinan Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta telah ditangkap musuh, akan tetapi kita di Bukittinggi belum menerima berita apa-apa tentang itu. Oleh karena situasi belum jelas, lebih baik kita bentuk *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* guna mengatasi keadaan genting sekiranya Presiden dan wakil Presiden ditangkap Belanda.

Mr. Sjafruddin mengusulkan dirinya sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan ketua Komisariat sebagai wakil ketua serta menanyakan apakah Ketua Komisariat dapat menyetujui usulnya itu.

Saya menjawab bahwa saya juga sependapat dengan Mr. Sjafruddin dan dapat menyetujui usul yang telah dikemukakan itu. Untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai suatu negara. Kami putuskan berdua bahwa akan dibentuk *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, sedang kabinetnya akan disusun sedikit hari lagi.

Keputusan pertama yang diambil sore itu adalah supaya semua pejabat Pemerintah di Bukittinggi jam 9.00 malam itu juga harus siap untuk mengungsi bersama-sama ke perkebunan Halaban, dekat Payakumbuh. Selesai pertemuan tersebut Mr. Sjafruddin serta kolonel Hidayat berpamitan dengan ketua Komisariat dan pulang ketempatnya masing-masing.

Sesudah Sholat magrib saya dan keluarga, didampingi Bupati Datuk Bagindo dan ajudan Sarung berangkat menuju Padang Jepang untuk menitipkan keluarga saya pada inik Abbas Padang Jepang, agar kami bebas berjuang dan bergerilya.

Sesampai ditempat yang dituju kami berbicara sebentar dengan inik Padang Jepang, menitipkan keluarga saya padanya, meminta bantuan dan pengawasannya serta menyerahkan sedikit uang untuk belanja mereka. Yang kami tinggalkan disana adalah istri dan dua orang anak saya, keluarga kami T. Radja Abdullah dan Cut Putih serta T. Alibasyah Keumala. Selesai urusan penitipan keluarga kami segera berangkat pulang ke Bukittinggi untuk menyelesaikan segala sesuatu.

Sebelum meninggalkan Bukittinggi malam itu jam 8.30 saya sebagai Ketua Komisariat Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Sumatera berpidato didepan radio Republik Indonesia Bukittinggi, menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat, agar berjuang sampai tetes darah penghabisan melawan musuh Belanda yang menyerang daerah Republik.

Jam 9.00 malam kendaraan pejabat-pejabat yang mengungsi keluar Bukittinggi telah diatur dan kami berangkat bersama-sama menuju perkebunan Halaban sekitar 15 km dari Payakumbuh.

Yang ikut mengungsi waktu itu antara lain :

1. Mr. T. Moehammad Hasan — Ketua Komisariat Pemerintah Pusat N.R.I.
2. Mr. Sjafruddin Prawiranegara — Menteri Kemakmuran N.R.I.
3. Mr. Lukman Hakim — Komisaris Negara Urusan Keuangan Sumatera.
4. Ir. Mananti Sitompul — Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Sumatera.
5. Ir. Indratjahja — Kepala Jawatan Perhubungan Sumatera
6. Mr. A. Latief — dari Jawatan Kemakmuran.
7. Rusli Rahim — dari Jawatan Koperasi.
8. Mr. A. Karim — Direktur BNI 1946.
9. Kolonel Nazir — dari Pimpinan Angkatan Laut.
10. Kolonel Adam — dari Pimpinan Angkatan Laut.
11. Mardjono Danubroto — dari Sekretariat Komisariat Pempus.
12. Kolonel H Sujono — dari Pimpinan Angkatan Udara.
13. Komisaris Besar Umar Said — Kepala Kepolisian Sumatera.
14. Dan lain-lain.

Sesampai di Payakumbuh kami singgah dan turun sebentar di kantor Bupati, berbicara dengan pejabat-pejabat disana dan memberikan instruksi seperlunya berhubung dengan keadaan yang genting.

Sesampai di Halaban kami mencari tempat dan beristirahat dibekas rumah administrateur kebun asing yang sudah lama ditinggalkan kosong tanpa inventaris.

Setelah rombongan Residen Sumatera Barat Mr. S.M. Rasyid di Halaban pada pagi hari Rabu tanggal 22 Desember 1948, diadakan musyawarah untuk menetapkan personalia Kabinet P.D.R.I.

Selesai musyawarah meninjau keadaan waktu itu diputuskanlah bentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| Ketua | : Mr Sjafruddin Prawiranegara, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan dan Luar Negeri ad interim. |
| Wakil Ketua | : Mr. T. Moehammad Hasan, merangkap Menteri Dalam Negeri, Pendidikan & Kebudayaan dan Agama. |
| Mr. S.M. Rasyid | menjadi Menteri Keamanan, merangkap menteri Sosial, Pembangunan Pemuda dan Perburuhan. |
| Mr. Lukman Hakim | menjadi Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman. |

Ir. Mananti Sitompul menjadi Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan.

Ir. Indracahya menjadi Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran.

Sebagai Sekretaris PDRI ditunjuk Mardjono Danubroto.

Letnan Jenderal Sudirman tetap menjadi Panglima Besar Angkatan Perang (A.P.) Republik Indonesia.

Kolonel A.H. Nasution tetap menjadi Panglima Tentara Teritorial Djawa (P.T.T.D.).

Kolonel Hidayat menjadi Panglima Tentara Teritorial Sumatera (P.T.T.S.).

Kolonel Nazir menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (K.S.A.L.).

Kolonel H. Sujono menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (K.S.A.U.).

Komisaris Besar Polisi Umar Said menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara.

yang hadir lainnya diangkat menjadi Anggota Staf P.D.R.I.

Dengan demikian lengkaplah terbentuk susunan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang segera dikumandangkan ke segenap pelosok Tanah Air dan ke Luar Negeri melalui pemancar-pemancar PDRI, baik yang berada di Pusat tempat PDRI, maupun yang berada di tempat-tempat lain di Sumatera, begitu juga yang berada di Jawa, sehingga pemberitaan dan informasi timbal balik Sumatera ke Jawa dan sebaliknya berjalan dengan lancar berkat jasa-jasa dan kerja keras anggota-anggota AURI kita.

Untuk menghindarkan terjadinya dualisme dalam pemerintahan, di Jawa dibentuk Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh J. Kasimo, dengan anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Susanto Titroprodjo, Supeno, Kiayi Masykur dan Panji Suroso.

Sesudah diumumkan berdirinya PDRI maka ada reaksi dari Jawa yang dapat menerima pembentukan PDRI tersebut berkat dua buah kawat yang dikirimkan pada tanggal 19 Desember 1948 oleh Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Hatta kepada Mr. Sjafroddin Prawiranegara dan kawat kedua kepada Dr. Sudarsono dan kawan-kawan.

Sender-sender PDRI dan Gubernur Militer Sumatera Barat tiap hari mengirimkan informasi ke Luar Negeri, terutama ke New Delhi tempat kedudukan Wakil R.I. Dr. Soedarsono dan Mr. Maramis. Yang terakhir ini kemudian diangkat oleh PDRI menjadi Menteri Luar Negeri, yang menyiarkan informasi PDRI kepada P.B.B. dan Badan-Badan Internasional lainnya.

Dengan adanya P.D.R.I. kami menjadi lega, karena Belanda tidak dapat berkata lagi bahwa Republik Indonesia sudah hancur lebur berhubung Presiden dan Wakil Presiden berada dalam tahanan mereka.

Untuk perjuangan selanjutnya Sumatera dijadikan Daerah Militer dipimpin oleh Gubernur-gubernur Militer, sedang di Jawa baru saja terbentuk Daerah-Daerah Militer yang dibagi menurut 3 propinsi, yaitu :

- Di Jawa Barat yang menjadi Gubernur Militer (G.M) adalah Kolonel Hasan Sadikin.
- Di Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto.
- Di Jawa Timur Kolonel Sungkono.

Karena keadaan di Sumatera berlainan dengan di Jawa dan Residen-Residen di Sumatera berpendidikan cukup dan berpengalaman selama 3½ tahun berevolusi serta cukup berwibawa menghadapi Rakyat dan Tentara, maka diangkatlah Gubernur-Gubernur Militer yang semuanya terdiri dari Orang-orang Sipil, hampir semuanya adalah Residen-Residen di Daerah mereka masing-masing, sehingga susunan Pemerintahan Militer di Sumatera adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Militer untuk Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo : Tgk Daud Beureueh.
2. Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Timur dan Tapanuli : Dr. Ferdinand Lumban Tobing.
3. Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Barat : Mr. St. Moh. Rasyid.
4. Gubernur Militer untuk Daerah Riau : R.M..Oetoyo.
5. Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Selatan dan Jambi : Dr. Adnan Kapau Gani.

Atas usul P.T.T.S. Kolonel Hidayat, PDRI mengangkat Gubernur-Gubernur Militer tersebut di atas, yang berlaku mulai 1 Januari 1949.

Gubernur-Gubernur di 3 Propinsi di Sumatera diangkat menjadi Komisaris Pemerintah sebagai berikut :

1. Komisaris untuk Daerah Sumatera Utara : Mr. S.M. Amin.
2. Komisaris untuk Daerah Sumatera Tengah : Mr. M. Nasrun.
3. Komisaris untuk Daerah Sumatera Selatan : Dr. M. Isa.

Wakil-wakil Gubernur Militer waktu itu diangkat Panglima-panglima Tentara di daerah masing-masing.

Kesibukan PDRI di Sumatera.

Guna mengelak penyerangan tentara Belanda dari Payakumbuh, PDRI bergerak ke Bangkinang. Setelah Bangkinang diserang kapal terbang Belanda dan terbakar, pada tanggal 31 Desember 1948 tengah malam rombongan PDRI bergerak menuju Teratak Buluh, dan melalui Sei Pagu, Lipat Kain dan Lubuk Jambi sampai ke Taluk dan bermalam disana.

Pagi hari rumah Dr. Ilyas tempat rombongan PDRI beristirahat diserang kapal terbang Belanda dengan tembakan mitrailleur, sehingga sore hari rombongan PDRI bergerak terus menuju Sungai Dareh dan setelah beberapa hari mengarungi hutan belukar dan naik bukit turun bukit sampailah kami di Bidar Alam yang menjadi Pusat PDRI untuk sementara.

Di tempat ini PDRI menerima radiogram dari Kolonel Simatupang Wakil II KSAP yang memberitakan bahwa serangan TNI tanggal 1 Maret 1949

di bawah pimpinan Let.Kol. Soeharto berhasil menduduki kota Yogyakarta, PDRI bersyukur berkaitan dengan peristiwa heroik ini, karena hal tersebut menjadi bukti bagi dunia internasional, bahwa TNI masih berfungsi dan sanggup menduduki kota Yogya.

Meskipun berpusat di Bidar Alam yang terletak dipinggir anak sungai Batang Hari, rombongan PDRI bersekar menjadi beberapa rombongan/kelompok yang bertugas mengadakan perjalanan ke wilayah sekitarnya guna memberi penerangan kepada rakyat Umum.

Tugas ini dapat kami laksanakan, karena PDRI mempunyai sender radio, yang sehari-hari menerima berita dari All India Radio di New Delhi, yang menyiarkan berita kejadian internasional.

Pada suatu waktu rombongan kami tiba malam hari di Lintau dan bermalam disalah satu rumah gadang, dan besoknya rombongan kami berangkat menuju ke tempat lain. Kami merasa segan tinggal lama-lama disatu tempat untuk menghindari menjadi sasaran musuh Belanda yang membom tempat PDRI, bila mendapat laporan dari kaki tangan Nica.

Besoknya rombongan kami masih berada tidak jauh dari Lintau dan sore harinya kami masih mendengar bunyi bom yang dijatuhkan Belanda disana.

Saya sendiri berusaha supaya jangan dikenal oleh kaki tangan Nica dengan cara menyamar sebagai pejabat agama sambil memakai kain sarung, tongkat, tudung dan memelihara kumis dan jenggot, akan tetapi ternyata masih dikenal oleh orang-orang tertentu, yang dibuktikan dengan pemberian hormat kepada kami, meskipun telah diatur kami berjalan dengan seorang pengiring saja, sedang pengawal dan pengiring lainnya berjalan jauh di belakang kami.

Bila rombongan PDRI dikenal orang banyak, ada kemungkinan bahaya mengancam, karena jika diantara mereka ada seorang kaki tangan Nica, tentu berita ini segera akan sampai kepada tentara Belanda yang justru mencari dan mengejar-ngejar PDRI.

Pada suatu waktu rombongan PDRI, berada di sekitar Muara Laboh, dan besoknya waktu rombongan kami masih berada di jalan pulang dari Muara Laboh terdengar bunyi bom yang dijatuhkan kapal terbang Belanda di sana.

Baik juga kami jelaskan serba sedikit tentang kesulitan dan penderitaan yang dialami rombongan PDRI sebagai contoh. Rombongan kami pernah tidur didalam hutan belukar diatas lantai dahan kayu dengan atap ranting dan daun kayu. Tengah malam kami disiram hujan lebat dan basah kuyup, sehingga kami tak dapat tidur, apalagi kelihatan pacat yang mencari mangsanya.

Pernah kami mengalami kekurangan persediaan makanan, sehingga rombongan kami terpaksa makan nasi dengan garam saja.

Selain dari itu berjalan di dalam hutan itu tidak aman, karena selain bahaya harimau dan ular tiba-tiba bisa diserang pacat yang menghisap darah manusia sampai menjadi gembung seperti lintah dalam air.

Pada suatu malam kami terpaksa tidur di sebuah pondok kecil dipinggir anak sungai Batang hari.

Waktu tengah malam keluarlah beratus-ratus ekor kecoak bergentayangan diseluruh pondok dan naik diatas orang yang tidur didalamnya. Subhanallah, kami terpaksa sabar dan bersyukur kepada Illahi.

Kesulitan lain yang kami alami adalah menanjak bukit turun bukit dan menyeberangi sungai dengan memegang tangan dua tiga orang jangan sampai dihanyutkan aliran air sungai yang deras.

Betapa sukar pekerjaan orang-orang pembantu rombongan PDRI melintasi sungai yang deras itu dengan radio dan barang-barang lain diatas kepalanya.

Di daerah pemukiman rombongan kami mendapat bantuan seperlunya dari Wakil Pemerintah setempat dan rakyat pedesaan. Syukur alhamdulillah rakyat umum banyak memberi bantuannya dimana perlu kepada tentara nasional, lasykar rakyat, rombongan Pemerintah dan pejuang-pejuang lainnya, baik berupa makanan, tempat beristirahat dan bermalam dan lain sebagainya.

Ada Wakil Pemerintah setempat (Camat, Wedana dan Bupati) yang menyembelih seekor sapi untuk menyambut kedatangan rombongan PDRI yang diharapkan suka memberi penerangan tentang keadaan perjuangan kemerdekaan pada dewasa itu.

Selain alat negara, organisasi B.P.N.K. di Sumatera Barat turut membantu menjaga keamanan rombongan PDRI. Dengan demikian kami segera mendapat informasi tentang bahaya yang mengancam berupa gerakan tentara Belanda dan sebagainya.

Meskipun berjalan kaki dan bersusah payah, kami bersyukur dapat berjuang bersama-sama rakyat mempertahankan tanah air dan negara Republik Indonesia yang kami turut proklamirkan pada tangga! 17 Agustus 1945.

PDRI mendapat laporan juga dari Jawa, antara lain dari Wakil II KSAP Kolonel Simatupang, dan PTTD Kolonel A.H. Nasution, Panglima Besar Sudirman, Inspektur Jenderal Angkatan Perang Jenderal Mayor Sukhardjo Hardjowardoyo, Menteri Kasimo, Mr. Susanto dan lain-lain.

Seluruh kota-kota besar di Jawa telah dimasuki tentara Belanda, tetapi untuk menjaga perhubungan dari satu kota ke kota lain Belanda mendapat kesulitan, karena dihadang oleh Tentara kita. Demikian juga Belanda sulit sekali mengadakan supply makanan, dan sebagainya.

Tentara Siliwangi sebanyak 20 Batalyon menyusup ke daerah Jawa Barat dan menjadi satu kekuatan besar yang disenangi rakyat untuk kepentingan perjuangan.

Juga di Jawa Timur tentara dari divisi I menyusup sekitar daerah-daerah yang diduduki Belanda, sehingga Perang Gerilya dari rakyat bersama-sama Tentara mulai bergelora.

Kolonel Nasution sebagai Panglima Jawa (PTTD) segera membentuk Pemerintahan Militer seperti di Sumatera dan berangsur daerah-daerah diluar kedudukan Belanda dikuasai Republik, tegasnya Belanda hanya berkuasa di kota-kota, sedang di luar kota kitalah yang menguasai. Daerah-daerah Republik yang sebelum Perang Kolonial kedua diduduki Belanda banyak yang kita rebut kembali dan Pemerintah Republik di daerah itu dihidupkan kembali.

Dengan menggunakan laporan-laporan dari pihak tentara itu dapatlah PDRI dan Perwakilan di Luar Negeri menetapkan Politik Republik Indonesia dan memberikan penerangan tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat di Indonesia.

Terutama apabila Dewan Keamanan PBB sedang membicarakan soal Indonesia selalu diusahakan untuk memberikan gambaran kepada Delegasi Republik Indonesia di Lake Success tentang pendirian-pendirian dan keadaan di tanah air.

PDRI tidak tinggal tetap disatu tempat, akan tetapi bergerak mobil sekitar keresidenan Sumatera Barat, dan ada kelompok yang meninjau sampai ke Jambi dan ke Aceh seperti rombongan PTTS Kolonel Hidayat.

Pada suatu waktu rombongan Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara beristirahat di Silantai, rombongan Wakil Ketua PDRI Mr. T. Moehammad Hasan berteduh di Sumpur Kudus, Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda dan Perburuhan Mr. S.M. Rasyid bersama Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan Ir. Mananti Sitompul berkedudukan di Kototinggi, Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran Ir. Indracahya beristirahat dekat Halaban, Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah Mr. M. Nasrun berada di Lubuk Sikaping, sedang P.T.T.S. Kolonel Hidayat berada di Kutaraja (Aceh). Tetapi setelah Roem-Royen Statement keluar pada tanggal 7 Mei 1949 PDRI berkumpul di Silantai dan Sumpur Kudus, bermusyawarah tentang hal itu dan lain-lain pada tanggal 14 sampai 17 Mei 1949. Dalam musyawarah di tempat-tempat tersebut ternyata banyak pihak yang tak puas karena PDRI tidak dibawa serta dalam perundingan dengan Belanda, atau setidaknya didengar pertimbangannya lebih dahulu.

Akan tetapi untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Bangsa PDRI bersabar dan berdiam diri.

Konferensi Asia di New Delhi.

Sesudah mendapat informasi dari Republik Indonesia dan kemudian dari PDRI negara-negara Asia seperti Sri Lanka, Burma, India dan Pakistan memberi sokongan moral kepada Indonesia.

Solidaritas Asia kelihatan dengan tindakan-tindakan Sri Lanka mulai 21 Desember 1948, dua hari sesudah aksi militer Belanda II dengan menutup pelabuhan udaranya buat kapal-kapal terbang Belanda yang pergi ke Indonesia, disusul oleh India dan Pakistan.

Liga Arab di Cairo memajukan "Appeal" kepada Dewan Keamanan PBB supaya Belanda dengan segera menghentikan aksi militernya. Selanjutnya Amerika Serikat melalui Economic Cooperation Administration-nya menghentikan bantuan ekonomi kepada Hindia Belanda mulai tanggal 22 Desember 1948.

Atas prakarsa (Inisiatif) Perdana Menteri Burma, sesudah itu diambil alih oleh P.M. India Jawaharlal Nehru, maka tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 diadakanlah di New Delhi Konferensi Asia, terkenal dengan New Delhi

Conference yang hadir waktu itu wakil-wakil dari Afganistan, Australia, Burma, Ceylon (Sri Langka), Egypt (Mesir), India, Ethiopia, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Saudi Arabia, Philippina, Syria dan Yaman.

Peninjau-peninjau adalah wakil-wakil dari Cina, Nepal, Selandia Baru dan Thailand (Siam), semuanya 19 negara, terdiri dari 15 wakil dan 4 Peninjau.

Isi Resolusi New Delhi itu sangat penting untuk Indonesia, karena lebih luas dari isi draft Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949.

Resolusi New Delhi menyebutkan antara lain harus ditariknya tentara Belanda dari Residensi Yogyakarta sedangkan Resolusi Dewan Keamanan mula-mula hanya berisi harus ditariknya tentara Belanda dari kota Yogyakarta (City of Yogyakarta).

Sesudah P.M. Nehru dengan perantara wakil India di PBB, Benegal Rau menyerahkan surat berisi (Isi) Resolusi New Delhi itu, didalam sidang Dewan Keamanan tanggal 25 dan 27 Januari 1949 wakil-wakil dari India, Australia dan Indonesia berhasil memasukkan isi Resolusi New Delhi ke dalam rencana Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dimajukan oleh empat negara, yaitu Cina, Cuba, Norwegia dan Amerika Serikat (terkenal dengan nama Four Power Draft Resolusion) yang kemudian menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB terkenal dengan Resolusi tanggal 28 Januari 1949.

Sesudah melalui perdebatan sengit di D.K. maka Resolusi tanggal 28 Januari 1949 itu menjadi dasar perundingan selanjutnya yang membawa kepada Roem Royen Statement (Pernyataan Roem-Royen).

Resolusi D.K. PBB tanggal 28 Januari 1949.

1. Mengajukan kepada Belanda untuk dengan segera menghentikan operasi-operasi militer dan kepada Indonesia untuk menghentikan perang gerilya.
2. Tahanan Politik Pemimpin-pemimpin Republik supaya dengan segera dan tidak bersyarat dibebaskan dan segera kembali ke Yogyakarta untuk menjalankan tugas mereka di dalam kebebasan termasuk Administrasi Kota Yogya (diubah dengan Residensi Yogyakarta atas usul India sesuai dengan New Delhi Resolution tanggal 23 Januari 1949).
3. Perundingan segera diadakan antara Belanda dan RI dengan bantuan K.T.N., sekarang bernama UNCI (United Nations Commission for Indonesia) berdasarkan prinsip-prinsip Persetujuan Linggarjati dan Renville dengan ketentuan, bahwa :
 - a. Pemerintahan Sementara (Interim Government) akan dibentuk 15 Maret 1949.
 - b. Pemilihan Umum buat Majelis Konstituante dan selesai tanggal 1 Oktober 1949.
 - c. Penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat tidak melewati tanggal 1 Juli 1949.

Resolusi ini tidak dapat diterima oleh pihak Belanda sehingga perundingan menjadi terkatung-katung dan UNCI terpaksa memberi ultimatum kepada Belanda, bahwa kalau sampai tanggal 15 Februari 1949 tidak dapat persetujuan tentang "Pemerintahan Federal Sementara" UNCI akan melaporkan kepada D.K. PBB dan akan memajukan usul-usul untuk menyelesaikannya (Kemudian ultimatum itu ditunda sampai 1 Maret 1949).

Tanggal 25 Maret 1949 UNCI dibawah pimpinan Merle Cochran (Amerika) memulai perundingan dengan kedua pihak, dan tanggal 14 April 1949 UNCI dengan dua anggota lainnya, Chritchley (Australia) dan Harremans (Belgia) dengan resmi membuka perundingan dan Hatta sampai di Jakarta dengan kapal terbang UNCI dan setelah berunding beberapa hari di Jakarta terbang kembali ke Bangka, sedangkan Critchley dan Harremans sibuk mengunjungi Soekarno dan kawan-kawan.

Sesudah semua segi dibicarakan selama 23 hari maka tanggal 7 Mei 1949 lahirlah Pernyataan Roem—Royen.

Roem—Royen Statement.

Mr. Roem sebagai wakil Republik menyatakan Kekuasaan yang diberikan oleh Soekarno Hatta.

Perintah penghentian tembak menembak akan dikeluarkan buat tentara RI dan orang-orang gerilya.

1. Bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Menghadiri Konferensi Meja Bundar untuk memperlekas penyerahan Kedaulatan kepada Indonesia Serikat.
3. Soekarno berusaha untuk disetujuinya politik ini oleh pemerintahnya sesudah Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.

Van Royen menyatakan :

1. Belanda menyetujui kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta dan dibawah pengawasan UNCI akan menghentikan Perang Gerilya dan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Republik bebas menjalankan tugasnya dalam Residensi Yogyakarta.
3. Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948.
4. Belanda akan tidak mendirikan Daerah dan Negara baru di daerah Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948.
5. Belanda menyokong RI masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal.
6. Belanda akan segera sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogya berusaha mengadakan Konferensi Meja Bundar (K.M.B.) untuk memperlekas penyerahan kedaulatan.

7. Belanda menyetujui, bahwa semua area di luar Residensi Yogya, dimana pegawai-pegawai Republik masih bertugas, tetap menjalankan tugasnya.

Sayang sekali PDRI tidak dibawa serta atau berkonsultasi lebih dahulu dengan PDRI sebelum berunding dengan pihak Belanda.

Akibatnya posisi Republik nampak lemah, karena berunding dengan orang-orang masih dalam tahanan Belanda, yang kurang bebas mengeluarkan pendapatnya dan tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Syukur PDRI bersabar berdiam diri untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Bangsa.

Padahal PDRI adalah bertukar Soekarno-Hatta sendiri, yang dikuasakan langsung kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera.

Hatta ke Aceh untuk menemui PDRI.

Sesudah selesai pernyataan Roem-Royen Hatta berusaha untuk menemui Pimpinan PDRI. Menurut pendapat Hatta, Syafruddin dan kawan-kawan berada di Aceh, maka pada tanggal 14 Juni 1949 rombongan Hatta berangkat ke Aceh, tetapi yang ditemui hanya Pemimpin-pemimpin dan rakyat Aceh.

Meskipun demikian Syafruddin sangat gembira dengan kedatangan Bung Hatta ke Sumatera, walaupun tidak bertemu, ada "Good Will" dan penghargaan.

Utusan Hatta menemui PDRI.

Tanggal 4 Juli 1949 utusan Republik yang terdiri dari M. Natsir Leime-na dan Dr. Halim datang ke Bukittinggi terus dibawa ke Dangung-Dangung. Tanggal 6 Juli 1949 diadakan perundingan di Padang Jepang dengan anggota-anggota PDRI berikut Staf Gubernur Militer Sumatera Tengah. Perundingan berjalan alot sampai jam empat pagi.

Wakil Ketua PDRI tidak hadir waktu itu, karena masih dalam perjalanan dari Sungai Puar menuju Padang Jepang. Akhirnya dipercepat persetujuan PDRI dan tanggal 10 Juli 1949 kembalilah Mr. Syafruddin ke Yogyakarta bersama Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim, dan tanggal 13 Juli 1949 Ketua PDRI menyerahkan mandat kembali dalam sidang istimewa Kabinet kepada Pemerintahan Soekarno-Hatta, sesudah hampir delapan bulan berjuang secara gerilya dengan segala pahit manisnya dan segala suka dukanya.

Dalam sidang Kabinet Istimewa itu Hatta sebagai Perdana Menteri berkata secara diplomatis bahwa dalam pandangan Pemimpin-pemimpin yang berada di Bangka PDRI berkuasa penuh ke dalam, sedangkan Pemimpin-pemimpin di Bangka banyak membantu PDRI untuk mengadakan kontak ke luar, oleh karena pihak luar mencari kontak dengan Republik, sedangkan kontak itu dengan PDRI tidak dapat diadakan.

Setelah melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda dan Penyerahan Kedaulatan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949, maka tercapailah Kemerdekaan Indonesia yang dimaksudkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945.

Syukur alhamdulillah dengan perjuangan seluruh rakyat bersama Pemerintah, Angkatan Perang RI dan lasykar rakyat, dengan dibantu oleh dunia internasional (PBB dan Dewan Keamanan), atas petunjuk yang maha kuasa dan rela Allah Swt, maka Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan yang diperjuangkannya.

Demikianlah dengan serba ringkas saya jelaskan perjuangan PDRI atas nama rekan-rekan seperjuangan Menteri-Menteri PDRI, Panglima Besar Angkatan Perang dan Stafnya, PTTD, PTTS, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Kepolisian Negara, Gubernur Sipil dan Militer beserta stafnya, lasykar rakyat dan sekalian saudara yang telah membantu Republik dengan jerih payah dan harta benda, ringkasnya atas nama sekalian saudara yang telah turut berjuang bersama PDRI.

Pada kesempatan ini pula saya sebagai Mantan Wakil Ketua PDRI mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala bantuan yang telah saudara berikan kepada PDRI dan Republik Indonesia yang sekarang sudah merdeka atas dukungan dan bantuan Saudara sekalian. Terima kasih saya ini saya tuju-kan kepada sekalian Saudara seperjuangan, baik yang telah mendahului kita, maupun yang masih hidup. Mari kita mengheningkan cipta sebentar untuk pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita.

Berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan tanah air kita dan mengingat seluruh rakyat telah banyak memberi bantuan kepada Republik kita, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua jajaran Pemerintah RI suka memperhatikan dan membantu rakyat kecil yang hidup melarat agar mereka turut mengecap nikmat negara merdeka yang telah mereka turut perjuangkan, sesuai dengan arahan yang telah digariskan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan Republik Indonesia.

Demikian juga syukur dan terima kasih kepada Saudara-saudara sejarawan yang telah bersusah payah mengadakan seminar PDRI ini untuk mencari kebenaran sejarah.

Mudah-mudahan berkat usaha Saudara-saudara sejarawan perjuangan PDRI lebih dikenal masyarakat hendaknya.

Khusus kepada Prof. Dr. Emil Salim saya sampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas segala usaha, bantuan dan nasehatnya sehingga Seminar PDRI yang telah lama kita idam-idamkan itu dapat dilaksanakan hari ini.

Akhirnya tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Soeharto, yang telah bersedia membuka Seminar PDRI ini dengan resmi, melalui Saudara Menteri Sekretaris Negara, Drs. Murdiono.

Dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian saya akhiri pembicaraan saya dengan : Wabillahit Taufiq Wal Hidayah Wassalamu' alaikum W.W.

Jakarta, 25 September 1989.

Mr. T. Moehammad Hasan.

10. BUTIR RENUNGAN PADA MASA REVOLUSI
DI SUMATERA BARAT.

Bergerilya dari rimba ke rimba :

Oleh Moh. Nazir

Sebelum terjadi agresi Belanda ke dua, saya selaku KSAL sedang berada di pulau Sumatera dalam rangka konsolidasi ALRI dan persiapan untuk menghadapi kongkalingkong politik Belanda yang terkenal curang itu. Ikut bersama kami Saudara-saudara Adam, Simanjuntak, Sunarjo, Harjono Nimpuno dan Suryo Suparjo.

Pada tanggal 19 Desember 1948 dikala kapal terbang Belanda melayang-layang mundur-mandir diatas kota Bukittinggi, rakyat mengira, bahwa kapal terbang itu akan membawa Bung Karno ke India. Tetapi dugaan itu ternyata meleset, yakni setelah kapal terbang Belanda itu menggempur Comandemen TNI dua kali pada hari itu; dan saya waktu itu sedang berada di Istana Bukittinggi.

Kolonel Hidayat segera mengeluarkan order agar semua Pimpinan Angkatan Perang berangkat ke Halaban sedangkan waktunya ditetapkan oleh Let. Kolonel Dahlan Ibrahim. Tentara Belanda waktu itu telah dekat ke Padang Panjang, kurang-lebih 16 km. lagi.

Saya dan Staf diantaranya Kolonel Adam terus berangkat ke Halaban dan baru sampai di Halaban jam 11 malam. Begitu juga halnya semua pimpinan lain bersama Syafruddin Prawiranegara.

Halaban, 22 - 12 - 1948. Kami ditempatkan di Onderneming Swiss dan tidur hanya di atas semen belaka dan dinginnya luar biasa sekali, sedang waktu itu Bukittinggi sebagai ibu kota R.I. telah di duduki Belanda.

Kemudian kami berangkat ke Bangkinang karena Payakumbuh telah di duduki pula.

Tanggal 23 Desember kami sampai di Muara Mahat, dan meneruskan perjalanan menuju Bangkinang dan baru sampai di Bangkinang jam 17.00. Dalam perjalanan ini kami bersama-sama dengan Syafruddin, Mr.T.Hasan, Mr. Lukman Hakim, saya sendiri dan Adam.

Tanggal 26 Desember jam 09.00 pagi Bangkinang di bom oleh Belanda dan kota kecil Bangkinang itupun terbakarlah. Rupanya Belanda sudah tahu, bahwa pimpinan PDRI sedang berada di sana.

Waktu kapal terbang Belanda itu sedang beraksi melayang-layang di atas Bangkinang itu, kami sedang duduk di lapangan bersama Lukman Hakim membicarakan soal keuangan dan tiba-tiba Bangkinang di tembaki dari udara dan di bom.

Pada tanggal 30 Desember 1948 jam 20.00 malam kami mendengarkan siaran Radio, dan Bangkinang harus di tinggalkan karena Belanda telah dekat yang berarti Pakan Baru telah jatuh. Kami terus langsung berangkat ke Teratak

Buluh dan semua kendaraan sudah harus ditinggalkan. Sdr. T. Hasan tampak bersedih hati berpisah dengan "Gajah Putih"-nya alias mobilnya. dan dia kemudian naik jeep.

Di Panti Ragi jeep Syafruddin Prawiranegara terbalik, dan Syafruddin terpelanting seperti akrobatik layaknya, dan ia terpaksa berpisah dengan kaca matanya yang setia karena pecah.

Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, kami berkelana mengembara dari hutan ke hutan, dari satu bukit ke bukit yang lain menuruni lembah-lembah yang dalam, dari satu kampung rakyat ke kampung yang lain untuk menggelorakan semangat juang rakyat dengan segala suka dan dukanya serta di selang-selingi oleh bermacam aneka peristiwa dan kejadian-kejadian yang lucu menggelikan hati sampai penghentian tembak menembak.

Pada tanggal 1 Januari 1949 kami sampai di Lipat Kain, dan jam 21.00 malam mengadakan rapat untuk membicarakan situasi di Sungai Pagu. Di Lipat Kain rombongan di perkecil supaya jangan sampai terlalu memberatkan rakyat yang menerima kami. Dan kami lanjutkan perjalanan ke Kota Baru dan terus ke Taluk Kuantan pada tanggal 4 - 1 - 1949. Kami menginap di rumah Dr. Ilyas Rupaya jejak kami terus diikuti Belanda dan dari pagi selama tiga jam terus menerus bombardemen Belanda tidak henti-hentinya, dan jam 12.00 bombardemen datang kembali, tetapi segala sesuatunya telah dipersiapkan.

Tanggal 5 Januari 1949 kami berada di Batang Karing dan menginap di rumah Wali Negeri dan kemudian kembali ke Kiliiran Jao. Dari Kiliiran Jao terus ke Sungai Dareh (tgl. 9 - 1 - 1949) dan dari sini terus ke ulu sungai naik perahu sedang Mr. T. Hasan berjalan kaki karena dia kuatir naik perahu.

Pada tanggal 15 - 1 - 1949 kami berada di dusun Abe dan disini kami menetap satu bulan lamanya dan pernah sakit sampai 17 hari lamanya.

Melalui Muara Labuh, Alahan Panjang pada tanggal 16 - 2 - 1949 kami berangkat menuju Sungai Penuh dan kami dijemput oleh Bupati Aminuddin dengan kendaraan truck.

Pada tanggal 17 - 2 - 1949 kami berada di Sungai Penuh (Kerinci). Dan pada tanggal 24 - 4 - 1949 dari sini kami kembali ke Sungai Dareh dan terus ke Sumpur yang terletak dipinggir Danau Singkarak yang indah itu, dan pada tanggal 4 - 5 - 1949 kami melanjutkan perjalanan ke Parak Lubang.

Pada bulan Juli datanglah delegasi dari Pusat yang terdiri dari M. Natsir, Dr. Leimena dan Dr. Halim menuju Padang Lawas dan Padang Jepang dimana para pimpinan PDRI berada waktu itu dengan maksud untuk menjemput mereka. Dan dari sini terus ke Bukittinggi bersama delegasi Syafruddin Prawiranegara.

Demikianlah kisah singkat kenangan kami selama bergerilya dari rimba ke rimba di Sumatera Barat dan sekitarnya ditengah-tengah rakyat yang bergelora-gelora semangat juangnya, ya, didaerah rakyat yang telah terlatih dalam revolusi dimana pahlawan-pahlawan Paderi menggembleng dan membina mereka pada abad yang lalu, untuk melawan dan memberontak kepada Belanda.

Menuju Konperensi Besar PDRI :

Setelah menjelajah kurang lebih lima bulan, sejak meninggalkan kota Bukittinggi, dimulai dari Halaban - Bangkinang - Taluk - Abe Sangir - Bidar Alam dan Sungai Penuh; dan setelah pula mengalami pemboman-pemboman dan penembakan-penembakan dari udara oleh kapal-kapal terbang Belanda setiap kali rombongan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dimana kami bergabung berada ditempat yang dituju, maka rombongan PDRI meneruskan perjalanannya ke Sumpur dimana kami tiba di tempat tersebut pada tanggal 4 Mei 1949.

Maksud kepergian kami ke tempat tersebut tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk mengadakan Konperensi Besar dengan aparatur-aparatur Negara lainnya yang ada. Turut di undang dan hadir dalam Konperensi itu, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil dari Partai-partai Politik yang tersebar di seluruh Sumatera.

Bekas Gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasrun dan stafnya datang hampir bersamaan dengan kedatangan kami, dua hari itu juga, sedang Mr. Sutan Moh. Rasyid Gubernur Militer Sumatera Tengah yang duduk sebagai anggota PDRI baru dapat tiba dengan stafnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 1949. Gubernur Militer Sumatera Selatan Dr. A.K. Gani dan P.T.T.S. (Panglima Tentara Teritorial Sumatera) kolonel Hidayat, masing-masing mengirimkan kawat penyesalan tidak dapat hadir, tetapi menyokong sepenuhnya dan tunduk kepada semua keputusan yang diambil konperensi Besar tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 1949 rapat Konperensi Besar di buka dan dipimpin langsung oleh Ketua P.D.R.I. sendiri dan mengambil tempat di rumah Wali Negeri di Si Lantai. Hadir dalam Konperensi Besar itu :

1. Semua anggota P.D.R.I. complit dengan stafnya.
2. Staf angkatan Perang dan Kepolisian.
3. Kepala-kepala Jawatan.
4. Gubernur Militer Sumatera Tengah dan Stafnya.
5. Bekas Gubernur Sumatera Tengah dan Stafnya.
6. Pimpinan Partai-Partai Politik yang tersebar di seluruh Sumatera.

Terlebih dahulu Ketua rapat membacakan kawat-kawat dari Jawa yang datang dari Panglima Besar Sudirman, dari K.S.A.P. II Kolonel Simatupang, dari Panglima Teritorial Jawa Kolonel Nasution dan dari Kepala Perwakilan Luar Negeri di New Delhi Mr. Maramis yang semuanya kawat itu optimistis bunyinya dan menyatakan berdiri dibelakang keputusan P.D.R.I.

Hoofd thema, pokok acara Konperensi adalah membicarakan dan mengupas Rum-Royen Statement dan mengambil langkah selanjutnya.

Setelah ketua Mr. Syafruddin Prawiranegara terlebih dahulu menguraikan panjang-lebar keadaan situasi negara, baik politis, ekonomis maupun strategis, maka diadakan pemandangan umum dan perdebatan. Berturut-turut berbicara dalam tiga hari itu :

1. Mr. Sutan Moh. Rasyid, sebagai Gubernur Militer Sumatera Tengah dan sebagai anggota P.D.R.I.

2. Mr. Nasrun Bekas Gubernur Sumatera Tengah.
3. Ir. Indra Tjahja - anggota P.D.R.I.
4. Djuhir Muhammad dari Partai P.S.I.
5. Rusli Rahim dari Jawatan Kooperasi.
6. Bachtaruddin dari Partai P.K.I.
7. M. Nazir Kepala Staf Umum A.L.R.I.

Pidato-pidato yang diucapkan oleh hampir semua pembicara, isi makna dan nadanya umumnya sama dan bukan main hebatnya, berapi-api dan bersemangat, boleh dikatakan semuanya mengecam beleid "Bangka" dan menyatakan tidak setuju dengan hasil putusan Rum-Royen Statement tsb.

Semua berpendapat, bahwa lebih baik meneruskan perlawanan dari pada menerima Rum-Royen statement itu.

Oleh karena pembicara-pembicara terdahulu telah banyak mengeluarkan pidato yang berapi-api, maka untuk menenangkan suasana, kami sebagai Kepala Staf Umum A.L.R.I. dan juga duduk dalam Staf P.D.R.I. berbicara ringkas saja dengan mengajukan tiga buah pertanyaan.

1. Apakah Pemerintah P.D.R.I. ini sah, kalau sah, kapan sahnya ?
2. Kalau P.D.R.I. ini sah, bagaimana bentuknya dan siapa Presidennya? dan bagaimana corak kabinetnya dan Pemerintahnya ?
3. Kalau P.D.R.I. ini sah, apakah P.D.R.I. menerima saja penunjukan Rum oleh "Pemerintah Bangka" untuk berunding dengan Belanda ? Menurut hemat kami pembicaraan antara Rum-Royen ini tidak lain dan tidak bukan adalah pembicaraan antara seorang gevangene (tahanan penjara) dengan seorang cipir alias juru kunci.

Karena tidak ada lagi yang ingin bicara, Ketua P.D.R.I. Mr. Syafruddin menguraikan lagi panjang-lebar tentang keadaan Negara dan sesudah itu menjawab, bahwa Pemerintah P.D.R.I. ini adalah sah dan disahkan oleh Pemerintah di Yogya pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum Belanda menduduki kota itu.

Mengenai bentuk Pemerintah P.D.R.I. ini, biarkan saja dulu untuk sementara waktu seperti bentuk dan susunannya sekarang; dan mengenai pertanyaan ketiga, Syafruddin menjawab : "Saya sepaham dengan visi Saudara dan begitu pula sepaham dengan apa-apa yang dikemukakan oleh Saudara-saudara yang lainnya.

"Tetapi jangan lupa, bahwa dunia luar mengetahui siapa Sukarno-Hatta, bahwa balans Republik Indonesia lebih berat kepada kedua beliau itu. Kalau kita hendak berpegang teguh kepada pendirian masing-masing, maka saya melihat akan terjadinya *dua golongan* yaitu golongan pro Sukarno-Hatta dan golongan pendukung P.D.R.I., dan ini tidak menguntungkan perjuangan Republik Indonesia yang kita semua sama-sama mencintainya; ini akan *dapat membahayakan keutuhan Negara dan Bangsa yang sudah payah.*

"Untuk mencegah *perpecahan dan menjaga serta memelihara persatuan*, saya akan serahkan mandat saya kembali".

Inilah jawaban singkat Saudara Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua P.D.R.I. dengan mukanya yang merah padam, ia kelihatan kesal dan mendongkol.

Kita semua yang hadir mengerti dan maklum, karena Syafruddin sebagai Ketua P.D.R.I. merasa dirinya dikesampingkan begitu saja oleh "Pemerintah Bangka". Dan walaupun Konferensi Besar tidak setuju dengan beleid-kebijaksanaan pemerintah "Bangka" itu, yang justru tidak berdaya apa-apa karena telah menyerah menjadi orang tahanan, namun rapat menerima langkah yang diambil oleh Syafruddin, yaitu menyerahkan mandatnya kembali *demi persatuan*.

Dengan tindakannya itu *tercegahlah perpecahan, terpelihara Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Bangsa dan Negara diselamatkan.*

Demikianlah sekedar renungan dan kenangan kami pada masa Revolusi, khususnya P.D.R.I. yang berpusat di Sumatera Barat itu semoga ada guna dan manfaatnya dalam penulisan Sejarah Revolusi Indonesia untuk generasi masa kini dan yang akan datang! Amien! Dan akhirnya kepada Allah kita tidak lupa memanjat puji dan syukur dan kepada rakyat Sumbar kita berterima kasih !.

Jakarta, 21 Maret 1975.-

Oleh : *H. Soejono*

Satu minggu sebelum jatuhnya bom Belanda di Bukittinggi, saya sebagai Komandan Komando Udara di Sumatra dan selaku Wakil KSAU sejak 29 Agustus 1947 menerima radiogram dari KSAU Suryadarma, yang berbunyi sebagai berikut :

"Keadaan gawat. Jika Belanda melancarkan agresi maka para anggota AURI diperintahkan terus berjuang menghadapi Belanda dengan meninggalkan tanda pangkat dan bersatu dengan rakyat menghadapi musuh".

Dari KSAU Suryadarma.

Radiogram itu dibacakan oleh Kapten-Ajudan saya OO-III Iskandar, yang sekaligus anggota Intel AURI. Pada mulanya saya gembira mendapat instruksi (katakan kabar) dari Jawa, tetapi segera saya mengalami kekecewaan. Tukas saya : saya tidak mau melaksanakan perintah itu. Kalau Kapten mau saya persilahkan.

Waktu di Bukittinggi kantor pusat ABRI termasuk AURI KO-Sumatra ada dalam kompleks komandemen. Jadi Komando-Darat-Sumatra, KO-Resimen dan KO-Batalyon berada dalam satu halaman.

Waktu kapal terbang Belanda di atas dan menjatuhkan berturut-turut hingga 2 bom, maka seluruh kompleks kacau dan bingung, banyak orang lari, tetapi saya menunggu dan menenangkan anak buah yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Instruksi saya: tenang-tenang saja. Lari kalau kejatuhan bom juga mati. Peralatan penting seperti senjata dan perbengkelan senjata beserta peralatan administrasi agar diungsikan ke suatu tempat di Halaban Payakumbuh. Alat komunikasi radio agar diamankan. Baru besok paginya para anggota AURI dengan kendaraan yang ada menuju tempat pengungsian.

Halaban, suatu kebun teh adalah tempat yang dituju untuk berkumpul sementara dalam pengungsian dan kemudian melancarkan perang gerilya perang rakyat di seluruh pelosok Indonesia sebagai dukungan yang kuat dalam perang diplomasi/politik terhadap musuh dan luar negeri internasional. Terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948 kurang lebih jam 4.00. Dalam Kabinet RI VII ini saya ditunjuk sebagai KSAU Republik Indonesia. Konon telah tersiar bahwa KSAU Suryadarma ditawan oleh Belanda.

Hal komunikasi radio (sender)

Kenyataan adalah AURI sudah lumpuh dalam pengembangan sayap penerbangan, dalam bentuk apapun. Satu satunya harapan adalah Catalina dengan pilot Cobby dan tenaga tehnik Londa yang akan terbang dari Jambi menuju Teluk Kuantan, dengan tujuan membawa Pemerintah Darurat menuju Aceh. Mendadak belakangan diberitakan bahwa sesudah Pemerintah Darurat pergi dari Halaban, Catalina hancur waktu start di Sungai Batanghari. Satu-

satunya modal pesawat terbang yang ada ialah RI-001 yang dioperasikan di Birma dengan mendapat imbalan, guna membiayai kebutuhan RI di luar negeri dan biaya pendidikan siswa pilot-pilot yang berada di India.

Dengan kelumpuhan sayap AURI untuk terbang dalam bergerilya, maka satu-satunya hubungan yang perlu dan harus terbina ialah sender-sender atau pemancar radio. Maka pertama saya mengamankan 1 set sender yang dibina oleh Dick Tamimi, diangkut dengan Jeep yang dibawanya bersama Isoenarjo dari Singapura. Dalam hal seperti itu banyak pemimpin kita gugup dan berpikir apa yang harus diperbuat. Menyeletuklah Bapak Syafruddin Prawiranegara : Lho dimana sendernya saudara Soejono, kok saya tidak melihat, katanya ikut kita. Oh ya ada. Sendernya kurang lebih $\frac{1}{2}$ KM dari sini dalam pengawasan saya untuk siap pakai dan siap sembunyi. Memang itu dengan resmi saya perbantukan kepada Pemerintah dan langsung siap pakai bagi Bapak.

Pikir saya, Pak Syafruddin garang juga. Tapi lebih jauh saya berpikir, apakah lokasi kebun teh Halaban itu cukup aman bagi sender dan sekaligus aman bagi seluruh anggota pemerintah. Dalam map dan ngomong sana sini, ternyata kebun teh Halaban dekat Payakumbuh bersandar pada lereng gunung dan dilingkari oleh jalan besar menuju Lintau, pula dilingkari oleh Sungai Kampar. Seberang Kampar adalah pegunungan luas dari Gunung Barisan.

Tanggal 23 Desember 1948 saya utarakan bahwa Halaban bukan tempat yang aman, dan segera harus ditinggalkan. Ada debat sana sini, mungkin karena letih dan dilanda oleh kecemasan, sehingga saya berkata kepada Dr. Sambiono Kolonel AD, bahwa saya tidak mau ditangkap dan ditawan oleh Belanda, dan segera akan berjalan turun gunung dan harus mencapai seberang kali Kampar. Seram sekali perembugan tentang berangkat dan tidak, dan diperlukan info dimana Belanda berada, apa masih di Bukittinggi atau sudah menuju Payakumbuh. Ada berita Belanda belum sampai di Baso keluar dari Bukittinggi, maka Bapak-bapak memutuskan untuk segera berangkat, tetap pakai kendaraan menuju Bangkinang lewat Payakumbuh, dan bukan jalan darat untuk menyeberangi Kampar. Saya menerima keputusan, tetapi dengan segera Halaban harus ditinggalkan. Siang hari kendaraan bergerak keluar dari Halaban, kembali menuju Payakumbuh, dan tanpa berhenti terus membelok ke Bangkinang via Tanjungpati. Tidak ada yang sempat mampir di Payakumbuh karena Belanda sudah bergerak keluar dari Baso menuju Payakumbuh dengan jarak kurang lebih 25 KM. Rombongan Pemerintah melintasi Tanjungpati, naik gunung lewat jalan Kelok-Sembilan, dan sore hari berada di atas Bukit Barisan kurang lebih 3 KM dari Tanjungpati yang sudah kita belakang. Ternyata Belanda sudah pula memasuki Tanjungpati dalam usahanya menangkap para anggota Pemerintah Darurat. Belanda tidak sanggup mengejar kita, karena jalan berkelok-kelok sembilan kali naik menuju ke atas gunung. Tanggal 24/25 Desember 1948, rombongan terdiri dari 7 kendaraan termasuk truk, memasuki Bangkinang, masuk rumah Asisten Wedana di muka alun-alun, dan semua anggota Pemerintah dalam keadaan sangat letih dan dengan pakaian yang sangat lusuh.

Saya sendiri bersama ajudan saya S.M.U. Sudarsono, kini Purnawirawan Kolonel Udara, berusaha menyembunyikan sender dalam Jeep Dick Tamimi, sedikit jauh dari alun-alun kurang lebih 1 KM. Saya bersama Ajudan kembali memasuki rumah Asisten-Wedana dan melihat Bapak-bapak menggeletakkan diri di sana sini, ada yang sudah tertidur dan ada yang masih dalam keadaan termenung. Terlintas dalam pikiran saya secara cepat akan keadaan esok paginya, dan saya menyeletuk kepada Sudarsono : Lidok Dar, bayangkan kalau Belanda mengetahui Pemerintah komplit berada di sini. Pasti besok pagi ada ngeong-ngeong dari Pakanbaru atau Bukittinggi. Tentu tahu, dan gampang pula dari adanya kendaraan-kendaraan mobil untuk memperkirakan dimana kita berada. Celetuk Sudarsono. Langsung saya keluarkan pendapat saya agar Bapak-bapak pergi mengaso di pinggiran, jangan di pusat seperti rumah kediaman Asisten Wedana di muka alun-alun. Rupanya Bapak Syafruddin belum tertidur dan menegur saya dengan bertanya dimana sendernya. Saya terpaksa sedikit menjelaskan akan keamanan sender, satu-satunya alat penghubung dan perlu dijaga jangan sampai kena ditembak oleh Belanda. Bapak Syafruddin diam saja dan membaringkan diri, acuh tak acuh atas "Warning" saya, sedang lain-lain Bapak ada yang bereaksi pindah tempat berbaring cari di rumah pinggiran. Saya sendiri tidak beristirahat dalam rumah Asisten.

Apa yang terjadi esoknya ?

Jam hampir setengah tujuh pagi, dua buah pesawat terbang menembaki rumah Asisten dan deretan kendaraan di pinggir alun-alun. Saya lari kencang-kencang menghampiri Bapak Syafruddin, menarik dia agar segera lari menuju kebelakang terlindung pohon-pohon dan menuju ke pinggir kali Kampar yang memang tidak jauh dari kantor asistenan. Setengah jam kemudian kita muncul dari persembunyian dan memasuki rumah Asisten, dan kebanyakan dalam keadaan diam. Semua selamat, kendaraan terkena tembak dan ada seorang prajurit tertembak mati langsung.

Kita semua berada di Bangkinang selama dua hari dan merundingkan masing-masing mau jalan ke mana, antara lain diusahakan rombongan mau menuju Teluk Kuantan, menghampiri Catalina, yang nantinya ternyata telah kena musibah di daerah Jambi. Saya dengan rombongan kecil, bersama pak Iskandar dan ajudan kembali ke daerah Payakumbuh untuk mengatur segalanya, sedang sender secara komplit dengan crew, saya serahkan kepada Bapak Syafruddin (Pemerintah). Rombongan Syafruddin masih mempergunakan mobil sejauh mungkin menuju arah Teluk Kuantan; dengan itu Mobil Gajah Putih dari Bapak Teuku M. Hassan mempersembahkan sisa-sisa tenaganya kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kisah perjalanan Pemerintah Darurat beberapa hari sesudah pemboman oleh Belanda, terutama mengenai "sender", dengan *op en aanmerkingen*, benar-benar menggarisbawahi, bagaimana pentingnya fungsi "pemancar Radio", untuk diamankan baik mengenai pesawatnya maupun mengenai jalurnya perhubungan antara Jawa dari Kulon Progo dan Playen Wonosari, menuju Sumatra. Terutama sender Pemerintah Pusat dan Sender Gubernur Militer/Pemerintah

Darurat, dengan Rangoon (Soemarno, Wiweko), untuk dapat disiarkan keseluruhan pelosok dunia yang dituju. Perhatian dalam keseluruhan demi keamanan Perhubungan radio dan terutama perjuangan politik, agar dunia Internasional mengakui sepenuhnya Republik Indonesia secara de facto sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, benar-benar merupakan tantangan mutlak, tidak dapat ditawar.

Paraklobang dalam daerah Halaban Kebun Teh

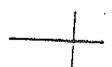
Paraklobang adalah sebutan yang timbul dari perjuangan bersama rakyat di waktu permulaan perang Kemerdekaan ke II. Kekuatan pertahanan dari pelbagai konsentrasi AURI, seperti dari Pakanbaru, dari Gadut Bukittinggi, dari Piobang Payakumbuh, beserta bekas pekerja-pekerja dari kebun teh, ditambah kelompok transmigran dari daerah Siak Indragiri, juga ada kelompok bekas napi di Sawahlunto yang dapat lolos dari kepenjaraan Belanda, bersatupada bahu membahu menghadapi musuh Belanda. Pimpinan komando pertempuran dipegang oleh D. Oma dan Domei Agan. Persenjataan cukup dan bahkan Paraklobang, kemudian disebut Tegalrejo, juga memelihara reparasi senjata yang diterima dari pelbagai front disekitar Bukittinggi.

Kekuatan jumlah manusia berjuang kurang lebih 250 orang, yang bertugas sebagian besar bercocok tanam dan buka lahan bekas dibakarnya sebagai area dari kebun teh, sehingga diberi nama Paraklobang. Pasar dibangun oleh para anggota tersebut di atas, bahkan AURI juga membangun sekolah dasar, beserta mendirikan tugu AURI dari kayu, yang hingga kini masih terpelihara walaupun telah diserang oleh rayap. Tugu itu sekarang menjadi barang yang antik bagi rakyat Tegalrejo. Serangan-serangan terhadap Patroli Belanda dari Payakumbuh sering dilancarkan dalam daerah yang berbukit-bukit dan yang berguna bagi perang gerilya. Selama hampir setahun bergerilya di Tegalrejo Payakumbuh, maka unit-unit AURI benar-benar merasakan persatuan dengan rakyat dusun yang memberi makan dan keteduhan, bahkan menyemangatkan tugas perang menghadapi Belanda. Sungguh AURI/Pemerintah sangat berhutang budi kepada rakyat.

PUAR DATAR, daerah KOTOTINGGI

Daerah ini merupakan konsentrasi AURI dalam pembinaan sender pemancar radio yang diserahkan kepada Gubernur Militer/Pemerintah Darurat. Pimpinan dipegang oleh Jakub. Terutama unit AURI sebesar kurang lebih 1 seksi itu menempati rumah dari famili Abdulmajid, juga nanti menjadi anggota AURI mencapai pangkat Perwira. Keluarga Abdulmajid benar-benar menjadi Ibu-Bapak Angkat dari anggota-anggota AURI. Suatu serbuan Belanda mengakibatkan sender dan generator cukup berat, diungsikan ke tempat lain Sei Dadap dan Sei Rimbang, dimana persatuan dengan rakyat juga terjelma dengan akrabnya.

Gubernur Militer Mr. Moh. Rasyid sangat menghargai dusun-dusun tersebut di atas karena sender AURI itu merupakan satu-satunya hubungan keluar, dalam soal politik atau militer Mr. M. Rasyid dan Mr. T. Moh. Hassan adalah sekaligus anggota dari Pemerintah Darurat.



KSAU kerap kali mengunjungi Puar-Datar dan Kototinggi, dalam rangka perjalanan kepelosok untuk menerangkan kepada rakyat tentang perang rakyat. Untuk mengamankan Pemerintah selanjutnya, maka rakyat dengan sukarela menumbangkan pohon-pohon kelapa untuk merintanginya musuh. Suatu hal yang penting, generator kehabisan bahan bakar, maka KSAU dalam kelompok kecil berjalan menuju Muaratebo Jambi untuk mengangkut bahan-bakar dengan kaleng-kaleng minyak tanah, dengan sumbatan mempergunakan tanah lumpur mengerahkan sebanyak 60 orang untuk mengangkutnya di atas kepala estafet, berganti-ganti hingga aman kembali diserahkan di Puardatar.

Menjalani Puasa

Dalam suatu bulan puasa Soejono yang bukan Islam solider turut menjalankan ibadah puasa sekaligus merupakan doa panjang kehadapan Yang Maha Kuasa, agar perjuangan Bangsa Indonesia di Ridhoi dan bersukses dengan kemenangan demi tegaknya Republik Indonesia dalam forum Internasional. Dalam bulan puasa dari Kototinggi, tempat kediaman Bapak Teuku Moh. Rasjid, KSAU berjalan keliling via Puardatar, menuju Bonjol melintasi hutan-belukar menuju Lubuksikaping dan kembali menuju utara Bukittinggi. Setelah itu menginspeksi daerah Kamang, tempat pertahanan pasukan tempur AURI yang dipimpin oleh Legino dan Dt. Bagabang Nurtama. Banyak korban jatuh dari anak buah, tetapi Kamang adalah tetap Kamang, naluri perjuangan yang terdahulu menghadapi penjajah Belanda, terutama pengalaman pada tahun 1908, maka Kamang tetap bertahan, dan menelan banyak korban Belanda, berkat penggunaan senjata berat 12,7 secara gigih. Kamang yang dekat Bukittinggi adalah merupakan daerah berpengalaman dalam konfrontasi dan bertempur dengan Belanda puluhan tahun lamanya, dan selama itu praktis Kamang tidak pernah menyerah.

Selanjutnya KSAU meneruskan perjalanan, melewati pinggiran Payakumbuh dan Piobang untuk kembali ke Kototinggi. Dalam perjalanan keliling itu disana-sini menjumpai anggota AURI, yang bersatu dengan pasukan Angkatan Darat, dan di mana perlu untuk digabungkan lagi pada induk pasukannya di Kamang maupun di daerah Halaban. KSAU kembali bertemu anggota Pemerintah di Kototinggi dan kebetulan bulan puasa sudah terlampau dengan selamat berpuasa hampir penuh, sehingga KSAU dihormati oleh Bapak Teuku Moh. Hassan dengan hadiah menyembelih kambing untuk makan kembang-ber-sama. Dalam kesempatan itu Bapak Teuku Hassan memperagakan bakatnya kembali dengan main biola. Sungguh terharu dan bergembira, berpesta kecil jauh dari sanak saudara.

Perjalanan Panjang

KSAU dengan rombongan kecil mendapat tugas keliling, untuk mempertebal semangat perang rakyat menghadapi Belanda dimana-mana. Sekaligus KSAU membawa pesan dan beban dari Pemerintah Darurat untuk membawa bekal "EMAS HITAM" untuk diserahkan bagi perjuangan di daerah Jambi. Terutama yang menjadi sasaran ialah Kiliranjau, yang harus dipertahankan jangan sampai jatuh dalam tangan Belanda, karena merupakan jalan lintas me-

lalui daratan dari Selatan ke Utara dan sebaliknya. Karena tempat itu perlu di pertahankan, maka diadakan penerangan dalam suatu rumah gadang di Sungai-Dareh, rumah sepanjang kurang lebih 30 meter dengan tiang besar-besar, memuat ratusan orang tua muda, datuk-datuk, Ninik-Mamak dan para rangkayo. Penerangan itu ditujukan penggunaan senjata gobok dari rakyat, untuk senantiasa siap menghalau patroli Belanda, baik dari Sijunjung atau dari Batusangkar, jangan sampai Kiliranjau dapat diduduki. Perjuangan Senjata gobok oleh rakyat dengan taktik Dor—Lari dari bukit ke bukit dipinggiran jalan besar, benar-benar cukup membuat pusing tentara Belanda dan bahkan ada tentara Belanda yang kena tembak senjata gobog dalam jarak dekat. Belanda tidak berdaya membalas hancur tentara senjata gobog, karena memang para gerilyawan tidak berkelompok dan bergerak cepat sendiri-sendiri. Selama perang Kemerdekaan ke II maka Kiliranjau tetap dalam pengawasan pasukan kita.

Meninggalkan Sungai Dareh KSAU dihormati oleh Rakyat dengan menyembelih kerbau dan berpantun-pantun antara para pemuda dan para gadis, seakan-akan para pemuda mewakili KSAU, minta pamit dengan haru dan janji untuk kembali lagi. Inilah suatu pengalaman lagi, di mana tanpa perintah atau instruksi dari Pemerintah Pusat, dapat bermanifestasi kepribadian Pemerintah Pusat, dengan segala wibawa, rakyat menerima baik tanpa terpaksa menjalankan tugas-tugas perjuangan Republik Indonesia. Sungai Dareh oleh karenanya merupakan daerah "Republik kecil yang bebas dan merdeka.

Sehabis Sungai Dareh KSAU melawat langsung kearah Bidaralam, di mana Bapak Mr. Syafruddin dkk melancarkan roda pemerintahan, baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Di sana terkumpul sebagian besar anggota Pemerintah Darurat dengan KSAL Moh. Nazir yang tetap single berusaha menangkap menjangkan muda yang bunting konon buat obat fitness dalam perantauan menerobos hutan belukar. Saya sangat bergembira menjumpai Bapak-bapak dalam kesehatan segar bugar dan selalu dalam suasana kegembiraan. Ketekunan para perwira Sandi—AURI dan PHB—AURI sangat terpuji, alat sender dalam perawatan yang baik, dan mereka bekerja non stop sesuai waktu yang dipergunakan untuk mengetuk dan menerima kabar.

Sehabis Bidaralam KSAU merantau berjalan lewat Hutan-Situjuh, dengan membawa "emas hitam" seberat 20 kg, menuju Jambi. Kenyataan rombongan kecil KSAU menghabiskan waktu sebelas hari untuk bisa keluar dari hutan belantara didaerah Gunung Kerinci itu. KSAU terpaksa membuang sepatunya, karena jebol di hari terakhir mau keluar dari hutan. Akibatnya ialah berjalan lebih lambat di jalan setapak. Walaupun sudah berhati-hati, musibah terjadi, kaki tanpa alas menginjak ranting kecil di jalan setapak, rupanya ranting dengan ketajaman, sehingga langsung berdarah dan terpaksa dibalut dengan sobekan kaus dalam. Perjalanan memakan satu setengah hari untuk keluar dari hutan dan mendapatkan kampung.

Di Jambi KSAU beristirahat dan merawat kaki tanpa obat setetesupun, hanya terus-menerus dibersihkan dengan air hangat dan dipijit mengeluarkan kotoran. Dalam waktu satu minggu kaki sembuh, dan Bapak Bastari (Polisi)

6

+

telah mendapatkan sepasang sepatu karet, sehingga KSAU dapat meneruskan perjalanan.

Dari Jambi KSAU menuju ke Selatan untuk bertemu dengan Dr. A.K. Gani di daerah Palembang Selatan. Jalan besar menuju Sorolangun mau tak mau melewati hutan belukar, yang panjangnya kurang lebih 3 jam jalan kaki. Pada suatu daerah di hutan itu, manusia jalan kaki harus berusaha melintasi-nya di antara jam 11.00 dan jam 14.00. Dalam kurun waktu itu, binatang buas tidak melintasi jalan raya di tengah hutan. Dapatlah dibayangkan, rombongan KSAU berjalan serius dan teratur, bolak-balik menengok jam tangan. Sambil waspada bertingak-tinguk apa ada bahaya muncul, sambil berimajinasi, apa yang akan diperbuat jika bahaya datang. Lega rasanya, sesudah hutan berbahaya itu sudah lewat. Dusun Sorolangun seakan-akan di muka kita. Kenyataan baru sesudah magrib rombongan KSAU memasuki Sorolangun, dan rakyat transmigrasi menyambut rombongan KSAU dengan gembira dan ramah.

Di Sorolangun KSAU memerlukan waktu beberapa hari untuk kunjung-mengunjungi dan memberi penerangan tentang perang rakyat secara populer, dan mengertikan mereka akan situasi negara yang dihadapi. Mereka rupanya haus akan adanya pemimpin. Mereka menghendaki kita berlama-lama di tengah-tengah mereka. Tetapi dengan pasti kita harus meninggalkan Sorolangun menuju Sikancing, tempat bercokolnya Dr. A.K Gani bersama dr. Ibnu Sutowo di Palembang pedalaman. Perjalanan memakan 2 hari, akan tetapi bukan se-serem perjalanan di daerah Jambi. Berjumpa para pemimpin di daerah baru dan lain, merupakan kenikmatan tersendiri. Para pemimpin kita umumnya dalam keadaan ria dan optimis, tidak berkecil hati, sabar dan tabah menghadapi keadaan yang itu-itu saja, dalam arti tanpa variasi dan monoton. Berita dan informasi secara timbal balik diutarakan, dan dapatlah dibayangkan selanjutnya apa yang akan terjadi jika perang gerilya seperti yang dialami itu, dilancarkan tanpa komunikasi udara. Maka kita bersyukur, bukan hanya demi pribadi, akan tetapi demi kepentingan strategis untuk memenangkan adanya pengakuan Republik Indonesia-lah, bahwa pemancar-pemancar radio AURI dengan para Perwira/Bintara P.H.B. dan SANDI, dapat terpelihara dengan baik. Lagi-lagi terdengunglah nama Dick Tamimi, nama Soenaryo dalam kuping KSAU, karena merekalah yang menyelundupkan pemancar radio itu dari Singapura masuk Pakanbaru, dan disambut baik oleh residen R.M. Utoyo.

Sehabis Sikancing daerah Sumatra Selatan, perjalanan keliling KSAU sekarang melewati Muara Tebo menuju Siak Indragiri di tapal-batas Sumatra Barat. Di sana terdapat tenaga rakyat dengan jumlah besar, yaitu para transmigran yang berjumlah kurang lebih 5000 orang. Mereka berdiam tidak berkelompok, tetapi menurut situasi lahan bagiannya yang untuk digarap. Mereka sangat getol untuk menjumpai rombongan KSAU dari dekat. Mereka benar-benar memerlukan adanya pimpinan yang dapat membimbing mereka. Mereka rasanya seperti dibuang di hutan belukar, dan sudahlah tidak tau kesudahannya !. Di malam hari waktu terang bulan, sebagai klimax keterangan-keterangan di siang hari mengenai perang rakyat, rakyat transmigrasi berkumpul,

berdiri berjajar dalam barisan seperti tentara di jalan besar, untuk bersama-sama berdoa, menirukan kata-kata KSAU, dalam sinar remangnya terang bulan, di hadapan Yang Maha Kuasa, "mohon kemenangan dalam perang Kemerdekaan ke II". Lima hari dihabiskan untuk memuaskan mereka dalam lahan yang luas dan berbukit, tanya jawab bernostalgia, ingin mendengar berita dari daerahnya di Jawa beserta mengharapkan suatu hari yang cerah, sebagai hasil jerih payah di hutan belukar jauh dari keramaian. Perpindahan dengan rakyat transmigran dirasa berat, dan dalam kalbu KSAU, dirasa cinta kasihnya kepada rakyat, pula seakan-akan dapat merasakan rasa sakitnya, rasa jerihpayahnya para transmigran meninggalkan daerahnya di Jawa untuk bermukim dalam suatu daerah yang terpencil. Eksistensi Pemerintah Pusat terasa wibawanya dalam hati rakyat. Selanjutnya perjalanan keliling KSAU, diakhiri untuk kembali ke Paraklobang/Tegalrejo (Pusat gerilya AURI) dan ke Puardatar Kototinggi pada Ibu/Bapak Angkat Keluarga Abdul Majid.

KSAU masih menghadiri pertemuan Pemerintah Darurat dengan Bapak Dr. Halim dan Bapak Natzir, suatu pertemuan penting dan hampir tidak mencapai sasaran. Bersyukurlah Bapak Mr. Syafruddin berjiwa besar untuk menuju ke Jawa menjumpai Bung Karno.

Akhirnya sesudah Cease-fire maka KSAU masih aktif dalam JOINT-COMITTEE, untuk selanjutnya bersatu dengan keluarga di Bukittinggi, dan dengan koper dari seng bersama keluarga menuju Jakarta dengan tugas baru.



12. PENGALAMAN BULAN-BULAN AKHIR 1948 SAMPAI DENGAN
AKHIR 1949

Oleh : A.E. Kawilarang

Akhir bulan Mei 1948 Kepala Staf Divisi Siliwangi Let. Kol. Daan Yahya kirim memorandum kepada Wakil Presiden/Menteri Pertahanan. Isinya : Kemungkinan besar dikemudian hari Belanda melancarkan lagi Aksi II. Pemerintah RI akan ikut bergerilya di daerah Yogya Selatan dan sekitarnya, tetapi dalam daerah sempit ini tidak dapat bergerak dengan leluasa. Karena itu harus dipikirkan bahwa di Sumatra jauh lebih bebas bisa bergerak; tidak perlu seluruh pemerintah, beberapa menteri perlu berada di Sumatra.

28 November 1948 di Sibolga, Wakil Presiden Bung Hatta dan Panglima Tentara dan Territorium Sumatra yang baru, Kolonel Hidayat turut menyelesaikan perang saudara yang dimulai pertengahan September 1948 antara Bedjo (dengan pasukannya di Tapanuli Selatan sampai Sipirok dan Sibolga) dan L. Malau (dengan pasukannya di Tapanuli Utara, kecuali Kabupaten Dairi).

Sebagai Komandan Sub Territorial VII Tapanuli dan Sumatra Timur Selatan mengadakan reorganisasi : Komandan Sektor I Mayor Bedjo, daerahnya Tapanuli Selatan. Pada Aksi II sebagian pasukannya harus bergerilya di Sumatra Timur Selatan sampai Asahan. Komandan Sektor II Mayor L. Malau, daerahnya Tapanuli Utara kecuali Kabupaten Dairi dan batas Selatan di Sitinding. Pada Aksi II sebagian pasukannya masuk Simalungun di Sumatra Timur. Komandan Sektor III Mayor Slamet Ginting, daerahnya Dairi. Waktu Aksi II masuk ke tanah Karo di Sumatra Timur sampai Deli dan Langkat. Komandan Sektor IV Kapten Oloan Sarumpaet (bulan pertama Aksi II diganti oleh Mayor Mareden Panggabean), daerahnya Sibolga dan sekitarnya sampai Aek Godang dan batas Angkola. Komandan Sektor "S" Mayor Husein Lubis. Permulaan Aksi II diganti oleh Let. Kol. Simanjuntak, semua anggota ALRI, daerahnya juga kota Sibolga dan waktu Aksi II ke sekitar Baros.

Taktik : Jika Belanda menyerang, jangan bertahan mati-matian, mundur perlahan-lahan dengan cara memperlambat pertempuran (*vertragend gevecht*) dengan *sniping*. Bergerilya dengan cara mengganggu patroli dan konvoi Belanda serta sarana perhubungan mereka. Makin jauh Belanda maju, makin kritis mereka memelihara perhubungannya dan makin kritis pasukan terpencil mereka serta makin kritis memelihara garis-garis logistik mereka.

Di Sumatra Timur, aman untuk Belanda sejak Renville, pasukan kita harus mulai aktif dan terpaksa pasukan Belanda terpecah diseluruh Sumatra Timur dan Tapanuli sampai Selatan Padang Sidempuan. Dilarang menyerang pos-pos Belanda karena pertahanan mereka kuat dan kita hanya buang peluru yang memang hanya sedikit dikarenakan perang saudara. Dalam buku Belanda *De Politionele Acties* penulis Pierre Heyboer, jalan Tarutung-Sibolga disebut "dodenweg" (jalan maüt).

Residen Tapanuli adalah Dokter Ferdinand Lumban Tobing, sangat populer di Tapanuli, aktif dan tegas. Hubungan sipil dan tentara selalu baik, jika ada sedikit salah faham di bawah, segera diselesaikan oleh Camat, Bupati dan Komandan Kompeni atau Batalyon. Selain itu diadakan Badan Urusan Memperbaiki Perekonomian Rakyat Indonesia (BUMPRI) yang antara lain mengatur : barang-barang di pedalaman (daerah Republik) yang boleh di bawa ke daerah pendudukan Belanda dan barang kota (Belanda) yang harus dibawa kembali (diselundup) ke daerah kita, harga sedikit stabil, pasar-pasar di pedalaman, dan sebagainya. Rencana ini prakarsa dan diatur oleh Kepala Staf Sub Terr VII Mayor Utaryo.

Pihak Republik (sipil dan tentara) di seluruh Tapanuli/Sumatra Timur hanya mempunyai 1 sender dan 1 sender cadangan di Komando Pos Sub Terr VII kira-kira 3 jam jalan dari Ko.Pos.Residen. Hubungan sender/ontvanger dengan Aceh, Riau (Mayor Akil Prawiradiredja) dan Komando Sumatra. Karena sebelum Aksi II boleh dikatakan segala persiapan seadanya sudah diatur dengan Komando Sumatra (yang tentu selalu berhubungan dengan PDRI), Komando Sub Terr VII tidak langsung berhubungan dengan PDRI. Hubungan dengan sektor-sektor dilakukan dengan "kurir jalan" yang kadang-kadang baru kembali sesudah 2 atau 3 bulan.

Komandan Sektor III Mayor Slamet Ginting, pasukannya asal Karo dan Dairi. Pasukan Mayor Djamin Ginting yang mundur ke Kotacane (Aceh) sesudah Aksi I, anak buahnya juga dari Karo dan Sumatra Timur, pasukannya di bawah Komando Aceh dan harus juga masuk Karo. Antara 2 mayor ada keinginan agar salah satu dari mereka menguasai Tanah Karo. Saya mengunjungi kedua komandan tersebut secara terpisah. Setelah itu ditentukan wilayah kekuasaan : Bagian Utara Karo di bawah Djamin dan Selatan di bawah Slamet.

Aksi II baru mulai, di daerah sektor II ada Timur Pane, (waktu sebelum Aksi I di Medan Area punya pasukan "Legiun Penggempur" yang tidak sah memakai pangkat Mayor Jenderal) mencoba merebut kekuasaan dari Mayor L. Malau, tetapi dikejar oleh Sektor II. Timur Pane dan pengikut-pengikutnya mundur ke Aceh Selatan dan non aktif di sana. Pasukan Sub Terr VII yang masuk di Sumatra Timur (Karo, Simalungun, Asahan, Labuan Batu) sering kontak senjata (vuurcontact) dengan KL, KNIL dan 4 Batalyon *Blauwpypers* ialah 4 *veiligheids* Batalyon dari negara Sumatra Timur. Sudah tentu di Tapanuli juga sering ada pertempuran.

Residen Tobing oleh Komando Sumatra diangkat sebagai Gubernur Militer Tapanuli dan A.E. Kawilarang sebagai Wakil Gubernur Militer.

Dipihak lawan Komandan *Troepen en Territoriaa! Komando noord Sumatra* (daerah Sumatra Timur dan Tapanuli) adalah Mayor Jenderal Piet Scholten. *Troepen commandant* di Tapanuli adalah Letnan Kolonel De Vries. Tengku Mansyur diangkat sebagai Wakil Negara Sumatra Timur. Yang ditunjuk sebagai Kepala Bagian Sipil di Tapanuli *Hoofd Gewestelijk Bestuur* (Recomba) tidak bisa berbuat banyak, paling-paling hanya di kota-kota yang diduduki pasukan Belanda.

13. KEGIATAN AURI SELAMA PDRI DI BURMA

Oleh : *Wiweko Supono*

Pada pertengahan bulan Desember 1948 pesawat terbang Dakota RI-001 mendarat di Calcutta dari Yogyakarta. Maksudnya adalah untuk perawatan periodik dan mengecet dalam camouflaje militer. Setelah selesai, pesawat terbang tersebut direncanakan kembali ke Yogyakarta.

Tetapi pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan serangan terhadap Yogyakarta dan menduduki kota tersebut, sehingga pesawat tidak bisa kembali ke pangkalan semula.

Agar kegunaan pemilikan pesawat tersebut dapat dioptimalisir maka melalui Perwakilan RI di New Delhi (Dr. Sudarsono) diusahakan memperoleh izin agar pesawat itu diperbolehkan beroperasi di India sebagai pesawat charter untuk pengangkutan cargo. Tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pemerintah India.

Tetapi secara tiba-tiba dan tidak terduga diterima kawat dari Perwakilan RI di Rangoon, yang mengatakan bahwa Pemerintah Burma memerlukan jasa-jasa pengangkutan udara.

Pada tanggal 26 Januari 1949 pesawat terbang RI-001 bertolak dari Calcutta menuju Rangoon. Semenjak hari itu operasi penerbangan yang dilakukan adalah bernaung dibawah nama "INDONESIAN AIRWAYS".

Pesawat RI-001 d charter oleh Pemerintah Burma melalui Kementerian Pertahanannya dan " Union of Burma Airways " - flag - carrier Burma.

Pada permulaan penerbangan-penerbangan charter, merupakan penerbangan logistik untuk kebutuhan Angkatan Bersenjata Burma. Lambat laun penerbangan tersebut merupakan penerbangan-penerbangan charter biasa yang mengangkut penumpang-penumpang sipil. Camouflaje militer pesawat pada suatu ketika dihilangkan dan pesawat merupakan pesawat komersil biasa.

Hasil-hasil operasi tersebut diatas dipakai untuk membantu keperluan tugas-tugas Pemerintah RI di luar negeri serta memungkinkan perluasan armada menjadi tiga pesawat terbang yaitu RI-001 dan RI-007 milik Pemerintah RI, sedangkan RI-009 dilease dari pihak luar.

Keperluan perjuangan dalam negeri juga tidak dilupakan. Pada pertengahan tahun 1949 RI-001 menerobos blokade Belanda dua kali dan membawa radio transmitter dan senjata ke Aceh. Yang terakhir ini adalah hasil diplomasi wakil RI di New Delhi (Dr. Sudarsono) dengan Jenderal Bo Ne Win yang pada waktu itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Burma.

Selain kegiatan-kegiatan penerbangan diatas, dari Rangoon juga dapat dipertahankan hubungan radio melalui Kesatuan Perhubungan Radio AURI di Aceh, Sumatera Tengah dengan Kesatuan Radio di Jawa (sekitar Yogya).

Perhubungan Radio AURI ini dimungkinkan karena hasil diplomasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Burma sehingga Angkatan Bersenjata Burma menyediakan radio transmitter di Rangoon untuk keperluan tersebut.

Sebagai penutup dapat ditambah disini bahwa hal-hal tersebut diatas diketahui juga oleh Sejarahwan Belanda DR. L. DE JONG sebagaimana tercantum dalam bukunya yang berjudul :

"Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog" jilid 12, disebutkan :

'VERSCHRIKKELIJKE ONTAARDING' OP SUMATRA

— zo ging Boekittinggi weer 'Fort de Kock' heten. 'Door dergelijke daden', aldus de vroegere Recomba van de Velde (sinds begin '49 Beels adviseur voor Sumatra, later algemeen adviseur) 'is ontstellend veel kwaad gedaan en wantrouwen gezaaid, ook waar een begin van vertrouwen mogelijk ware geweest'.

De TNI-eenheden hadden zich uit de grotere plaatsen teruggetrokken. Hun commandant kwam spoedig, nl. eind januari '49, weer in radioverbinding met de legerleiding op Java: een belangrijke verbinding, want van Sumatra uit konden via Rangoon, waar de regering van Birma een legerzender ter beschikking had gesteld, berichten gewisseld worden met de Indonesische ambassade in New Delhi.' Die legerleiding kreeg trouwens meer radioverbindingen met Sumatra: er kwam een zender in Atjeh, nl. in Koetaradja — er kwamen voorts geheime zenders in Benkoelen, in Pakanbaroe, in Djambi en vlak bij Telokbetoeng. Via die verbindingen werd instructie gegeven om het Nederlands militair bestuur zoveel mogelijk in het nauw te brengen. Aldus geschiedde. Een groot aantal met Nederland samenwerkende Indonesiers werd geliquideerd of anderszins bestraft, woningen en fabrieken gingen in vlammen op - ook maakten roversbenden van de situatie gebruik om hun slag te slaan. Er ontstond, aldus weer van de Velde, 'een terreur die eerst na onze ingreep werkelijk met die naam moet worden bestempeld, een verschroeide aarde-systeem zonder enige rem en een verschrikkelijke ontaarding in de vorm van ontvoering, verminking, moord en brandstichting.'

Misschien evenwel wordt Nederlands zwakke positie het treffendst geïllustreerd door het feit dat de Republikeinse noodregering, die op 19 december '48 was ingesteld, ongehinderd haar werk kon voortzetten. Zeker, zij moest Boekittinggi verlaten maar zij vestigde zich niet eens zo ver daarvandaan : in Kotatinggi, hemelsbreed ca. 30 km verder noordelijk, langs de weg 90 km. Zij had een mobiele zender bij zich die ook al met New Delhi in verbinding stond.

Van beheersing van de situatie was dus geen sprake.

De Republiek heeft van Atjeh uit ook een luchtverbinding met Birma kunnen onderhouden.

+

2

Oleh : *Baharuddin Djaka.*

... Saya pada masa periode PDRI (1948 - 1949 - 1950) berumur sekitar 19 - 20 tahun, berdomisili di kota Bukittinggi. Waktu itu saya menjadi anggota B.P.N.K. (Badan Pengawal Negeri dan Kota) untuk Wijk Pasar Atas Bukittinggi; menjadi anggota/pembantu PEMA (Penyelidik Masyarakat) Sub Terr IX Banteng Sumatera; menjadi pembantu staf Sekretaris I dan II Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat yang diketuai oleh Mr. St. Muhamad Rasyid Residen Sumatera Barat, sedang PEMA Sub Terr IX Banteng Sumatera dikomandani oleh Kapten Leon Salim. Mengingat suasana yang semakin genting, maka B.P.N.K. membentuk P.M.T. (Pasukan Mobil Teras). Kepada anggota P.M.T. yang terdiri dari pemuda-pemuda yang disaring secara ketat diminta oleh Pemimpin Sipil/Militer agar waspada terhadap kemungkinan serbuan tentara Belanda; menjadikan diri masing-masing sebagai prajurit pembela tanah air; melakukan latihan-latihan atau perang-perangan seperti yang pernah dipelajari di jaman Jepang sewaktu menjadi Bogodan/Seinendan; diajarkan cara-cara perang gerilya (menyelusup ke daerah musuh kemudian merusak dan menghancurkan obyek-obyek vital milik Belanda; mengetahui/mengawasi setiap orang baru yang memasuki wijk kita masing-masing; setiap mata-mata (spion) Belanda yang tertangkap jangan diberi ampun, sembelih dengan kaleng.

Sementara itu dari kawan-kawan seanggota PEMA sudah pula santer omong-omongan/cerita bisik-bisik bahwa Taicho (Pak Leon Salim) telah melapor kepada atasan bahwa Belanda akan menyerbu ke daerah pedalaman Republik Indonesia. Kita akan perang gerilya karena perang secara frontal jelas kita tidak akan mampu. Obyek-obyek vital akan kita rusak, gedung-gedung, rumah-rumah dan lain-lain akan kita bakar (taktik bumi hangus). Kepada beberapa anggota pilihan diperintahkan untuk menyebarkan selebaran-selebaran yang isinya antara lain berupa seruan pada rakyat agar lebih waspada dan bersiap untuk perang.

Demikian juga di kantor Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat/kantor Residen Sumatera Barat semakin sering diadakan rapat-rapat tertutup dan kadang berlangsung sampai larut malam, sehingga kami pegawai Dewan Pertahanan Daerah terpaksa pula bekerja lembur. Salah seorang anggota Dewan Pertahanan Daerah (Pak Abdullah, Alm.) membagi-bagikan buku saku (stensilan) antara lain buku karangan Tan Malaka (seorang tokoh yang sudah menjadi mitos dan idola bagi kaum muda Sumatera Barat dikala itu), seperti buku: "Dari Penjara ke Penjara", "Madilog", "Perang Gerilya", "Pacar Merah", "Elang Emas", dan lain-lain; juga buku karangan Matu Mona. Kepada kami para pembantu/pegawai D.P.D. ditekankan supaya dalam keadaan bagaimanapun juga harus tetap setia kepada Republik Indonesia pimpinan Sukarno - Hatta. Pokoknya pada waktu itu semua orang menyatakan patuh setia kepada Republik Indonesia, semuanya bersumpah dan bertekad untuk ikut perang gerilya melawan Belanda.

MENTERTAWAKAN SEKALIGUS MEMALUKAN

Pada tanggal 18 Desember 1948 (Sabtu malam Minggu), dengan tidak diduga sebelumnya, di atas kota Bukittinggi terdengar deruman bunyi mesin pesawat terbang yang biasanya adalah pesawat milik AURI atau pesawat charteran yang terbang pergi-pulang/mondar-mandir antara Yogya dengan lapangan terbang AURI di Gadut (Bukittinggi). Pesawat semacam ini biasanya membawa para pembesar RI dan untuk itu biasanya diadakan upacara penyambutan.

Malam itu saya dijemput oleh Pak Rasjid Manan Sekretaris I Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat untuk ikut bersama beliau pergi ke lapangan terbang Gadut. Status saya pada malam itu bukanlah sebagai anggota B.P.N.K/P.M.T. atau sebagai anggota PEMA, tetapi sebagai bawahan beliau untuk sewaktu-waktu jika diperlukan dapat memberikan bantuan tenaga muda untuk mendorong, meng-engkol mobil Austin tua miliknya yang selalu mogok dan macet ditengah perjalanan.

Setibanya di lapangan terbang Gadut rupanya sudah banyak penyambut yang tiba lebih dulu dari kami. Pesawat mengelilingi lapangan namun tak kunjung mendarat. Para penyambut berpendapat bahwa pesawat tidak dapat mendarat karena pilot tidak bisa melihat landasan pendaratan. Kepada yang membawa mobil diminta mengarahkan lampu mobilnya ke landasan pacu. Pelataran pendaratan sudah terang benderang, tetapi pesawat tidak mendarat juga dan akhirnya menghilang dikegelapan malam. Para penyambut yang sebagian besar adalah pejabat penting menampakkan kekecewaannya, dan satu demi satu pulang ke rumah/asramanya. Belakangan baru di ketahui bahwa pesawat tersebut adalah milik AU Belanda yang rupanya sedang melakukan terbang khusus. Keesokan harinya, Minggu tanggal 19 Desember 1948, pesawat misterius itu berada lagi di angkasa Bukittinggi. Kali ini ciri dan tanda-tandanya menunjukkan bahwa pesawat tersebut adalah "milik A.U. Belanda yang berpangkalan di lapangan udara Tabing (Padang). Dari pesawat tersebut dijatuhkan pamflet yang kalau tidak salah berbunyi "Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, Belanda akan melakukan Polisionil-aksi; kepada kaum ekstrimis diminta supaya menyerahkan senjatanya kepada tentara Kerajaan yang segera akan tiba, dan lain sebagainya".

Selang beberapa saat datang lagi dua buah pesawat terbang Mustang bercocor merah yang secara tiba-tiba muncul di sela-sela gunung Merapi dan Singgalang. Mereka langsung menjatuhkan benda-benda hitam, yang rupanya bom. Sama sekali tidak ada tembakan anti serangan udara dari pihak kita.

Kepanikan, kekalutan, hiruk-pikuk, kacau-balau muncul pada penduduk kota Bukittinggi. Pembesar, Pimpinan Sipil atau Militer menyelamatkan diri. Keluarga, harta benda yang dapat dibawa, diselamatkan. Mulailah kelompok demi kelompok keluarga, dengan pakaian yang seadanya menyingkir dari kota, mengungsi ke daerah asal masing-masing. Tinggallah kota Bukittinggi dengan kelengangannya. Suatu pandangan yang memilukan. Kota Bukittinggi yang sebelumnya dijuluki pemerintah kolonial Belanda sebagai Paris van Indie menjadi sepi.

Pemboman atas kota Bukittinggi berarti Belanda telah memulai lagi peperangan. Aku mendatangi kawan-kawan sesama B.P.N.K./P.M.T., sama-sama anggota PEMA, sama-sama jadi Pembantu/pegawai di kantor Dewan Pertahanan Daerah Residen Sumatera Barat untuk membentuk Pasukan Mobil Teras dengan tugas merusak, mengganggu, membuat rintangan dengan merobohkan pohon-pohon yang akan dilalui tentara Belanda. Tugas pertama yang kami rencanakan adalah membumihanguskan kantor-kantor. Pada saat inilah rupanya secara alamiah terjadi penyaringan. Kenyataannya banyak yang takut, enggan atau mengelak dengan segala macam alasan. Apa yang sebelumnya digemblengkan, dipompakan, disumpah-setiakan, kenyataannya tidak demikian. Hal ini tidak saja dilakukan dan ditunjukkan oleh kalangan sipil, bahkan juga kalangan berbaju seragam. Sebagian mereka menanggalkan seragam satuannya dan menukarkannya dengan pakaian biasa atau bertopeng sebagai pedagang.

Tanggal 19 Desember 1948 kota Bukittinggi dibom Belanda sebanyak dua kali, yaitu sekitar jam 06.00 pagi dan sekitar jam 10.00 siang. Dengan dua kali pemboman itu kota Bukittinggi sudah terpukul. Namun terbukti faktor X sangat menentukan. Kota Bukittinggi terletak 900 meter di permukaan laut, dikelilingi oleh bukit-bukit, lurah dan jurang, dipagar gunung Merapi, Singgalang. Letaknya di atas perbukitan. Jaraknya dari pangkalan militer Belanda di Padang kurang lebih 90 KM melalui jalan yang berliku-liku dan berbukit. Kalaulah letak kota Bukittinggi tidak seperti itu tentulah tentara Belanda akan langsung menyerbu kota Bukittinggi sebagaimana mereka lakukan di Yogyakarta. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi sehingga memungkinkan pemimpin sipil dan militer mempersiapkan diri untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Sementara sudah datang laporan bahwa tentara Belanda mendarat di danau Singkarak dan langsung menuju Padang Panjang (19 KM dari Bukittinggi) Keluarlah instruksi dari Ketua Dewan Pertahanan Daerah/Residen Sumatera Barat supaya kota Bukittinggi dikosongkan. Penduduk dianjurkan untuk mengungsi, para pegawai yang setia kepada Republik supaya mengungsi dan menghubungi atasan masing-masing kalau sudah berada di luar kota. Team-team khusus nampaknya sudah dibentuk untuk membumihanguskan gedung-gedung, kantor-kantor dan obyek vital.

Kami masih sempat membuat brigade penghalang di pasar Atas Bukittinggi, malamnya masih piket di kantor Dewan Pertahanan Daerah/Residen Sumatera Barat sambil menyaksikan penduduk berduyun-duyun menuju luar kota. Makin larut malam makin mencekam. Sementara itu hujan rintik-rintik membasahi kota Bukittinggi. Tidak lama kemudian terlihat kobaran api. Rupa-nya taktik bumi hangus sudah mulai dilaksanakan. Asrama Militer di Birogo, gudang penyimpanan bensin di lapangan pacuan kuda Gadut, kantor PEMA Ujung Karang-Menteng, dan lain-lain dibakar. Kantor Dewan Pertahanan Daerah/Residen Sumatera Barat saat itu belum dibakar. Petugas piket pada malam itu selain penulis sendiri adalah Nazwir Taher, Syarif pelayan/pesuruh kantor, dan lain-lain. Instruksi yang kami terima ialah supaya menunggu kabar telepon dari Mr. St. Muhamad Rasyid dari Padang Panjang. Sesudah ada telepon

dari Padang Panjang itulah baru dilakukan penumpukkan meja-meja tulis, kursi dan bundel-bundel surat, dan lain-lain untuk dibakar termasuk pembakaran gedungnya sendiri. Sesudah itu kami berdua menuju Istana Wakil Presiden yang letaknya berdampingan dengan kantor DPD/Residen Sumatera Barat yang sudah mulai dibumihanguskan. Kami berdua terus menuju ke Percetakan Uang Republik Indonesia dengan maksud, kalau masih dapat meminta uang seperlunya, tapi tidak kesampaian karena sudah dilakukan pembakaran.

Pada tanggal 21 Desember 1948 malam dengan pakaian seadanya dan dalam keadaan hujan, kami bertiga (Baharuddin Jaka, Nazwir Saleh dan Syahbudin Salim anggota B.P.N.K., P.M.T. Wijk kampung Cina) berjalan keluar kota Semula hendak menuju daerah Kamang, tetapi maksud ini kami urungkan lalu kami menuju ke Payakumbuh berdasarkan ingatan bahwa Ketua DPD/Residen Sumatera Barat pernah mengatakan bahwa kalau hendak mengungsi pergilah ke Payakumbuh, karena daerahnya luas, berbukit, dan perekonomian rakyat baik, sawah dan ladangnya besar-besar serta banyak perkebunan bekas milik Belanda.

Setiap kendaraan yang menuju kota Payakumbuh penuh dengan barang rumah tangga bercampur dengan orang sehingga kelihatannya memang betul-betul sudah melewati batas-batas maksimum muatannya. Namun setiap orang yang berjalan dengan tujuan yang sama masih memaksakan agar bisa dibawa. Kami bertiga dengan memegang pentungan kayu memaksa truk berhenti untuk dapat membawa kami. Memang taktik kekerasan dan paksaan sangat bermanfaat pada saat kritis seperti ini. Sementara itu hujan deras, kota Bukittinggi diliputi angkasa yang merah menyala-nyala, gumpalan asap mengapung memenuhi udara malam. Jalanan yang menuju Payakumbuh dipadati oleh kendaraan umum, gerobak, bendi ditambah dengan gelombang manusia yang sedang menyejahtakan diri, menyebabkan kendaraan tersendat-sendat seperti merangkak. Jarak Bukittinggi-Payakumbuh hanya 33 KM. Dalam keadaan biasa dengan mobil paling lama kurang lebih 45 menit. Tetapi pada malam itu kami berangkat jam 10.00 dari kota Bukittinggi baru sampai di Payakumbuh sekitar jam 08.00 pagi. Pada truk yang sama ikut pula Bapak K.H. Siradjudin Abbas Ketua Umum Partai Perti. Beliau menasehati agar menuju Halaban atau Suliki.

Kota Payakumbuh kami dapati sedang dibumihanguskan dan tidak ada satupun warung nasi dibuka. Dengan perut kelaparan kami mengeringkan pakaian dengan cara mendekati sisa api bekas rumah kosong di tengah pasar Payakumbuh. Sesudah pakaian kering kami berusaha mencari ruman makan. Terkandung niat untuk memaksakan diri memasuki rumah penduduk. Pada detik-detik inilah datang pertolongan Tuhan. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil hitam bernomor polisi BA 45 yang tak pelak lagi adalah mobil dinas Pak Mr. St. Muhamad Rasyid Ketua Dewan Pertahanan Daerah/Residen Sumatera Barat yang penuh dengan penumpang. Secara spontan dan tegas beliau mengatakan kepada kami supaya mengikuti beliau ke Suliki, tentu dengan cara sendiri karena mobilnya sudah penuh. Beliau memberikan bungkusan yang ternyata berisi uang yang baru dicetak pecahan Rp. 25,- yang akan dipergunakan untuk dana dan biaya-biaya yang diperlukan. Sopir beliau M. Tamin melemparkan

pula segumpalan kue-kue/makanan kelebihan. Alhamdulillah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kami bertiga berjalan kaki menuju Suliki menyusuri jalan setapak di desa-desa karena jalan raya sudah penuh dengan pohon yang sengaja dirobohkan untuk menghalangi kendaraan tentara Belanda. Di suatu rumah di negeri Simalanggang kami bertiga dipersilahkan penjaga keamanan supaya mampir karena di rumah itu sudah banyak berkumpul pembesar sipil dan militer yang baru datang dari kota Bukittinggi dan Payakumbuh.

Sekitar pukul 03.00 pagi, kami bertiga sampai di ibu kota Kewedanaan Suliki. Dalam kegelapan malam sampai sulit mengenal satu sama lain kecuali dari suaranya. Kami dapat menemui Pak Rasyid untuk melaporkan kehadiran kami dan langsung minta instruksi apa yang harus kami kerjakan. Dengan suara pelan dan hati-hati, kami dibawa ke sebuah kamar gelap, lalu dinyalakan sebuah lampu templok; memerintahkan supaya saya mengambil kertas dan mesin tik dan beliau mendiktekan sebuah perintah istimewa No. 1/Ist/DPD/48, antara lain isinya untuk membersihkan pengamanan dan mengambil tindakan jika dianggap perlu di suatu daerah yang terletak dalam salah satu pesantren (sekolah agama) yang terletak dalam salah sebuah gaung (lurah) di Padang Japang, dimana saat itu sudah ada bersembunyi keluarga dari Pak Rasyid dan keluarga Pak Mr. T. Muhamad Hassan yang dikenal dengan Surau Inyiek Syech Abbas Padang Japang. Dengan lelah lunglai pagi itu kami menuju ke Padang Japang dengan berbekal Surat Perintah Istimewa tersebut, untuk dapat melalui pos-pos penjagaan sepanjang jalan yang sangat ketat. Malamnya kami sampai ditempat yang dituju. Rupanya di surau itu sudah ada sepasukan Mobrig dengan tugas sama seperti kami. Kami membagi tugas, kami akan menyelundup/menyelusup ke dalam masyarakat, sedangkan Mobrig dari security fisiknya. Maklum keluarga yang menjadi tanggung jawab kami adalah keluarga (anak dan istri) Pak Mr. St. Muhamad Rasyid dan keluarga Pak Mr. T. Muhamad Hassan (anak - istri dan beberapa anggota keluarga), yang betul-betul menjadi incaran dan yang di cari-cari Belanda. Sebagaimana manusia biasa dapat dipahami, ketenangan, konsentrasi serta semangat juang dari masing-masing bapak tersebut sedikit banyaknya bergantung kepada keamanan, ketentraman dan keselamatan dari keluarga masing-masing beliau itu.

Sementara itu keadaan semakin gawat saja, lebih-lebih semenjak kota Payakumbuh diduduki Belanda. Tentaranya sering menyelusup ke pinggiran kota, seperti ke Padang Japang yang letaknya tidak seberapa jauh dari Payakumbuh.

Pada satu malam, datang kurir dari Pak Rasyid yang waktu itu sudah menjadi Gubernur Militer, agar kami memasuki kota Payakumbuh untuk mengambil dua orang anggota keluarga beliau yang masih tertinggal. Sesudah kami rundingkan dengan anggota Mobrig maka tugas itu kami laksanakan. Dengan mempergunakan pedagang yang sehari-hari keluar masuk kota membawa dagangan berupa singkong, ubi, sayur-mayur, atau kelapa, kami menitipkan secarik kertas berisi pesan ke alamat orang yang dituju. Sedangkan kami

dengan harap-harap cemas menunggu di pinggiran kota, tidak jauh dari pos tentara Belanda.

Cara yang kami gunakan ternyata berhasil. Keluarga yang diambil dari dalam kota atau keluar melalui pos penjagaan Belanda, juga berlakon sebagai pedagang yang membawa beras, lauk dan pauk dari dalam kota. Dengan demikian terkumpullah seluruh anggota keluarga yang paling dekat dengan Pak Gubernur Militer Mr. St. Muhamad Rasyid. Nyata bahwa setelah terkumpulnya seluruh keluarga dekatnya, beliau semakin bersemangat dalam memimpin, mengatur, dan menggelorakan perang gerilya melawan Belanda. Dalam jabatannya sebagai Residen Sumatera Barat, Ketua Dewan Pertahanan Daerah, Gubernur Militer Sumatera Tengah, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Pemerintahan Umum, Menteri Keamanan, Menteri Sosial, Pembangunan dan Perburuhan, serta Menteri Pemuda Pemerintah Darurat Republik Indonesia beliau biasanya berada di Koto Tinggi bersama-sama dengan para pembantunya.

Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa status dan fungsi Koto Tinggi saat itu begitu penting dan strategis. Dua orang menteri PDRI yaitu Ir. Mananti Sitompul yang memegang jabatan Menteri P.U. dan Menteri Keamanan, Sosial, Pemuda, Pembangunan dan Perburuhan dijabat oleh Mr. St. Muhamad Rasyid. Jadi kiranya dari sinilah rupanya terdapat kesalahfahaman sementara orang yang menganggap seolah-olah kedudukan PDRI adalah di Koto Tinggi, sedangkan sebenarnya PDRI itu mobil, berpindah-pindah dari desa ke desa, dari dusun ke dusun dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Koto Tinggi penting karena menjadi tempat/titik pertemuan antara pejuang-pejuang gerilya di garis terdepan, menjadi tempat berkumpul/bertemu para wali-wali perang, pimpinan lasykar-lasykar perjuangan, pimpinan partai-partai dan lain-lain. Malah pernah pula dikunjungi Panglima Tentara Territorial Sumatera Kolonel Hidayat dan Letkol Ahmad Taher dan rombongannya menemui Mr. St. Muhamad Rasyid dalam kedudukannya sebagai Menteri Keamanan. Di Koto Tinggi juga ada sebuah zender radio AURI yang dimanfaatkan PDRI dalam berkomunikasi dengan luar dan dalam negeri, khususnya dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan dengan Mr. Maramis di New Delhi. Akibat kedudukan serta strategisnya Koto Tinggi ini, pasukan Belanda pada suatu pagi tahu-tahu sudah berada dalam wilayah Koto Tinggi. Sedangkan para pemimpin pagi sedingin itu masih dipembaringan masing-masing. Karena ketololan tentara Belanda sendiri, ketika seorang dari mereka menembak mati seorang yang kebetulan memang tidak waras, tembakan ini bergema diseluruh lurah dan bukit di sekitar Koto Tinggi. Kami cepat menghilang dan menyelusup masuk hutan menaiki bukit, menyelinap dibalik batu-batu cadas, dan lain-lain sehingga serdadu Belanda tidak menemukan apa-apa. Mereka kembali ke pos terdepannya di Tiaka dengan tangan hampa.

Kepemimpinan dan perintah-perintah yang di keluarkan Gubernur Militer terasa pengaruhnya dikalangan masyarakat umum, badan-badan perjuangan, B.P.N.K./P.M.T. dan militer. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan pertempuran yang masuk, seperti dari Front Agam-Kamang, Matur, Palupuh

(dekat Lubuk Sikaping) dan lain-lain. Laporan ini disiarkan dan disebarluaskan melalui radio rimba ke luar negeri. Salah satu kejadian di luar perhitungan logika perang konvensional, pernah sebuah pesawat terbang capung milik Belanda jatuh akibat sebutir tembakan yang ditembakkan oleh seorang anggota B.P.N.K. dengan mempergunakan senjata kuno buatan dalam negeri (istilah sehari-hari dikalangan penduduk asli senapan tersebut diberi nama "badie balansa" yang biasanya digunakan untuk menembak babi hutan), di daerah pertempuran Palupuh. Tak ayal lagi nasib pilot Belanda tersebut tertangkap oleh penduduk dan langsung dicingang-cingang. Kepingan jasadnya dibagi-bagikan dan sebagian dibawa ke Koto Tinggi sebagai bukti laporan.

Sebagaimana telah dipaparkan, tidak banyak pegawai Republik yang ikut bergerilya. Banyak di antara mereka memilih tetap tinggal dalam kota dan menjadi pegawai NICA. Dari jumlah yang ada di luar kota bergerilya termasuk kesatuan-kesatuan lain seperti Mobrig, TNI, barisan-barisan perjuangan dan lain-lain. Di sini terbukti kesetiaan warga desa sebagai anggota B.P.N.K./P.M.T., mereka ikut serta berperan dalam mempertahankan dan memperjuangkan Republik Indonesia. Terbukti bahwa dari sekian banyak korban pertempuran melawan Belanda sebagian besar terdiri dari rakyat, petani, pemuda, dan sebagainya. Begitu juga dibidang logistik semuanya datang dari rakyat.

Akibat terlalu sedikitnya tenaga/pegawai Republik Indonesia yang ikut bergerilya, maka tenaga yang ada betul-betul dimanfaatkan. Penulis sendiri dibebani tugas-tugas khusus dari Gubernur Militer, misalnya Bersama beberapa orang anggota Mobrig dan beberapa orang tenaga B.P.N.K./P.M.T. setempat memasuki lapangan terbang AURI yang terletak di Piobang Payakumbuh yang pada saat itu telah dikuasai tentara Belanda. Menurut laporan yang diterima Gubernur Militer, pada salah satu gudang di lapangan terbang tersebut masih tersimpan barang-barang berharga milik Pemerintah R.I. "Pokoknya apa yang ditemukan ambil dan bawa ke Koto Tinggi". Di malam gelap gulita, dengan bantuan anggota B.P.N.K. setempat kami memasuki gudang demi gudang. Ternyata tidak satupun yang dicari dapat ditemukan kecuali kaleng cat kosong, tumpukan kayu-kayu dan bambu-bambu bekas.

Perintah lainnya yang pernah kami emban ketika seregu pasukan Mobrig mencari ketua PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk menyampaikan langsung seberkas dokumen penting. Dokumen tersebut tidak boleh lepas dari badan apalagi jatuh ketangan orang lain. Dapat dibayangkan kesulitan yang menghadang karena kami tidak tahu pasti dimana Ketua PDRI tersebut berada. Kabar terakhir yang kami peroleh ketika berada di Koto Tinggi bahwa Ketua PDRI berada di daerah Tanah Datar/Sawah Lunto Sijunjung atau kemungkinan di dusun Sumpurkudus, yang pasti untuk sampai ke dusun itu harus melewati beberapa pos penjagaan tentara Belanda di sekitar kota Payakumbuh dan Tanah Datar. Untuk dapat mengetahui dusun pemukiman Ketua PDRI bukanlah pekerjaan yang mudah walaupun kami sudah dilengkapi dengan surat sakti dari Gubernur Militer. Penjagaan berlapis-lapis, tersembunyi dan hingga pos penjagaan terakhir kami berhasil meyakinkan para pengawal bahwa kami harus langsung bertemu dengan Pak Syaf sendiri (tidak boleh ada orang ketiga).

Alhamdulillah, sewaktu saya mengatakan bahwa saya langsung dari Pak Rasyid, beliau merangkul saya dengan harunya. Suatu kenangan manis untuk saya pribadi, bahwa seorang kroco dapat berangkulan dengan seorang pembesar (Ketua PDRI). Pada saat itulah kami bertemu muka dengan Pak Komodor Natsir, Pak Lukman Hakim, dan lain-lain.

PERINTAH MEMASUKI KOTA BUKITTINGGI

Rasanya dikala menerima perintah memasuki kota Bukittinggi untuk mengusahakan obat-obat dan alat-alat tulis kantor, tengkuk saya merinding, rasanya lebih baik bertempur digaris depan karena jelas lawan yang dihadapi. Tapi memasuki kota yang sepenuhnya dikuasai musuh, masya Allah, ya ngeri benar.

Dengan tekad yang bulat serta berserah diri pada kekuasaan Allah, "Terbujur lalu, terbelintang patah", "Esa hilang, dua terbilang", penulis bersama dengan saudara Nazwir Taher berangkat menuju kota Bukittinggi. Menyamar sebagai pedagang singkong, melalui daerah front Agam pos terdepan front Kamang, dengan memilih hari pasar, Rabu atau Sabtu menyelusup masuk kota Bukittinggi dengan mempergunakan jalan/pos-pos penjagaan Belanda. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Di tengah-tengah dan di sela-sela orang banyak karena sedang hari pasar, saya menyelusup memasuki rumah keluarga (tante saya) yang cukup dikenal dan mempunyai nama baik semenjak jaman Belanda dulu. Dengan berganti pakaian seperti orang kota, kami langsung mendatangi Kepala Kantor Ass. Residen yang memang sudah sangat mengenal dan tahu dengan kami semenjak di kantor Residen Sumatera Barat/Dewan Pertahanan Daerah sebelumnya. Kepada beliau kami beritakan tugas yang kami emban langsung dari Pak Mr. St. Muhamad Rasyid - bekas atasannya sebelum Belanda masuk. Asisten Residen memberi kami surat keterangan dan malah meminjamkan mobil dinas beliau untuk kami gunakan dalam kota. Usaha dan permintaan kami pada Kepala Rumah Sakit untuk memperoleh obat-obat yang diperlukan di daerah Republik juga berhasil dengan baik. Malah Rumah Sakit Umum Bukittinggi memberikan bantuan mobil ambulance untuk membawa obat-obatan tersebut ke daerah pinggiran kota agak jauh ke dalam memasuki daerah RI di nagari yang terkenal dengan nama Kapau. Obat-obatan tersebut diturunkan di sebuah surau (langgar) milik H.A. Malik. Entah bagaimana (kemungkinan rahasia bocor ketangan kaki-kaki tangan Belanda) kemudian surau (langgar) tersebut dibakar tentara Belanda dalam salah satu operasi pembersihannya. Dan memang surau tersebut sering digunakan untuk persinggahan dalam setiap usaha melakukan operasi sabotase.

Secara beranting obat-obat serta bahan-bahan pokok lainnya yang berhasil kami peroleh dari dalam kota kami bawa ke Koto Tinggi. Namun sayang jumlah collinya sudah tidak sebanyak yang diharapkan, karena ditengah perjalanan melalui dusun dan desa dan daerah-daerah pertempuran, sejumlah collinya memang diminta dan memang sangat diperlukan pula oleh dusun dan desa yang dilalui tersebut, apalagi disaat itu memang sedang banyak berjangkit penyakit rakyat seperti sakit perut, cacar, malaria, dan lain-lain.

Begitulah perintah serupa saya jalankan beberapa kali. Karena suatu kali nyaris kepergok menyebabkan kami ngeri. Ingat pepatah kuno yang menyatakan: "Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu terjatuh juga". Dan memang terbukti kemudian bahwa salah seorang kawan kami saudara Awaluddin Latif tertangkap patroli Belanda dan berkat pertolongan Allah dia lolos dengan melompati jurang dan syukur dia tidak meninggal karena tersangkut diakar-akar pohon dan berhasil kembali ke Koto Tinggi dengan fisik yang menyedihkan.

Silih berganti perintah-perintah istimewa saya terima dari Pak Gubernur Militer. Kali ini berupa perintah untuk memindahkan peti-peti berisi timah dari suatu dusun terpencil di tengah hutan ke suatu dusun yang jauh dari pengamatan umum. Kami boleh menggunakan tenaga B.P.N.K./P.M.T. setempat untuk memikul peti-peti tersebut. Sesampainya kami di dangau yang dituju memang ternyata masih ada susunan beberapa peti yang kalau diangkat memang agak berat, namun agak mengandung bau (aroma) yang agak busuk, sedangkan kalau timah biasanya tidak mempunyai bau busuk . . . rupanya isinya ternyata berupa emas alias candu.

Demikianlah beberapa kisah yang kami alami sendiri.



III. DARI SUMBER-SUMBER YANG TERCECER

1. PDRI Dalam Sumber-Sumber Belanda.

Oleh : Machfudji Mangkudilaga *)

Saya ingin berbicara mengenai data dalam arsip-arsip Belanda tentang PDRI. Berbicara tentang instansi yang mungkin dapat menyimpan arsip-arsip di negeri Belanda, saya teringat kepada dua instansi ;

- 1). *Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht Staf* (Seksi Sejarah Militer Staf Angkatan Darat) yang berkedudukan di 'S-Gravenhage.
- 2). *Instituut Voor Nederlandse Geschiedenis* (Lembaga untuk Sejarah Belanda) yang berkedudukan di 'S-Gravenhage.

Instansi yang pertama telah menerbitkan DOCUMENTEN BETREFFENDE DE EERSTE POLITIONELE ACTIE (20/21 Juli - 4 Agustus 1947), yang diedit oleh Let.Kol. Drs. H.L. Zwitter, wakil Kepala Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht Staf. Buku itu saya tulis resensinya dalam Majalah TSM (Teknologi, Strategi, dan Militer) no. 8 bulan Pebruari tahun 1988).

Instansi yang kedua menerbitkan seri Rijks Geschiedkundige Publicatien (Penerbitan Sejarah Negara) suatu penerbitan yang direncanakan berjilid jilid yang berjudul Officiele Bescheiden Betreffende De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945 - 1950 (Surat surat Resmi mengenai Hubungan Indonesia Belanda 1945 - 1950).

Dari kedua penerbitan ini, baik Documenten maupun Officiele Bescheiden, yang terdapat di Perpustakaan Arsip Nasional hanya Officiele Bescheiden dan baru sampai jilid 14, yang meliputi kurun waktu 5 Juni - 31 Agustus 1948, dari 24 jilid yang direncanakan.

Jika kita melihat berdirinya PDRI ini setelah Belanda melancarkan serangan militernya yang kedua (19 Desember 1948) maka berarti belum ada penerbitan sumber arsip Belanda yang mencakup periode berdirinya PDRI. Jadi tindakan yang pertama-tama harus dilakukan adalah untuk meminta kepada kedua lembaga di atas apakah mereka dapat memberikan salinan/foto copy dari arsip-arsip tersebut dari periode yang kita bahas sekarang ini.

Jawaban dari Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht Staf adalah negatif. Mereka tidak dapat memberikan apa yang diperlukan, mungkin arsip-arsipnya ada tetapi belum dibenahi. Mereka pernah memberikan kepada saya laporan dari pihak Belanda mengenai serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta yang telah saya bahas dalam Majaiah TSM no. 21 edisi bulan Maret 1989.

Hasil yang lebih baik diperoleh dari *Instituut Voor Nederlandse Geschiedenis*. Salah seorang editornya, yaitu Dr. P.J. Drooglever yang saya kenal

*) Kapus Konservasi Arsip Nasional RI

teah memberikan foto kopi dari sejumlah lembar arsip-arsip Belanda yang ada hubungannya dengan PDRI, yang sekarang saya antarkan kepada hadirin sekalian.

Jika kita lihat apa yang kita peroleh dari pihak Belanda mengenai arsip-arsip Belanda yang memuat data tentang PDRI, maka secara kronologis kita dapat mulai dari laporan Kepala Pemerintahan Sipil di Sumatra Barat, yaitu Residen Dr. L.B. Van Straten kepada Wakil Tinggi Mahkota Dr. Beel pada tanggal 28 Desember 1948. Jadi setelah sepuluh hari dilancarkan aksi militer Belanda yang kedua.

Arsip ini ada 4 macam yaitu :

- Laporan residen tersebut;
- Ikhtisar dari berita-berita mengenai Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang disusun oleh CMI (*Centrale Militaire Inlichtingendienst* = Pusat Intelejen Militer)
- Laporan tertanggal 6 Juli 1949 yang diterima Verbindings-Post Algemeen Hoofd Kwartier (Pgs Perhubungan Markas Besar Umum) Kepada Pemerintah Belanda di Indonesia yang berasal dari Residen Padang.
- Berita *Aneta* (Kantor Berita Belanda) tertanggal 19 Juli 1949 yang diberi catatan oleh CMI.

Laporan pertama adalah laporan residen Sumatra Barat, yaitu ikhtisar peristiwa-peristiwa dalam minggu pertama aksi militer Belanda. Dalam laporan itu belum disinggung adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia tetapi kemudian terdapat berita dari akhir tahun 1948, yang menyatakan bahwa Belanda menangkap siaran radio mengenai didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia secara singkat. Kemudian terdapat surat dari bagian perhubungan Departemen Luar Negeri Belanda kepada Menteri Luar Negeri Belanda tertanggal 27 Januari 1949, yang memberitakan mengenai ditangkapnya berita-berita dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada P.M. Nehru dari India mengenai Resolusi Konferensi New Delhi. Dalam siaran itu juga disebutkan terima kasih Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada apa yang dibuat oleh Pemerintah India di bawah pimpinan P.M. Nehru yang sangat besar artinya bagi rakyat Indonesia.

Arsip yang paling tebal adalah ikhtisar berita-berita yang disusun oleh Pusat Intelejen Belanda mengenai Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang isinya dapat dibagi dalam dua bagian :

1. Pernyataan-pernyataan Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengenai posisi dan wewenangnya;
2. Pendirian Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengenai persengketaan Indonesia Belanda pada umumnya serta rencana Beel, dan persetujuan Van Royen-Roem secara khusus.

Isinya adalah riwayat singkat Pemerintah Darurat Republik Indonesia sejak didirikannya pada tanggal 22 Desember 1948, dan yang memerintah wilayah

2

+

Indonesia ke luar dan ke dalam selama Pemerintahan Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Tanggal 23 Desember 1948, Ketua Pemerintah ini menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, Angkatan Bersenjata agar tidak terdapat kekacauan, gencatan senjata hanya boleh dilakukan dengan perintah Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu. Seterusnya pada tanggal 28 Desember 1948, Kol. Hidayat Panglima Angkatan Bersenjata Republik di Sumatra memberikan perintah untuk meneruskan perjuangan.

Seterusnya pada tanggal 7 Maret disusun Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Jawa, selanjutnya juga diuraikan pertukaran pikiran antara Pusat PDRI di Sumatra Barat dengan tokoh Republik, militer maupun sipil di Jawa. Juga terlihat di situ bahwa PDRI mengajukan syarat-syarat untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda secara politis, dan PDRI antara lain mensyaratkan pembebasan kembali pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan. Belanda rupanya pada permulaannya mau memaksakan rencananya sendiri yaitu rencana Beel, kemudian kita melihat juga pendirian PDRI terhadap persetujuan Van Royen-Roem, yang belum dapat memberikan pendiriannya yang tegas sebelum syarat-syaratnya dipenuhi, antara lain kembalinya Pemerintah Republik di Yogyakarta.

Laporan dari Pusat Intelejen Militer Belanda ini tertanggal 7 Juni 1949, dan selanjutnya kita dapat melihat lampiran-lampiran antara lain mengenai kedudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan laporan-laporan lainnya seperti laporan-laporan harian yang banyak dilampirkan di sini. Dalam laporan ini terdapat antara lain misalnya susunan kabinet PDRI, berita-berita yang ditangkap Belanda mengenai kedudukan Republik Indonesia, serta pertukaran pikiran antara Pemimpin Republik Indonesia mengenai kedudukan Republik Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda. Laporan-laporan ini sebetulnya merupakan informasi bagi pimpinan Pemerintah Belanda, baik yang berada di Indonesia maupun di negeri Belanda.

Sedangkan arsip yang ketiga dan keempat merupakan laporan-laporan dari bulan Juli 1949, yaitu masa setelah Republik Indonesia kembali di Yogyakarta dan merupakan masa menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB); juga terdapat laporan mengenai kunjungan Dr. Leimena ke Sumatra Barat.

Kesan yang kita peroleh dari pembacaan sekilas arsip-arsip Belanda yang berisi data tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia ialah bahwa Belanda sangat memperhatikan adanya PDRI. Intelejen mereka dengan cermat memantau aktivitas-aktivitas Pemerintah Darurat Republik Indonesia antara lain dengan menyadap dan melaporkan siaran-siaran radio terutama yang bersifat hubungan resmi dari PDRI kepada satuan-satuan Republik Indonesia di daerah di luar Sumatra, maupun di luar negeri dan melaporkannya sebagai arus informasi. Dengan istilah sekarang mungkin dapat dikatakan sebagai Management Information System.

Gambaran ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan pantauan Intelejen Belanda untuk wilayah Indonesia di luar Sumatra. Ini dapat kita lihat bagai-

2.

PDRI DALAM ARSIP BELANDA.

MINISTERIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN
AFDELING VERBINDINGEN

's-Gravenhage 27 Januari 1949.

Ref. No. 1568

AAN : MIN., VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

FOI

BATAVIA

CONFI.

Mede gescind aan New Delhi onder no. 69.

Volgens intercepten heeft de Noodregering van de Republiek, met betrekking tot de resolutie van de New Delhi conferentie, als volgt aan Nehru geseind :

"De resolutie is nog niet in overeenstemming met onze verlangens, in het bijzonder omdat daarin niet is opgenomen de jure erkenning van de Republiek. (Deze de jure erkenning beschouw ik n.l. van essentieel belang, aangezien hiermede gegarandeerd wordt, dat de Nederlanders de Republiek niet meer zullen aanvallen en geen reden meer hebben om te beweren, dat het geschil tussen Nederland en de Republiek een binnenlandse aangelegenheid zou zijn). Aangezien ik evenwel de overtuiging toegedaan ben, dat de Aziatische landen, die de resolutie hebben aangenomen, ook in den vervolge volledige steun zullen verlenen om de vorming van een onafhankelijk en soeverein Indonesie uiterlijk 1 Januari 1950 te waarborgen en ook uit solidariteits gevoel met de landen, die aan de conferentie deelnamen, neem ik de resolutie met volledig verantwoordelijkheids besef aan.

Het is van belang, dat ik het punt releveer van de teruggave der Republikeins gebieden en het weder doen functioneren van de Republikeinse Regering. In bedoelde gebieden zullen zeer grote tekortkomingen worden geconstateerd, voornamelijk op het gebied der financiën, communicaties en economie, hetgeen een gevolg is van de Nederlandse actie, terwijl deze tekortkomingen moeilijk te boven zijn te komen, indien wij van bevriende staten geen steun zouden ontvangen. De Noodregering spreekt uit naam van het volk van Indonesie haar welgemeende dank uit voor de door U bewezen diensten zomede voor die van de Regering van India en die van de andere Regeringen, die aan de New Delhi conferentie hebben deelgenomen. De resolutie, die met algemene stemmen is aangenomen zal ook door de V.R. worden aangenomen want indien de voorwaarden in de resolutie van de V.R. minder gunstig zouden zijn dan die vermeld in de Aziatische resolutie, kunnen deze zeer zeker moeilijk door ons aanvaard worden."

FK/SD

DIRVO 750.

163

Resident, hoofd tijdelijke bestuursdienst van Sumatra's Westkust (Van Straten)
aan hoge vertegenwoordiger van de kroon (Beel), 28 dec. 1948.

Mits deze heb ik de eer Uwer Excellentie eerbiedig aan te bieden een overzicht der gebeurtenissen gedurende de afgelopen week.

De Militaire operatie is erop gericht geweest op kortst mogelijke termijn de centra van terroristische activiteit te elimineren, door bezetting der haarden Fort de Kock en Padang Pandjang. Er zijn drie wegen welke naar deze plaatsen voeren (via Pariaman - Manindjau via Loeboek Aloeng - Kaloe Tanam en via Loeboek Salasih - Solok).

Een blik op de kaart doet zien hoe dicht het Barisan gebergte de kust nadert, wat plotselinge overgang onder sterke helling van de Padangvlakte naar bergterrein ten gevolge heeft.

De toegangswegen via de Soebangpas (Solok), Anei Kloof (Padang Pandjang en Matoerweg (Manindjau) zijn dan ook nauw, bochtig, steil, en met geringe bezetting gemakkelijk verdedigbaar.

Aangezien de T.N.I. blijkens bekomen berichten een eventuele aanval via de kortste weg - de Anei Kloof - verwachtte en daarop haar versterkingen en troepen geconcentreerd had, heeft de militaire leiding haar actie primair op de Soebangpas (Solok) gericht met een secundaire opmars richting Anei Kloof.

Op dag-D werden luchtgewijs twee belangrijke bruggen op de weg Solok Padang Pandjang aan het Singkarakmeer bezet, welke bezetting uiteraard zo spoedig mogelijk uit haar isolement verlost moest worden.

Ondanks versperringen en vernieling van enige kleine bruggen in de Soebangpas, waardoor het in beweging brengen van de troepen vertraging ondervond, werden deze objecten alsmede de onderafdelingshoofdplaats Solok binnen de vastgestelde tijd bereikt.

Werkelijk gevechtscontact is nergens gemaakt, zodat, nadat de Soebangpas eenmaal gepasseerd was, de bezetting van Solok (Maandag), Padang Pandjang (Dinsdag), Fort de Kock (Woensdag) en Pajacombo (Donderdag) spoedig konden volgen, temeer waar de T.N.I. zich niet de moeite gegeven had in het binnenland versperringsmaatregelen te treffen, terwijl zij iedere openlijke strijd angstvallig vermeden heeft.

Wvd voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie (Elink Schuurman)
aan minister van overzeese gebiedsdelen (Sassen), 28 dec. 1948.

Blijkens een intercoept heeft de Voorzitter van de republikeinse noodregering op 23 December via de radiozender Pakan Baroe het volgende bericht bestemd voor het gehele Indonesische volk aan alle stations geseind :

"Teneinde verwarring en misverstand te voorkomen wordt bij deze aan alle militairen van de weermacht van de Republiek Indonesia bekend gemaakt dat "cease fire", staken van het vuren, slechts wordt uitgevoerd indien het bevel hiertoe wordt uitgevaardigd door de Voorzitter van de noodregering".

Het terroristenleger is dan ook ongeschonden uit de strijd gekomen en uit de snelle opmars en voorspoedige bezetting der diverse centra mogen geen voorbarige conclusies ten aanzien van herstel van orde en rust getrokken worden. Wij zullen ons moeten voorbereiden op een periode van sniperactiviteit in T.N.I. verband niet alleen doch op verhoogde terreur van op eigen gelegenheid opererende benden die onder het mom van vaderlandsliefde de bevolking zullen uitzuigen en onderdrukken, om in eigen voeding en onderhoud te kunnen voorzien.

Gedurende de luttele dagen sedert het begin der acties verstreken, is zulks reeds overduidelijk gebleven. De verrassende omtrekkende beweging heeft de gehele gewapende bende op de vlucht gejaagd, doch reeds na 24 uur werden de eerste snipers gemeld en sindsdien wordt hun optreden steeds driester.

Het terrein door de bergen is ideaal voor een guerilla optreden, en spoedige versterking van de U-Brigade met zuiveringstroepen is dringend vereist niet alleen voor de beveiliging van de convooiwegen doch ook voor bescherming van de bevolking.

Niet alleen toch blijft deze onder druk staan voor wat levering van voeding aan deze benden betreft, maar ook iedere poging tot toenadering blijft vruchteloos, en van medewerking bij het opsporen van gewapenden is geen sprake zolang de bevolking er niet van overtuigd is dat zij die hulp zonder kans op gruwelijke represailles verleent.

Een ander sprekend voorbeeld van toenamende druk : Toen ik Padang Pandjang bezocht, was iedereen bereid medewerking te verlenen. Sindsdien hebben zich enige gevallen van handgranaatwerpen voorgedaan, en men is zo terughoudend geworden dat op een door de bestuursembtenaar ter plaatse uitgeschreven bijeenkomst van alle diensthooften, niemand verschenen is.

Spoedige en grondige zuivering van deze gewapende benden is voorwaarde voor de wederopbouw, en hoe eerder de U-brigade de daartoe nodige versterking ontvangt des te spoediger kan de samenwerking beginnen.

Fort de Kock werd geheel, Solok vrijwel, en Padang Pandjang vrijwel niet door de bevolking verlaten. In Solok en Fort de Kock waren alleen de Chinezen achtergebleven. De kampongs langs de hoofdwegen zijn alle verlaten op een paar ouden van dagen en kinderen na. Aangezien echter de velden volledig beplant zijn acht ik het uitgesloten dat deze toestand langer dan enige weken kan blijven bestaan. De padi staat overal uitstekend er voor, in leeftijd wisselend van oogstrijpheid (Padang Pandjang) tot een a twee maanden oud (Solok - Singkarak).

Zelfs al heeft de T.N.I. een zeer groot gedeelte van de aanwezige voorraden afgevoerd, dan nog behoeft voor directe hongersnood niet gevreesd te worden. Er is voldoende oëbi, pisang, klapper en teboe - om enige der voornaamste voedingsgewassen te noemen - om aan het gevaar daarvoor het hoofd te bieden.

Mogelijk zal aan de terugkerende bevolking der centra gedurende een korte periode enige steun gegeven moeten worden.

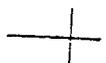
(Volgen nadere bijzonderheden over de economische situatie, de toestand van de bevolking en over voorlichtingsactiviteiten).

D. De Militair Gouverneur ZUID-SUMATRA seinde 31 December aan alle station c.q. Regering van INDIA te NEW DELHI :

"Daar het volk vastbesloten is zijn onafhankelijkheid te verdedigen, is aan de verschroeiide-aarde-politiek op grote schaal uitvoering gegeven opdat de volkskracht voor 100% tegen de vijand wordt ingezet.

E. Kolonel Hidajat vaardigde 31 December de volgende dagorder uit :

"Met uitvaardiging van deze dagorder bevindt de leiding van de gehele weermacht van de Republiek Indonesia zich voorlopig in mijn handen. Hierbij wordt aan land, zee- en luchtmacht opgedragen immer tegen de Nederlanders te blijven strijden. Gelet op de grondslagen van de weermacht van de Rep. Indonesia en de leuze INDONESIA MERDEKA moet een totalitaire tegenstand worden geboden door middel van verschroeiide-aarde-politiek en guerillastrijd. Zonder ophouden moeten aanvallen worden gedaan in gebieden waar de Nederlanders zich bevinden. *Het vuren wordt niet gestaakt zolang niet is voldaan aan de voorwaarden die op 23 December zijn bekend gemaakt door de Centrale Noodregering van de Republiek Indonesia en die tot instructie dienen voor de Republikeinse Delegatie bij de UNO.*" (onderstreping van bewerker).



SAMENVATTING VAN DE CMI BERICHTEN BETREFFENDE DE REPUBLIKEINSE NOODREGERING OP SUMATRA.

De hierboven genoemde berichten zouden kunnen worden gerangschikt in :

- a. uitspraken van de Noodregering betreffende haar positie en bevoegdheid;
- b. het standpunt van die regering t.o.v. het Nederlands-Indonesisch geschil in het algemeen en het plan Beel en de Van Roijen-Rum verklaring in het bijzonder;

Aangaande de positie van de Noodregering heeft in de eerste dagen na de tweede politionele actie enigerlei verwarring geheerst in de Republikeinse gelederen.

Toen het de Republiek duidelijk was geworden, dat een tweede Nederlandse politionele actie op handen was, besloot het Republikeinse kabinet op 16 December 1949 een van haar leden, n.l. Sjafruddin, die in die dagen op Sumatra vertoefde, opdracht te geven om het bewind, zolang dat door eerstgenoemde regering niet zou kunnen worden uitgeoefend, over te nemen.

In de kabinetszitting op 19 December werd echter niettegenstaande het hierboven vermelde besluit om onbekende redenen (was men bang dat het bericht van het aan Sjafruddin verleende mandaat zijn plaats van bestemming niet had bereikt?) het bestuur over de Republiek in handen van een drietal niet in Djokja aanwezige kabinetsleden zijn gelegd, n.l. Dr. Soekiman, Min. van Binnenlandse Zaken in het Kabinet Hatta, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Min. van Justitie en Djuanda, Min. van Verbindingen, hetgeen op 20 December werd bekend gemaakt.

Op 22 December 1948 stelde Sjafruddin bekend, dat tijdelijk een Noodregering (Centrale) van de Republiek op Sumatra werd ingesteld, die het volledige gezag naar binnen en naar buiten zou uitoefenen voor de tijd, dat de regering Soekarno-Hatta niet in staat was haar plichten te vervullen.

Op de 23ste daaraan volgende richtte de voorzitter van die regering zich tot het Indonesische volk, waarbij, teneinde verwarring en misverstand te voorkomen, aan alle militairen van de weermacht van de Republiek bekend werd gemaakt, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt, indien het bevel hiertoe werd uitgevaardigd door de Voorzitter van de zgn. Noodregering.

Op 28 December nam de Kol. Hidajat, bevelhebber der Republikeinse troepen op Sumatra, het bevel van alle Republikeinse strijdkrachten op zich, waarbij de troepen de opdracht kregen de strijd voort te zetten en het vuren niet te staken, alvorens zou zijn voldaan aan de voorwaarden, welke de regering op 23 December stelde. Op 31 Januari gaf Sjafruddin een dagorder uit, waarin werd herhaald, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt in opdracht van de Opperbevelhebber, die terzake overleg zou plegen met de zgn. Noodregering. Zolang deze order nog niet was gegeven, diende de strijd met de meeste kracht te worden voortgezet.

Dat de positie van de Noodregering als centrale regering intussen nog niet vaststond, blijkt o.a. uit een radiografische mededeling van de Republikeinse Prov. Regering Oost-Java d.d. 14 Januari 1949, waarbij het besluit van de Ministerraad tijdens de zitting van 19 December 1948 werd bekend gemaakt en o.m. werd gesteld, dat zo lang de President en Vice-President verhinderd zijn hun functies uit te oefenen, de leiding van de Centrale Regering werd overgedragen aan drie Ministers, n.l. die van Binnenlandse Zaken, Justitie en Verbindingen.

Eerst een maand later op 16 Februari wendde de Voorzitter van de Noodregering zich tot het militaire bestuur in Midden-Java met het verzoek er wel nota van te willen nemen, dat de noodregering in Sumatra als de enige voorlopige centrale regering met een vaste positie in het buitenland moest worden beschouwd. Deze regering oefende zowel naar binnen als naar buiten het volle gezag uit in Indonesia en zou dit doen totdat er zekerheid zou zijn, dat de regering Sukarno-Hatta weer haar taak zou kunnen verrichten.

Naar aanleiding hiervan werd door hem de wenselijkheid bepleit, dat de zgn. centrale regering op Java in de vorm van een commissariaat der noodregering werd samengesteld en niet als een soort nood-kabinet zou fungeren.

Kort daarop bevestigde de op Java verblijvende Minister Kasimo, dat in de Kabinetszitting van 16 December 1948 het besluit werd genomen tot de vorming van een noodregering op Sumatra onder leiding van Sjafruddin. De achtergebleven ministers op Java zouden zich slechts beschouwen als een deel van de centrale regering op Sumatra.

Op 7 Maart werd de samenstelling van het commissariaat op Java der noodregering door Minister Kasimo bekend gemaakt, waarbij de Commandant Territoriale Troepen Java (Nasution?) als adviserend lid in dit lichaam werd opgenomen. Voorts werd bepaald dat het Commissariaat (Kommissariaat Pusat Pemerintah Djawa) verantwoording schuldig is aan de noodregering over het bestuur van Java en Madoera, terwijl het voorts in belangrijke zaken advies geeft. De Legercommandant (Soedirman?) in zijn kwaliteit van Opperbevelhebber van de strijdkrachten in de gehele Republiek zou adviserend lid van de noodregering worden.

Op 14 Maart zond de Voorzitter van de noodregering een uitgebreid telegram aan het Commissariaat, waarin zij een voorstel deed om de ministers op Java als leden in de noodregering op te nemen. Tevens werd een soort taakverdeling opgesteld.

Op 23 Maart gaf Soedirman (als Legercommandant?) in een uitzending de noodregering te kennen, dat politiek en defensie z.i. niet mochten worden gescheiden.

Hij protesteerde tegen een bekendmaking van de noodregering, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt op bevel van Soekarno na overleg met de noodregering, waarbij hij er op wees, dat op Java reeds veel stemmen opgingen zich niet te onderwerpen aan bevelen van personen, die zich in gevangenschap bij of onder controle van de Nederlanders bevonden.



Volgens hem moest daarover worden beslist op een bijeenkomst van de noodregering, de Staf van de weermacht, Soekarno (mits in vrijheid) en zo mogelijk enige leden van het werkomite (KNIP). De oude werkwijze, waarbij de legerleiding geheel buiten de politieke besprekingen werd gehouden, had bitter lijden veroorzaakt. Daarom was het volgens hem noodzakelijk, dat tussen noodregering en legerleiding voortaan eenheid van inzicht, voornemen, houding en handelen zou bestaan.

Sjafruddin antwoordde hierop op 15 April, dat het volgens zijn mening niet juist was, dat de Legercommandant een beslissende stem had bij de vaststelling van het politieke beleid. Wel moest volgens hem de Legercommandant in belangrijke kwesties steeds worden gehoord.

Omstreeks 6 Februari had de noodregering de tussenkomst van Palar ingeroepen om Soekarno en Hatta te seinen, dat zij, voordat zij een ontmoeting zouden hebben gehad met de zgn. "noodregering" geen formele of informele onderhandelingen moesten voeren met de Nederlanders of BFO.

In een rede op 9 April had Sjafruddin uitdrukkelijk verklaard, dat de Republikeinse leiders op Bangka het gezag aan de noodregering hadden overgedragen, zodat de Nederlanders niet moesten denken buiten de noodregering om met de Republikeinse leiders op Bangka te kunnen onderhandelen.

De order staakt het vuren zou volgens hem niet worden gegeven en er zou niet aan de Ronde Tafel Conferentie worden deelgenomen, indien de regering Soekarno-Hatta niet onvoorwaardelijk zou worden gerehabiliteerd. De agenda voor eventuele preliminaire besprekingen zou voor de noodregering slechts een punt bevatten: de teruggave van de regering aan Sukarno-Hatta. Deze en andere verklaringen waren voor bladen als Sin Po en Warta Indonesia aanleiding zich af te vragen, wat voor nut het had te onderhandelen met een groep, die feitelijk niet meer bevoegd was in naam van de Republiek op te treden.

Dit laatste werd nog eens op 19 April onderstreept door de leden van de noodregering, Mr. Rasjid en Ir. Sitompul, die vaststelden, dat de preliminaire besprekingen begonnen waren zonder dat vaststond van wie de Republikeinse Delegation de bevoegdheid om te onderhandelen had gekregen.

(Uit een later bericht, waarin Sjafruddin zijn standpunt t.o.v. de van Roijen-Ruin verklaring bepaalde, blijkt echter, dat op 27 Maart de Noodregering instructies aangaande de preliminaire besprekingen deed toekomen (zie blz. 6)*.)

Het is niet onmogelijk, dat deze leden van de noodregering, die op een andere plaats verbleefden, hiervan onkundig bleven.).

Uit een redevoering van Sjafruddin voor alle stations op 15 Mei blijkt, hoe de noodregering over haar positie dacht. Zij deelde n.l. mede, dat zij het gezag nog niet aan de regering Sukarno-Hatta zou kunnen teruggeven, ook al zouden de leden van die regering reeds in Djokja bijeen zijn, alvorens zij omtrent de van Roijen-Ruin verklaringen voldoende inlichtingen had ontvangen.

+
put water
tidak bisa

7

Dit zou echter kunnen geschieden, madaat de noodregering ervan overtuigd was, dat de regering Sukarno—Hatta inderdaad vrij was en bevrijd van de Nederlandse druk en bedreiging haar taak weer zou kunnen verrichten.

B3 berichten meldden op 16 Mei, dat Sjafruddin zou weigeren zijn mandaat terug te geven, ook wanneer de regering Sukarno—Hatta in Djokja zou zijn teruggekeerd, onder het motief, dat hij een regeringsmandaat had voor het gehele gebied van de Republiek en Sukarno—Hatta slechts kunnen optreden in de residentie Djokja.

Als argument werd voorts o.a. aangevoerd, dat niettegenstaande de noodregering, die tijdens de besprekingen de enige officiële Republikeinse regering was, zich met hand en tand had verzet tegen te overeenkomst, Sukarno en Hatta zonder enig mandaat de overeenkomst hadden laten sluiten, waardoor de Noodregering in een dwangpositie zou zijn geraakt. Teniende n.l. de Republiek bij het buitenland niet in discrediet te brengen, zou de Noodregering genoodzaakt zijn nu eveneens haar goedkeuring aan de overeenkomst te hechten.

Intussen gaf de Noodregering op Sumatra op 19 Mei 1949 een telegrafische bekendmaking uit, waarin de taakverdeling van de leden van de Noodregering op Sumatra werd vermeld.

Alle aangelegenheden, zo was besloten, op Sumatra betrekking hebbend, zouden worden afgehandeld door de leden te Sumatra, waarbij naast hun taak de competentie zou komen om de taak van een andere minister buiten Sumatra uit te oefenen.

Met andere woorden, de regering werd gevormd uit personen uitsluitend op Sumatra aanwezig, zij trok daarbij opnieuw het bestuur voor geheel Indonesia tot zich, het bestaan van het commissariaat op Java daarbij blijkbaar negerend.

Zo werd b.v. Mr. Sjafruddin Minister van Defensie en zou hij tevens de Minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigen.

Betreffende het standpunt van de Noodregering van de Republiek t.o.v. het Nederlands—Indonesisch geschil, kunnen de berichten als volgt worden samengevat.

De dag nadat de Noodregering was gevormd maakte zij bekend bereid te zijn het vuren te staken en wederom met de Nederlanders te onderhandelen op de volgende voorwaarden:

- 1e. In vrijheidstelling van de Republikeinse Regering.
- 2e. Terugtrekking Nederlands leger naar oorspronkelijke posities van voor 19 December
- 3e. Onvoorwaardelijke de facto en de jure erkenning van de Republiek als staat, die Java en Sumatra omvat.
- 4e. Spoedige vorming van een onafhankelijke en soevereine Indonesische staat, voormalig Nederlands—Indie omvattend.
- 5e. Zo spoedig mogelijke terugtrekking van het Nederlandse leger uit geheel Indonesia, met de bepaling, dat op het moment, waarop een vrije onafhan-

kelijke staat zal zijn gevormd, het Nederlandse leger nietmeer in Indonesie aanwezig is.

6e. De Nederlandse belangen zullen naar behoren worden behartigd.

Later werd hieraan nog toegevoegd, dat behalve een opnieuw erkennen van de Linggadjadi-overeenkomst, het onvoorwaardelijke herstel van de regering Sukarno-Hatta een vereiste was, alvorens de cease-fire kon worden afgekondigd.

Omsreeks 12 Januari maakte de noodregering bekend wel genegen te zijn de cease-fire order van de Veiligheidsraad op te volgen en de onderhandelingen met de Nederlanders te hervatten onder auspicien en supervisie van de Veiligheidsraad.

Groot was het vertrouwen in de Veiligheidsraad blijkbaar evenwel niet, aangezien de noodregering de voorkeur gaf aan een interventie van de Aziatische conferentie te New-Delhi, wegens het herhaaldelijk falen van de Veiligheidsraad.

Het was een grote teleurstelling voor de noodregering dat in de resolutie van de Aziatische conferentie de "de jure" erkenning van de Republiek (zie ad 3 van de voorgaande voorwaarden) niet was opgenomen, waardoor Nederland belet zou kunnen worden in den vervolge het geschil als een binnenlandse aangelegenheid te behandelen.

Omdat hij rekende op verdere steun van de Aziatische mogendheden en hun bereidheid de vorming van een onafhankelijk en souverain Indonesie te garanderen, verklaarde Sjafruddin zich toch bereid uit solidariteitsgevoel de resolutie aan te nemen.

Ook hoopte hij op steun in financieel en economisch opzicht bij het herstel van de Republiek, omdat op dit gebied door de Nederlandse actie grote tekortkomingen zouden bestaan.

Herhaaldelijk werd door de noodregering de verwachting uitgesproken, dat de Veiligheidsraad de besluiten van de Aziatische conferentie eveneens zou aannemen, omdat minder gunstige besluiten moeilijk door de Indonesiers zouden kunnen worden geaccepteerd.

In het begin van Februari liet de noodregering aan Sukarno en Hatta weten, dat deze laatsten, voordat zij een ontmoeting met de zgn. noodregering hebben gehad, geen formele of informele onderhandelingen met de Nederlanders of BFO mochten voeren.

Tijdens een uitzending van de Voorlichtingsdienst d.d. 6 Februari werd verklaard, dat het, gezien de slechte ervaringen met de Nederlanders opgedaan, in het huidige stadium maar beter was de strijd voort te zetten tot het bittere einde, dan later onder wellicht ongunstiger omstandigheden opnieuw te moeten beginnen.

Het plan Beel werd door de noodregering zowel als het Commissariaat op Java een verwerping door de Nederlanders van de resolutie van de Veiligheidsraad geacht. Om aan de gevolgen daarvan te ontkomen, zouden de Nederlanders volgens Sjafruddin een op het oog ruimer voorstel dan de oplossing van de

Veiligheidsraad hebben gedaan, met de hoop, dat de Veiligheidsraad haar eigen resolutie wederom zou intrekken.

Volgens de noodregering noemde de Vice-President van de BFO, toen hij het plan onder ogen kreeg, dit een bedrog van de wereldopinie.

Bij het bekendmaken van zijn standpunt t.o.v. het plan-Beel, stelde Sjafruddin na een korte recapitulatie van de feiten, welke zich sinds 1945 hebben voorgedaan, waarbij in het bijzonder de Linggardjati en Renville-overeenkomst werden aangehaald en de Nederlanders werden beschuldigd de politionele actie te hebben ingezet op het ogenblik, dat de Republiek erin was geslaagd de Muso opstand te onderdrukken, nog de volgende eisen, welke vrijwel overeenkwamen met de bij de vorming van de noodregering bekend gemaakte voorwaarden om een eventuele cease-fire order af te kondigen :

- a. Volledige rehabilitatie van de Republiek, bestaande uit:
 - 1e. vrijlating van de gevangen genomen Republikeinse prominenten
 - 2e. de teruggave van de Republikeinse gebieden, die gewapender hand de Republiek werden ontnomen, ondanks de Linggardjati en Renville-overeenkomst.
- b. De erkenning van de Republiek, d.w.z. dat de TNI erkend moet worden en dat de Nederlandse troepen uit Republikeins grondgebied moeten worden teruggetrokken.

Eerst als aan de voorwaarden onder a. ad 1 en 2 was voldaan, zou Sjafruddin bereid zijn de order staakt het vuren af te kondigen.

In een latere omschrijving van zijn standpunt benaderde Sjafruddin zijn eerstgenoemde voorwaarden nog meer.

Op 8 Maart maakte Sjafruddin bekend, dat de Ronde Tafel Conferentie gebaseerd moet zijn op de volgende grondslagen:

1. De vorming van een Voorlopige Federale Regering, uiterlijk op 1 Juli 1949, waarvan de vertegenwoordiging van de Republiek uit 50%, die van de deelstaten uit 40% en van de minoriteitsgroepen uit 10% zou bestaan.
2. Aan die Voorlopige Regering zou de souvereiniteit moeten worden overgedragen.
3. Voor de vorming van het federale leger moet de TNI op verzoek van de V.F.R. voor rust en orde in het gebied van de Republiek zorgen; in de andere gebieden moet het Nederlandse leger de rust en orde handhaven.
4. Ten behoeve van de samenstelling van de Constituanten moet de V.F.R. met spoed algemene verkiezingen doen houden onder toezicht van de UNCI. Die Constituanten moet dan de Grondwet samenstellen en een definitieve Federale Regering kiezen.
5. Het Nederlandse Leger zal in zijn geheel uit Indonesie moeten worden teruggetrokken op een datum, welke gezamenlijk zal worden vastgesteld door de Federale Regering, de Nederlandse Regering en de UNCI.



6. Hierna wordt het Statuut van de Unie Indonesia-Nederland vastgesteld en bekrachtigd door het Parlement van Indonesia en Nederland.

T.a.v. de Van Roijen-Rum verklaring maakte de noodregering omstreeks 14 Mei bekend, dat zij haar standpunt nog niet kon vaststellen, alvorens nadere gegevens waren ontvangen ten aanzien van de ten uitvoerlegging van de instructie aan de leiders op Bangka d.d. 27 Maart, welke luiden:

1. De terugkeer van de Republikeinse Regering naar Djokja dient in te houden een erkenning door de Nederlanders van het gezag van de Republikeinse Regering over geheel Java en Sumatra en omliggende eilanden, overeenkomstig Linggardjati.
2. Dat de TNI niet van hun respectievelijke standplaatsen behoeft te worden teruggetrokken v-o-o-r de Federale Regering van Indonesie is ingesteld.
3. Terugtrekking Nederlandse troepen uit Republikeins gebied.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat geen bezwaar tegen de deelname aan de RTC op tijdstip en voorwaarden, waarover nadere besprekingen met de Sukarno-Hatta regering kunnen worden gevoerd.

Zolang de inlichtingen als bovenbedoeld niet zouden zijn verstrekt, zou de noodregering het gezag nog niet aan de regering Sukarno-Hatta kunnen teruggeven, hetgeen eerst zou kunnen geschieden, als de noodregering de overtuiging heeft, dat de regering Sukarno-Hatta inderdaad vrij is en bevrijd van Nederlandse druk en bedreiging haar taak weer kan verrichten.

Dit telegram was in tegenspraak met een telegram van U.P. van 14 Mei, waarin beweerd werd, dat de noodregering zich achter de Van Roijen-Rum overeenkomst stelde.

Op 17 Mei ontkende Sjafrudin nog eens uitdrukkelijk de waarheid van dit U.P.-bericht.

Een militair woordvoerder van het Militaire Gouvernement van Atjeh leverde de volgende critiek in een telegram aan de noodregering op de Van Roijen-Rum verklaring.

- 1e. De besprekingen over het vormen van de cease-fire commissie is in strijd met de gestelde voorwaarde, dat de Nederlandse troepen moeten worden teruggetrokken uit het Republikeinse gebied.
- 2e. Om een terugkeer van de Republikeinse Regering naar Djokja te verkrijgen, heeft de Republiek zich bereid verklaard deel te nemen aan de Ronde Tafel Conferentie, wat dus in strijd is met een onvoorwaardelijke terugkeer.
- 3e. Uit de verklaring, dat de Nederlanders geen federale besturen zullen instellen in de ex-Republikeinse gebieden kan de conclusie worden getrokken, dat deze gebieden niet teruggegeven zullen worden, hetgeen dus geen volledige erkenning is van de Republikeinse souvereiniteit over Java, Madura en Sumatra.

Het is nog niet bekend, hoe de noodregering hierop reageerde.

Bovenstaande samenvatting van soms onvolledige en verwarde berichten geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.

- 1e. zou kunnen worden geconcludeerd, dat het kabinet Hatta zijn regeringsbevoegdheid werkelijk heeft overgedragen aan de noodregering o.l.v. Sjafruddin.
- 2e. Het is niet duidelijk, hoe het staat met de bevoegdheden van President Sukarno, o.a. in zijn functie van Opperbevelhebber van de Republikeinse strijdkrachten. Werd het opperbevelhebberschap overgedragen, en zo ja, aan wie - aan Sjafruddin, als Hoofd der noodregering, of aan Tan Malakka, die volgens berichten zou zijn belast met de leiding van het verzet?
Voor de mogelijkheid, dat alle bevoegdheden van Sukarno (dus ook diens opperbevelhebberschap) aan Sjafruddin werden overgedragen, pleit de bekendmaking op 23 December j.l. dat de cease-fire order door de Voorzitter van de noodregering moet worden uitgevaardigd. Maar in latere berichten wordt hierover niet meer gerept en wordt men hieromtrent in het onzekere gelaten. Gesproken wordt dan over de opperbevelhebber, die de cease-fire order moet geven, terwijl in latere berichten Sukarno weer wordt genoemd als de man, die de cease-fire order moet afkondigen.
Ook t.a.v. de functie van de Legercommandant zou twijfel kunnen bestaan. Zoals op pag.1 werd vermeld, nam Kol. Hidajat het bevel over alle Republikeinse strijdkrachten op zich.
In latere berichten fungeert Sudirman weer als Legercommandant; het is evenwel niet duidelijk, of dit alleen voor Java geldt of ook voor Sumatra.
- 3e. zou kunnen worden gesproken van een geleidelijke verscherping in de verhouding noodregering-Sukarno/Hatta, die tenslotte tot uiting komt in een poging van de noodregering om het gezag te behouden, c.q. eerst over te gaan dit over te dragen nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan en de invloed van Sukarno-Hatta te ondermijnen door Sukarno-Hatta o.a. het recht te ontzeggen de Van Roijen-Rum verklaring af te leggen.
- 4e. dat de bij verschillende gelegenheden gestelde eisen van de noodregering (bij de vorming van die regering, bekendmaking van het standpunt t.o.v. het plan Beel en de preliminaire besprekingen) niet veel wijziging vertonen en in hoofdzaak neerkomen op:
 - a. vasthouden aan de Linggadjati-overeenkomst, in zoverre deze een erkenning van Java-Sumatra-Madura als Republikeins gebied betreft.
 - b. terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Republikeins gebied en later uit geheel Indonesie.
 - c. onvoorwaardelijk herstel Sukarno-Hatta regering.
- 5e. Aangezien de Van Roijen-Rum verklaring hieraan niet voldoet, is het nog onzeker of de noodregering bereid is de cease-fire order af te kondigen, of

indien dit door een andere autoriteit geschiedt (Sukarno), een dergelijke order door haar zal worden erkend.

Uit een telegram van Kol. Simatupang van 24 Mei j.l. aan de noodregering blijkt, dat deze de Nederlanders blijft wantrouwen en zal trachten voor gemaakte afspraken internationale garantie te verkrijgen, terwijl zij zich t.a.v. de bevoegdheden van President en Vice-President gereserveerd houdt en de mogelijkheid wil openhouden om deze te desavoueren. Kol. Simatupang stelt daar o.m. tegenover, dat de noodregering moet trachten de positie van President en Vice-President naar buiten zoveel mogelijk te versterken en maatregelen moet nemen, waardoor de Rep. Regering de gelegenheid krijgt om in zo gunstig mogelijke situatie besprekingen te voeren, terwijl naar binnen een tweede linie moet worden gevormd en krachten georganiseerd, die kunnen worden gebruikt als de besprekingen mislukken. Te dien einde moet de noodregering op haar post blijven, vooral als de Rep. Regering naar Djokja terugkeert, in welk geval de noodregering een Commissariaat voor Sumatra moet worden, maar in staat moet zijn om op ieder moment te reincarneren.

6e. Het is onduidelijk, of de Banka-groep de besprekingen op eigen gezag voerde, of richtlijnen van de Noodregering ontving dan wel voorafgaand contact daarover met deze had. Uit het bericht op blz. 6 zou men kunnen afleiden, dat het laatste het geval is, hetgeen ongetwijfeld van invloed zou zijn op het karakter en de afloop van het huidige bezoek van Hatta c.s. aan de Noodregering.

Batavia C., 7 Juni 1949.

13

SAMENVATTENDE BESCHOUWING OVER DE POSITIE VAN DE REPUBLICKEINSE NOODREGERING OP SUMATRA.

De talrijke hierbijgaande uitspraken van de noodregering van de Republiek op Sumatra dienen te worden gerangschikt in :

- a. uitspraken betreffende de positie en bevoegdheid van die regering;
- b. het standpunt van die regering ten opzichte van het geschil Nederland-Indonesië in het algemeen;
- c. idem ten opzichte van het plan Beel
- d. idem ten opzichte van de Van Roijen-Rum overeenkomst.

In deze beschouwing zal het onder a. vermelde worden behandeld.

In de eerste tijd na de tweede politionele actie heeft er enigerlei verwarring geheerst in de republikeinse gelederen.

Een tweetal groepen republikeinse prominenten, die voor de Nederlandse strijdkrachten onbereikbaar waren, betwistten elkaar de voorrang.

Dit werd mogelijk gemaakt doordat de regering Soekarno-Hatta op 16 December 1949 blijkbaar opdracht had gegeven aan een van haar leden, n.l. Sjafroeddin, die in die dagen op Sumatra vertoefde, om het bewind, zolang dat door eerstgenoemde regering niet zou kunnen worden uitgeoefend, over te nemen.

In de kabinetszitting op 19 December werd om onbekende redenen (was men bang dat het aan Sjafroeddin uitgereikte mandaat zijn plaats van bestemming niet had bereikt?) het bestuur over de Republiek in handen van een drietal niet in Djoesja aanwezige kabinetsleden gelegd, n.l. dr. Soekiman, Minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Hatta, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Minister van Justitie, en Djuanda, Minister van Verbindingen, hetgeen op 20 December werd bekend gemaakt.

Op 22 December 1948 volgde een bekendmaking, dat tijdelijk een Nood-Centrale Regering van de Republiek op Sumatra werd ingesteld, die het volledige gezag naar binnen en naar buiten zou uitoefenen voor de tijd, dat de regering Soekarno-Hatta niet in staat was haar plichten te vervullen.

Op de 23ste daaraan volgende richtte de voorzitter van die regering zich tot het Indonesische volk, waarbij, teneinde verwarring en misverstand te voorkomen, aan alle militairen van de weermacht van de Republiek bekend werd gemaakt, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt, indien het bevel hiertoe werd uitgevaardigd door de Voorzitter van de zgn. Noodregering.

Op 28 December nam de Kol. Hidajat, bevelhebber der republikeinse troepen op Sumatra, het bevel van alle republikeinse strijdkrachten op zich, waarbij de troepen de opdracht kregen de strijd voort te zetten en het vuren niet te staken, alvorens zou zijn voldaan aan de voorwaarden, welke de regering op 23 December stelde. Op 31 Januari gaf Sjafroedin een dagorder uit, waarin werd herhaald, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt in opdracht van de Opperbevelhebber, die terzake overleg zou plegen met de zgn. noodregering.

Zolang deze order nog niet was gegeven diende de strijd met de meeste kracht te worden voortgezet.

In verband met het bovenstaande ligt het voor de hand te veronderstellen, dat hiermede Kol. Hidajat wordt bedoeld; het is immers op dat moment niet duidelijk hoe de noodregering met Soedirman, de eigenlijke opperbevelhebber, overleg wil plegen, daar zij toentertijd met deze niet in contact stond.

Het is minder aannemelijk, dat hier op het opperbevelhebberschap van Soekarno wordt gedoeld, aangezien deze zijn bevoegdheden had overgedragen aan Sjafroeddin (weliswaar werd in de bekendmaking daarvan door de noodregering niet gerept over het bevelhebberschap, maar wel werd gesteld, dat zij het volledige gezag naar binnen en naar buiten zou uitoefenen voor de tijd, dat de regering Soekarno-Hatta niet in staat is haar plichten te vervullen; dat het opperbevelhebberschap van Soekarno daaronder niet zou vallen, lijkt niet logisch).

Een andere mogelijkheid is nog dat Tan Malakka, die volgens het verslag van de Indiase Consul met de verzetsleiding zou zijn belast, als opperbevelhebber dient te worden beschouwd. Uit latere berichten zal naderhand blijken, dat Soedirman toch weer als opperbevelhebber schijnt te worden beschouwd. Uit het bovenstaande blijkt evenwel dat hierover enige tijd onzekerheid heeft bestaan en dat er sprake was van twee opperbevelhebbers.

Dat de positie van de noodregering als centrale regering nog niet vaststond, blijkt uit de radiografische mededeling van de Republikeinse Prov. Regering Oost-Java, waarbij het besluit van de Ministerraad tijdens de zitting van 19 - 12 - '48 werd bekend gemaakt, o.m. dat zolang de President en Vice-President verhinderd zijn hun functies uit te oefenen, de leiding van de Centrale Regering werd overgedragen aan drie Ministers, n.l. die van Binnenlandse Zaken, Justitie en Verbindingen.

Op 16 Februari daaraan volgende wendde de Voorzitter van de noodregering zich tot het militaire bestuur in Midden-Java met het verzoek er wel nota van te willen nemen, dat de noodregering in Sumatra als de enige voorlopige centrale regering met een vaste positie in het buitenland moest worden beschouwd.

Deze regering oefent zowel naar binnen als naar buiten het volle gezag uit in Indonesia en zal dit doen totdat er zekerheid is, dat de regering Sukarno-Hatta weer haar taak zal kunnen verrichten.

Naar aanleiding hiervan werd de wenselijkheid bepleit dat de huidige centrale regering op Java in de vorm van een commissariaat der noodregering werd samengesteld en niet als een soort nood-kabinet zou fungeren. Kort daarop bevestigde Minister Kasimo dat in de kabinetszitting van 16 December 1948 het besluit werd genomen tot de vorming van een noodregering op Sumatra onder leiding van Sjafroeddin. De achtergebleven ministers op Java zouden zich slechts beschouwen als een deel van de centrale regering op Sumatra.

Op 7 Maart werd de samenstelling van het commissariaat op Java der noodregering door Minister Kasimo bekend gemaakt waarbij de Commandant Territoriale Troepen Java als adviserend lid in dit lichaam werd opgenomen. Voorts werd bepaald dat het Commissariaat (Kommissariaat Pusat Pemerintah Djawa) verantwoording schuldig is aan de noodregering over het bestuur van Java en Madoera, terwijl het voorts in belangrijke zaken advies geeft. De Legercommandant in zijn kwaliteit van Opperbevelhebber van de strijdkrachten in de gehele Republiek zou adviserend lid van de noodregering worden.

Omstreeks 6 Februari had de noodregering de tussenkomst van Palar ingeroepen om Soekarno en Hatta te seinen, dat zij, voordat zij een ontmoeting hebben gehad met de zgn. "noodregering" geen formele of informele onderhandelingen moesten voeren met de Nederlanders of B.F.O.

Begin Maart vestigt de Kol. Hidajat er nogmaals de aandacht van alle commandanten der strijdkrachten op, dat de order staakt het vuren slechts mocht worden opgevolgd, indien deze afkomstig was van de Opperbevelhebber.

Op 14 Maart zond de Voorzitter van de noodregering een uitgebreid telegram aan het Commissariaat, waarin zij een voorstel deed om de ministers op Java als leden in de noodregering op te nemen.

Tevens werd een soort taakverdeling opgesteld. Op 23 Maart gaf Soedirman in een uitzending de noodregering te kennen, dat politiek en defensie z.i. niet mochten worden gescheiden.

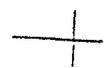
Hij protesteerde derhalve tegen een bekendmaking van de noodregering, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt op bevel van Soekarno na overleg met de noodregering, waarbij hij er op wees, dat op Java reeds veel stemmen opgingen zich niet te onderwerpen aan bevelen van personen, die zich in gevangenschap bij of onder controle van de Nederlanders bevonden.

Volgens hem moest daarover worden beslist op een bijeenkomst van de noodregering, de Staf van de weermacht, Soekarno (mits in vrijheid) en zo mogelijk enige leden van het werkomitee (KNIP). De oude werkwijze, waarbij de legerleiding geheel buiten de politieke besprekingen werd gehouden, had bitter lijden veroorzaakt. Daarom was het volgens hem noodzakelijk dat tussen noodregering en legerleiding voortaan eenheid van inzicht, voornemen, houding en handelen zou bestaan.

Sjafroeddin antwoordde hierop op 15 April, dat het volgens zijn mening niet juist was, dat de Legercommandant een beslissende stem had bij de vaststelling van het politieke beleid. Wel moest volgens hem de Legercommandant in belangrijke politieke kwesties steeds worden gehoord.

In een rede op 9 April had Sjafroeddin uitdrukkelijk verklaard, dat de republikeinse leiders op Bangka het gezag aan de noodregering hadden overgedragen, zodat de Nederlanders niet moesten denken buiten de noodregering om met de republikeinse leiders op Bangka te kunnen onderhandelen.

De order staakt het vuren zou niet worden gegeven en er zou niet aan de Ronde Tafel Conferentie worden deelgenomen, indien de regering Soekarno-Hatta niet onvoorwaardelijk zou worden gerehabiliteerd.



De agenda voor eventuele preliminaire besprekingen zou voor de noodregering slechts een punt bevatten: de teruggave van de regering Soekarno-Hatta. Deze en andere verklaringen waren voor bladen als Sin Po en Warta Indonesia aanleiding zich af te vragen, wat voor nut het had te onderhandelen met een groep, die feitelijk niet meer bevoegd was in naam van de Republiek op te treden.

Dit laatste werd nog eens op 19 April onderstreept door de leden van de noodregering Mr. Rasjid en In. Sitompul, die vaststelden, dat de preliminaire besprekingen begonnen waren zonder dat vaststond van wie de republikeinse delegatie de bevoegdheid om te onderhandelen had gekregen.

Zij meenden te weten, dat alvorens besprekingen met de Nederlanders zouden worden gevoerd, eerst een ontmoeting tussen Soekarno en Hatta enerzijds en de Noodregering anderzijds zou plaats hebben, die naar hun weten niet had plaats gevonden.

Zij vroegen zich af in hoeverre de Republikeinse Delegatie aan de Noodregering was gesubordineerd en van de nodige directieven voorzien.

Op 21 April zetten Rasjid en Sitompul hun uiteenzettingen voort, door te verklaren, dat Dr. Van Roijen bij de besprekingen te Batavia d.d. 16 April j.l. zijn ergernis te kennen had gegeven door de vraag te stellen of door Sukarno en Hatta enerzijds en de Noodregering anderzijds een afspraak was gemaakt, dat de order staakt het vuren slechts door de Noodregering kon worden uitgevaardigd (verkl. voorlichtingsdienst Noodregering op 9 April 1949).

Zij meenden hieruit te mogen concluderen dat, ofschoon de Nederlandse vertegenwoordiger de Noodregering niet wenste te erkennen hij toch zeer goed wist, dat slechts deze regering momenteel het gezag uitoefende. Het is na het bovenstaande duidelijk, dat de Noodregering niet enthousiast kon zijn over de van Roijen-Rum-overeenkomst.

In een redevoering van Sjafroeddin voor alle stations deelde deze mede, dat de Noodregering het gezag nog niet aan de Regering Sukarno-Hatta zou kunnen teruggeven, ook al zouden de leden van die regering reeds in Jogja bijeen zijn, alvorens zij omtrent de van Roijen-Rum bijeenkomst voldoende inlichtingen had ontvangen.

Dit zou eerst kunnen geschieden, nadat de Noodregering ervan overtuigd was, dat de regering Sukarno-Hatta inderdaad vrij was en bevrijd van de Nederlandse druk en bedreiging haar taak weer zou kunnen verrichten.

Op 17 Mei herhaalde Sjafroeddin uitdrukkelijk, dat de Noodregering haar standpunt ten overstaan van de Rum-van Roijen bijeenkomst nog niet had bepaald.

B3 berichten meldten op 16 Mei, dat een oppositie tegen de regering Sukarno-Hatta ontstond. Sjafroeddin zou weigeren zijn mandaat terug te geven, ook wanneer de regering Sukarno-Hatta in Djokja zou zijn teruggekeerd onder het motief, dat hij een regeringsmandaat had voor het gehele gebied van de Republiek en Sukarno-Hatta slechts kunnen optreden in de residentie Djokja.

Als argument werd voorts o.a. aangevoerd, dat niettegenstaande de Noodregering, die tijdens de besprekingen de enige officiële republikeinse

regering was, zich met hand en tand had verzet tegen de overeenkomst, Sukarno en Hatta zonder enig mandaat de overeenkomst hadden laten sluiten. (zie aanvulling op pag. 5).

De Noodregering geraakte hierdoor in een dwangpositie. Teneinde n.l. de Republiek bij het buitenland niet in discredit te brengen, was de Noodregeringgenoodzaakt eveneens haar goedkeuring aan de overeenkomst te hechten.

Men zou nu voornemens zijn in de zo spoedig mogelijk bijeen te roepen zitting van het KNIP de regering Hatta te wippen en verwachtte, dat Sjafroeddin of Dr. Leimena een nieuw kabinet zou samenstellen.

Tenslotte gaf de Noodregering op Sumatra een telegrafische bekendmaking d.d. 19 Mei 1949 uit, waarin de taakverdeling van de leden der Noodregering op Sumatra werd vermeld.

Alle aangelegenheden, zo was besloten, op Sumatra betrekking hebbend, zouden worden afgehandeld door de leden te Sumatra, waarbij naast hun taak de competentie zou komen om de taak van een andere minister buiten Sumatra uit te oefenen.

Met andere woorden de regering werd gevormd uit personen op Sumatra aanwezig, zij trok daarbij het bestuur voor geheel Indonesie tot zich, het bestaan van het commissariaat e.a. regeringspersonen daarbij negerende.

Zo werd b.v. Mr. Sjafroeddin Minister van Defensie en zou hij tevens de Minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigen.

Uit het voorgaande mag naar het voorkomt worden geconcludeerd :

- a. een verscherping in de verhouding Noodregering-Sukarno-Hatta ;
- b. een poging om het gezag, waarmede de eerste door de laatsten was bekleed, te behouden en zo mogelijk nog te versterken, daarmede de invloed van Sukarno-Hatta ondermijnende ;
- c. Ten aanzien van het opperbevelhebberschap bestaat geen zekerheid. Kan Sukarno nog als Opperbevelhebber worden beschouwd of heeft Sjafroeddin als Voorzitter van de Noodregering die functie overgenomen. Zo nee, dan is het toch aan twijfel onderhevig of Sukarno zal worden gehoorzaamd als hij als Opperbevelhebber de order staakt het vuren afkondigt:
 - 1e. wegens het conflict met de Noodregering, die Sukarno-Hatta het recht van een overeenkomst te sluiten, betwist;
 - 2e. omdat Sukarno Tan Malakka met de leiding van het verzet belastte en het de vraag is, of hij evenals Soedirman, die zich ten rechte of ten onrechte (Hidajat) nog Legercommandant voelt en niet van zins schijnt te zijn een dergelijk bevel van Sukarno op te volgen, bereid is om de strijd te staken.

In elk geval blijkt wel duidelijk, dat de Noodregering zich (met recht) als de enige centrale en wettige autoriteit van de Republiek beschouwt en dat Sukarno-Hatta deze regering had moeten raadplegen alvorens nieuwe verplichtingen aan te gaan. De toekomst zal het leren of dit een welbewuste politiek

is geweest om zich achter de autoriteit van een ander te verschuilen of dat de Bangka prominenten inderdaad te goeder trouw waren, toen zij de overeenkomst aangingen.

In een telegram van omstreeks 6 Februari verzoekt de zgn. Noodregering door tussenkomst van Palar, dan wel van een andere ex-republikeinse vertegenwoordiger in het buitenland, aan Sukarno en Hatta te seinen, dat zij, voordat zij een ontmoeting hebben gehad met de zgn. Noodregering geen formele of informele onderhandelingen moeten voeren met de Nederlanders of BFO.

P.D.R. 12 April 1949 (Agno. 2487/ADOC.Geh.)

Op 10 April jl. verzocht SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA als Minister van Voorlichting van de Noodregering via AURI-station ex-MUARA AMAN, aan alle rep. radiostations om zijn verklaring inzake het standpunt van de Noodregering op een zo ruim mogelijke schaal te publiceren.

In deze verklaring, welke was gedagtekend: SUMATRA 9 April 1949, memoreerde SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA de bestandsovereenkomsten met de Neds en de bittere ervaringen, die de Republiek daarmee en met de beloften der Neds had opgedaan.

Hij trok daaruit de conclusie, dat "alle bewijzen, welke door de Neds sedert de November-belofte 1918 tot op heden geleverd zijn, het wantrouwen van de Indonesiers tegenover de Ned. regering slechts versterkt hebben. Het vertrouwen van de Indonesiers in de Nederlanders kan slechts terugkeren, indien zij bereid zijn de grondslagen van de LINGGARDJATI-overeenkomst die door de Indonesiers met opoffering van bijzondere gevoelens is ondertekend opnieuw te erkennen. Indien deze grondslagen door de Neds niet worden aanvaard, is het niet mogelijk het bevel om het vuren te staken, in de praktijk te doen naleven"

Vervolgens besprak de rep. Minister voornoemd enkele technische moeilijkheden m.b.t. de uitvoering der "cease fire order".

Eveneens wees hij op het feit, dat de rep. leiders op BANGKA het gezag aan de Noodregering hadden overgedragen, zodat de Neds niet moesten denken, dat zij buiten de Noodregering om met de rep. leiders op BANGKA kunnen onderhandelen.

" De Noodregering kan bevel geven het vuren te staken en kan ook
" besluiten deel te nemen aan de Ronde Tafel Conferentie, doch het
" standpunt van de Noodregering is : de order "staakt het vuren" zal
" niet worden gegeven en er zal niet aan de Ronde Tafel Conferentie
" worden deelgenomen, indien de regering SUKARNO-HATTA niet
" onvoorwaardelijk door de Neds wordt gerehabiliteerd. De verklaring
" van Mr. RUM, dat hij slechts bereid is te onderhandelen over de
" rehabilitatie van de regering SUKARNO-HATTA op de door de
" Noodregering vastgestelde grondslagen, is dus juist." aldus SJAFRU-

" DIN PRAWIRANEGARA.

" De agenda voor eventuele preliminaire besprekingen bevat voor ons slechts een punt :

" De teruggave van de regering SUKARNO-HATTA.

" Andere kwesties kunnen allen worden besproken, nadat het gezag van de regering SUKARNO-HATTA is hersteld".

In verband met de a.s. voorconferentie namen berichten en beschouwingen m.b.t. de Noodregering op SUMATRA een voorname plaats in, in de rep., Chin. en Federalistische pers van de afgelopen week.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de samenstelling der Noodregering welke via de illegale zender, de "Voice of SUMATRA", door enkele bladen werd opgevangen-merkt de "Sin Po" op, dat de aankondiging van deze regering "een grote politieke zet met een diepere betekenis" is. Het blad vraagt zich af of nog wel resultaten te verwachten zijn van de onderhandelingen met de BANGKA-groep op de a.s. voorconferentie, daar deze groep thans feitelijk niet meer bevoegd is in naam van de Republiek op te treden.

Het federalistische blad "Warta Indonesia" meende uit de aankondiging van het zogenaamde kabinet der Noodregering door SUBANDRIO te LONDEN te moeten opmaken, dat dit geschiedde met het doel de wereld te laten begrijpen, dat onderhandelingen over de Indon. kwestie met de BANGKA-groep van geen nut zijn.

Immers, sinds de vorming der Noodregering is de status van de BANGKA-groep niets meer dan die van gewone particulieren, zodat verder met SJAFRUDIN onderhandeld zal moeten worden, aldus de "Warta Indonesia".

P.D.R. 21 April 1949 (Agno. 2680/ADOC.Geh.)

Dd. 19 April jl. werden via het AURI-station ex-PAJAKOMBOH door Mr. RASJID en Ir. SITOMPUL, respectievelijk Minister van Arbeid en Sociale Zaken (tevens Militair Gouverneur van SWK) en Minister van Publieke Werken van de republikeinse noodregering, enkele bezwaren t.a.v. de door de noodregering gevoerde politiek naar voren gebracht. Genoemde ministers stelden vast, dat de preliminaire gesprekken begonnen waren tussen een republikeinse delegatie onder Mr. RUM, en een Nederlandse delegatie onder Dr. van ROYEN. Beide ministers vroegen zich af, van wie de republikeinse delegatie de bevoegdheid om te onderhandelen had gekregen.

Voorts meenden zij te weten, dat alvorens er besprekingen met de Nederlanders zouden worden gevoerd, eerst een ontmoeting tussen SUKARNO en HATTA enerzijds en de noodregering anderzijds zou plaatshebben. Deze ontmoeting had naar hun weten nog niet plaats gehad.

Tenslotte vroegen de ministers zich af, in hoeverre de republikeinse delegatie en de republikeinse vertegenwoordiging in het buitenland aan de noodregering waren gesubordineerd en deze instanties van de nodige directieven werden voorzien.



Zij beëindigden hun bezwaarschrift als volgt :

" Wij stellen voor, dat alle maatregelen, zowel naar buiten als naar binnen, in
" het bijzonder met betrekking tot onze delegatie en onze vertegenwoordigers
" in het buitenland, rechtstreeks door de noodregering van de Republiek
" Indonesia moeten worden getroffen en dat e.e.a. onder haar leiding dient te
" staan, opdat een uniformiteit in de te voeren politiek gegarandeerd wordt
" en om de buitenwereld te binden, zich rechtstreeks met de noodregering van
" de Republiek Indonesia in verbinding te stellen.
" Er moet opnieuw met nadruk aan de gehele wereld en in het binnenland
" worden verklaard, dat het de noodregering van de Republiek Indonesia is,
" die ten volle de bevoegdheid heeft om het e.e.a., betrekking hebbende op de
" Republiek, vast te stellen."

P.D.R. 23 April 1949 (Agno. 2721/ADOC.Geh.)

Dd. 21 April meende de Voorlichtingsdienst van de noodregering in een beschouwing, bestemd voor alle stations, dat de Nederlanders besprekingen voeren met het masker van fascisme op.

De Nederlandse delegatie brengt vnl. onderwerpen naar voren, welke slechts besproken kunnen worden, indien de regering van SUKARNO-HATTA weer vrij is en evenals voorheen haar taak kan verrichten. Bovendien zet het Nederlandse leger, omdat het niet in staat is de republikeinse guerilla-activiteit in de kiem te smoren, de zuiveringsacties voort. Deze acties worden gezien als een onderdeel van een grootscheepse aanvalscampagne van het Nederlandse leger met de bedoeling om gedurende de besprekingen zoveel mogelijk gebieden te beheersen en republikeinse leiders te arresteren, teneinde de tegenstand van het Indonesische volk te breken. De Voorlichtingsdienst besloot haar beschouwing met het volk van INDONESIA op te wekken, de Guerillastrijd intensiever voort te zetten, totdat de Nederlanders bereid zijn, de republikeinse eisen in te willigen (A2).

P.D.R. 25 April 1949 (Agno. 2752/ADOC.Geh.)

In republikeinse kringen te BATAVIA is men van oordeel, dat, tengevolge van hetgeen zich kort voor de tijdens de preliminaire besprekingen heeft voorgedaan met betrekking tot het Nederlands-Indonesische geschik, de stemming in het republikeinse kamp er niet eensgezinder op is geworden. Was men oorspronkelijk slechts twee meningen toegedaan, t.w. een groep, die een reele overeenkomst nastreefde teneinde het geschil op te lossen en een groep, die slechts wenste te onderhandelen over de terugkeer van de republikeinse regering naar DJOCJA om eerst daarna de andere punten van bespreking ter tafel te brengen, thans echter zijn er, voornamelijk als gevolg van de bemoeiingen van de UNCI-leden COCHRAN en CRITCHLEY, alsmede van de Consul-Generaal van INDIA ALLAGAPAN, vier groeperingen waar te nemen :

1. Zij, die een overeenkomst, zoals de Nederlandse delegatie zich die voorstelt, wensen te aanvaarden en - in grote trekken - ook wensen na te leven. Als prominenten in deze groep worden genoemd : Dr. DARMASETIAWAN, Mr. KUSUMA ATMADJA en SUTAN SJAHRIR die echter op detailpunten weer van mening verschillen.
2. De grote groep, die thans genegen is om een schijn-overeenkomst aan te gaan, conform het advies van COCHRAN en CRITCHLEY. Tot deze groep behoren ook velen dergenen, die aanvankelijk het standpunt : "eerst terug naar DJOCJA, daarna verder praten", innamen; aangenomen mag worden, dat de meesten dezer figuren in principe hun standpunt niet hebben gewijzigd, doch in deze schijnovereenkomst slechts een middel tot het bereiken van hun doel zien. Tot deze groep kunnen worden gerekend SUKARNO, HATTA en vrijwel alle leden van de republikeinse delegatie met voorlopige uitzondering van MOH. RUM.
3. MOH. RUM en een kleine groep, die voornamelijk uit prestigeoverwegingen blijven vasthouden aan de eis, eerst naar DJOCJA terug te keren en overdracht van de soevereiniteit te verkrijgen, alvorens overeenkomsten te sluiten. Verwacht wordt echter, dat ook zij uit "utiliteitsoverwegingen" naar groep 2 zullen omzwaaien.
4. De noodregering, die, gesteund door de hoogste en hogere verzets-leiding, van geen onderhandelingen of compromis met de Nederlanders wil weten. Aanhanger van deze groep is ook Dr. ALLAGAPAN, die bedreigd heeft alleen Indiase steun te willen verlenen, indien de Republiek op dit radicale standpunt blijft staan, doch van wie verwacht wordt, dat hij zich ook neer zal leggen bij de beslissing een schijnovereenkomst aan te gaan. Dit zou b.v. kunnen blijken uit het feit, dat hij op 21 April jl. uit naam van de Indiase gemeenschap aan MOH. RUM f. 1.000,- ter hand stelde als steun aan de Republiek.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de algemene tendenz wijst naar het aangaan van een schijnovereenkomst, als zijnde "de grootste gemene deler" van de diverse meningen in republikeinse kringen. Van invloed op het nemen van deze beslissing is zeer zeker ook de toezegging van COCHRAN, dat - indien de Republiek deze schijnovereenkomst aanneemt - de U.S.A. zowel financiële als economische steun zal leveren, terwijl zij er ook bij de PHILIPPIJNEN op zal aandringen een lening aan de Republiek te verstrekken. Evenzo hoopt de Republiek dan ook van INDIA een lening te kunnen verkrijgen.

Aangenomen kan dus worden, dat men in de hoogste republikeinse kringen genegen is om de "staakt het vuren" order te geven, waarbij echter niemand verwacht, dat deze order enig effect zal sorteren; het vuren zal in feite pas beëindigd worden, wanneer geen Nederlands militair meer in "republikeins gebied" aanwezig is, waarop gevuurd kan worden, m.a.w. pas na het terugtrekken der Ned. troepen.

Algemeen heerst in republikeinse kringen de overtuiging, dat een "cease fire"-order door de eventueel herstelde republikeinse regering op alle mogelijke wijzen gesaboteerd zal worden en het verzet onverminderd voortgang zal vinden.

Op deze wijze verwacht de Republiek dus uiteindelijk toch te bereiken wat zij momenteel ter voorconferentie niet schijnt te kunnen verkrijgen: het verdwijnen van de Nederlandse troepen.

Met betrekking tot de "Ronde Tafel Conferentie" heerst in republikeinse kringen hier ten stede thans de zekerheid, dat daaraan zal worden deelgenomen door een "Indonesische delegatie", samengesteld uit republikeinse en federalistische "BFO"-vertegenwoordigers. Evenzo heeft men in die kringen de overtuiging, dat, zodra de soevereine V.S.I. geschapen zijn, er verder zal worden doorgebouwd op unitaristische leest.

Dd. 21 April jl. werd via het AURI-stn ex-PAJAKUMBOH, de politieke beschouwing van RASJID en SITOMPUL, beide leden van de noodregering, voortgezet (zie dzz Politiek Dagrapport No. 13, dd. 21 April, punt 2). In deze beschouwing, welke gericht was aan de Voorzitter der noodregering, gevan beide leden te kennen, dat zij het eens waren met de publicatie van de Minister van Voorlichting, dd. 9 April jl., waarin o.m. met nadruk was verklaard dat de order "staakt het vuren" slechts door de noodregering kan worden uitgevaardigd.

In verband met genoemde verklaring van de Minister van Voorlichting werd door RASJID en SITOMPUL gesuggereerd, dat naar aanleiding hiervan Dr. van ROYEN bij de besprekingen te BATAVIA dd. 16 April j.l. zijn ergeis te kennen heeft gegeven door de vraag te stellen, of door SUKARNO en HATTA enerzijds en de noodregering anderzijds terzake een afspraak was gemaakt: Tevens meenden genoemde leden der noodregering hieruit te mogen ooncluderen, dat, ofschoon de Nederlandse vertegenwoordiger de noodregering niet wenst te erkennen, hij toch zeer goed wist, dat slechts deze regering momenteel het republikeinse gezag uitoefent. Deze omstandigheden moesten volgens RASJID en SITOMPUL zo goed mogelijk worden uitgebuit, weshalve zij de voorzitter der noodregering voorstelden om via de UNCI een telegram te zenden met het verzoek of de republikeinse delegatie zich in verbinding kan stellen met de noodregering, teneinde een verklaring te kunnen afleggen over de bevoegdheden van deze noodregering (A2).

P.D.R. 28 April 1949 (Agno. 2824/ADOC.Geh.)

Een informant meende, dat SUKARNO en HATTA nimmer hadden verwacht, dat de 2e politionele actie eenivoor de Republiek zo gunstige reactie in het buitenland teweeg zou brengen. De regeringsoverdracht door SUKARNO en HATTA aan TAN MALAKKA, welke op 19 December j.l. plaatsvond, is dan ook onvoorwaardelijk geschied, want zij beschouwden de zaak als verloren. TAN MALAKKA is echter niet van plan zijn mandaat wederom ter beschikking

te stellen en zal trachten een eigen regering te proclameren, indien SUKARNO-HATTA de regeringsoverdracht nietig verklaren.

RAPP. T.I.G. 16 Mei 1949 (Agno. 3256/Geh.49)

Onderwerp : Oppositie tegen SUKARNO/HATTA.

Vernomen wordt dat in het geheim een aantal Republikeinse prominenten, waaronder SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, MOH. NATSIR, Prof. Dr. SUPOMO, Dr. LEIMENA, Ir. UKAR BRATAKUSUMA, KI HADJAR DEWANTORO, Koln. NASUTION en SIMATUPANG, voornemens is oppositie te voeren tegen het SUKARNO/HATTA regiem.

SJAFRUDDIN zal weigeren zijn mandaat terug te geven - ook wanneer SUKARNO en HATTA in DJOKJA zullen zijn teruggekeerd onder het motief dat hij een regeringsmandaat heeft voor het gehele Republikeinse gebied, terwijl SUKARNO/HATTA daarentegen slechts kunnen optreden in de residentie DJOKJA. Zo spoedig mogelijk zal het "Komite Nasional Indonesia Pusat" worden bijeengeroepen. Tijdens de zitting van het KNIP zal alsdan een motie van wantrouwen worden ingediend tegen het kabinet HATTA, waarbij tevens getracht zal worden SUKARNO te wippen.

Als argumentatie zal het volgende worden aangevoerd :

1. Niettegenstaande de Noodregering, die tijdens de besprekingen te BATAVIA, de enige officiële Republikeinse regering was, zich met hand en tand heeft verzet tegen de overeenkomst, hebben SUKARNO en HATTA - zonder dat zij hiervoor enig mandaat hadden - de overeenkomst laten sluiten.
Hierdoor geraakte de Noodregering in een dwangpositie. Teneinde nl. de Republiek bij het buitenland niet in discrediet te brengen, was de Noodregering genoodzaakt eveneens haar goedkeuring te hechten aan de gesloten overeenkomst.
2. Dat SUKARNO/HATTA deze overeenkomst hebben doen sluiten met het voorop gezette doel haar te saboteren, kan evenmin de goedkeuring van de Noodregering wegdragen.
Door tussenkomst van de Republikeinse delegatie werd nl. de werkelijke bedoeling aan Republikeinse prominenten, verzets leiders en Republikeins gezinde Federalisten bekend gemaakt. Hierbij werd de mogelijkheid voorbij gezien, dat e.e.a. ook in Nederlandse kringen bekend zou worden, die de UNCI en de Veiligheidsraad hiervan uiteraard op de hoogte zullen stellen. Dat hierdoor de Republiek ontegenzeggelijk de sympathie van het buitenland, althans van een groot gedeelte van de buitenlandse diplomaten, zal verliezen is buiten twijfel.
3. Voorts hebben SUKARNO en HATTA de Republiek practisch in de armen gedreven van Amerika door hun toezeggingen tegenover COCHRAN (zie ZG rapport No. 70 dd. 14 Mei 1949), waardoor Indonesie - niet officieel maar wel in feite - door allerlei economische en andere verdragen, a.h.w. een Amerikaanse "kolonie" zal worden.

24

+

4. Dat SUKARNO niet de juiste man is om als president van de Republiek op te treden, heeft hij tijdens zijn bewind wel bewezen. Als voorbeelden hiervoor zullen worden aangehaald, dat :

- a. overeenkomsten werden gesloten, die ten aanzien van de voorgaande, steeds in het nadeel van de Republiek uitvielen, waardoor het grondgebied van de Republiek na elke Overeenkomst steeds meer werd ingekrompen;
- b. de bevolking niet kon worden beveiligd tegen terreurdaden van zijn eigen leger en rampokbenden,
- c. de economische toestand van het land zeer sterk is achteruitgegaan, niet alleen tengevolge van het hierboven vermeld sub a en b, doch ook door het in het geheel niet, althans zeer zwak, optreden tegen corruptie.

Als candidaat voor de presidentszetel zal door de oppositie de Sultan van DJOKJA worden voorgedragen, terwijl men verwacht dat SJAFRUDDIN of Dr. LEIMENA verzocht zal worden een nieuw kabinet samen te stellen. Dit nieuwe kabinet, waarin de oppositie sterk vertegenwoordigd zal zijn, zal alsdan de overeenkomst - tegen het sluiten waarvan de Noodregering zich in het begin zo sterk heeft verzet - geheel naar de geest naleven, onder het motief dat zij dit wel moet doen om de sympathie van het buitenland niet te verspelen.

Teneinde de nieuwe deelstaten niet voor het hoofd te stoten (men verwacht nl. grote moeilijkheden bij de vaststelling van het grondgebied van de Republiek DJOKJA), is de oppositie voornemens met een plan te komen om geheel Indonesie onder te brengen in een "Negara Kesatuan" met verstrekkende bevoegdheden voor de huidige Negara-regeringen. Door KI HADJAR DEWANTORO (lid van de "Dewan Pertimbangan Agung") is inmiddels aan de Sultan van DJOKJA een voorstel ingediend om zo spoedig mogelijk na terugkeer van de Republikeinse regering in DJOKJA, een groot nationaal congres bijeen te roepen, ter bijwoning waarvan alle Indonesische prominenten zullen worden uitgenodigd, om de omzetting van een "Indonesia Serikat" tot een "Negara Kesatuan" te bespreken. Tijdens dit congres zal tevens de Sultan van DJOKJA, die ook voor de Federalisten een acceptabele figuur is, worden voorgedragen voor President van Indonesie.

Ook ten opzichte van de toekomstige betrekkingen met Nederland nemen SJAFRUDDIN c.s. een ander standpunt in dan SUKARNO en HATTA. Mede in verband met het "gentlemen agreement" COCHRAN-HATTA (zie dzz. ZG rapport No. 70) blijft de groep SUKARNO/HATTA, gesteund door o.a. St. SJAHIR, ALI SASTROAMIDJOJO, MOH. RUM en SUMARTO, zich verzetten tegen een Unie-verband met Nederland; wel wenst zij een bilateraal verdrag te sluiten, voorzover een verdrag met de U.S.A. niet in e.e.a. kan voorzien.

SJAFRUDDIN c.s. zijn ervan doordrongen dat Indonesie op velerlei gebied nog niet geheel op zichzelf zal kunnen staan. Voor de opbouw verkiezen zij echter Nederlandse steun boven een innig samengaan met Amerika; derhalve voelen zij meer voor een Unie-verband met Nederland, dan voor verdragen met de Verenigde Staten.

P.D.R. 2 Mei 1949 (Agno. 2925/ADOC.Geh.)

De overkomst van HATTA naar BATAVIA wordt in republikeinse kringen voornamelijk in verband gebracht met het feit, dat zowel het merendeel van de leden der republikeinse delegatie als de overige republikeinse prominenten te BATAVIA meer en meer overhellen naar de mening, dat een overeenkomst volgens "Nederlands schema" de meest geslaagde uitweg is.

Zowel de noodregering als de verzetsleiding hebben SUKARNO en de overige op BANGKA verblijvende prominenten kunnen overtuigen, niet alleen dat het aangaan van een overeenkomst met de volledige Canadese ruling als basis het persoonlijk prestige van de republikeinse leiders op BANGKA teniet zal doen, maar ook dat de herstelde republikeinse regering in DJOCJA op een volledige tegenwerking van de verzetsleiding kan rekenen. HATTA'S taak was dus in de eerste plaats, de republikeinse delegatie te overtuigen van de precaire toestand en haar te weerhouden van het aangaan van een overeenkomst, gebaseerd op de uitvoering van de complete Canadese ruling.

- In de tweede plaats wilde HATTA persoonlijk contact opnemen met de UNCI en de voorzitter van de Nederlandse delegatie, teneinde ten pogen langs deze weg het gevaar te bezweren en een voor de noodregering en de verzetsleiding acceptabele overeenkomst te bewerkstelligen.

Het door MOH. NATSIR uitgegeven communique van 25 April jl, dat zeer zeker met voorkennis en medeweten van de republikeinse delegatieleden is gepubliceerd, ziet men eveneens als een poging tot beïnvloeding in genoemde richting.

De komst van de Sultan van DJOKJA op verzoek van BANGKA had tot doel, de republikeinse delegatie ervan te overtuigen, dat de terugkeer van de republikeinse regering naar DJOKJA van urgent en primair belang is, terwijl de overige punten van de ruling op de tweede plaats komen, zodat dus een eventuele overeenkomst beperkt dient te worden tot de "terugkeer naar DJOCJA".

In republikeinse kringen is men algemeen van mening, dat noch de BANGKA-groep noch de Sultan van DJOKJA over voldoende macht beschikken om de strijd over de gehele linie te doen staken. De werkelijke macht berust bij de centrale verzetsleiding, die zeer sterk onder invloed staat van de Partai Murba, de PKI en andere linkse groeperingen, welke juist in het geheel niet geneigd zijn de vijandelijkheden te beëindigen, voordat alle Nederlandse militairen het republikeinse territorium hebben verlaten.

Bovendien gelooft men, dat een overeenkomst, waarbij de republikeinse bevoegdheden tot een Daerah DJOKJA beperkt blijven, het republikeinse prestige in het buitenland ten eerste zal schaden, daar een dergelijke overeenkomst niet na te leven zal zijn en bovendien TAN MALAKKA c.s. ten goede zal komen.

Omtrent de terugtrekking van de Nederlandse strijdkrachten verschillen de republikeinen en de republikeins georiënteerde federalisten van mening. De republikeinen wensen een zo spoedig mogelijke ontruiming van het

gehele territorium, terwijl de federalisten een vaksgewijze ontruiming en vanging door de TNI om praktische redenen beter uitvoerbaar achten. Over de opbouw van de federale strijdkrachten wenst men eerst te spreken na de algehele soevereiniteitsoverdracht, waarbij men bereid is buitenlandse adviseurs in dienst te nemen, doch zeker niet van zins is de medewerking van Generaal SPOOR en zijn directe staf te aanvaarden.

De republikeinen zijn dan ook van mening, dat gezien de vele complicaties, welke zich voordoen, de besprekingen op een dood spoor zullen geraken, aangezien de Nederlanders hun standpunt handhaven.

P.D.R. 7 Mei 1949 (Agno. 3020/ADOC.Geh.)

In een telegram, gericht aan alle stations, verzoekt SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA het regeringsstandpunt van de noodregering van de Republiek Indonesia t.a.v. de huidige besprekingen op zo ruim mogelijke schaal te publiceren. SJAFRUDDIN wijst er in de eerste plaats op, dat reeds eerder regeringsverklaringen t.a.v. deze kwestie worden afgelegd. Hij meent er echter goed aan te doen op het ogenblik, nu de besprekingen in een zo ver gevorderd stadium verkeren, dat beslissingen zullen worden genomen, nogmaals het standpunt van de regering duidelijk naar voren te brengen.

1. De terugkeer van de regering SUKARNO-HATTA naar DJOCJA dient in overeenstemming met de Veiligheidsraadresolutie van 28 Jan. 1949 onvoorwaardelijk te geschieden. Het aannemen van de voorwaarden, welke de Nederlanders t.a.v. deze terugkeer stellen, zou een rechtvaardiging van de Nederlandse agressie betekenen.
2. De noodregering van de Republiek Indonesia is alleen dan bereid mede te werken aan de effectuering van de order "staakt het vuren", indien de TNI niet van haar respectievelijke locaties behoeft te worden teruggetrokken. De noodregering is van mening, dat slechts overeenstemming kan worden bereikt, indien de terugkeer van de regering SUKARNO HATTA naar DJOCJA, vergezeld gaat van een erkenning door de Nederlanders van het republikeins gebied, omvattende geheel JAVA, SUMATRA en de eilanden er om heen, overeenkomstig de LINGGARDJATI-overeenkomst. Uiteraard dienen de Nederlandse troepen ineens, dan wel bij gedeelten, en op een vastgestelde datum geheel uit het republikeins gebied te worden teruggetrokken.
3. Indien de Nederlanders aan beide bovengenoemde punten hebben voldaan, heeft de noodregering van de Republiek Indonesia geen bezwaar tegen deelname aan de Ronde Tafel Conferentie op een tijdstip en voorwaarde, waarover nader besprekingen zullen worden gevoerd tussen de regering SUKARNO-HATTA en de Nederlandse regering.

In republikeinse kringen acht men de nieuwe richtlijnen, waarmee MOH. RUM van BANGKA terugkeerde, een bewijs, dat de republikeinse leiding ingaat op COCHRAN's advies betreffende een "schijnovereenkomst". COCH-

RAN adviseerde nl. de Canadese ruling in haar geheel te accepteren en dan na terugkeer in DJOCJA nadere besprekingen te voeren over de twee volgende punten van de Canadese ruling.

Deze nieuwe richtlijnen zijn uitgegeven met instemming van de noodregering en de centrale verzetsleiding.

Men acht het duidelijk, dat het "staakt het vuren" noch het deelnemen aan de Ronde Tafel Conferentie kan geschieden, alvorens de Republiek haar grondgebied van 18 Dec. 1948 heeft teruggekregen. De voorlopige instelling van een DJOCJA-sector onder republikeins bestuur heeft naar hun mening het voordeel, dat de republikeinse regering in DJOCJA terug is, terwijl de verzetsleiding er dan voor moet zorgen, dat het een en ander zich ontwikkelt volgens de republikeinse ideeën.

P.D.R. 11 Mei 1949 (Agnó. 3239/ADOC.Geh.)

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA richtte zich in een telegram dd. 9 Mei tot :

1. de leden van de Noodregering op JAVA;
2. "Gen." SUDIRMAN;
3. "Kol." SIMATUPANG;
4. Cdt. Terr. Troepen SUMATRA (A2).

Naar aanleiding van de voorlopige overeenkomst, die tussen de Republikeinse en de Nederlandse delegatie is gesloten, verzoekt SJAFRUDDIN bovengenoemde personen hun meningen en eventuele suggesties bij hem in te dienen.

P.D.R. 17 Mei 1949 (Agnó. 3241/ADOC.Geh.)

Gebaseerd op het statement van de noodregering, dat een overeenkomst alleen mogelijk is, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- A. de Nederlandse troepen moeten worden teruggetrokken uit het republikeinse gebied (zoals bepaald in de LINGGARDJATI-overeenkomst); de weer-macht van de Republiek Indonesia blijft in de gebieden, waar zij zich thans bevindt,
- B. onvoorwaardelijke terugkeer van de republikeinse regering naar DJOCJA;
- C. erkenning van de republikeinse souvereiniteit over JAVA, MADURA en SUMATRA;

leverde een militair woordvoerder van de Militaire Gouvernement ATJEH zijn critiek op de op 7 Mei te BATAVIA gesloten overeenkomst.

In het telegram, gericht aan de voorzitter van de noodregering, het Cdo JAVA, het Cdo SUMATRA en de Militaire Gouverneurs op SUMATRA, zegt deze woordvoerder o.m. het volgende :

1. De besprekingen worden inmiddels voortgezet voor het vormen van een "cease fire" commissie, hetgeen in strijd is met punt A van het statement.
2. Om een terugkeer van de republikeinse regering naar DJOCJA te verkrijgen, heeft de Republiek zich bereid verklaard deel te nemen aan de Ronde Tafel Conferentie, wat dus in strijd is met een onvoorwaardelijke terugkeer.
3. Uit de verklaring, dat de Nederlanders geen federale besturen zullen instellen in de ex-republikeinse gebieden, kan de conclusie worden getrokken, dat deze gebieden niet teruggegeven zullen worden, hetgeen dus geen volledige erkenning is van de republikeinse souvereiniteit over JAVA, MADURA en SUMATRA.

Noot DCMI : Uit de structuur van het telegram kan worden opgemaakt, dat dit bericht nog meerdere punten bevatte, die evenwel wegens dzz onvolledige ontvangst niet kunnen worden vermeld.

P.D.R. 18 Mei 1949 (Agno. 3263/ADOC.Geh.)

De drijfveer van het streven van de oppositiegroep SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA c.s., waarvan in dzz Politiek Dagrapport No. 34 dd. 17/5 '49 onder pt 1 melding werd gemaakt, is niet alleen de overtuiging, dat SUKARNO en HATTA voornamelijk streven naar behoud van hun eigen positie en daarbij het belang van staat en volk op het tweede plan stellen, doch ook de overtuiging, dat een voortzetting van het regiem SUKARNO-HATTA niet allen de groei van het communisme in de hand zal werken, maar mogelijk dit zelfs zal steunen. De oppositiegroep beschuldigt SUKARNO en HATTA er van, zelf communisten te zijn, in ieder geval zeer zeker sterk met het communisme te sympathiseren.

Volgens hen moet het optreden van het SUKARNO-regiem tegen MUSO, AMIR SJARIFUDDIN en aanhang tijdens de September-opstand niet zo zeer worden gezien als een poging het communisme te bestrijden, dan wel als een poging, die figuren te elimineren, die een gevaar betekenden voor de positie van SUKARNO en HATTA.

Dit zou verklaren waarom HATTA tijdens de communistische onlusten meermalen heeft uitgelaten, "nimmer het communisme als ideologie te willen bestrijden". (*Noot DCMI* : Indertijd in uitlatingen van HATTA tegenover de pers bevestigd.)

De oppositiegroep wijst er verder op, dat SUKARNO sympathie koestert voor TAN MALAKKA, hetgeen blijkt uit het feit, dat SUKARNO TAN MALAKKA mandaten en financiën verstrekke, teneinde de strijd tegen de Nederlanders te kunnen voortzetten, indien SUKARNO en HATTA door een hernieuwde militaire actie zouden worden uitgeschakeld. (*Noot DCMI* : TAN MALAKKA beweert inderdaad een dergelijk mandaat te hebben gekregen. Ook in het bekende politiek testament van SUKARNO en HATTA wordt TAN MALAKKA als eerste genoemd)

In republikeinse kringen wekte de verklaring van MOH. RUM, dat zelfs de communisten instemden met de terugkeer van de Republiek onder SUKARNO, dan ook geen verwondering. De oppositiegroep ziet hierin wederom een bevestiging van haar opinie ten aanzien van de verhouding tussen SUKARNO-HATTA en het communisme.

D.R.S.I. 23 Mei 1949. Geh. Agno. 3373/AO.

De Secretaris van de noodregering op Sumatra gaf een telegrafische bekendmaking uit dd. 19 Mei 1949, waarin hij de taakverdeling der leden der noodregering op Sumatra vermeldde.

In een algemene zitting op 16 Mei 1949 werd door de noodregering besloten, dat alle aangelegenheden, op Sumatra betrekking hebbende, zouden worden afgehandeld door de leden te Sumatra, waarbij naast hun taak de Competentie komt om de taak van een ander minister uit te oefenen buiten Sumatra.

E.e.a. volgens het volgende schema.

1. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, voorzitter Min. van Defensie en Voorlichting, vertegenwoordigt de Minister van Buitenl. Zaken.
2. Mr. TENKU HASAN, Minister van Onderwijs, Opvoeding en Cultuur, vertegenwoordigt de minister van Binnenlandse Zaken en die van Godsdienst.
3. Mr. St. MOHAMAD RASJID, Minister van Arbeid en Sociale Zaken, vertegenwoordigt de Minister van Opbouw en Jeugdzaken en behandelt eveneens de aangelegenheden betreffende de veiligheid.
4. Mr. LUKMAN HAKIM, Minister van Financien, vertegenwoordigt de Minister van Justitie.
5. Ir. SITOMPUL, Minister van Publieke Werken, vertegenwoordigt de minister van Gezondheid.
6. Mr. INDRATJAJA, Minister van Verbindingen, vertegenwoordigt de minister van Welvaart.

Toen de regering van de republiek de onvermijdelijkheid van een nieuw conflict na het afbreken van de onderhandelingen in December 1948, inzag, werden in het besef van de niet te voorkomen bezetting van het republikeins grondgebied besloten een regering in ballingschap op te richten en een verzetsleiding in het leven te roepen, die de guerilla moest leiden.

Het was de bedoeling dat Soekarno en een aantal ministers zich naar India zou begeven om daar de actie op internationaal gebied tegen de Nederlanders voort te zetten. Doordat het vliegtuig, dat Soekarno c.s. moest ophalen te laat aankwam, slaagde deze opzet niet.

a. De strijd van de republiek zal worden voortgezet op basis van de guerilla-krijg en worden uitgevoerd door de T.N.I en andere organisaties (350.000 man), het geheel onder leiding van de communist Tan Malakka, die daartoe wordt terzijde gestaan door een aantal T.N.I. hoofdofficieren, tien Jap. officieren, vijf Indiase officieren, drie Chinese communisten-leiders en verschillende partijleiders (Sukiman, Ali Budiardjo, Ukar, Sutomo, en de communisten D.N. Aidit, Chaerul Saleh, Wikana, Sudero en Ibu Perna).

b. Ter bestrijding van de kosten werd Tan Malakka een bedrag van Fl. 1.025.000 Ned. Crt. in Jav. Bankbiljetten en gouden staven ter hand gesteld.

c. De guerilla-strijders zouden de strijd minstens drie jaar moeten volhouden.

d. Propaganda om de bevolking aan te zetten tot voortzetting van de strijd, zal worden gevoerd.

e. Dr. Sudarsono, vertegenwoordiger en gevolmachtigd Minister van de Rep. Indonesia in India, werd gemachtigd namens de Republiek een politieke overeenkomst te sluiten in geval Ir. Soekarno hiertoe niet in de gelegenheid zou zijn.

Op 20 December maakte de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Centrale Regering vanuit Tawang Manggoe bekend, dat bij ontstentenis van de President en de vice-President de leiding van het Centrale Bestuur zou worden overgedragen aan drie ministers, nl.:

de Min. v. Binnenlandse Zaken	: Dr. Soekiman
de Min. v. Justitie	: Mr. Soesanto Tirtoprodjo
de Min. van Verbindingen	: Djoenda

Voorts werd bekend gemaakt, dat in verband met de huidige situatie tot genoemde overdracht werd overgegaan.

Uit een verhoor van de gearresteerde ex-rep. burgemeester van Solo bleek, dat de bedoeling was het bestuur van de republiek in handen van Sukiman, Susanto Tirtoprodjo (Min.v. Justitie) en Djuanda, Min.v. Verbindingen te leggen, nadat Soekarno met de meeste ministers naar India zou zijn uitgeweken. Door de plotselinge inzet van de politionele actie mislukte dit plan.

Sukiman, Susanto en Kasimo (Minister van Jeugdzaken) waren in Solo. Zij besloten overeenkomstig de oorspronkelijke plannen tot vorming van zgn. Pemeruntak Daerah over te gaan, waarin ook zouden worden opgenomen de Soesoehoenan en de Mangkoenegara als z.g. "Menteri negara". Dit besluit werd op 20 December genomen.

De eerste kabinetszitting, welke in de nacht van 20 op 21 December zou worden gehouden, ging echter niet door i.v.m. de nadering van Ned. troepenh.

Op 22 December werd bekend gemaakt, dat in verband met het feit, dat de verbindingen met Java zijn verbroken, op Sumatra tijdelijk een "nood-Centrale Regering" van de Republiek wordt ingesteld, die het volledige gezag naar binnen en naar buiten uitoefent voor de tijd, dat de regering Soekarno-Hatta niet in staat is haar plichten te vervullen.

De regering zal bestaan uit :

Mr. Sjafroeddin, Prawiranegara, voorz.

Mr. Tengkoë M. Hassan

Ir. Indratjaja

Mr. Soetan Moh. Rasjid

Ir. Mr. Sitompoel

Op 23 - 12 - '48 Seinde deze Noodregering Republiek Indonesia aan alle stations en aan de delegatie van de Republiek bij de UNO, dat zij bereid is haar troepen de order te geven het vuren te staken en wederom met de Nederlanders in onderhandeling te treden op de volgende voorwaarden.:

1. Allereerst dienen de leden van de Rep. regering, die door de Nederlanders zijn gearresteerd, in vrijheid te worden gesteld.
 2. Het Ned. Leger, dat vanaf 19 December het rep. gebied is binnengevallen, dient te worden teruggetrokken naar zijn oorspronkelijke posities.
 3. Een onvoorwaardelijke de facto en de jure erkenning van de Republiek Indonesia als een staat, die Java en Sumatra omvat.
 4. De spoedige vorming van een onafhankelijke en soevereine Indonesische staat, alle eilanden van Indonesia (voormalig Nederlands-Indie) omvattend, door de Indonesiërs zelf en op democratische grondslag, zonder inmenging van de Nederlanders.
 5. De zo spoedig mogelijke terugtrekking van het Nederlandse leger uit geheel Indonesia met de bepaling, dat op het moment waarop een vrije en onafhankelijke Indonesische staat zal zijn gevormd, het Nederlandse leger niet meer in Indonesia aanwezig is.
- De Nederlandse economische belangen zullen naar behoren worden behandeld.

Voorts verzoekt de Voorzitter van de Noodregering Republiek Indonesia d.d. 23. - 2. '48 het Kabinet van de Republiek Indonesia op Java mede te delen, welke leden van het Kabinet nog in goede welstand verkeren en welke maatregelen zijn genomen. Op dezelfde datum richtte de voorzitter van de

Noodregering, op Sumatra zich tot het Indonesische volk, waarbij, teneinde verwarring en misverstand te voorkomen, aan alle militairen van de weermacht van de zgn. Republiek Indonesia bekend werd gemaakt, dat het vuren slechts mag worden gestaakt, indien het bevel hiertoe wordt uitgevaardigd door de Voorzitter van de zgn. Noodregering.

Op 27 - 12 - '48 werd het volgende radiogram onderschept : Van Soedirman

Aan Mr. Soedarsono India

Gelieve in India onverwijld een regering te vormen.

Afs. aan Mr. Sjafroedin.

Dagrapport S.I. 1 - 1 - '49.

Op 28 December 1948 nam Kol. Hidajat, naar in een dagorder bekend werd gemaakt, het commando van alle "Republikeinse strijdkrachten" op zich, waarbij de troepen de opdracht kregen de strijd voort te zetten en het vuren niet te staken alvorens is voldaan aan de voorwaarden, welke de noodregering op 23 December stelde.

D.R.S.I. 16 - 1 - '49 radiografische mededeling van de Rep. Prov.Reg.Oost-Java aan Noodregering van de rep. Indonesia op Sumatra 14 - 1 - 49 luidende : "Hierbij doe ik U toekomen het besluit van de Ministerraad tijdens de zitting van 19 - 12 '48, luidende als volgt :

1. Zolang de President en de Vice-President verhinderd zijn hun functies uit te oefenen, wordt de leiding van de Centrale Regering overgedragen aan 3 ministers, n.l. die van Binnenlandse Zaken, Justitie en Verbindingen.
2. De Minister van Binnenlandse Zaken bevindt zich buiten het gewest Jogja, evenals de Minister van Voedselvoorziening en de Minister van Opbouw en Jeugdzaken.
3. Bovengenoemde twee ministers zullen alles in het werk stellen opdat de regering steeds zal kunnen functioneren.

D.R.S.I. 12 - 1 - '49

Tekst van de boodschap v.d. Voorz. van de Noodregering aan de rep. vertegenwoordiger bij de UNO :

"On December 26th 1948 the provisional government of the republik of Indonesia sends a telegram to the committee of good offices as follows :
"pro committee of good Offices Djakarta. We cannot regard our president, vice-president and others by the Dutch captured Indonesian authorities as rightfully liberated as long as they are not handed over in safe order to the Indonesian provisional government by the Dutch authorities c.q. by the agency of your committee. The humiliation inflicted upon our nation cannot be washed out by a more physical liberation of our beloved national leaders. You can come into contact with us through alle India radio."

Op 10 Januari maakte de Voorzitter aan het buitenland bekend, dat de Rep. Regering wel genegen was de "cease fire" order van de Veiligheidsraad op te volgen, zulks als voorbereiding voor het hervatten van de besprekingen met de Nederlanders onder auspiciën en supervisie van de Veiligheidsraad.

Zij geeft echter de voorkeur aan een interventie van de Aziatische conferentie te New-Delhi, aangezien de Veiligheidsraad haars inziens niet bij machte is gebleken de koloniale agressie van de Nederlanders tegen te gaan.

D.R.S.I. 21 - 12 - '49. Gehagno. 454/AO 20.

Maramis door Noodregering op 19.1.'49 tot Min.v.Buitenl. Zaken benoemd.

D.R.S.I. 26 - 1 - '49. Gehagno. 612/AO 20.

Op 24 Januari zond de noodregering (Sjafroeddin) het bericht aan Nehru d.t.k. van Maramis, dat zij had kennisgenomen van de inhoud van de resolutie, aangenomen op de Aziatische conferentie, waarbij aansluitend het volgende commentaar, waarschijnlijk door Sjafroeddin, werd gegeven.

"Het besluit is echter naar mijn bescheiden mening nog niet in overeenstemming met onze verlangens, in het bijzonder, omdat daarin de jure-erkenning van de republiek niet is opgenomen, die juist van essentieel belang is, aangezien zij ten volle garandeert, dat de Nederlanders de republiek niet meer zullen aanvallen en geen reden meer zullen hebben om aan te voeren, dat het geschil tussen Nederland en de republiek een binnenlandse aangelegenheid zou zijn. Doch daar ik ervan overtuigd ben, dat de Aziatische landen, welke die besluiten hebben genomen, ook in den vervolge volledige steun zullen verlenen, teneinde de vorming te garanderen van een onafh. en soeverein Indonesia, uiterlijk op 1 Januari 1950, neem ik ook uit solidariteitsgevoel met de aan de conferentie deelnemende landen, die resolutie met volledig verantwoordelijkheidsbesef aan.

"Het is van belang, dat ik nog een punt naar voren breng, n.l. de teruggave van de republikeinse gebieden en het wederom doen functioneren van de Regering. In die gebieden zullen zeer grote tekortkomingen worden geconstateerd, v.n. op het gebied der financiën, verbindingen en economie in het algemeen, hetgeen een gevolg is van de Nederlandse actie en welke tekortkomingen moeilijk te boven zijn te komen, indien wij geen steun ontvangen van onze hevriende staten."

Voorts werd dank betuigd aan de Regering van India en de andere aan de conferentie deelnemende regeringen voor de bewezen diensten en de hoop uitgesproken, dat de besluiten van de Aziatische conferentie, die met algemene stemmen zijn genomen, ook door de Veiligheidsraad aangenomen zullen worden, want, indien de voorwaarden in de resolutie van de Veiligheidsraad minder gunstig zijn dan die in deze besluiten, kunnen zij zeer zeker door ons moeilijk geaccepteerd worden.



D.R.S.I. 27 - 1 - '49. Gehagno. 633/AO.

Op 25 Januari zond Sjafruddin aan Maramis het verzoek de aandacht van de C.G.D. voop. Sumatra te vestigen, opdat militaire waarnemers derwaarts zullen worden gedirigeerd. De veiligheid van de mil. waarnemers wordt v.w.b. republikeins gebied gewaarborgd Voorts werd Maramis verzocht de C.G.D. in te lichten omtrent de moeilijkheden, welke een evt. staken van de guerilla-krijg in zekere gebieden met zich zal medebrengen, zulks t.g.v. het niet functioneren van het gezagsapparaat, hetgeen zou zijn veroorzaakt door de Nederlandse agressie.

D.R.S.I. 28 - 1 - '49. Gehagno. 675/AO.

Sjafruddin gaf telegram v/d Wnd. Chef Staf Weermacht op Java, Kol. Simatupang betreffende het onvermogen van de Ned. troepen omarmde situatie in de grote steden meester te worden en het bestuur goed te doen functioneren aan Mr. Maramis door.

D.R.S.I. 2 - 2 - '49. Gehagno. 771/AO.

Op 31 Januari gaf Sjafroeddin, voorzitter van de z.g. noodregering, een dagorder uit, waarin werd aangegeven, dat het vuren slechts mag worden gestaakt en opdracht van de Opperbevelhebber (Hidajat ?), die terzake overleg zal plegen met de z.g. noodregering. Zolang deze order nog niet is gegeven, dient de strijd met de meeste kracht te worden voortgezet.

Op 1/2 deed de z.g. noodregering door bemiddeling van Soedarsono aan haar minister van Buitenlandse Zaken, Maramis, het volgende bericht toekomen :

31 Jan. 1949. "According decision provisional government Republic Indonesia cease fire order can only be issued by President in quality supreme commander after conference between at least president, vice president and provisional government."

Voorts zond de Voorz. van de Noodregering op 31 Jan. aan versch. hoge rep. autoriteiten het bericht :

"Ik heb in mijn instructies aan de Republikeinse vertegenwoordiger bij de U.N.O. reeds te kennen gegeven, dat de resolutie van de Veiligheidsraad moeilijk aanvaard kan worden, wanneer de inhoud daarvan minder verstrekkend zou zijn als de resolutie van de Aziatische conferentie. Mijn houding hangt af van mijn besprekingen met de President en de Vice-President. Intensiveert de strijd."

D.R.S.I. 9 - 2 - 1949. Gehagno. 1013/AO.

Op 5 Februari zond "Kol." Hidajat "Opperbevelhebber der rep. weermacht", de militaire gouverneurs van Atjeh en Zd.-Sumatra het volgende bericht :

"In verband met de uitnodiging, welke de noodregering tot de C.G.D. heeft gericht, om een bezoek te brengen aan het onder ons gezag staande gebied

deel ik U mede, dat zulks uitsluitend is gebaseerd op de politiek van ons land en niets heeft uit te staan met defensie-vraagstukken. U gelieve hiermede rekening te houden en de bevolking toe te staan met de C.G.D. in contact te komen."

Op 6 Februari gaf de voorlichtingsdienst van de zgn. Noodregering een communiqué uit, waarin o.a. de volgende zinsnede voorkwam :

Teneinde alle twijfel weg te nemen, is het nodig te verklaren, dat de Noodregering van de republiek Indonesia de resolutie van de Veiligheidsraad, welke lang zo ver niet gaat als die van de Asia-conferentie, niet kan aanvaarden.

In een telegram van omstreeks 6 Februari, vermoedelijk bestemd voor New-Delhi, verzoekt de zgn. Noodregering d.t.k.v. Palar, dan wel van een andere ex-Republikeinse vertegenwoordiger in het buitenland, aan Soekarno en Hatta te seinen, dat zij, voordat zij een ontmoeting hebben gehad met de zgn. "Noodregering" geen formele of informele onderhandelingen moeten voeren met de Neds. Of B.F.O.

D.R.S.I. 12 - 2 - '49. Gehagno. 1029/AO.

D.d. 6 Februari 1949 werd een uitzending v.d. Voorlichtingsdienst der Noodregering opgevangen, waarin werd betoogd, dat het Indon. volk reeds voldoende bittere ervaring over de houding en handelingen der Nederlanders heeft opgedaan.

Wij behoeven geen nieuwe mislukking af te wachten. In een (ongunstige?) situatie is het voor ons moeilijk om later weer verzet te plegen tegen de Ned. agressie. Het is beter, dat wij de huidige strijd voortzetten tot de Neds. aan onze eisen willen voldoen. De Noodregering wacht eerst nog op een gelegenheid om tenminste de President en Vice-President te spreken, alvorens over te gaan een definitieve houding vast te stellen.

D.R.S.I. 13 - 2 - '49. Gehagno. 1042/AO.

De Voorlichtingsdienst van de Noodregering berichtte dd. 11-2-'49, dat de UNO-Commissie voor Indonesie aan de Ned. en Rep. Indonesia een ultimatum zou hebben gesteld van 4 dagen, waarin beide partijen alsnog tot een overeenkomst moesten komen, zoals de Veiligheidsraad had voorgesteld in de laatste resolutie. Wanneer dit bericht waar zou zijn, werd verder gemeld, dan is het nodig, dat van republikeinse zijde wordt verklaard, dat deze verdraging niet aan de Rep. regering is te wijten.

Hoevel de noodregering volledige bevoegdheid heeft gekregen het bewind te voeren, waagt zij het niet enige maatregel te treffen, voordat overleg is gepleegd met Soekarno en Hatta.

D.R.S.I. 19 - 2 - '49. Gehagno. 1224/AO.

De Voorzitter v.d. Noodregering wendde zich op 16.2.'49 tot het militaire bestuur in Midden-Java met het verzoek en wel nota van te willen

nemen, dat de Noodregering in Sumatra als de enige voorlopige centrale regering met een vaste positie in het buitenland moet worden beschouwd.

Deze Regering oefent, zowel naar binnen als naar buiten, het volle gezag uit in Indonesia en zal dit doen totdat er zekerheid is, dat de regering Sukarno-Hatta weer haar taak zal kunnen verrichten.

Naar aanleiding hiervan leek het hem wenselijk, dat de huidige Centrale Regering op Java in de vorm van een Commissariaat der Noodregering wordt samengesteld en niet als een soort Nood-kabinet, waarvan sprake was.

D.R.S.I. 21 - 2 - '49. Gehagno. 1251/AO.

N.a.v. het vorige bericht met de uiteenzetting van Mr. Safroeddin over de positie der "Noodregering" in Sumatra is thans door Minister Kasimo toegegeven, dat in kabinetszitting van 16 Dec. 1948 het besluit werd genomen tot de vorming van een Noodregering op Sumatra o.l.v. Mr. Sjafruddin. De vijf achtergebleven ministers op Java beschouwen zich slechts als een deel van de Centrale Regering op Sumatra.

D.R.S.I. 22 - 2 - '49. Gehagno. 1353/AO.

De Voorlichtingsdienst der Noodregering op Sumatra gaf het volgend commentaar o/h plan Beel :

Door het aannemen van de resolutie der Veiligheidsraad werd de Ned. Regering tenslotte gedwongen om - of zij wilde of niethaar standpunt te bepalen. Op zeer duidelijke wijze werd toen de resolutie van de Veiligheidsraad verworpen, doch, om zich van alle gevolgen van dien te vrijwaren, werd nu een Ned. plan naar voren gebracht, n.l. het z.g. plan Beel, dat zo op het oog veel ruimer en meer aanvaardbaar zou zijn voor het Indonesische volk, dan de oplossing door de Veiligheidsraad voorgestaan.

De gedachtegang der Neds. is hierbij geweest, dat de Veiligheidsraad dit plan Beel nu wel zal aanvaarden en haar eigen resolutie van 28.1.'49 wederom zal intrèkken.

Inderdaad wanneer men dit Ned. plan, dat de souvereiniteit aan het Indonesische volk op 1 Mei 1949 wil overdragen, oppervlakkig zou bekijken - dit zou dus 1 jaar eerder geschieden dan door de Veiligheidsraad was bepaald - zou men tot de conclusie komen, dat hier sprake is van een radicale politieke koersverandering, welke echter van de Ned. regering niet kan worden vermoed.

Wij zijn er dan ook niet verbaasd over dat, toen de Vice-President van het B.F.O. dit z.g. plan Beel ter inzage kreeg, op informele wijze hij dit een bedrog der wereldopinie noemde.

De opmerking wordt gemaakt door S.I. v.d. Gen. Staf dat de Waspada van 14.2.'49 een bericht publiceerde waarin werd gezegd, dat de Rep. Noodregering op Sumatra de resolutie van de Veiligheidsraad van 28.1.'49 had afgewezen (zie bericht D.R.S.I. van 9.2.'49).

D.R.S.I. 28 - 2 - '49. Gehagno. 1416/AO.

Mr. Sjafruddin, vz. noodregering maakte op 25-2-'49 zijn standpunt m.b.t. het zgn. plan-Beel wereldkundig.

Teneinde niet de indruk te wekken, dat de Republiek niet bereid zou zijn met de Neds. In onderhandelingen te treden, begon hij met een korte recapitulatie van de feiten, welke zich sinds 1945 hebben voorgedaan, waarbij in het bijzonder Linggadjati en Renvilleovereenkomst werden aangehaald.

Voorts werden de Neds. ervan beschuldigd, de tweede pol. actie te hebben ingezet op het ogenblik, dat de Rep. en juist in was geslaagd de Moeso-
opstand te onderdrukken.

Na nogmaals er op gewezen te hebben, dat de Republiek genegen is met de Neds. te onderhandelen, werden de volgende eisen gesteld, waaraan eerst moest worden voldaan :

- a. Volledige rehabilitatie van de Republiek, bestaande uit :
 - 1e. de vrijlating van de gevangen genomen rep. prominenten.
 - 2e. de teruggave van de rep. gebieden, die gewapender hand de Republiek werden ontnomen, ondanks de Linggadjati- en Renville-overeenkomsten.
- b. de erkenning van de Republiek, d.w.z. dat de T.N.I. erkend moet worden en dat de Ned. troepen uit Rep. grondgebied moeten worden teruggetrokken.

Overigens deelde Sjafruddin mede, de order "staakt het vuren" eerst te kunnen geven, indien aan de voorwaarden onder a ad. 1 en 2 was voldaan.

D.R.S.I. 1 - 3 - '49. Gehagno. 1433/AO.

Als officiële reactie op de Ned. regeringsverklaring, betrekking hebbende op het plan Beel, deelde Sjafruddin, voorzitter Noodregering op Sumatra mede, dat het reeds ingenomen standpunt werd gehandhaafd.

Alvorens met de Neds. te onderhandelen, werden de reeds eerder vermelde eisen gehandhaafd t.w. :

- a. Erkenning Rep. door Neds., overeenkomstig de Linggadjati-overeenk.
- b. Terugtrekking van het Ned. leger van het gehele voormalige Rep. territor.

Dit standpunt werd wereldkundig gemaakt, waarbij de Rep. Weermacht werd aangezet de strijd niet allen voort te zetten, doch ook te intensiveren.

D.R.S.I. 3 - 3 - '49. Gehagno. 1494/AO.

Hidajat heeft aan alle Cdt. der strijdkrachten bericht, dat er geen lokale onderhandelingen mogen worden gehouden en dat de order staakt het vuren slechts mag worden opgevolgd, indien deze afkomstig is van de Opperbevelhebber.



D.R.S.I. 7 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 1561/AO.

Van de zijde van het Commissariaat van de noodregering op JAVA kwamen reacties op het plan-BEEL met de vervroegde soevereiniteitsoverdracht en het houden van een Ronde Tafel Conferentie.

Met het telegram van Mr. ROEM, waarbij de Ned. voorstellen met nadruk werden afgewezen, werd volledig ingestemd.

De woordvoerder van het Commissariaat en de militaire woordvoerder, ex-Gen.Maj. SOEHARDJO, deelden mede, dat met het plan-BEEL de Neds de resolutie van de Veiligheidsraad hadden afgewezen.

Er werd op laangedrongen, dat de noodregering van SUMATRA de Veiligheidsraad zou verzoeken, een speciale zitting aan onderwerpelijke aangelegenheid te besteden.

Het tweede punt was, de landen van de Pan-Aziatische conferentie om steun te vragen, waarbij het toepassen van economische en diplomatieke sancties werd gesuggereerd.

De mil. woordvoerder, SOEHARDJO, deelde mede, dat een Ronde Tafel Conferentie met deelname van SOEKARNO c.s. van nul en gener waarde was, zolang SOEKARNO c.s. geen ruggespraak kon houden met het Kabinet en het KNIP, waar toe herstel van het Rep. gezag te DJOKJA een eerste vereiste is.

Tot slot waarschuwde hij de Rep. leiding en de federalisten zich niet te laten misbruiken voor het uitoefenen van pressie op de Rep. weermacht.

SOEHARDJO gaf de wenk bij eventuele besprekingen met de Neds, aandacht te schenken aan de mening van de hoogste weermachtsleiding, aangezien deze leiding in het huidige stadium van de onafhankelijkheidsstrijd het heft in handen heeft.

Geven de Neds uitvoering aan hun plannen door o.m. de Ronde Tafel Conferentie te houden zonder SOEKARNO c.s., dan zal de strijd met de wapens tot het bittere einde worden voortgezet, aldus SOEHARDJO

D.R.S.I. 9 Maart 1949, 10.00 uur. — Geh.ag. 1650/AO.

dd. 7 Maart jlr deed Minister KASIMO via ex-stn GADING, de voorzitter van de Rep. noodregering weten, dat de samenstelling van het Commissariaat met Kol. SIMATUPANG is besproken. Voorgesteld werd dit als volgt uit te voeren ;

1. Het Kommissariaat Pusat Pemerintah Djawa, afgekort KPPD, wordt ingesteld bij besluit van de noodregering van de Republiek Indonesia, die de taak en verplichtingen van het Commissariaat bepaalt en het e.e.a. hieromtrent naar buiten en naar binnen bekend maakt.
2. De ministers tot leden ervan te benoemen, t.w. Dr. SUKIMAN (Voorzitter), KASIMO, Mr. SUSANTO TIRTOPRODJO, SUPENO en MASKUR. Het commissariaat kan plaatsvervangers voor zijn leden, die voor een tijdje op reis moeten gaan a.a., benoemen. Zolang Dr. SUKIMAN op reis is, is R.P. SUROSO zijn plaatsvervanger.

3. De Cdt Terr Troepen JAVA is adviserend lid van de KPPD.
4. De KPPD voert het algemeen bestuur op JAVA en MADURA met de speciale taak dit opnieuw te organiseren (?) en om alle krachten en bronnen aan te wenden t.b.v. de strijd.
De KPPD is verantwoording schuldig aan de Noodregering van de Republiek Indonesia. De KPPD geeft in alle aangelegenheden advies aan de Noodregering van de Republiek Indonesia en deze noodregering zal bij het nemen van belangrijke besluiten de KPPD om advies vragen.
5. De Legercommandant in zijn kwaliteit van Opperbevelhebber van de strijdkrachten in de gehele Republiek, is adviserend lid van de noodregering van de Republiek Indonesia.

D.R.S.I. 9 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 1650/AO.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, voorzitter van de Rep. Noodregering op SUMATRA, maakte dd. 8 Maart jl. via de Mob. zender van de Noodregering bekend, dat volgens haar zienswijze, de Ronde Tafel Conferentie gebaseerd moet zijn op de volgende grondslagen :

1. de vorming van een voorlopige Federale Regering, uiterlijk op Juli 1949, en waarvan de vertegenwoordiging bestaat uit 50% van de Republiek, 40% van de andere deelstaten en 10% van de minoriteits' groepen.
2. aan die Voorlopige Federale Regering moeten de Neds de souvereiniteit overdragen ;
3. voor de vorming van het federale leger moet de TNI op verzoek van de Voorlopige Federale Regering voor de rust en orde in het gebied van de Republiek Indonesia zorgen.
In de andere gebieden moet het Ned. leger de rust en orde bewaren;
4. ten behoeve van de samenstelling van de constituanten moet de Voorlopige Federale Regering met spoed algemene verkiezingen doen houden, zulks onder toezicht van de Commissie van de Verenigde Naties ; Die constituanten moet dan de grondwet samenstellen en een definitieve Federale Regering kiezen ;
5. het Ned. leger zal in zijn geheel uit INDONESIA moeten worden teruggetrokken op een datum, welke gezamenlijk zal worden vastgesteld door de Federale Regering, de Ned. Regering en de Commissie van de Verenigde Naties ;
6. hierna wordt het statuut van de Unie Indonesia-Nederland vastgesteld en bekrachtigd door het Parlement van INDONESIA en NEDERLAND.

D.R.S.I. 16 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 1880/AO.

Op 14 Maart zond de voorzitter der "Noodregering" op SUMATRA een uitgebreid telegram aan het "Commissariaat der Rep. Indonesia" op Java, waarin zij een voorstel deed de huidige samenstelling van de "noodregering"



der Rep. Indonesia te wijzigen een aan te vullen met de ministers, die thans nog hun taak op JAVA vervullen, en die dan ook als leden worden opgenomen in dit college.

E.e.a. wordt dan als volgt gedacht :

- | | |
|---------------------------------|---|
| Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA | - Voorzitter Defensie en Voorlichting ; |
| Mr. A.A. MARAMIS | - Buitenlandse Zaken ; |
| Dr. SUKIMAN | - Binnenlandse Zaken en Gezondheid ; |
| Mr. LUKMAN HAKIM | - Financien ; |
| I. KASIMO | - Welvaart, incl. Volksvoedselvoorziening ; |
| Mr. SUSANTO TIRTO PRODJO MASKUR | - Justitie ; |
| Mr. TEUNKOE MOHAMAD HASAN | - Eredienst ; |
| Ir. INDRATJAJA | - Onderwijs, Opvoeding en Cultuur ; |
| Ir. SITOMPUL | - Verbindingswerken ; |
| Mr. ST. MOH. RASJID | - Publieke Werken ; |
| SUPENO | - Arbeid en Sociale Zaken ; |
| | - Opbouw en Jeugdzaken. |

Het Ministerie van Volksvoedselvoorziening wordt opgeheven een aangelegenheden hierover worden behandeld door het Ministerie van Welvaart.

De hieruit voortvloeiende werkzaamheden der leden op JAVA en SUMATRA worden als volgt gedacht :

- a. Alle aangelegenheden, betrekking hebbende op (") algemeen ("), in het bijzonder het (") buitenlands politiek beleid (") worden gemeenschappelijk in (") onderling overleg (") tussen de leden op JAVA en SUMATRA afgehandeld (uitgezonderd in dringende omstandigheden, waarbij door de leden op SUMATRA zelf een beslissing kan worden genomen).
- b. Alle aangelegenheden, betrekking hebbende op JAVA, worden afgehandeld door de leden, die zich op JAVA bevinden en die naast hun respectieve taken ook de aangelegenheden moeten behandelen, welke behoren tot de werkzaamheden van een der leden van de noodregering der Republiek Indonesia op SUMATRA. Omgekeerd worden alle aangelegenheden, betrekking hebbende op SUMATRA, door de leden, die zich op SUMATRA bevinden, afgehandeld en welke leden, naast hun respectieve taken, ook de aangelegenheden moeten behandelen, welke behoren tot de werkzaamheden van een der leden van de noodregering der Republiek Indonesia op JAVA.
- c. De leden op JAVA vormen ook een commissariaat van de noodregering der Republiek INDONESIA, welk commissariaat in kwesties van algemene aard een beslissing kan nemen, doch zich in het bijzonder bezig zal houden met aangelegenheden, welke op JAVA betrekking hebben.

Aan de andere kant kunnen de leden op SUMATRA een beslissing nemen in kwesties van algemene aard en zullen zij zich in het bijzonder bezig houden met kwesties, die op SUMATRA betrekking hebben. Het e.e.a. op SUMATRA wordt echter geen commissariaat genoemd.

Als adviseur op JAVA voor de KPPD worden gedacht de Cdt Terr.Trpn JAVA en de Legeredt, op SUMATRA zal Kol. HIDAJAT, Cdt.Terr.Tpn.

De positie van SJAFRUDDIN zelf zal bij het accoord gaan met deze regeling aanmerkelijk verstevigd worden en in belangrijkheid toenemen.

D.R.S.I. 18 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 1926/AO.

Volgens een goed geïnformeerd Indon. intellectueel heeft in de hoogste Rep. regeringskringen en ernstig verschil van mening plaats gehad naar aanleiding van het voornemen van MARAMIS om in NEW DELHI een "regering in ballingschap" te vormen.

- Deze regering zou hem (MARAMIS) als president hebben en verder bestaan uit SUDARSONO, PALAR, UTOYO en SUBANDRIO. MOH. HATTA wenste echter de noodregering op SUMATRA te handhaven. (Ongevalueerd).

D.R.S.I. 21 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 2072/AO.

Omstreeks 19 Febr. j.l. werden te DJOCJA aangetroffen een bekendmaking en een instructie "NON-COOPERATIE" van Kol. A.H. NASUTION.

In de bekendmaking (dd 17. Jan. 1949) deelde NASUTION - zich aanduidend als Bevelhebber Commando II (JAVA en MADURA) - mede, dat HATTA op 19 Dec. 1948 het bevel had gegeven de strijd onder alle omstandigheden voort te zetten. Voorts gaf hij te kennen, dat op JAVA - conform de resolutie van de Kabinetvergadering dd 13 Dec. 1948 - een vertegenwoordigend lichaam van de Centrale Regering in het leven was geroepen, en dat SUDIRMAN de opperleiding van de weermacht in handen had.

De bekendmaking besloot met de mededeling, dat NASUTION, als Bevelhebber van Commando II dd 20 Dec. 1948 voor geheel JAVA en MADURA een militair bestuur had ingesteld, geleid door 4 mil. Gouverneurs. Men was doende, aldus NASUTION, een militair civiel bestuur in te stellen. Er bestond contact tussen de Centrale Regering en alle mil. Gouverneurs, voorts ook met SUMATRA. Daarom wekte NASUTION alle rep. instanties op, op haar post te blijven en de strijd voort te zetten.

De instructie "NON-COOPERATIE" (dd 5 Jan. 1949) had Kol. NASUTION gebaseerd op bovengenoemde order van de vice-President om de strijd onder alle omstandigheden voort te zetten. Zij behelsde, dat alle bij de vijand in dienst zijnde landsdienaren en dessa-beambten zich dienden te melden bij het mil bestuur van de Rep. Indonesia, dat sedert 22 Dec. 1948 voor geheel JAVA weer in het leven as geroepen.



Alle nog bij de vijand in dienst blijvende Indon. staatsburgers dienden als oorlogsmisdadigers te worden beschouwd, en moesten als zodanig volgens de mil. krijgswetten worden berecht.

De uit deze instructie voortvloeiende maatregelen dienden door de mil. Gouverneurs, de mil. Commando's, de KDM's en de KODM's te worden getroffen, zulks in samenwerking met de troepen-Cdtn en civiele autoriteiten.

De instructie besloot met de aantekening, dat het voor een beter verloop van de strijd noodzakelijk was een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen patriot en verrader. Ieder KDM diende de namen van de verraders in zijn gebied te noteren en door te zenden.

D.R.S.I. 28 Maart 1949, 10.00 uur — Geh.ag. 2111/AO.

In een uitzending dd 23 Maart (26 Maart via stn AURI ex-SOLO verzonden) gaf SUDIRMAN de Noodregering te kennen, dat politiek en defensie z.i. niet mogen worden gescheiden. Hij protesteerde derhalve tegen de bekendmaking van de Noodregering, dat het vuren slechts mocht worden gestaakt op bevel van SUKARNO, na overleg met de Noodregering.

Hij noemde dit onpractisch en vreesde in geval van toepassing van deze clause voor het "prestige" van de Noodregering.

" Ik acht het nodig mede te delen, dat er op JAVA reeds veel stemmen opgaan, zich niet te onderwerpen aan bevelen van personen, die zich in gevangenschap bij of onder controle van de Neds bevinden", aldus SUDIRMAN.

Over een ev. "staakt het vuren" moet volgens SUDIRMAN worden macht, SUKARNO (mits in vrijheid) en zo mogelijk van enige leden van het Werkcomite KNIP.

De oude werkwijze, waarbij de legerleiding geheel buiten politieke besprekingen werd gehouden, heeft bitter lijden veroorzaakt. De Neds konden ons zodoende nl. overrompelen. Geen strijder kan dit ooit vergeten.

Tussen Noodregering en legerleiding moet voortaan eenheid van inzicht, voornemen, houding en handelen bestaan.

Omdat Kol. NASUTION het te druk heeft stelde SUDIRMAN voor Gen. Maj. SUHARDJO (die op Java vertoeft) zitting te doen nemen in de Regering van het Commissariaat op JAVA. SUHARDJO is momenteel belast met de organisatie van de volksdefensie en de coördinatie tussen civiele en militaire autoriteiten en de bevolking.

Tenslotte drong SUDIRMAN er bij de Noodregering op aan, het contact met de legerleiding op JAVA en met het buitenland te intensiveren en het volgende "Weermachts-communique" wereldkundig te maken :

" De strijd en de tegenstand op JAVA worden dagelijks meer geordend en heviger en het gehele volk geeft zijn volle medewerking aan onze troepen omdat zij beseffen, dat zij, hoe dan ook niet bereid zijn "gekoloniseerd of nogmaals onderdrukt te worden".

D.R.S.I. 30 Maart 1949, 10.00 uur. — Geh.ag. 2167/AO.

Dd. 28 Maart zond de Noodregering (via haar mobiele zender) aan MARAMIS, PALAR en SUDARSONO haar standpunt t.a.v. de Canadese resolutie, dat hier verkort wordt weergegeven :

De Noodregering heeft in wezen weinig vertrouwen in het nut van de bedoelde onderhandelingen. De Nederlanders hebben immers herhaaldelijk verklaard, niet bereid te zijn de Rep. autoriteiten in vrijheid te stellen conform de resolutie van 28 Januari jl. Niettemin heeft de Noodregering geen bezwaar tegen de onderhandelingen, welke gevoerd zullen worden door de zich op BANGKA bevindende Rep. leiders.

Evenwel op de volgende minimum-voorwaarden :

- a. Rep. Regering moet teruggebracht worden naar DJOKJA, hetgeen impliceert : erkenning van haar grondbeginselen en gezag over geheel JAVA, SUMATRA en de omliggende eilanden, conform LINGGADJATI ;
- b. Dit betekent, dat de TNI-troepen, die thans over geheel JAVA, SUMATRA en de omliggende eilanden verspreid zijn, niet zullen worden teruggetrokken totdat een Indon. Federale Regering is gevormd.

Kan de Nederlandse Regering deze voorwaarden niet aanvaarden, dan is het uitgesloten, dat de besprekingen bevredigende resultaten zullen afwerpen.

Zondra de Rep. Regering en de leiding van haar Weermacht in DJOKJA terug zijn, kan het "ophouden met vuren" gemakkelijk worden uitgevoerd.

Het aanvaarden van beide genoemde voorwaarden zal de deelname van de Republiek aan de Ronde Tafel Conferentie vergemakkelijken.

De Noodregering is ervan overtuigd, dat de Republiek bij aanvaarding van genoemde voorwaarden, ook "een woordje kan spreken" met de leden van de BFO. Al hebben de Nederlanders het zo voorgesteld, als zou er een kloof bestaan tussen de Republiek en de BFO, in feite ligt deze tussen de Nederlanders en de Indonesiers.

P.D.R. No. 18 dd. 27 - 4 - '49. Gehagno. 2802.

In antwoord op bovenstaande uiteenzetting van Sudirman deelde de voorz. van de noodregering aan Sudirman d.d. 15 April het volgende mede :

Politieke en militaire kwesties staan (inderdaad in nauw) verband met elkaar. Maar naar mijn meening is het niet juist, indien de Legercommandant een "beslissende stem" heeft in de kwesties, waarbij de politieke houding moet worden bepaald. Dit is in strijd met het "systeem democrasi", waarbij de regering verplicht is verantwoording af te leggen aan het volksvertegenwoordigend lichaam (werkcomite van het KNIP). Maar natuurlijk moet in belangrijke politieke kwesties steeds.

Rapport D.C.M.I. afd. VIII dd. 15.5.'49.

Van Mr. S. Prawiranegara aan alle stations.

De Noodregering over de voorlopige overeenkomst.

In verband met de voorlopige van Royen-Rum overeenkomst, die op 7 Mei '49 te Djakarta werd gesloten, maakt de Noodregering na in voltallige zitting en tezamen met de Chefs der Staven van de Land-Zee-en Luchtmacht bijeen te zijn geweest en waarbij deze overeenkomst werd besproken, het volgende bekend :

Alvorens overeenstemming is bereikt en nadere gegevens zijn ontvangen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de instructie aan leiders op Bangka, gedateerd 27 Maart en luidende :

1. De terugkeer van de Rep. regering naar Jogja dient in te houden, dat de Nederlanders het gezag van de Republikeinse regering over geheel Java, Sumatra en de omliggende eilanden in beginsel erkennen, zoals zij dat bij de Linggadjati-overeenkomst reeds hebben erkend.
2. De in punt 1 bedoelde erkenning betekent, dat de T.N.I. troepen die thans over geheel Java, Sumatra en over de omliggende eilanden zijn verspreid, niet van hun respectievelijke standplaatsen zullen worden teruggetrokken, voor de Federale Regering van Indonesie is ingesteld, " is de Noodregering nog niet in staat haar standpunt ten opzichte van deze voorlopige overeenkomst vast te stellen, alvorens zij hieromtrent voldoende inlichtingen heeft ontvangen van de President en de Vice-President.

Om diezelfde redenen kan de Noodregering, zolang deze inlichtingen haar nog niet zijn verstrekt, het gezag nog niet aan de regering Sukarno-Hatta teruggeven, ook al zouden de leden van die regering reeds in Jogja bijeen zijn. Tenslotte zal de teruggave van de door de regering Sukarno-Hatta aan de Noodregering verleende bevoegdheden eerst geschieden, nadat de Noodregering ervan overtuigd is, dat de regering Sukarno-Hatta inderdaad vrij is en bevrijd van Nederlandse druk en bedreiging haar taak weer kan verrichten.

Dit telegram is in tegenspraak met op 15 Mei door Aneta verstrekt bulletin van U.P. van 14 Mei, dat luidde : "de voorzitter rep. delegatie Rum heeft bekend gemaakt, dat hij via New-Delhi telegrammen ontving van Sjafruddin, hoofd van rep. Noodregering, die zich achter de te Batavia bereikte overeenkomst stelde, aldus U.P. corresp. te Batavia. Sjafruddin gaf Sultan Jogja opdracht bestuur Jogja over te nemen, wanneer Neds. terugtrekken. Rum zeide voorts, dat Moh. partijleiders eveneens volledige steun hebben toegezegd en dat de comm. partij niet tegen herstel van rep. is. Dit vergroot kansen op uitvoering van overeenkomst, m.b.t. staakt vuren, aldus Rum.

P.D.R. 13 - 5 - '49. Gehagno. 3227/ADOC.

Naar aanleiding van een verzoek van de Noodregering aan militaire en civiele gezaghebbers, verkondigde A.K. Gani o.m. de mening (A 2).

- 1e. dat men hoofdzakelijk moest vertrouwen in eigen kracht.
- 2e. dat de samenstelling v.d. noodregering niet bevredigend was, aangezien volksleiders er geen deel vanuit maakten.

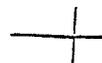
- 3e. voor het sluiten van een nieuwe wapenstilstandsovereenkomst en een nieuw politiek accord dient vooraf overleg te worden gepleegd met de civiele en militaire verantwoordelijke leiders uit elk gewest afzonderlijk.
- 4e. wapenstilstandsovereenkomst zal alleen worden aanvaard, indien die wordt gebaseerd op de huidige status-quo. Dit zal het verlies met zich brengen van enkele grotere plaatsen en de verbindingswegen, welke deze plaatsen verbinden, doch daartegenover staat het voordeel dat geen demarcatielijnen meer gelden en de Nederlandse gebieden slechts pockets vormen in het door de republiek verenigde gebied.
- 5e. een politiek accord zal worden aanvaard, indien dit de vorming van een onafh. en soevereine Negara Republik Indonesia Serikat inhoudt, waarvan de republiek Indonesia een lid vormt.
- 6e. de oorlogstoestand zal eindigen eerst nadat de Negara Republik Indonesia Serikat tot stand is gekomen en het machtsapparaat van de Republik Indonesia aan haar is overgedragen.
- 7e. de oorlogstoestand dient te worden gehandhaafd gedurende de politieke onderhandelingen, want de guerillastrijd bij deze onderhandelingen is ons machtigste wapen.

In een telegram aan Maramis van de Voorz. van de Noodregering zegt deze laatste, dat zelfs indien overeenstemming wordt bereikt tussen de regering van de republiek Indonesia en de Nederlandse regering, zulks ter voldoening van de resolutie van de V.R. van 28 - 1 - '49 en het besluit v.d. V.R. van 23 - 3 - '49, dit niet het wantrouwen van de Indonesiers t.a.v. de Ned. bedoeling kan wegnemen. Ook de verklaring van Dr. v. Royen, dat de Ned. regering de voorlopig bereikte overeenkomst in afwachting van de goedkeuring van de noodregering op eerlijke wijze ten uitvoer zal leggen, zal dit wantrouwen, ontstaan door de bittere ervaringen sinds de 16e eeuw, * niet verminderen.

Sjafruddin verzoekt dan erbij de UNO op aan te dringen de geeigende stappen te nemen, die de Nederlanders uitdrukkelijk verplichten hun beloften na te komen, n.l. het onvoorwaardelijk en ten volle overdragen van de soevereiniteit aan de Indonesiers. Als richtsnoer hiervoor ware het bekende standpunt van de Noodregering van de republiek in te nemen.

Door C.M.I. werd geen enkel intercept opgevangen, dat bericht bevestigt, noch wordt door bovenaangehaald telegram van Noodregering ook maar enige grond van waarheid gegeven aan mededelingen Rum. Bovendien wijst houding Mil. Leiders op Sumatra in het geheel niet op medewerking uitvoering overeenkomst, aangezien Hidajat, Mil. Gouverneur West-Sumatra, op 14 dezer seinde om op 17 dezer op alle fronten offensief tegen vijand in te zetten, ten-einde de politiek van onze regering te versterken. Hij beval alle Cmdt. en sub-cmdt. op 17 Mei gelijktijdig aan te vallen.

* Maksudnya sejak kedatangan kapal-kapal dagang Belanda yang pertama di Nusantara (red).



Er kan op gewezen, dat Noodregering en T.N.I. op Sumatra meer en meer overhellen naar extreem standpunt van verzetsleiding Java onder Tan Malakka, dat staakt het vuren eerst opgevolgd kan worden na terugtrekking Ned. troepen uit geheel Java en Sumatra.

RAPPORTEN VAN AFDELING VIII - ddo. 17 Mei 1949, 16.00 uur.

Van : Voorzitter van de Noodregering der Republiek INDONESIA.

Aan : Alle Stations.

Weerlegging van het bericht, als zou de Noodregering van de Republiek Indonesia haar goedkeuring hebben gehecht aan de VAN ROYEN-ROEM-overeenkomst.

Door de Nederlandse radio-omroep in DJAKARTA werd gisteren een bericht gepubliceerd - welk bericht ook door de buitenlandse radio-stations overgenomen werd - over de verklaring van de Voorzitter van de Delegatie der Republiek INDONESIA, Mr MOHD RUM, aan de pers te DJAKARTA, luidende, dat de voorzitter van de Noodregering der Republiek INDONESIA zijn goedkeuring heeft gehecht aan de overeenkomst, gesloten op 7 Mei 1949 tussen de Delegatie van de Republiek INDONESIA en de Nederlandse Delegatie te DJAKARTA en welke overeenkomst bekend staat onder de naam VAN ROYEN - RUM - overeenkomst.

Mits deze wordt met nadruk verklaard, dat het bericht niet op waarheid berust. De Noodregering van de Republiek INDONESIA heeft tot dusver haar standpunt ten opzichte van die VAN ROYEN - RUM - overeenkomst nog niet bepaald en is nu in afwachting van uitvoerige en volledige inlichtingen van de President en de Vice-President zulks om haar standpunt te bepalen.

SUMATRA, 16 - 5 - '49.

(16 - 5 - 21.30) Ontv. 16 - 5 - 22.05.

Politiek dagrapport No. 38 dd. 21 Mei 1949,
Gehagno. 3331/ADOC

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de voorlichtingsdienst KOTARADJA aan de noodregering om inlichtingen inzake haar standpunt ten aanzien van de Van ROYEN-RUM-verklaringen, antwoordde de voorzitter van de noodregering op 19 Mei j.l. (A2), dat de noodregering van de Republiek Indonesia zich nog niet kon uitspreken over haar standpunt ten opzichte van de voorlopige Van ROYEN-RUM-overeenkomst; derhalve hield zij zich nog steeds aan het oorspronkelijke standpunt, dat reeds meerdere malen op duidelijke wijze werd gepubliceerd.

-uo
juist
gezonden, onder verwijzing naar telegram no. 80 van I.amping. Vgl.no.267
2 Onder dit nummer had Stikker op 26 december aan Batavia geseind :
"Gezien de resolutie van de Veiligheidsraad (vgl. no. 253 noot 1) is het
van groot belang, dat wij volledig en juist zijn ingelicht omtrent de ver-
blijfplaats, de gezondheidstoestand en de beperkingen van bewegings-
vrijheid van Soekarno en andere politieke leiders, die thans geïnterneerd
zijn."

312 1 Codetelegram. No Delegatie 329. Archief B.Z.912.10 Indon. Nederl.
onderhandelingen

souvereiniteitsoverdracht, deel 23. Dit telegram was mede bestemd voor
Stikker. In zijn op 23 december onder no. 502 naar Den Haag geseinde
situatierapport over de periode 22 dec. 12.00 uur tot 23 dec. 12.00 uur
had Beel o.a.

gemeld : "Zogenaamde noodregering op Sumatra ingesteld bestaande uit
Sjafroedin Prawiranegara, Tengko Hassan, Ir. Indratjaja, Moh. Rasjid,
Ir. Sitompoel". A.R.A., archief Minog, codetelegrammen 1948, 7. Voorts
had de C.M.I. op 24 december onder no. 392 o.a. het volgende naar Den
Haag geseind : "De Voorzitter van de Noodregering, *Mr. Sjafroedin
Prawiranegara*, seinde via Station *Bengkoelen* op 23 December aan alle
stations en ter beroeping door iedere zender van de Republiek :

"Instructie voor de Delegatie van de Republiek Indonesia bij de UNO.
Te seinen via *New Delhi, Singapore* of *Bangkok*, In verband met de
pogingen van de UNO om bevelen te doen geven voor het ophouden van
het vuren, deelt de Republikeinse Regering hieronder haar standpunt
mede : De Republikeinse Regering is bereid bevel te geven voor het
ophouden van vuren en zij is voorts bereid met de Nederlanders te onder-
handelen op de volgende voorwaarden :

1. Allereerst dienen de leden van de Republikeinse Regering, die door
de Nederlanders zijn gearresteerd, in vrijheid te worden gesteld.
2. Het Nederlandse leger, dat vanaf 19 December het Republikeinse
gebied is binnengevallen, dient teruggetrokken te worden naar de oor-
spronkelijke positie.
3. Een onvoorwaardelijke de facto en de jure erkenning (unconditional
recognition de facto and de jure) van de Republiek Indonesie als een
staat die *Java* en *Sumatra* omvat.
4. De spoedige vorming van een onafhankelijke en soevereine Indonesis-
che staat, alle eilanden van Indonesie (het voormalige Nederlands Indie)
onvattend, door de Indonesiers zelf en op democratische grondslag,
zonder inmenging van de Nederlanders (constituante).
5. De zo spoedig mogelijke terugtrekking van het Nederlandse leger uit
de onafhankelijke Indonesische staat, tot dat het Nederlandse leger niet
meer in Indonesie aanwezig is.

De Nederlandse economische belangen zullen meer behoren behartigd
worden." Vgl. ook no. 211 neet en zie no. noot.

2 Sjafroedin Prawiranegara.



- 313 1. Archief B.Z.999.224 Indon. kwestie in de Veiligheidsraad, deel 10.
2. Vgl. Y. nos 366 en 398.
3. Vgl. nos 286 en 289.
4. No 301.

11-
11-
5. De zitting van de Veiligheidsraad van 28 December ving aan om 16.00 uur. Het verslag daarvan is geregistreerd als S/PV 394. Ook in U.M.B.Z. no. 19 pp. 62-74. De tekst van de daar aangenomen gescendeerde Chinese resolutie betreffende het vrijlaten der politieke gevangenen, welke is aangenomen met 8 stemmen voor en 3 onthoudingen (Belgie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), luidde: "The Security Council, listing that the Netherlands Government had not so far released the President of the Republic of Indonesia and all other political prisoners, as required by the Resolution of 24 December 1948; Calls upon the Netherlands Government to set free these political prisoners forthwith and report to the Security Council within 24 hours of the adaption of the present Resolution". Doc. B/1164. De op 27 December door de vertegenwoordiger van Columbia ingediende resolutie betreffende de consulaire commissie, werd aangenomen met 9 stemmen voor en 2 onthoudingen (de oekreine en de Sovjet Unie). Zij luidde: "The Security Council Requests the Consular Representatives in Batavia referred to in Paragraph 5 of the Resolution adapted on 25 August 1947 at the 194th meeting of the Council to send as soon as possible for the information and guidance of the Security Council a complete report on the situation in the Republic of Indonesia, covering in such report the observance of the cease-fire orders and the conditions prevailing in areas under military occupation or free which armed forces now in occupation may be withdrawn". Doc. 5/1165. Ook in U.M.B.Z. no. 19, pp. 73 en 74. Zie no. 314 e.v.

- 314 1. Codetelegram No. 78 173. Archief B.Z.999.224 Indon. kwestie in de Veiligheidsraad, deel 10. Vgl. nos 302, 303 en 313.
2. Zie no. 315.
3. Op 29 December seinde deer onder no.ZG 93: "Tan vervolge op mijn telefoongesprek van 28 dezer en mijn telegram ZG 90 (hier no. 309) moge ik nogmaals met de meeste nadruk vermelding van de datum 31 December ontraden. De operatie Djambi is door de weersomstandigheden reeds uitgesteld, terwijl in verband met zware brugvernielingen zeker niet de garantie kan wonder gegeven, dat Benkoelen avant 1 Januari is bereikt. Bovendien is bezetting van Telokbetong avant 31 December uitgesloten. Het is illussif dergelijke centre geruisloos te bezetten." Vgl. ook no. 305.
4. No. 291.
5. Zie no. 331.

315. 1. Codetelegram. No. ZG 174. Archief B.Z.999.224 leder. 691n163blz.22.
Ook dit tracht ik te torpederen. De couranten zijn vandaag rustiger, de
KLM ondervindt geen last.
2. Muhammad Zafrullah Khan.
3. Telegram niet aangetroffen. Zie de N.R.C., 24 December 1948.
4. Zie no. 332 a.

- 234, 1. Codetelegram. No. D 69. Archief B.Z. 912. 10 Indon.
Nederl. onderhandelingen soevereiniteitsoverdracht, deel 23.
2. No. 214.
3. No. 192.
4. No. 194.
5. No. 199.

- 235 1. Codetelegram. No. ZG 167. A.R.A., archief Minog, codetelegrammen
1948, 4.
2. No. 209.
3. Vgl. No. 215 noot 22.
4. Vgl. No. 219.
5. Op 24 December seinde Sassen onder no. ZG 169 aan Beel: "Ter
aanvulling van mijn ZG 167 vestig ik nog de aandacht op de verklaring
van van Roijen "nu wij tot deze moeilijke beslissing zijn gekomen is
mijn land vast besloten haar uit te voeren, welke de kosten of de
consequenties ook zijn mogen". Voorts wijs ik U op het Reuterinter-
view van Drees (zie o.a. de N.R.C. van 27 December), hetwelk U naar
ik aanneem reeds bekend is.

- 236 1. Codetelegram. No. 726. Archief B.Z. 912. 10 Indon.
Nederl. onderhandelingen soevereiniteitsoverdracht, deel 23. Dit
telegram was mede bestemd voor de H.V.K.
2. Vgl. No. 220 en zie No. 242.
3. op 24 December seinde Sassen onder no. ZG 168 aan Beel : "Ik verzoek
U mij Uw advies te doen toekomen over de uitvoerbaarheid van de in
Stikker 726 vervatte suggestie, waarbij ik aantekenen dat dit mij eerst
na verzending bekend werd. In verband met het genoemde standput,
dat Sumatra niemandsland zou zijn, vestig ik de aandacht op het uit
Singapore afkomstige Reuterbericht van 24 dezer, dat op Sumatra een
voorlopig Republikeins bewind zou zijn gevestigd, waarover ik zo
spoedig mogelijk gaarne ten spoedigste nadere mededelingen zou
ontvangen". Zie no. 314.

- 237 1. Codetelegram. No. 142. Archief B.Z. 912. 10 Indon.
Nederl. onderhandelingen soevereiniteitsoverdracht, deel 23. Van dit
telegram werd onder de resp. nos 723, 896 en D 50 copie gezonden aan
Batavia, Washington en van Roijen Parijs.



3.

TERJEMAHAN ARSIP BELANDA TENTANG PDRI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI BELANDA
BAGIAN PERHUBUNGAN

's Gravenhage, 27/1/1949

Ref. No. 1568

Kepada

F.C.

Menteri Luar Negeri

BATAVIA

Menurut penyadapan berita yang tertangkap, Pemerintah Darurat RI sehubungan dengan resolusi Konferensi New Delhi, telah mengetok kawat kepada Nehru sebagai berikut :

"Resolusi itu belum sesuai dengan keinginan kita, khususnya karena di dalamnya tidak tercantum pengakuan 'de jure' kepada RI. (Pengakuan de jure ini kami pandang sangat penting, dengan demikian menganggap telah ada jaminan, bahwa Belanda tidak akan lagi menyerang RI, dan tidak akan ada alasan lagi untuk mengatakan perselisihan antara Negeri Belanda dan RI adalah urusan dalam negeri). Tetapi saya cenderung beranggapan keputusan, seperti negara-negara Asia, yang menyetujui resolusi itu juga dalam kelanjutan bantuan penuh yang akan diberikan untuk menjamin pembentukan negara RI yang merdeka dan berdaulat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950 dan juga dengan rasa setiakawan dengan negara-negara yang ikut serta dalam konferensi, saya menerima resolusi dengan kesadaran serta bertanggung jawab penuh".

Hal ini penting, untuk menekankan pada pengembalian daerah-daerah RI dan pemerintahan RI dapat berfungsi lagi. Dalam daerah-daerah yang dimaksud akan diperkirakan adanya kekurangan besar, terlebih-lebih dalam bidang keuangan, komunikasi, ekonomi, hal mana yang disebabkan oleh aksi Belanda, padahal kekurangan-kekurangan tadi sulit teratasi, apabila kita tidak menerima bantuan dari negara-negara sahabat. Dengan ini Pemerintah Darurat RI atas nama rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah India yang telah memberikan bantuan dan juga kepada pemerintah-an lain, yang telah menghadiri Konferensi New Delhi. Resolusi itu yang di-terima dengan suara terbanyak akan juga diterima oleh V.R.*) karena apabila syarat-syarat dalam resolusi dari V.R. akan kurang menguntungkan daripada yang tercantum pada Resolusi Asia, hal mana pasti sukar untuk kita terima.

*) V.R. = Veiligheidsraad = Dewan Keamanan PBB

RESIDENT, KETUA PEMERINTAHAN SEMENTARA DARI
SUMATERA BARAT (VAN STRATEN) KEPADA WAKIL TERTINGGI
DARI KERAJAAN BELANDA (BEEL), 28 DESEMBER 1948

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Yang Mulia suatu ikhtisar/pandangan dari peristiwa-peristiwa selama seminggu yang lalu. Operasi militer telah ditujukan secara sesingkat-singkatnya untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan pusat teroris, dengan menduduki Pusat Fort de Kock dan Padangpanjang. Ada tiga jalan untuk mencapai tempat-tempat ini (melalui Pariaman—Maninjau melalui Loeboek Along—Kaloë Tanam dan melalui Loeboek Salasih—Solok).

Melihat pada peta dapat diketahui bagaimana dekatnya Bukit Barisan dengan pantai, dengan mendadak ada perubahan tebing yang sangat tegak mulai dari daerah Padang ke daerah pegunungan.

Jalan masuk melalui jalan Sobang (Solok), celah-celah Anai (Padangpanjang dan jalan Matur—Maninjau), pintu jalan tadi merupakan jalan sempit, berbelok-belok, terjal dan dengan sedikit pendudukan dengan mudah dapat dipertahankan. "

Mempertimbangkan TNI ternyata akan mengharapkan berdasarkan berita-berita yang diperoleh, bahwa kemungkinan serangan melalui jalan pintas/lembah Anai, dan selanjutnya dapat mengadakan konsolidasi bala bantuan dan kesatuan, pimpinan militer menghadapi aksi pertama terhadap Subangpas (Solok) dengan serbuan kedua ke jurusan lembah Anai.

Pada hari D mudah sekali dikuasai melalui udara dua jembatan penting di jalan Solok—Padangpanjang ditepi danau Singkarak, dan pendudukan itu akhirnya dapat dengan singkat dapat dibebaskan dari isolasi.

Walaupun rintangan dan pengrusakan beberapa jembatan kecil pada jalan Soebang, hal mana memperlambat gerakan pasukan, namun sasaran-sasaran dan juga kota Kecamatan Solok dalam waktu yang telah ditentukan dapat tercapai.

Kontak senjata yang sebenarnya tidak pernah terjadi, dengan demikian setelah jalan Soebang sekali telah dilalui, maka pendudukan di Solok (Senin), Padangpanjang (Selasa), Fort de Kock (Rabu), dan Pajacombo (Kamis) dapat dilaksanakan dengan cepat, apalagi TNI tidak berusaha membuat rintangan-rintangan di pedalaman, dalam pada itu mereka menghindari setiap pertempuran terbuka.

.....
D. Gubernur Militer Sumatera Selatan mengirim berita pada tanggal 31 Desember kepada seluruh stasiun pemancar c.q. Pemerintah India di New Delhi : "Karena rakyat sudah mengambil keputusan untuk mempertahankan kemerdekaannya, politik bumi hangus telah dilaksanakan secara besar-besaran, untuk dapat menggunakan kekuatan rakyat 100% menghadapi musuh".

E. Kolonel Hidayat mengumumkan pada tanggal 31 Desember perintah harian (militer) sebagai berikut: "Dengan dikeluarkannya perintah harian ini, maka seluruh pimpinan Angkatan Bersenjata RI untuk sementara di tangan kami. Dengan begitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara tetap memerangi orang-orang Belanda. Menunjuk kepada dasar-dasar kekuatan APRI (Angkatan Perang RI) dan semboyan Indonesia Merdeka, harus memberi perlawanan secara menyeluruh dengan mengadakan politik bumi hangus dan perang gerilya. Tanpa henti-hentinya harus diadakan serangan-serangan di mana terdapat orang-orang Belanda. *Perlawanan tidak akan dihentikan, selama syarat-syarat yang telah diumumkan pada tanggal 23 Desember oleh pusat Pemerintah Darurat RI, yang juga merupakan instruksi untuk delegasi RI di UNO.* (Garis bawah oleh penulis).

PEJABAT KETUA DELEGASI PERUNDINGAN BELANDA (ELINK SCHUURMAN) KEPADA MENTERI URUSAN NEGERI SEBERANG (SASSEN), 28 DESEMBER 1948.

Dalam sebuah berita yang tersadap, ternyata ketua Pemerintah Darurat RI pada tanggal 23 Desember melalui siaran radio Pekanbaru menyampaikan berita bagi seluruh rakyat Indonesia melalui semua stasiun radio sebagai berikut: "Untuk menghindari kekacauan dan kesalahpahaman maka kepada seluruh anggota APRI diumumkan bahwa 'Gencatan senjata' hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Pemerintahan Darurat".

Pasukan teroris tidak menjadi korban dalam pertempuran, dan dalam gerakan maju yang cepat dan dengan pendudukan yang segera dari beberapa tempat, hal itu janganlah menjadi kesimpulan yang tergesa-gesa mengenai adanya perbaikan ketertiban dan keamanan. Kita tidak hanya bersiap-siap untuk menghadapi penembak gelap dalam TNI, tetapi juga untuk dapat menghadapi gerakan teror perorangan dari gerombolan yang dengan semboyan cinta tanah air, akan memeras dan menindas rakyat untuk mencari/memenuhi diri sendiri akan makanan dan perawatan.

Selama beberapa hari setelah gerakan selesai, hal itu menjadi jelas: gerakan melingkar yang tiba-tiba membuat seluruh gerombolan bersenjata melarikan diri, akan tetapi setelah 24 jam dilaporkan adanya penembak gelap dan mulai saat itu gerakan mereka makin berani.

Daerah berbukit adalah cocok untuk gerakan gerilya, dan bantuan yang cepat dari Brigade "U" dengan pasukan pembersihan sangat diperlukan, tidak saja untuk keamanan jalan konvoi, tetapi juga untuk melindungi rakyat.

Tidak saja terjadi tekanan terhadap pemberian makanan kepada gerombolan yang dimaksud, akan tetapi juga setiap usaha untuk pendekatan tetap tidak bermanfaat, dan dengan kerjasama untuk melacak gerombolan bersenjata

tidaklah mungkin selama rakyat tidak dapat diyakinkan bahwa bantuan semacam itu tidak akan menimbulkan tindakan pembalasan yang mengerikan.

Sebuah contoh yang nyata adanya penindasan yang meningkat : Pada waktu saya mengunjungi Padangpanjang semua orang menyanggupi memberikan kerjasama. Sejak itu terjadi beberapa tindakan pelemparan granat, dan orang menjadi begitu menahan diri, dan ketika oleh pejabat pegawai negeri setempat dikiriskan undangan pertemuan untuk semua kepala-kepala dinas, tidak seorang pun yang datang menghadiri.

Pembersihan secara cepat dan cermat terhadap gerombolan bersenjata adalah syarat untuk pembangunan kembali, dan lebih cepat bantuan kekuatan yang diterima oleh Brigade "U", akan mempercepat dimulainya kerjasama.

Seluruh penduduk Fort de Kock, sebagian besar penduduk Solok dan Padangpanjang juga meninggalkan kota. Di Solok dan Fort de Kock, hanya orang-orang Cina yang masih berada di situ. Kampung-kampung di sepanjang jalan besar semua ditinggalkan, kecuali beberapa orang tua dan anak-anak. Mengingat bahwa ladang-ladang telah penuh ditanami, saya berpendapat bahwa keadaan ini masih dapat bertahan lebih lama dari beberapa minggu. Di mana-mana tanaman padi tumbuh dengan baik. Jangka waktu memanen adalah tidak tetap (Padangpanjang), 1 - 2 bulan masak panen. (Solok/Singkarak).

Walaupun TNI telah mengangkut sebagian besar persediaan yang ada, tetapi tidak perlu khawatir akan adanya kelaparan yang muncul tiba-tiba. Masih terdapat cukup ubi, pisang, kelapa, dan tebu, sekedar untuk menyebut beberapa tanaman makanan penting yang dapat mencegah adanya bahaya kelaparan itu.

Kemungkinan rakyat yang akan kembali ke kota harus diberi bantuan dalam waktu yang singkat.

(Menyusul berita-berita khusus mengenai situasi ekonomi, keadaan rakyat, dan aktivitas dinas penerangan).

RINGKASAN BERITA-BERITA CMI MENGENAI PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK DI SUMATERA *

Berita-berita yang disebut di atas dapat disusun dalam :

- a. Pernyataan-pernyataan Pemerintah Darurat mengenai posisi dan wewenangnya,
- b. Pendapat pemerintah mengenai perselisihan Indonesia-Belanda pada umumnya, Rencana Beel, dan Pernyataan Roem-Royen khususnya.

*) Ag. 4448/geh. 49
Overgekomen archieven Alg. Secr. 2912 Secr. 2912.

Tentang posisi Pemerintah Darurat dalam hari-hari pertama setelah aksi polisi ke dua, terjadilah kekacauan di kalangan republik.

Ketika makin menjadi jelas bagi republik, bahwa akan ada Aksi Kepolisian ke dua, Kabinet Republik memutuskan pada tanggal 16 Desember 1949 (Sic! 1948) salah satu dari anggota-anggotanya, yaitu Sjafruddin, yang berada di Sumatera, memberi perintah untuk mengambil alih kekuasaan itu selama pemerintah (di Yogyakarta, peny.) tidak dapat berjalan.

Akan tetapi dalam Sidang Kabinet tertanggal 19 Desember keputusan yang diberitahukan di muka ini, dengan alasan-alasan yang tidak diketahui, Pemerintahan Republik memberikan kepada tiga anggota kabinet yang tidak hadir di Yogyakarta, yaitu Dr. Soekiman, Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Kehakiman, dan Djuanda, Menteri Perhubungan, yang diumumkan pada tanggal 20 Desember. Barangkali khawatir bahwa berita pemberian mandat kepada Sjafruddin, tidak akan sampai pada tempat yang dituju.

Pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafruddin menetapkan bahwa untuk sementara didirikan sebuah Pemerintah Darurat (Pusat) Republik di Sumatera yang punya kekuasaan penuh baik ke dalam maupun ke luar, selama Pemerintahan Soekarno-Hatta tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Berikutnya pada tanggal 23 Desember 1948 Ketua Pemerintahan itu memberitahukan kepada bangsa Indonesia, untuk menghindari kekacauan dan kesalahpahaman, diumumkan kepada seluruh Militer Angkatan Perang RI bahwa perlawanan permusuhan tidak boleh dihentikan apabila perintah itu tidak diumumkan oleh *Ketua Pemerintah Darurat* tersebut.

Pada tanggal 28 Desember Kolonel Hidayat, Panglima Tentara Indonesia di Sumatera, mengambil alih komando seluruh angkatan perang Republik, yang menerima perintah untuk meneruskan perang dan perlawanan tidak dihentikan sebelum dipenuhi syarat-syarat, yang diminta pemerintah itu pada tanggal 23 Desember. Pada tanggal 31 Januari, Sjafruddin mengumumkan sebuah Perintah Harian, yang di dalamnya diulang, bahwa perlawanan itu hanya boleh dihentikan atas perintah Panglima Tertinggi, yang dalam hal itu akan berunding lebih dulu dengan apa yang dinamakan Pemerintah Darurat. Selama perintah ini belum diberikan, perang itu harus diteruskan dengan sepenuh kekuatan.

Bahwa posisi Pemerintah Darurat sebagai Pemerintah Pusat sementara itu belum pasti, ternyata dari pemberitahuan radiografis Pemerintah Republik Propinsi Jawa Timur, tertanggal 14 Januari 1949, mengenai keputusan Dewan Menteri pada sidang tanggal 19 Desember 1948 dan antara lain ditetapkan, bahwa selama Presiden dan Wakil Presiden berhalangan untuk menjalankan tugas-tugas mereka, pimpinan Pemerintah Pusat diserahkan kepada tiga menteri, yaitu Menteri Urusan Dalam Negeri; Menteri Kehakiman dan Menteri Perhubungan.

Baru sebulan kemudian; pada tanggal 16 Februari, Ketua Pemerintah Darurat meminta Pemerintah Militer di Jawa Tengah dengan permohonan

untuk memperhatikan, bahwa Pemerintah Darurat di Sumatera, sementara sebagai Pemerintah Pusat dengan mengingat posisinya yang tepat di luar negeri. Pemerintahan ini menjalankan kekuasaan baik ke dalam maupun ke luar sebagai pemerintahan penuh di Indonesia, dan itu akan berlaku sampai Pemerintahan Soekarno—Hatta dapat menjalankan lagi tugasnya.

Sehubungan dengan itu, maka ia menuntut seyogyanya Pemerintah Pusat di Jawa disusun dalam bentuk Komisariat Pemerintah Darurat dan tidak akan bertugas sebagai sebuah Kabinet Darurat.

Tak berapa lama, di Jawa, Menteri Kasimo membenarkan bahwa dalam Sidang Kabinet tertanggal 16 Desember 1948, telah diambil keputusan untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera, di bawah pimpinan Syafruddin. Para menteri yang tertinggal di Jawa akan menganggap dirinya sebagai bagian Pemerintah Pusat di Sumatera.

Pada tanggal 7 Maret susunan Komisariat Pemerintah Darurat di Jawa diumumkan oleh Menteri Kasimo, dan Komandan Tentara Teritorial Jawa (Nasution?) diangkat sebagai anggota penasehat Komisariat tersebut. Selanjutnya ditentukan bahwa tanggung jawab Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa agar bertanggung jawab kepada Pemerintah Darurat tentang pemerintahan di Jawa dan Madura, sedangkan selanjutnya Komisariat itu memberikan saran-saran dalam urusan-urusan penting. Panglima Tentara (Soedirman?) dalam kedudukan sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik akan menjadi anggota penasehat Pemerintah Darurat.

Pada tanggal 14 Maret Ketua Pemerintah Darurat mengirim telegram yang luas pada Komisariat, yang berisi usul untuk mengangkat menteri-menteri di Jawa sebagai anggota-anggota dalam Pemerintah Darurat. Bersamaan dengan itu disusun pembagian tugas.

Pada tanggal 23 Maret, Soedirman (sebagai Panglima Tentara) di dalam siarannya memberitahukan Pemerintah Darurat, bahwa politik dan pertahanan menurut pendapatnya tidak boleh dipisah-pisahkan.

Dia protes terhadap pengumuman Pemerintahan Darurat, bahwa perlawanan hanya dihentikan atas perintah Soekarno setelah berunding dengan Pemerintah Darurat. Ia menunjuk kepada kenyataan bahwa di Jawa telah banyak suara tidak mau tunduk pada orang-orang yang berada dalam tawanan atau di bawah pengawasan Belanda.

Menurut pendapatnya urusan itu harus diputuskan dalam rapat Pemerintah Darurat, staf dari Angkatan Perang, Soekarno (dengan syarat dalam status bebas) dan bila mungkin dengan para anggota Badan Pekerja KNIP. Cara kerja yang menempatkan Pimpinan Angkatan Perang di luar perundingan politik telah menyebabkan penderitaan yang pahit. Karena itu menurut pendapatnya adalah suatu keharusan, bahwa antara Pemerintahan Darurat dan Pimpinan Perang (Panglima) mulai dari sekarang harus ada kesatuan pandangan, tekad, sikap, dan tindakan.

Syafruddin menjawab pada tanggal 15 April, bahwa menurut pendapatnya adalah tidak benar, bahwa Panglima Angkatan Perang mempunyai suara

yang menentukan dalam pengambilan kebijaksanaan politik. Adalah benar, bahwa Panglima Angkatan Perang selalu harus didengar dalam persoalan-persoalan penting.

Kira-kira pada tanggal 6 Februari, Pemerintah Darurat telah minta perantaraan L.N. Palar untuk memberi isyarat kepada Soekarno-Hatta, bahwa sebelum mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Darurat, mereka tidak mengadakan pembicaraan resmi atau tidak resmi dengan Belanda atau BFO.

Di dalam sebuah pidato tanggal 9 April, Syafruddin telah menyatakan dengan pasti, bahwa pemimpin-pemimpin Republik di Bangka telah menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintahan Darurat, sehingga orang-orang Belanda tidak berpikir untuk dapat berunding dengan pemimpin-pemimpin Republik di Bangka tanpa menyertakan Pemerintah Darurat.

Perintah untuk menghentikan tembak-menembak menurutnya tidak akan diberikan dan tidak akan ikut berunding dalam Konferensi Meja Bundar, sampai Pemerintah Soekarno-Hatta dipulihkan tidak dengan syarat. Agenda untuk perundingan permulaan bagi Pemerintah Darurat hanya mengenai satu pokok: Pemulihan kembali Pemerintahan kepada Soekarno-Hatta. Pemberitaan ini dan pemberitaan lainnya bagi surat-surat kabar seperti Sin Po dan Warta Indonesia, hanyalah menimbulkan pertanyaan keuntungan macam apa yang diharapkan untuk berunding dengan sebuah kelompok, yang kenyataannya tidak lagi berwenang untuk bertindak atas nama Republik.

Hal terakhir ini sekali lagi telah digaris-bawahi oleh anggota-anggota Pemerintahan Darurat, pada tanggal 19 April, Mr. Rasjid dan Ir. Sitompul, yang menentukan bahwa perundingan permulaan telah dimulai tanpa kepastian dari siapa delegasi Republik telah memperoleh wewenang untuk mengadakan perundingan.

Dari berita berikutnya, yang berisi pendirian Syafruddin yang pasti mengenai Pernyataan Roem-Royen, ternyata bahwa pada tanggal 27 Maret Pemerintah Darurat telah mengirimkan instruksi tentang perundingan permulaan. Adalah suatu hal yang mungkin, bahwa anggota-anggota Pemerintah Darurat yang berada di lain tempat, tidak tahu tentang hal ini.

Dari pidato Syafruddin untuk semua stasiun pada tanggal 15 Mei terbukti, bagaimana Pemerintah Darurat beranggapan tentang posisinya. Dia memberitahukan bahwa dia belum dapat memberikan kembali pemerintahan itu pada Pemerintah Soekarno-Hatta, walaupun anggota-anggota pemerintahan itu bersama-sama sudah akan ada di Yogya, sebelum dia menerima informasi cukup tentang Pernyataan Roem-Royen dan penjelasannya.

Hal itu benar-benar bisa terlaksana, setelah Pemerintah Darurat diyakinkan, bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta sesungguhnya telah bebas dan dibebaskan dari tekanan dan ancaman Belanda untuk dapat menjalankan lagi tugasnya.

Pada tanggal 16 Mei, berita-berita B3 menyatakan, bahwa Syafruddin akan menolak untuk memberikan kembali mandatnya, juga apabila Pemerintahan Soekarno-Hatta telah kembali di Yogya, dengan alasan, bahwa dia mem-

punyai mandat pemerintahan untuk seluruh daerah Republik dan Soekarno-Hatta hanya dapat bertindak tidak lebih di dalam residensi Yogya.

Selanjutnya sebagai argumen lebih lanjut di kemukakan bahwa walaupun Pemerintah Darurat yang selama perundingan itu bertindak sebagai satu-satunya Pemerintahan Republik yang resmi, telah melawan dengan segala daya upaya terhadap persetujuan itu, Soekarno dan Hatta telah mengakhiri persetujuan tanpa sebuah mandat pun, dan karenanya Pemerintah Darurat telah dihadapkan dengan keadaan terpaksa. Agar pada akhirnya Republik tidak jatuh namanya di Luar Negeri, Pemerintahan Darurat sekarang juga akan terpaksa setuju dengan persetujuan itu.

Sementara itu di Sumatera pada tanggal 19 Mei 1949, Pemerintahan Darurat mengeluarkan Pengumuman (telegrafis) yang menjelaskan pembagian tugas anggota-anggotanya di Sumatera. Diputuskan, bahwa di samping tugas mereka yang berkaitan dengan Sumatera, mereka punya wewenang untuk menjalankan tugas menteri lain yang berada di luar Sumatera.

Dengan kata lain, pemerintahan itu dibentuk dari orang-orang yang berada di Sumatera, mereka menarik pada dirinya pemerintahan untuk seluruh Indonesia, dan dengan itu meremehkan adanya Komisariat di Jawa.

Demikianlah misalnya Mr. Sjafruddin menjadi Menteri Pertahanan, dan bersamaan dengan itu dia akan bertindak sebagai Menteri Urusan Luar Negeri.

Tentang pendapat Pemerintah Darurat Republik mengenai perselisihan Belanda - Indonesia, berita-berita itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

U m u m :

Sehari setelah Pemerintah Darurat dibentuk, mereka mengumumkan kesanggupan untuk menghentikan tembak-tembak dan sekali lagi diadakan perundingan untuk syarat-syarat berikutnya :

1. Membebaskan Pemerintahan Republik.
2. Penarikan kembali pasukan Belanda ke posisi semula sebelum tanggal 19 Desember.
3. Pengakuan de facto dan de jure Republik tanpa syarat sebagai negara, yang meliputi Jawa dan Sumatera.
4. Pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan segera, yang meliputi Hindia Belanda dahulu.
5. Penarikan kembali pasukan Belanda dari seluruh Indonesia dengan secepat mungkin, dengan ketentuan, bahwa pada saat akan dibentuk negara merdeka, pasukan Belanda tidak lagi berada di Indonesia.
6. Kepentingan-kepentingan Belanda akan diperhatikan.

Kemudian dapat ditambahkan di sini, bahwa kecuali sebuah pengakuan sekali lagi tentang Persetujuan Linggarjati, pemulihan Pemerintahan Soekarno-Hatta tanpa syarat adalah suatu keharusan, sebelum gencatan senjata dapat diumumkan.

Sekitar tanggal 12 Januari Pemerintah Darurat dengan senang mengumumkan akan mentaati perintah gencatan senjata dari Dewan Keamanan, dan untuk mulai lagi perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan dan pengawasan tertinggi Dewan Keamanan.

Akan tetapi kepercayaan kepada Dewan Keamanan tidak besar, oleh karena Pemerintah Darurat lebih mengutamakan campur tangan Konferensi Asia di New Delhi, karena kegagalan yang berkali-kali terjadi dengan Dewan Keamanan.

Adalah suatu kekecewaan yang besar bagi Pemerintah Darurat, bahwa dalam Resolusi Konferensi Asia tidak terdapat pengakuan de jure (lihat No. 3 pada syarat-syarat sebelumnya), yang akan mencegah Belanda di waktu-waktu mendatang menganggap perselisihan sebagai urusan dalam negeri.

Karena dia mengharap bantuan selanjutnya dari kekuatan-kekuatan Asia, dan mereka menjamin pembentukan Indonesia yang merdeka dan berdaulat berkuasa, Sjafruddin toh menjelaskan kesanggupannya menerima, resolusi berdasarkan rasa solider. Dia juga mengharapkan bantuan dalam hal keuangan dan ekonomi untuk memperbaiki Republik, karena di daerah ini aksi Belanda telah menimbulkan kerugian-kerugian besar.

Berkali-kali diharapkan oleh Pemerintah Darurat, bahwa Dewan Keamanan akan menerima keputusan-keputusan Konferensi Asia karena keputusan-keputusan yang kurang menguntungkan akan sulit diterima oleh bangsa Indonesia.

Pada awal Februari, Pemerintah Darurat memberitahukan Soekarno-Hatta, bahwa sebelum mereka mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Darurat tersebut, tidak mengadakan perundingan-perundingan formal atau informal dengan Belanda atau BFO.

Pada saat pengumuman Dinas Penerangan tertanggal 6 Februari, diterangkan bahwa mengingat pengalaman-pengalaman jelek dengan orang-orang Belanda, dalam perkembangan seperti sekarang ini, perang lebih baik diteruskan sampai titik darah penghabisan daripada harus mulai lagi dalam keadaan yang barangkali lebih buruk.

Rencana Beel

Rencana Beel oleh Pemerintah Darurat maupun oleh Komisariat di Jawa, dianggap sebagai sebuah penolakan Belanda terhadap resolusi Dewan Keamanan. Untuk dapat melepaskan diri dari akibat-akibat itu menurut Syafruddin, bangsa Belanda harus membuat usul penyelesaian yang lebih luas daripada resolusi Dewan Keamanan, dengan harapan, bahwa Dewan Keamanan dengan itu akan menarik resolusinya sendiri.

Menurut Pemerintah Darurat, Wakil Presiden BFO, ketika dia melihat rencana itu, berkata bahwa rencana itu adalah penipuan terhadap pendapat dunia.

Pada waktu mengumumkan pendiriannya mengenai Rencana Beel, Sjafruddin menyatakan setelah membuat rekapitulasi fakta yang terjadi sejak

tahun 1945, khususnya mengenai Perjanjian Linggarjati dan Renville; Belanda dituduh telah memulai aksi polisi, pada saat Republik telah berhasil menindas pemberontakan Mujo, juga dengan diumumkannya syarat-syarat yang hampir cocok ketika pembentukan Pemerintah Darurat, yaitu kemungkinan adanya gencatan senjata :

- a. Rehabilitasi Republik yang lengkap, terdiri dari :
 1. Pembebasan para tawanan orang-orang terkemuka Republik.
 2. Pengembalian daerah-daerah Indonesia yang diambil dengan kekerasan senjata dari Republik, walaupun ada Perjanjian Linggarjati dan Renville.
- b. Pengakuan Republik, itu berarti bahwa TNI harus diakui dan bahwa pasukan-pasukan Belanda harus ditarik mundur dari daerah Republik.

Baru setelah dipenuhi syarat-syarat di bawah (a, No. 1 dan 2), Sjafruddin bersedia mengumumkan penghentian tembak-menembak.

Dalam uraian selanjutnya mengenai pendiriannya, Sjafruddin mendekati lagi syarat-syarat yang disebut pertama.

Pada tanggal 8 Maret, Sjafruddin mengumumkan bahwa Konferensi Meja Bundar harus diatur atas dasar-dasar sebagai berikut :

1. Pembentukan sebuah Pemerintahan Federal Sementara (PFS. Red.), selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949, yang terdiri dari wakil-wakil Republik sebesar 50%, negara-negara bagian sebesar 40%, dan kelompok minoritas sebesar 10%.
2. Pada Pemerintahan Sementara itu akan diserahkan kedaulatan.
3. Sebelum pembentukan Pasukan Federal, TNI atas permintaan PFS harus menjaga ketertiban dalam daerah Republik; di daerah-daerah lain, pasukan Belanda harus memelihara ketertiban.
4. Untuk kepentingan susunan Konstituante (MPRS), PFS harus segera mengadakan Pemilihan Umum di bawah pengawasan UNCI. Konstituante (MPRS) itu harus menyusun UUD dan harus memilih Pemerintahan Federal yang pasti.
5. Pasukan Belanda seluruhnya harus ditarik kembali dari Indonesia pada suatu tanggal, yang ketentuannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Belanda, dan UNCI.
6. Setelah itu Anggaran Dasar Unie Indonesia-Belanda ditentukan dan disyah oleh Parlemen Indonesia dan Belanda.

Bertalian dengan Pernyataan Roem-Royen, Pemerintah Darurat mengumumkan sekitar tanggal 14 Mei, bahwa dia masih tidak dapat menentukan pendiriannya, sebelum diterima bahan-bahan yang menunjukkan telah dilaksanakannya instruksi kepada para pemimpin di Bangka pada tanggal 27 Maret, yang berisi :

1. Kembalinya Pemerintahan Republik ke Yogya juga berisi pengakuan oleh Pemerintahan Belanda tentang kekuasaan Pemerintahan Republik

di seluruh Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau sekitarnya, sesuai Persetujuan Linggarjati.

2. Bahwa TNI tidak perlu ditarik kembali dari tempat-tempat kedudukan mereka masing-masing *sebelum* didirikan Pemerintah Federal Indonesia dibentuk.
3. Penarikan kembali pasukan Belanda dari daerah Indonesia.

Jika syarat-syarat ini dipenuhi, tidak keberatan untuk ikut serta dalam KMB. Mengenai waktu dan syarat-syarat masih perlu dibicarakan dengan Pemerintahan Soekarno-Hatta

Selama keterangan-keterangan tersebut di muka belum diberikan, maka Pemerintah Darurat belum dapat menyerahkan kembali pemerintahannya kepada Pemerintah Soekarno-Hatta, dan baru dapat dilaksanakan jika Pemerintah Darurat mempunyai keyakinan, bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta benar-benar bebas, dan bebas dari tekanan dan ancaman Belanda dalam menjalankan tugasnya.

Telegram ini berlawanan dengan telegram UP pada tanggal 14 Mei, di mana diterangkan bahwa Pemerintah Darurat setuju dengan Pernyataan Roem-Royen.

Pada tanggal 17 Mei, Sjafruddin menolak kebenaran berita UP itu.

Seorang jurubicara militer dari Pemerintahan Militer Aceh menyampaikan kritik berikut ini di dalam sebuah telegram pada Pemerintah Darurat tentang Pernyataan Roem-Royen :

1. Perundingan tentang pembentukan Komisi Gencatan Senjata bertentangan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bahwa pasukan Belanda harus ditarik kembali dari daerah Indonesia.
2. Untuk memperoleh kembalinya Pemerintahan Republik ke Yogya, Republik menyatakan ikut serta pada Konferensi Meja Bundar, yang berarti bertentangan dengan kembalinya Republik tanpa syarat.
3. Dari penjelasan itu, bahwa Belanda tidak akan mendirikan Pemerintahan Federal di bekas daerah-daerah Republik, dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah-daerah itu tidak akan dikembalikan, yang berarti tidak adanya pengakuan penuh atas kedaulatan Republik di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Masih belum jelas, bagaimana reaksi Pemerintah Darurat mengenai hal itu.

Ringkasan berita-berita di atas yang kadang-kadang tidak lengkap dan simpang-siur menghasilkan catatan-catatan sebagai berikut :

1. Dapat diambil kesimpulan bahwa Kabinet Hatta sungguh-sungguh telah menyerahkan kekuasaan pemerintahannya pada Pemerintah Darurat, di bawah pimpinan Sjafruddin.
2. Adalah tidak jelas, bagaimana kedudukan kekuasaan Presiden Soekarno, antara lain dalam fungsinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang



Republik. Kedudukan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik telah diserahkan kepada Sjafruddin atau kepada Tan Malaka, yang menurut berita-berita ditugaskan untuk memegang pimpinan perlawanan. Untuk kemungkinan bahwa semua kekuasaan Soekarno (juga kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi) diserahkan kepada Sjafruddin, pengumuman pada tanggal 23 Desember yang lalu merupakan perintah gencatan senjata yang seharusnya diumumkan oleh Ketua Pemerintah Darurat. Akan tetapi dalam berita-berita berikutnya tentang hal ini tidak disinggung lagi dan menimbulkan keragu-raguan. Dibicarakan tentang Panglima Tertinggi, yang harus memberikan perintah gencatan senjata, sementara dalam berita berikutnya Soekarno disebut lagi sebagai orang yang harus mengumumkan perintah gencatan senjata itu. Juga bertalian dengan fungsi Panglima Besar, terdapat keragu-raguan. Seperti hal pertama, telah diberitahukan, Kolonel Hidajat mengambil tugas komando atas seluruh Angkatan Perang Republik. Dalam berita berikutnya Soedirman menjalankan tugas lagi sebagai Panglima Besar, tetapi hal itu tidak menjadi jelas, apakah itu hanya berlaku untuk Jawa atau juga untuk Sumatera.

3. Dapat dibicarakan adanya tahap-tahap hubungan yang makin tajam antara Pemerintah Darurat—Soekarno—Hatta yang akhirnya sampai pada percobaan Pemerintah Darurat untuk memelihara wibawa, pertama-tama dengan jalan menyerahkan hal itu setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi, dan pengaruh Soekarno—Hatta dilemahkan, dengan jalan Soekarno—Hatta tidak dibenarkan untuk mengeluarkan suaranya tentang Pernyataan Roem—Royen.
4. Bahwa pada kesempatan-kesempatan yang berbeda diajukan tuntutan-tuntutan Pemerintah Darurat (dalam hal pembentukan pemerintahan itu, pengumuman pendapat mengenai Rencana Beel dan Perundingan Awal) tidak menunjukkan banyak perubahan, dan pada pokoknya berarti :

- a. Berpegang teguh pada Persetujuan Linggarjati, sejauh hal itu merupakan pengakuan bahwa Jawa—Sumatera—Madura adalah daerah-daerah Republik.
- b. Penarikan kembali tentara Belanda dari daerah Republik dan kemudian dari seluruh Indonesia.
- c. Pemulihan kembali tanpa syarat Pemerintahan Soekarno-Hatta.
5. Oleh karena Pernyataan Roem—Royen tidak memenuhi hal itu, maka masih tidak tentu apakah Pemerintah Darurat bersedia mengumumkan perintah gencatan senjata, atau apabila itu terjadi oleh otoritas yang lain (Soekarno), perintah semacam itu akan diakui olehnya.

Dari sebuah telegram Kolonel Simatupang tertanggal 24 Mei yang lalu kepada Pemerintah Darurat ternyata, bahwa ia tetap mencurigai Belanda dan akan mencoba agar semua janji memperoleh jaminan in-

ternasional, sementara dia tidak berbicara lebih lanjut sehubungan dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, dan kemungkinan membiarkan hal itu terbuka untuk menolak wewenang itu. Kolonel Simatupang menyatakan sikap terhadap hal itu, antara lain bahwa Pemerintah Darurat harus mencoba sebanyak mungkin memperkuat posisi Presiden dan Wakil Presiden ke luar dan harus mengambil langkah-langkah yang memungkinkan Pemerintah Republik memperoleh kesempatan untuk menjalankan perundingan di dalam situasi yang menguntungkan, sementara ke dalam harus membentuk garis pertahanan ke dua dan mengorganisasi kekuatan-kekuatan yang dapat dipergunakan bila perundingan itu gagal. Pada akhirnya Pemerintah Darurat harus tetap berada pada posisinya, terutama jika Pemerintah Republik kembali ke Yogya, dalam hal ini Pemerintah Darurat harus menjadi Komisariat untuk Sumatera, tetapi dalam keadaan untuk dapat menjelma kembali setiap waktu.

6. Tidak jelas, apakah kelompok Bangka melakukan perundingan atas wibawanya sendiri, atau menerima pedoman Pemerintah Darurat, atau sebelumnya memang sudah ada kontak mengenai hal itu. Dari berita dimuka orang dapat mengambil kesimpulan bahwa hal terakhirlah yang sebenarnya terjadi, yang jelas akan ada pengaruh kepada sifat dan akhir kunjungan Hatta baru-baru ini kepada Pemerintah Darurat.

Batavia C., 7 Juni 1949.

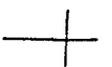
RINGKASAN TINJAUAN TENTANG POSISI PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK DI SUMATERA

Pernyataan-pernyataan yang begitu banyak dari Pemerintah Darurat Republik di Sumatera, bersama ini dapat disusun sebagai berikut :

- a. Pernyataan-pernyataan tentang posisi dan wewenang pemerintahan itu,
- b. Pendirian pemerintahan itu mengenai perselisihan Belanda Indonesia pada umumnya,
- c. Pendirian pemerintahan itu mengenai Rencana Beel,
- d. Pendirian pemerintahan itu mengenai Persetujuan Roem-Royen.

Dalam tinjauan ini akan dibahas mengenai apa yang tercantum dalam (a). Dalam waktu awal setelah Aksi Kepolisian ke dua terjadi kekacauan pada badan-badan republik.

Dua kelompok orang-orang terkemuka Republik, yang tidak dapat dijamah oleh pasukan tentara Belanda, saling berebut kedudukan, siapa di antara mereka yang lebih terkemuka.



Hal itu dapat terjadi karena pemerintah Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Desember, 1949 (sic! 1948) rupa-rupanya telah memberi perintah pada seorang dari anggotanya, yaitu Sjafruddin, yang pada hari-hari itu berada di Sumatera untuk mengambil alih kekuasaan, selama pemerintahan itu tidak dapat menjalankan tugasnya.

Dalam sidang Kabinet tanggal 19 Desember tidak diketahui alasan-alasan tiga anggota Kabinet yang tidak hadir di Yogya, yaitu Dr. Soekiman, Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Kehakiman, dan Ir. Djuanda, Menteri Perhubungan, telah menerima kekuasaan Republik yang diumumkan pada tanggal 20 Desember. Apakah mereka takut bahwa mandat yang telah diberikan kepada Sjafruddin, tidak akan sampai kepada yang dituju?

Pada tanggal 22 Desember 1948 terdengar sebuah pengumuman, bahwa untuk sementara didirikan sebuah Pemerintah Pusat Darurat Republik di Sumatera, yang menjalankan kekuasaan baik ke dalam dan ke luar, selama Pemerintahan Soekarno-Hatta tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berikutnya pada tanggal 23, Ketua Pemerintah itu berhubungan dengan penduduk Indonesia, untuk menghindari kekacauan dan salah pengertian, diumumkan pada semua Angkatan Perang Republik, bahwa pertempuran tidak boleh dihentikan, apabila perintah itu tidak diumumkan oleh Ketua Pemerintah Darurat tersebut.

Pada tanggal 28 Desember, Kolonel Hidayat, Panglima Angkatan Perang Republik di Sumatera mengambil komando atas semua pasukan Tentara Republik, yang memperoleh perintah untuk meneruskan perjuangan dan tidak dihentikan sampai lebih dahulu telah dipenuhi syarat-syarat yang telah dinyatakan pemerintah pada tanggal 23 Desember.

Pada tanggal 31 Januari Sjafruddin membuat Perintah Harian yang di dalamnya diulang, bahwa tembak-menembak hanya boleh dihentikan atas perintah Panglima Tertinggi, yang dalam hal itu akan berunding lebih dulu dengan Pemerintah Darurat tersebut. Selama perintah itu belum diberikan, perang itu harus diteruskan dengan segenap tenaga.

Berhubung dengan yang tersebut di muka ini, sudah dapat diduga bahwa yang dimaksud dengan Kolonel Hidayat sesungguhnya pada waktu itu tidak jelas bagaimana pemerintahan darurat dapat berunding dengan Soedirman Panglima Besar yang sesungguhnya, karena mereka pada waktu itu tidak dapat berhubungan. Sukar dapat diterima, bahwa dengan itu dimaksud Soekarno sebagai pemegang komando, karena ia telah menyerahkan kekuasaannya kepada Sjafruddin. Memang benar dalam pengumuman itu tidak disinggung tentang kedudukan Panglima Besar, tetapi memang diputuskan bahwa Pemerintah Darurat memiliki kekuasaan penuh ke dalam dan ke luar.

Untuk suatu masa, kemungkinan lain ialah bahwa Tan Malaka, yang menurut laporan dari Konsul India ditugasi untuk memimpin perlawanan, dapat dianggap sebagai Panglima Besar.

Dari berita-berita kemudian akan ternyata bahwa Soedirman kembali dapat dianggap sebagai Panglima Besar. Dari yang tersebut di atas, ternyata

bahwa ketidakpastian dalam pemerintahan pada waktu itu untuk sementara dapat terjadi dan bahwa dapat dikatakan adanya dua Panglima Besar.

Bahwa kedudukan Pemerintah Darurat sebagai Pemerintah Pusat belum tetap, terbukti dari siaran radio Republik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang mengumumkan keputusan Dewan Menteri dalam sidang tanggal 19 Desember 1948, antara lain bahwa selama Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, pimpinan Pemerintah Pusat diserahkan kepada tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, dan Perhubungan.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari, Ketua Pemerintah Darurat memberitahukan Pemerintahan Militer di Jawa Tengah, dengan permintaan agar menaruh perhatian, bahwa Pemerintah Darurat di Sumatera harus dianggap sebagai satu-satunya Pemerintah Pusat Sementara dengan kedudukan pasti di luar negeri.

Pemerintahan ini melaksanakan "kekuasaan penuh ke luar maupun ke dalam dari Indonesia, dan akan tetap begitu sampai ada kepastian bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta dapat menjalankan tugasnya kembali.

Atas dasar inilah maka seharusnya Pemerintah Pusat di Jawa disusun dalam bentuk Komisariat dari Pemerintahan Darurat dan tidak berfungsi sebagai Kabinet Darurat. Tidak lama kemudian, Menteri Kasimo membenarkan bahwa dalam sidang Kabinet pada tanggal 16 Desember 1948 telah diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera di bawah pimpinan Sjafruddin. Menteri-menteri lainnya yang tertinggal di Jawa harus menganggap dirinya sebagai bagian Pemerintah Pusat di Sumatera.

Pada tanggal 7 Maret susunan Komisariat Pemerintah Darurat di Jawa diumumkan oleh Menteri Kasimo, dan Komandan Pasukan Teritorial di Jawa diangkat sebagai Penasehat Komisariat. Selanjutnya ditentukan bahwa Komisariat-komisariat Pemerintah Pusat di Jawa harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Darurat mengenai pemerintahan di Jawa dan Madura, dan selanjutnya memberikan nasehat-nasehat mengenai perkara-perkara penting. Komandan Tentara sebagai Panglima Besar pasukan perjuangan di seluruh Republik, menjadi anggota penasehat Pemerintah Darurat.

Sekitar tanggal 6 Februari, Pemerintah Darurat telah meminta L.N. Palar sebagai penengah untuk memberitahukan Soekarno-Hatta bahwa sebelum mereka mengadakan pertemuan antara Pemerintah Darurat, agar tidak mengadakan perundingan secara resmi atau tidak resmi dengan pihak Belanda maupun B.F.O.

Permulaan bulan Maret, Kolonel Hidajat sekali lagi minta perhatian semua Komandan Pasukan perjuangan, bahwa perintah penghentian tembakan dapat dipatuhi apabila hal itu berasal dari Panglima Besar.

Pada tanggal 14 Maret, Ketua Pemerintah Darurat mengirim telegram panjang lebar kepada Komisariat, yang berisi usul agar para Menteri di Jawa duduk sebagai anggota Pemerintah Darurat. Juga diadakan semacam pembagian tugas. Pada tanggal 23 Maret, Soedirman mengirim pemberitahuan kepada



bahwa ketidakpastian dalam pemerintahan pada waktu itu untuk sementara dapat terjadi dan bahwa dapat dikatakan adanya dua Panglima Besar.

Bahwa kedudukan Pemerintah Darurat sebagai Pemerintah Pusat belum tetap, terbukti dari siaran radio Republik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang mengumumkan keputusan Dewan Menteri dalam sidang tanggal 19 Desember 1948, antara lain bahwa selama Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, pimpinan Pemerintah Pusat diserahkan kepada tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, dan Perhubungan.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari, Ketua Pemerintah Darurat memberitahukan Pemerintahan Militer di Jawa Tengah, dengan permintaan agar menaruh perhatian, bahwa Pemerintah Darurat di Sumatera harus dianggap sebagai satu-satunya Pemerintah Pusat Sementara dengan kedudukan pasti di luar negeri.

Pemerintahan ini melaksanakan kekuasaan penuh ke luar maupun ke dalam dari Indonesia, dan akan tetap begitu sampai ada kepastian bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta dapat menjalankan tugasnya kembali.

Atas dasar inilah maka seharusnya Pemerintah Pusat di Jawa disusun dalam bentuk Komisariat dari Pemerintahan Darurat dan tidak berfungsi sebagai Kabinet Darurat. Tidak lama kemudian, Menteri Kasimo membenarkan bahwa dalam sidang Kabinet pada tanggal 16 Desember 1948 telah diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera di bawah pimpinan Sjafruddin. Menteri-menteri lainnya yang tertinggal di Jawa harus menganggap dirinya sebagai bagian Pemerintah Pusat di Sumatera.

Pada tanggal 7 Maret susunan Komisariat Pemerintah Darurat di Jawa diumumkan oleh Menteri Kasimo, dan Komandan Pasukan Teritorial di Jawa diangkat sebagai Penasehat Komisariat. Selanjutnya ditentukan bahwa Komisariat-komisariat Pemerintah Pusat di Jawa harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Darurat mengenai pemerintahan di Jawa dan Madura, dan selanjutnya memberikan nasehat-nasehat mengenai perkara-perkara penting. Komandan Tentara sebagai Panglima Besar pasukan perjuangan di seluruh Republik, menjadi anggota penasehat Pemerintah Darurat.

Sekitar tanggal 6 Februari, Pemerintah Darurat telah meminta L.N. Palar sebagai penengah untuk memberitahukan Soekarno-Hatta bahwa sebelum mereka mengadakan pertemuan antara Pemerintah Darurat, agar tidak mengadakan perundingan secara resmi atau tidak resmi dengan finak Belanda maupun B.F.O.

Permulaan bulan Maret, Kolonel Hidajat sekali lagi minta perhatian semua Komandan Pasukan perjuangan, bahwa perintah penghentian tembakan dapat dipatuhi apabila hal itu berasal dari Panglima Besar.

Pada tanggal 14 Maret, Ketua Pemerintah Darurat mengirim telegram panjang lebar kepada Komisariat, yang berisi usul agar para Menteri di Jawa duduk sebagai anggota Pemerintah Darurat. Juga diadakan semacam pembagian tugas. Pada tanggal 23 Maret, Soedirman mengirim pemberitahuan kepada

Pemerintah Darurat, bahwa menurut pendapatnya politik dan pertahanan tidak dapat dipisahkan.

Dia juga menentang pengumuman Pemerintah Darurat, bahwa penghentian tembak-menembak hanya dapat dilaksanakan atas perintah Soekarno setelah berunding dengan Pemerintah Darurat. Ia juga menunjukkan bahwa di Jawa sudah muncul suara-suara tidak akan tunduk kepada perintah orang-orang yang dalam tawanan atau di bawah pengawasan Belanda.

Menurut dia hal tersebut harus diputuskan oleh sidang Pemerintah Darurat, staf Angkatan Perang, Soekarno (bila bebas), dan bila perlu beberapa anggota Badan Pekerja KNIP. Cara kerja lama, yang tidak mengikut sertakan pimpinan tentara dalam perundingan politik menimbulkan kekecewaan yang besar. Oleh karena itu, menurut dia merupakan keharusan bahwa antara Pemerintah Darurat dan pimpinan Tentara terdapat kesatuan pendapat, sikap pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

Sjafruddin menjawabnya pada tanggal 15 April, bahwa menurut pendapatnya adalah tidak benar bahwa Komandan Pasukan mempunyai suara yang menentukan dalam menetapkan kebijaksanaan politik. Menurut pendapatnya memang benar bahwa Komandan Tentara selalu harus didengar suaranya dalam hal-hal politik yang penting.

Dalam suatu pidato pada tanggal 9 April, Sjafruddin menekankan dalam satu pengumuman, bahwa pemimpin-pemimpin Republik di Bangka telah menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Darurat, sehingga Pemerintah Belanda jangan mengira bahwa tanpa Pemerintah Darurat mereka dapat mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin di Bangka.

Perintah penghentian tembak-menembak tidak akan diumumkan dan tidak akan ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar, bila Pemerintah Soekarno-Hatta tidak direhabilitasi tanpa syarat.

Agenda untuk perundingan permulaan bagi Pemerintah Darurat hanya ada satu pokok, yaitu pengembalian Pemerintahan Soekarno-Hatta. Hal ini dan pemberitaan lainnya membuat surat kabar Sin Po dan Warta Indonesia bertanya: apa kegunaannya berunding dengan satu kelompok, yang dalam kenyataannya tidak berwenang bertindak atas nama Republik.

Yang terakhir ini sekali lagi pada tanggal 19 April digaris bawahi oleh anggota Pemerintah Darurat yaitu Mr. Rasjid dan Ir. Sitompul, yang menentukan bahwa pembicaraan pendahuluan telah mulai tanpa diketahui dari mana anggota delegasi Republik telah mendapat kuasa untuk melakukan perundingan.

Mereka menganggap bahwa sebelum perundingan dengan Belanda akan dilaksanakan, pada pertamanya harus ada pertemuan antara Soekarno dan Hatta di satu pihak, dan Pemerintah Darurat di lain pihak, yang sepengetahuan mereka tidak pernah diadakan.

Mereka bertanya, sampai di mana delegasi Republik berada di bawah Pemerintah Darurat dan telah menerima petunjuk-petunjuk yang diperlukan.

Pada tanggal 21 April, Rasjid dan Sitompul memberi keterangan lebih lanjut dengan penjelasan bahwa Dr. Van Royen pada perundingan di Batavia

tertanggal 16 April yang lalu, telah menyatakan ketidak senyapannya dengan menanyakan apakah antara Soekarno—Hatta di satu pihak dan Pemerintah Darurat di lain pihak telah ada persetujuan, bahwa tembak-menembak dapat dihentikan hanya oleh Pemerintah Darurat. (Pengumuman Dinas Penerangan Pemerintah Darurat tanggal 9 April 1949).

Mereka beranggapan bahwa berdasarkan itu dapat disimpulkan, walaupun Pemerintah Belanda tidak ingin mengakui Pemerintah Darurat, tetapi ia mengetahui dengan baik, bahwa hanya pemerintah itulah yang sekarang ini menjalankan kekuasaan. Dengan jelas telah dipaparkan di atas, bahwa Pemerintah Darurat tidak senang menyambut persetujuan Roem—Royen.

Dalam pidato Sjafruddin kepada semua stasiun pemancar diberitahukan, bahwa Pemerintah Darurat belum dapat mengembalikan kekuasaan kepada Soekarno—Hatta, meskipun anggota-anggota Pemerintah itu sudah berkumpul di Yogya, sebelum mereka menerima penjelasan yang cukup tentang persetujuan Roem—Royen.

Hal itu baru dapat terlaksana setelah Pemerintah Darurat yakin, bahwa pemerintah Soekarno—Hatta benar-benar bebas dan dibebaskan dari tekanan dan ancaman Belanda untuk dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Pada tanggal 17 Mei diulangi lagi oleh Sjafruddin dengan sungguh-sungguh, bahwa Pemerintah Darurat belum menyatakan pendiriannya mengenai perundingan Roem—van Royen.

Kabar B3 memberitahukan pada tanggal 16 Mei, bahwa telah timbul oposisi terhadap Pemerintah Soekarno—Hatta. Sjafruddin akan menolak untuk mengembalikan mandatnya, juga bila Soekarno—Hatta telah kembali di Yogya, dengan alasan bahwa ia mendapat mandat pemerintah untuk seluruh daerah Republik dan Soekarno—Hatta hanya dapat bertindak di daerah Yogya.

Sebagai alasan selanjutnya antara lain dikemukakan, sungguhpun Pemerintah Darurat, yang ketika perundingan diadakan, satu-satunya Pemerintah Republik yang resmi, yang dengan gigih menentang persetujuan. Soekarno—Hatta tanpa mendapat apapun telah menyetujui persetujuan itu.

Pemerintah Darurat oleh karena itu menjadi terpojok. Untuk mencegah nama Republik di luar negeri menjadi jatuh, maka Pemerintah Darurat terpaksa harus menyetujui persetujuan tersebut. Mereka merencanakan dalam pertemuan KNIP yang secepat mungkin diadakan untuk menjatuhkan Pemerintahan Hatta dan berharap bahwa Sjafruddin atau Dr. Leimena akan membentuk kabinet yang baru.

Akhirnya Pemerintah Darurat di Sumatera mengumumkan dengan telegram pada tanggal 19 Mei 1949, yang menyebutkan tentang pembagian tugas para anggota Pemerintah Darurat di Sumatera.

Semua persoalan, begitu diputuskan, yang berkaitan dengan Sumatera akan diselesaikan oleh anggota di Sumatera, yang di samping tugas mereka berwenang untuk menjalankan tugas seorang Menteri lain yang berada di luar Sumatera.

Dengan kata-kata lain, Pemerintah Darurat dibentuk dari orang-orang yang hadir di Sumatera. Dengan demikian mereka mengambil pemerintahan

seluruh Indonesia ke dalam tangannya, dan adanya Komisariat serta anggota-anggota pemerintah yang lain diabaikan.

Dengan demikian, misalnya Mr. Sjafruddin yang menjadi Menteri Per-tahanan, juga mewakili Menteri Luar Negeri. Dari kejadian itu kiranya dapat disimpulkan :

- a. Adanya hubungan yang makin runcing antara Pemerintah Darurat dan Soekarno-Hatta.
 - b. Suatu percobaan untuk memperlemah kekuasaan Soekarno-Hatta, setelah yang berkuasa pertama diganti oleh yang kedua. (PDRI, Red.) dengan jalan tetap mempertahankan atau memperkuat kedudukan.
 - c. Sehubungan dengan kedudukan Panglima Tertinggi masih juga belum jelas. Apakah Soekarno masih tetap dianggap sebagai Panglima Tertinggi, ataukah Sjafruddin sebagai Ketua Pemerintah Darurat telah mengambil alih itu? Bila tidak, masih dapat diragukan apakah Soekarno akan dipatuhi apabila ia sebagai Panglima Tertinggi mengumumkan perintah penghentian tembak-menembak.
1. Karena adanya pertentangan dengan Pemerintah Darurat, yang meragukan hak Soekarno-Hatta untuk membuat perjanjian.
 2. Karena Soekarno telah menyerahkan pimpinan perlawanan kepada Tan Malaka dan menjadi pertanyaan, apakah dia seperti Soedirman, atau seperti Hidajat yang, benar atau tidak, merasa sebagai Panglima Tentara dan rupa-rupanya tidak bersedia menerima perintah semacam itu dari Soekarno untuk menghentikan perlawanan.

Bagaimana pun juga ternyata jelas, bahwa Pemerintah Darurat (sesuai dengan hukum) adalah satu-satunya Pemerintah Pusat dan kekuasaan Republik Indonesia yang sah, dan bahwa Soekarno-Hatta harus berunding dulu dengan pemerintah itu sebelum menerima kewajiban-kewajiban baru. Masa depan akan memberi pelajaran apakah ini merupakan politik dengan penuh kesadaran untuk bersembunyi di belakang kekuasaan yang lain, atau apakah orang-orang terkemuka di Bangka memang dapat dipercaya ketika mulai dengan perunding-an.

Dalam sebuah telegram sekitar 6 Februari, apa yang disebut Pemerintah Darurat meminta perantaraan Palar, atau salah seorang ex Wakil Pemerintah Republik di luar negeri, untuk menyampaikan berita kepada Soekarno-Hatta, agar mereka sebelum mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Darurat tidak mengadakan perundingan resmi atau tidak resmi dengan Belanda atau B.F.O.

<i>Sjafruddin</i>

18

P.D.R. 12 April 1949 (Agno. 2487/ADOC. Geh.)

Pada tanggal 10 April yang lalu, Sjafroeddin Prawiranegara sebagai Menteri Penerangan Pemerintah Darurat melalui stasiun AURI bekas Stasiun Muara Aman, mengumumkan agar pendirian Pemerintah Darurat disiarkan se-luas mungkin oleh seluruh stasiun radio.

Dalam penjelasannya tertanggal : Sumatra 9 April 1949, Sjafroeddin Prawiranegara mengingat kembali perjanjian gencatan senjata dengan Belanda dan pengalaman-pengalaman dari janji-janji Belanda yang telah dialami Republik. Dari situ dia mengambil kesimpulan, bahwa "semua memperkuat bukti bahwa yang telah dihasilkan Belanda sejak janji November 1918 sampai saat ini hanya menimbulkan kecurigaan orang-orang Indonesia terhadap Pemerintah Belanda. Kepercayaan Indonesia terhadap Belanda hanya dapat kembali jika mereka bersedia sekali lagi mengakui prinsip perjanjian Linggarjati yang telah ditanda tangani oleh Indonesia dengan pengorbanan dan perasaan-perasaan yang khusus. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterima oleh Belanda, maka tidak mungkin perintah untuk menghentikan tembak-menembak dalam praktek dapat terlaksana".

Selanjutnya Menteri Republik tersebut membicarakan beberapa kesulitan teknis, sehubungan dengan pelaksanaan perintah gencatan senjata (cease fire order). Dia juga menunjukkan bukti, bahwa pemimpin-pemimpin Republik di Bangka telah menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Darurat, sehingga Belanda janganlah berpikir untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin Republik di Bangka di luar Pemerintah Darurat.

"Pemerintah Darurat dapat memberikan perintah hentikan tembak-menembak dan dapat juga memutuskan untuk ikut ambil bagian pada Konferensi Meja Bundar, tetapi pendirian Pemerintah Darurat adalah: Perintah 'Hentikan tembak-menembak' tidak akan diberikan dan tidak akan ikut serta pada Konferensi Meja Bundar, jika Pemerintah Sukarno-Hatta tidak direhabilitasi tanpa syarat oleh Belanda. Penjelasan Mr. Roem bahwa dia hanya bersedia melakukan tentang perundingan tentang rehabilitasi Pemerintah Darurat adalah benar". Demikian kata Sjafroeddin Prawiranegara. "Agenda untuk mengadakan perundingan permulaan bagi kami hanyalah berisi satu soal: Pengembalian Pemerintah Sukarno-Hatta. Persoalan-persoalan lainnya hanya dapat dibicarakan setelah kekuasaan Pemerintah Sukarno-Hatta pulih kembali".

Sehubungan dengan perundingan permulaan yang akan datang, berita dan tinjauan mengenai Pemerintah Darurat mendapat tempat yang penting di dalam pers Republik, Cina dan Federal di minggu sebelumnya. Karena pengumuman tentang susunan Pemerintah Darurat melalui pemancar-pemancar gelap, "Voice of Sumatra" yang dapat ditangkap oleh beberapa surat kabar, "Sin Po" mencatat bahwa pengumuman pemerintah itu merupakan "langkah politik yang besar, dengan arti yang lebih dalam". Surat kabar itu mempertanyakan apakah perundingan dengan kelompok Bangka pada perundingan pendahuluan akan berhasil, karena kelompok itu dalam kenyataannya tidak lagi memiliki wewenang untuk bertindak atas nama Republik.

Surat kabar federalis, "Warta Indonesia" berpendapat, bahwa dengan pengumuman Kabinet apa yang disebut Pemerintah Darurat oleh Subandrio di London dapat disimpulkan, bahwa itu terjadi dengan tujuan agar dunia mengerti bahwa perundingan-perundingan tentang masalah Indonesia dengan kelompok Bangka adalah tidak berguna. Sesungguhnya sejak pembentukan Pemerintah Darurat, maka status kelompok Bangka tidak lebih sebagai orang-orang partikelir biasa, sehingga perundingan selanjutnya harus diadakan dengan Sjafoeddin, demikian "Warta Indonesia".

P.D.R. 21 April 1949 (Agno. 2680/ADOC. Geh.)

Tanggal 19 April yang lalu, melalui bekas stasiun AURI di Payakumbuh Mr. Rasjid dan Ir. Sitompul, masing-masing Menteri Perburuhan dan Menteri Sosial (juga Gubernur SWK) serta Menteri Pekerjaan Umum Pemerintah Darurat Republik, menyatakan beberapa keberatan sehubungan dengan politik yang telah dijalankan oleh Pemerintah. Menteri-menteri tersebut menjelaskan bahwa perundingan pendahuluan telah dimulai antara delegasi Republik di bawah pimpinan Mr. Roem dan delegasi Belanda di bawah pimpinan Dr. Van Royen. Kedua menteri ini bertanya, siapa yang memberi wewenang delegasi Republik untuk mengadakan perundingan.

Selanjutnya mereka berpendapat, bahwa sebelum perundingan dengan Belanda dilaksanakan, pertama-tama akan ada pertemuan antara Sukarno dan Hatta di satu pihak, dan di lain pihak Pemerintah Darurat. Pertemuan itu menurut pengetahuannya belum pernah terjadi.

Akhirnya menteri-menteri tersebut bertanya, sampai sejauh mana delegasi Republik dan perwakilan Republik di luar negeri berada di bawah Pemerintah Darurat dan apakah instansi-instansi tersebut telah menerima petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Mereka mengakhiri pernyataan keberatannya sebagai berikut: "Kami mengusulkan agar semua peraturan baik ke luar maupun ke dalam, khususnya sehubungan dengan delegasi kami dan wakil-wakil kami di luar negeri, harus langsung diberikan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan bahwa satu dan yang lainnya di bawah pimpinannya, sehingga terjamin untuk menjalankan suatu politik yang seragam, dan untuk memaksa dunia luar agar mengadakan hubungan langsung dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Perlu dibuat pernyataan baru yang tegas kepada seluruh dunia dan ke dalam negeri, bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia sepenuhnya mempunyai wewenang untuk menentukan segala sesuatu yang bertalian dengan Republik".

P.D.R. 23 April (Agno. 2721/ADOC. Geh.)

Tanggal 21 April, petugas penerangan Pemerintah Darurat dalam sebuah tinjauan yang ditujukan kepada semua stasiun berpendapat, bahwa Belanda berunding dengan berkedok fasisme.

Delegasi Belanda terutama mengajukan persoalan-persoalan hanya dapat dibicarakan jika Pemerintah Sukarno-Hatta bebas kembali, dan dapat men-

jalankan tugas seperti dulu. Lagipula tentara Belanda melanjutkan aksi-aksi pembersihan karena tidak berhasil menumpas kegiatan gerilya Republik. Aksi-aksi itu dapat dipandang sebagai bagian kampanye serangan secara besar-besaran tentara Belanda, dengan maksud untuk menguasai wilayah sebanyak mungkin selama perundingan berlangsung dan untuk menangkap pemimpin-pemimpin Republik, sehingga memadamkan perlawanan rakyat Indonesia. Dinas Penerangan menutup tinjauannya dengan membangunkan rakyat Indonesia agar dengan lebih intensif melanjutkan perang gerilya, sampai Belanda bersedia mengabdikan tuntutan-tuntutan Republik.

P.D.R. 25 April 1949 (Agno. 2752/ADOC. Geh.)

Di kalangan Republik di Batavia orang berpendapat, bahwa sebelum perundingan pendahuluan, sehubungan dengan persoalan Belanda dan Indonesia, suasana di pihak Republik makin menunjukkan tidak adanya kesatuan pendapat. Pada mulanya hanya ada dua anggapan, yaitu kelompok yang mengusahakan sebuah perjanjian yang nyata, sehingga dapat menyelesaikan perselisihan, dan kelompok yang hanya ingin berunding tentang pengembalian Pemerintah Republik ke Yogya, dan kemudian mengajukan pokok-pokok pembicaraan yang lain. Akan tetapi sekarang dapat dilihat adanya empat kelompok, terutama sebagai akibat campur tangan anggota UNCI Cochran dan Critchley, juga Konsul Jenderal India, Allagapan.

1. Mereka yang menginginkan untuk memulai dan mentaati perjanjian secara garis besar, seperti yang diusulkan delegasi Belanda. Sebagai pemimpin-pemimpin dari kelompok ini disebut: Dr. Darmasetiawan, Mr. Kusumatmadja dan Sutan Sjahrir, tetapi saling berbeda pendapat dalam soal-soal detail.
2. Kelompok besar, yang sekarang cenderung untuk mengadakan perjanjian semu sesuai nasihat Cochran dan Critchley. Kelompok ini termasuk mereka yang mula-mula berpendapat, "Pertama-tama kembali ke Yogya, kemudian berbicara". Dapat disimpulkan, bahwa bagian terbesar tokoh-tokoh ini pada dasarnya tidak mengubah pendirian mereka, tetapi perjanjian semu itu dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kelompok ini dapat dimasukkan Sukarno, Hatta dan hampir semua anggota delegasi Republik dan sementara sebagai kekecualian Moh. Roern.
3. Moh. Roem dan kelompok kecil, yang terutama tetap berpegang pada tuntutan berdasarkan pertimbangan prestise dengan tuntutan pertama-tama kembali ke Yogya dan terlaksananya penyerahan kedaulatan, sebelum membuat perjanjian-perjanjian. Akan tetapi diharapkan bahwa mereka "berdasarkan pertimbangan keuntungan" akan berbalik menjadi kelompok ke dua.
4. Pemerintah Darurat, yang didukung oleh pimpinan perlawanan tinggi dan tertinggi, tidak mengijinkan perundingan atau kompromi dengan Belanda.

Pendukung dari kelompok ini adalah juga Dr. Allagapan yang telah mengancam, India akan memberikan bantuan jika Republik tetap pada pendirian yang radikal, tetapi dari siapa diharapkan bahwa dia juga menyokong keputusan bila perjanjian semu itu tercapai. Ini misalnya terbukti ketika dia memberikan bantuan atas nama masyarakat India sebesar F. 1.000 kepada Moh. Roem pada tanggal 21 April yang lalu kepada Republik.

Dari kenyataan di atas terdapat kecenderungan umum untuk mencapai perjanjian semu sebagai "pembagi persekutuan terbesar" dalam pendapat yang berbeda-beda di kalangan Republik. Tentu saja pengaruh pengambilan keputusan ini adalah kesanggupan Cochran, bahwa Amerika Serikat akan memberi bantuan baik berupa keuangan maupun ekonomi, jika Republik menerima perjanjian ini. Sementara mereka juga akan mendesak Filipina untuk memberikan pinjaman pada Republik. Dengan cara yang sama Republik mengharapkan juga mendapat pinjaman dari India.

Jadi dapat dimengerti bahwa kalangan tertinggi Republik cenderung untuk memberikan perintah "Penghentian tembak-menembak", tetapi tidak seorang pun mengharapkan bahwa perintah itu akan menimbulkan pengaruh. Tembak-menembak itu pada kenyataannya baru akan diakhiri bila tentara Belanda tidak ada lagi di "wilayah Republik" dan karena itu masih dapat ditembak, dan baru berhenti setelah penarikan pasukan Belanda.

Pada umumnya di kalangan Republik terdapat keyakinan bahwa suatu "cease fire" dalam Republik yang telah dipulihkan akan dihalang-halangi dengan berbagai cara dan perlawanan selanjutnya tidak akan berkurang.

Jadi dengan cara ini akhirnya Republik mengharapkan akan mencapai apa yang pada saat-saat perjanjian permulaan tidak dapat diperoleh, yaitu perginya tentara Belanda.

Sehubungan dengan Konferensi Meja Bundar, kalangan Republik sekarang di kota ini merasa pasti, bahwa konferensi itu akan dihadiri oleh "Delegasi Indonesia" yang terdiri dari wakil-wakil Republik dan Federalis "BFO". Demikian juga orang-orang Republik mempunyai keyakinan, bahwa setelah kedaulatan V.S.I. menjadi kenyataan, kemudian akan didirikan bentuk negara Kesatuan.

Tanggal 21 April yang lalu, melalui stasiun AURI ex-stasiun Payakumbuh diteruskan tinjauan politik Rasjid dan Sitompul, keduanya anggota Pemerintah Darurat (berdasarkan laporan harian politik No. 13, tertanggal 21 April, pokok ke dua). Dalam tinjauan itu, yang ditujukan kepada Ketua Pemerintah Darurat, keduanya menyatakan setuju dengan pengumuman Menteri Penerangan tertanggal 9 April yang lalu, yang menjelaskan dengan tekanan, bahwa perintah "Penghentian tembak-menembak" hanya dapat dibuat oleh Pemerintah Darurat.

Sehubungan dengan penjelasan Menteri Penerangan itu, Rasjid dan Sitompul menyatakan bahwa bertalian dengan perundingan di Batavia tanggal 16 April yang lalu, Dr. Van Royen mengungkapkan kerisauannya, mengajukan pertanyaan, apakah antara Sukarno-Hatta di satu pihak dan di lain pihak

Pemerintah Darurat telah ada perjanjian yang telah dibuat. Dengan ini sekaligus, anggota-anggota Pemerintah Darurat itu berkesimpulan, walaupun wakil Belanda tidak mengakui Pemerintah Darurat, tetapi dia jelas mengetahui, bahwa hanya Pemerintah Darurat yang saat itu menjalankan kekuasaan Republik. Keadaan itu menurut Rasjid dan Sitompul harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dan mereka mengusulkan Ketua Pemerintah Darurat untuk mengirimkan telegram melalui UNCI, dengan permohonan agar delegasi Republik dapat berhubungan dengan Pemerintah Darurat, sehingga dapat memberikan pernyataan tentang wewenang Pemerintah Darurat ini.

P.D.R. 28 April 1949 (Agno. 2824/ADOC. Geh.)

Seorang informan berpendapat bahwa Sukarno-Hatta tidak pernah menduga bahwa aksi Kepolisian Kedua akan menyebabkan reaksi yang begitu menguntungkan untuk Republik di luar negeri. Penyerahan pemerintah secara resmi oleh Sukarno dan Hatta kepada Tan Malaka yang terjadi pada 19 Desember yang lalu, juga tanpa syarat, sebab mereka menilai perkara itu sebagai kekalahan. Tan Malaka sebaliknya tidak merencanakan pengembalian mandatnya, dan akan mencoba untuk memproklamasikan sebuah pemerintahan sendiri, bila Sukarno-Hatta tidak memberlakukan penyerahan pemerintahannya kepada-

RAPP. T.I.G. 16 Mei 1949 (Agno. 2824/ADOC. Geh)

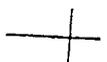
Pokok Pembicaraan: Oposisi Terhadap Sukarno-Hatta

Diketahui bahwa sejumlah pemimpin-pemimpin, yaitu: Sjafroeddin Prawiranegara, Moh. Natsir, Prof. Dr. Supomo, Dr. J. Leimena, Ir. Ukar Bratakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Kol. Nasution dan Simatupang secara rahasia berniat mengadakan oposisi terhadap pemerintah Sukarno-Hatta.

Sjafroeddin akan menolak untuk memberikan mandatnya, juga ketika Sukarno-Hatta telah dikembalikan ke Yogya, dengan alasan bahwa dia mempunyai mandat pemerintah untuk seluruh wilayah Republik, sedangkan Sukarno-Hatta sebaliknya hanya dapat bertindak di wilayah Yogya. Maka segeralah "Komite Nasional Indonesia Pusat" akan dipanggil bersidang. Selama sidang KNIP, akan diajukan usul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Hatta, dan bersamaan dengan itu akan dicoba untuk menyingkirkan Sukarno.

Berikut ini diajukan argumentasi:

1. Walaupun Pemerintah Darurat yang selama perundingan di Batavia, merupakan satu-satunya pemerintah Republik yang resmi, dan sekuat tenaga melawan persetujuan, tetapi Sukarno-Hatta, tanpa mempunyai mandat untuk itu, membuat persetujuan. Karena ini Pemerintah Darurat berada dalam kedudukan terjepit. Agar Republik tetap dihormati di luar negeri, maka Pemerintah Darurat terpaksa untuk menyetujui perjanjian yang telah diputuskan.



2. Bahwa Sukarno—Hatta menyetujui perjanjian ini dengan suatu rencana mengadakan sabotase sebagai tujuan berikutnya, tetap tidak memperoleh persetujuan Pemerintah Darurat. Dengan perantaraan utusan Republik diberitahukan maksud yang sebenarnya kepada pemimpin-pemimpin Republik, pemimpin-pemimpin perlawanan, dan kaum federalis yang pro Republik. Dengan demikian tidak terlihat kemungkinan bahwa satu dan lain juga diketahui kalangan Belanda, yang akan memberitahukan UNCI dan Dewan Keamanan mengenai hal ini. Bahwa dengan itu Republik akan kehilangan simpati luar negeri, paling tidak bagian besar diplomat-diplomat luar negeri, tidaklah dapat diragukan.
3. Selanjutnya Sukarno—Hatta telah mendorong Republik ke pelukan Amerika dengan menyatakan kesanggupan-kesanggupan mereka kepada Cochran (lihat Laporan No. 70 tertanggal 14 Mei 1949), yang membuat Indonesia, walaupun tidak resmi tetapi dalam kenyataannya, dengan perjanjian-perjanjian ekonomi maupun lainnya menjadi "koloni" Amerika.
4. Bahwa Sukarno bukan seorang yang tepat untuk bertindak sebagai Presiden Republik, terbukti selama kekuasaannya. Sebagai contoh-contoh dapat dikemukakan:
 - a. Perjanjian-perjanjian yang telah diputuskan, yang menyangkut perjanjian sebelumnya selalu merugikan Republik, karena wilayah Republik selalu menjadi lebih kecil pada setiap perjanjian.
 - b. Rakyat tidak dapat dilindungi terhadap perbuatan teror tentara mereka sendiri dan kelompok perampok.
 - c. Keadaan ekonomi negara semakin mundur, tidak hanya apa yang telah disebutkan pada pokok a dan b, tetapi juga karena tidak adanya tindakan-tindakan sama sekali, atau tindakan yang sangat lemah, terhadap korupsi.

Sebagai calon presiden akan diusulkan oleh oposisi Sultan Yogyakarta, sementara orang berharap bahwa Sjafroeddin atau Dr. Leimena diharapkan untuk membentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, yang bagian besar diwakili oposisi, maka perjanjian akan dipatuhi sesuai semangatnya, dengan alasan bahwa mereka terpaksa melakukan itu untuk tidak kehilangan simpati luar negeri, walaupun pada mulanya Pemerintah Darurat telah menolak dengan gigih terhadap persetujuan itu.

Akhirnya untuk tidak menyinggung negara-negara bagian baru (diduga akan muncul kesulitan-kesulitan besar pada penentuan wilayah Republik Yogyakarta), maka oposisi berniat untuk membuat rencana untuk membuat seluruh Republik dalam suatu Negara Kesatuan, dengan memberi wewenang kepada pemerintah Negara-negara Bagian sekarang. Oleh Ki Hadjar Dewantara (Anggota Dewan Pertimbangan Agung) sementara itu diajukan sebuah usul kepada Sultan Yogyakarta untuk mengadakan kongres besar nasional secepat mungkin, setelah kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta, yang akan dihadiri oleh seluruh pemimpin Indonesia yang diundang untuk membicarakan mengubah

negara "Indonesia Serikat" menjadi "Negara Kesatuan". Selama kongres itu juga akan diusulkan agar Sultan Yogya, yang bagi kaum federalis merupakan tokoh yang dapat diterima, menjadi Presiden Indonesia.

Juga mengenai hubungan dengan Belanda di masa yang akan datang, Sjafroeddin dkk. mengambil sikap berbeda dengan Sukarno-Hatta. Sehubungan dengan "gentlemen agreement" antara Cochran dan Hatta (lihat Laporan No. 70) kelompok Sukarno-Hatta, disokong oleh St. Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, Moh. Rum dan Sumarto, akan menolak hubungan uni dengan Nederland. Mereka ingin membuat perjanjian bilateral sejauh perjanjian dengan Amerika Serikat tidak dapat memberikan satu dan lain hal.

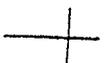
Sjafroeddin dkk. menyadari bahwa Indonesia dalam berbagai bidang belum dapat mandiri. Untuk pembangunan, mereka lebih suka memilih bantuan Belanda daripada akrab bersama-sama dengan Amerika. Dalam hal itu mereka lebih suka dalam hubungan Uni dengan Nederland daripada membuat perjanjian-perjanjian dengan Amerika Serikat.

P.D.R. 2 Mei 1949 (Agno. 2925/ADOC. Geh.)

Kedatangan Hatta di Batavia, oleh kalangan Republik dihubungkan dengan fakta, bahwa sebagian besar anggota-anggota delegasi Republik maupun pemimpin-pemimpin Republik terkemuka lainnya di Batavia, makin lama makin berubah pendapat sesuai dengan "skema Nederland" yang akan memberikan jalan keluar yang paling berhasil. Baik Pemerintah Darurat maupun pemimpin-pemimpin perlawanan dapat meyakinkan Sukarno dan para terkemuka lain-lainnya yang tinggal di Bangka, bahwa tidak hanya mengadakan perjanjian dengan "Canadese ruling" sebagai dasar akan meniadakan wibawa perseorangan pemimpin-pemimpin Republik di Bangka, tetapi juga bahwa kembalinya Pemerintah Republik di Yogya seperti semula, akan sepenuhnya mendapat tantangan para pemimpin perlawanan. Jadi tugas Hatta yang pertama ialah untuk meyakinkan delegasi Republik tentang keadaan yang gawat dan untuk mencegah membuat perjanjian, yang didasarkan kepada pelaksanaan seluruh "Canadese ruling". Tugas yang kedua Hatta ialah ingin mengadakan hubungan pribadi dengan UNCI dan Ketua delegasi Belanda, dan dengan jalan itu mencoba situasi yang berbahaya dapat dihindari serta agar Pemerintah Darurat dan para pemimpin perlawanan dapat menerima perjanjian yang dapat dicapai.

Pengumuman yang dibuat oleh Moh. Natsir pada tanggal 25 April yang lalu, yang sudah tentu sepengetahuan dan telah dirundingkan lebih dulu dengan anggota-anggota delegasi Republik, dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi arah seperti tersebut di muka.

Kedatangan Sultan Yogya atas permintaan Bangka bertujuan untuk meyakinkan delegasi Republik, bahwa kembalinya Pemerintah Republik ke Yogya adalah sesuatu yang mendesak dan sangat penting. Sementara persoalan-persoalan selebihnya dalam "ruling" menempati urutan kedua, sehingga kemungkinan persetujuan perlu dibatasi sampai "kembali ke Yogya".



Di kalangan Republik orang pada umumnya berpendapat bahwa baik kelompok Bangka maupun Sultan Yogya tidak cukup punya kekuasaan untuk menghentikan permusuhan di seluruh garis pertahanan. Kekuatan yang sebenarnya bergantung pada pimpinan pusat gerakan perlawanan, yang di bawah pengaruh kuat Partai Murba, PKI dan kelompok-kelompok kiri lainnya, yang semuanya benar-benar tidak suka untuk mengakhiri permusuhan sebelum seluruh militer Belanda meninggalkan wilayah Republik.

Lagipula orang percaya, bahwa perjanjian yang tetap membatasi wewenang Republik hanya sampai daerah Yogya akan sangat merugikan wibawa Republik di luar negeri, karena perjanjian semacam itu tidak akan diperhatikan, lagipula Tan Malaka dkk. akan beruntung.

Antara Pemerintah Republik dengan kaum federalis yang berorientasi Republik terdapat pandangan yang berbeda mengenai penarikan kembali tentara Belanda. Pemerintah Republik menginginkan pengosongan seluruh wilayah secepatnya, sedangkan kaum federalis menganggap pengosongan dan penggantian bertahap oleh TNI dapat dilaksanakan berdasarkan alasan praktis akan lebih dapat terlaksana. Tentang pembangunan Angkatan Perang Federal pada pertamanya orang ingin membicarakan itu setelah penyerahan kedaulatan sepenuhnya, dan mengenai hal itu orang bersedia menerima penasehat-penasehat luar negeri, tetapi bukan berniat untuk menerima bantuan dari Jenderal Spoor dan stafnya langsung. Maka kalangan Republik juga berpendapat, bahwa dilihat dari banyaknya kesulitan yang terjadi, perundingan akan sampai jalan buntu, oleh karena Belanda mempertahankan pendapatnya.

P.D.R. 7 Mei 1949 (Agno. 3020/ADOC. Geh.)

Dalam sebuah telegram yang dikirimkan kepada seluruh stasiun, Sjafroeddin Prawiranegara meminta agar pendirian Pemerintah Darurat Republik Indonesia tentang perundingan dewasa ini untuk diumumkan secara luas. Sjafroeddin pada pertamanya menunjuk, bahwa sebelumnya telah banyak diumumkan keterangan-keterangan pemerintah. Ia berpendapat tepat waktunya untuk sekarang, mengingat perundingan-perundingan telah sampai tingkat yang begitu jauh, yang akan mengambil keputusan-keputusan, dan sekali lagi mengemukakan pendirian pemerintah :

1. Perigamoilan Pemetintahan Sukarno-Hatta ke Yogya harus sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 tanpa syarat. Penerimaan syarat-syarat yang diajukan Belanda tentang pengembalian ini akan berarti mengesahkan tindakan agresi Belanda.
2. Maka Pemerintah Darurat RI hanya bersedia membantu mewujudkan perintah "Hentikan tembak-menembak" jika TNI tidak ditarik kembali dari setiap kedudukannya. Pemerintah Darurat berpendapat, bahwa kesepakatan hanya dapat dicapai jika pengembalian Pemerintah Sukarno-Hatta ke Yogya disertai pengakuan Belanda terhadap wilayah Republik, mencakup seluruh Jawa, Sumatra dan pulau-pulau di sekitarnya, sesuai

dengan perjanjian Linggarjati. Akhirnya pasukan Belanda secara serentak atau menurut bagian-bagiannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan seluruhnya harus ditarik mundur dari wilayah Republik.

3. Jika Belanda telah memenuhi kedua masalah yang tersebut di atas, Pemerintah Darurat RI tidak akan berkeberatan ikut serta pada Konferensi Meja Bundar pada waktunya dengan syarat tentang perundingan selanjutnya antara Pemerintah Sukarno-Hatta dan Pemerintah Belanda.

Di kalangan Republik orang memperhatikan pedoman-pedoman baru, yang diperoleh Mohi Rum setelah kembali dari Bangka merupakan bukti bahwa pimpinan Republik memberi reaksi kepada saran Cochran mengenai "Perjanjian semu". Cochran menyarankan agar menerima secara menyeluruh "Canadese ruling" dan kemudian setelah kembali ke Yogya mengadakan perundingan-perundingan tentang dua masalah berikutnya dari "Canadese ruling".

Pedoman baru ini telah dikeluarkan dengan persetujuan Pemerintah Darurat dan pimpinan pusat gerakan perlawanan. Orang berpendapat telah menjadi jelas, bahwa "Hentikan tembak-menembak" maupun keikutsertaan dalam Konferensi Meja Bundar dapat terlaksana, sebelum Republik mendapatkan kembali wilayahnya dari tanggal 18 Desember 1948. Pembentukan sementara wilayah Yogya di bawah pemerintah Republik menurut pendapatnya merupakan keuntuhan, bahwa Pemerintah Republik telah kembali di Yogya, sedangkan pimpinan perlawanan harus berusaha agar satu dan lain hal berkembang sesuai dengan cita-cita Republik.

P.D.R. 11 Mei 1949 (Agno. 3239/ADOC. Geh.)

Mr. Sjafroeddin menulis telegram tertanggal 9 Mei yang ditujukan kepada :

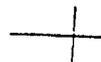
1. Para anggota Pemerintah Darurat di Jawa
2. Jenderal Soedirman
3. Kolonel Simatupang
4. Komandan Tentara Teritorial Sumatra.

Sehubungan dengan perjanjian sementara yang telah diputuskan antara delegasi Indonesia dengan Belanda, Sjafroeddin minta pendapat dan saran dari orang-orang tersebut dan mengirimkan itu kepadanya.

P.D.R. 17 Mei 1949 (Agno. 3241/ADOC. Geh.)

Berdasarkan pernyataan Pemerintah Darurat, perjanjian hanyalah mungkin, jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi :

- A. Pasukan Belanda harus ditarik dari wilayah Republik (seperti telah ditentukan dalam perjanjian Linggarjati). Angkatan Perang RI tetap berada di wilayah sekarang mereka berada.
- B. Pengembalian Pemerintah Republik ke Yogya tanpa syarat.



C. Pengakuan kedaulatan Republik di Jawa, Madura, dan Sumatra. Seorang jurubicara militer dari Pemerintah Militer Aceh menyatakan kritiknya tentang keputusan perjanjian pada tanggal 7 Mei di Batavia.

Di dalam telegram yang ditujukan kepada wakil Pemerintah Darurat, Cdo Jawa, Cdo Sumatra, dan para Gubernur Militer di Sumatra, jurubicara itu antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Sementara itu perundingan dilanjutkan untuk membentuk komisi "Gencatan senjata" yang bertentangan pokok A dalam pernyataan itu.
2. Untuk dapat mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogya, Republik telah menyatakan untuk ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar, yang berarti berlawanan dengan pengembalian tanpa syarat.
3. Dari pernyataan itu bahwa Belanda tidak akan mendirikan pemerintahan federal di dalam bekas wilayah Republik, dapat disimpulkan bahwa wilayah-wilayah itu tidak akan dikembalikan, jadi hal itu adalah sama sekali bukan pengakuan kedaulatan Republik di Jawa, Madura, dan Sumatra.

Catatan DCMI : Dari isi telegram dapat disimpulkan bahwa berita ini lebih banyak berisi pokok masalah, tetapi karena tidak lengkapnya penerimaan (melalui penyadapan, *Red.*), tidak dapat disebutkan.

P.D.R. 18 Mei 1949 (Agno. 3263/ADOC. Geh.)

Alasan dari tujuan kelompok oposisi Sjafroeddin dkk., yang dalam laporan harian No. 34 tertanggal 17 Mei 1949 telah diberitakan pada pokok pertama, tidak hanya keyakinan, tetapi bahwa Sukarno dan Hatta terutama tetap mempertahankan posisi mereka sendiri, dan dengan itu menempatkan kepentingan negara dan rakyat pada rencana yang kedua, tetapi juga keyakinan, bahwa tindakan regim Sukarno-Hatta tidak hanya akan membantu perkembangan komunis, tetapi juga kemungkinan akan membantu komunis. Kelompok oposisi menuduh Sukarno dan Hatta tentang itu, bahkan mereka sendiri adalah komunis, setidaknya-tidaknya menaruh simpati kepada komunisme. Menurut mereka tindakan rejim Sukarno terhadap Muso, Amir Sjarifuddin dan pengikutnya dalam pemberontakan selama bulan September, tidak dilihat sebagai usaha sebagai melawan komunis, tetapi sebagai usaha untuk menghilangkan tokoh-tokoh yang dapat membahayakan posisi Sukarno-Hatta. Hal ini akan menjelaskan mengapa Hatta telah berkali-kali mengeluarkan pendapatnya "tidak akan melawan komunisme sebagai ideologi".

(*Catatan DCMI* : Pada waktu itu telah dipastikan ucapan-ucapan Hatta kepada pers).

Kelompok oposisi mengungkapkan lebih jauh, bahwa Sukarno bersimpati kepada Tan Malaka yang sesuai dengan fakta, bahwa Sukarno memberikan mandat dan keuangan kepadanya, agar perlawanan terhadap Belanda dapat diteruskan, jika Sukarno-Hatta akan dihancurkan oleh aksi militer baru. (*Catatan DCMI* : Tan Malaka memang menyatakan telah mendapat mandat

seperti itu. Juga di dalam surat wasiat Sukarno—Hatta yang terkenal, Tan Malaka disebut sebagai orang yang pertama).

Di kalangan Republik tidaklah mengherankan penjelasan Moh. Rum, bahwa juga orang-orang komunis setuju dengan kembalinya Republik di bawah Sukarno. Kelompok oposisi sekali lagi dengan ini melihat tepatnya pendapat mereka tentang hubungan Sukarno—Hatta dengan komunisme.

D.R.S.I. 23 Mei 1949. Geh.Agno. 3373/AO.

Sekretaris Pemerintah Darurat di Sumatra memberikan pengumuman melalui telegram tertanggal 19 Mei 1949, yang memuat berita tentang pembagian kerja antara anggota-anggota Pemerintah Darurat di Sumatra.

Di dalam Sidang Umum tanggal 16 Mei 1949 telah diputuskan oleh Pemerintah Darurat, bahwa semua kepentingan yang berhubungan dengan Sumatra akan diselesaikan oleh anggota-anggota di Sumatra, yang di samping tugas mereka, berwenang menjalankan tugas menteri lain di luar Sumatra.

Hubungan satu dengan yang lainnya sesuai skema :

1. Mr. Sjafroeddin Prawiranegara, Ketua, Menteri Pertahanan dan Penerangan, mewakili Menteri Luar Negeri.
2. Mr. Teuku Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mewakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
3. Mr. St. Moh. Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial, mewakili Menteri Pembangunan dan Pemuda, dan mengerjakan juga urusan tentang Keamanan.
4. Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan mewakili Menteri Kehakiman.
5. Ir. Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum mewakili Menteri Kesehatan.
6. Mr. Indratjaja, Menteri Perhubungan mewakili Menteri Kemakmuran.

D.R.S.I. 24 dan 25 Januari 1949. Agno's 566 dan 540/AO 20

Ketika Pemerintah Republik menyadari tidak dapat menghindari lagi konflik baru setelah putusnya perundingan bulan Desember 1949, dan sadar melihat pendudukan wilayah Republik tidak dapat dicegah, maka diputuskanlah untuk mendirikan Pemerintah Darurat dan untuk mendirikan pimpinan perlawanan yang memimpin gerilya.

Sukarno dan sejumlah menteri bermaksud akan pergi ke India untuk meneruskan aksi di tingkat internasional melawan Belanda. Oleh karena pesawat yang harus menjemput Sukarno dkk. terlambat datang, maka rencana ini gagal. Dalam sebuah sidang kabinet di istana Sukarno pada tanggal 19 Desember 1948, maka menurut sebuah laporan rahasia dari bekas Konsul India Mr. Junus telah diputuskan seperti berikut :



- a. Perlawanan Republik akan diteruskan pada basis gerilya dan akan dilaksanakan oleh TNI dan organisasi lain (350.000 orang) yang seluruhnya di bawah pimpinan komunis Tan Malaka yang dibantu oleh sejumlah opsir tinggi TNI, 10 opsir Jepang, 5 opsir India, 3 pemimpin komunis Cina dan pemimpin partai-partai yang berbeda (Sukiman, Ali Budiardjo, Ukar, Sutomo dan kaum komunis D.N. Aidit, Chaerul Saleh, Wikana, Sudero, dan Ibnu Parna).
- b. Tan Malaka telah diberi sejumlah uang sebesar Fl. 1.025.000 Belanda dalam uang kertas Java. Bank dan emas batangan.
- c. Pejuang gerilya setidak-tidaknya harus dapat bertahan selama 3 tahun untuk melanjutkan peperangan.
- d. Akan dilakukan propaganda untuk mengobarkan semangat rakyat agar meneruskan perjuangan.
- e. Dr. Sudarsono, wakil dan pemegang kuasa penuh menteri Republik Indonesia di India dikuasakan atas nama Republik untuk membuat perjanjian politik di dalam keadaan Sukarno tidak mempunyai kesempatan untuk itu.

D.R.S.I. 22 Desember 1949

Pada tanggal 20 Desember Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah Pusat mengumumkan dari Tawangmangu, bahwa seandainya tidak ada Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan Pemerintah Pusat akan diserahkan pada 3 menteri, yaitu :

Menteri Dalam Negeri : Dr. Soekiman

Menteri Kehakiman : Mr. Soesanto Tirtoprodjo

Menteri Perhubungan : Djoeanda

Selanjutnya diumumkan bahwa sehubungan dengan keadaan sekarang, tugas tersebut telah diserahkan secara resmi.

Dari pemeriksaan bekas Walikota Republik Solo yang ditahan, ternyata maksud Pemerintah Republik berada di tangan Soekiman, Soesanto Tirtoprodjo (Menteri Kehakiman) dan Djoeanda (Menteri Perhubungan), ialah setelah Sukarno dengan beberapa menteri pergi ke India. Oleh aksi Kepolisian yang tiba-tiba, rencana ini gagal.

Soekiman, Soesanto dan Kasimo (Menteri Urusan Pemuda, *Sic.!*) berada di Solo. Mereka memutuskan sesuai rencana semula untuk membentuk apa yang disebut pemerintah (*Sic.!*), yang juga akan mengangkat Susuhunan dan Mangkoenegara sebagai "Menteri Negara". Putusan itu diambil pada tanggal 20 Desember.

Sidang kabinet pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 malam 21 Desember, tidak terlaksana sehubungan dengan makin mendekatnya pasukan-pasukan Belanda.

D.R.S.I. 23 Desember 1948

Pada tanggal 22 Desember diumumkan, sehubungan dengan kenyataan bahwa perhubungan dengan Jawa telah terputus, maka untuk sementara didirikan "Pemerintah Pusat Darurat Republik" di Sumatra, yang menggunakan kekuasaan penuh ke dalam dan ke luar, selama Pemerintah Sukarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugas-tugas negara.

Pemerintah akan terdiri dari :

Mr. Sjafroeddin Prawiranegara, Ketua

Mr. Tengkoeh M. Hasan

Mr. Indratjaja

Mr. St. Moh. Rasjid

Ir. Sitompul.

D.S.R.I. 24 Desember 1948

Pada tanggal 23 Desember 1948 Pemerintah Darurat RI ini mengirim telegram kepada seluruh stasiun dan kepada delegasi Republik di UNO, bahwa ia bersedia memberikan perintah "Hentikan tembak-menembak" kepada pasukannya dan kembali melakukan perundingan dengan Belanda dengan syarat-syarat seperti berikut :

1. Pertama harus dibebaskan anggota-anggota Pemerintah Republik yang ditahan Belanda.
2. Tentara Belanda yang masuk wilayah Republik sejak tanggal 19 Desember ditarik kembali ke posisi semula.
3. Pengakuan RI sebagai negara de facto dan de jure yang mencakup wilayah Jawa dan Sumatra tanpa syarat.
4. Segera membentuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, mencakup seluruh pulau-pulau di Indonesia (dahulu bekas Hindia Belanda) dengan dasar demokrasi bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Belanda.
5. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia secepat mungkin dengan ketentuan bahwa pada saat negara Indonesia yang bebas dan merdeka dibentuk, tentara Belanda tidak ada lagi di Indonesia. Kepentingan ekonomi Belanda akan diperhatikan dengan baik.

Selanjutnya Ketua Pemerintah Darurat RI pada tanggal 23 Desember 1948 memohon kabinet RI di Jawa untuk memberitahukan, anggota-anggota mana yang masih dalam kedudukan dan tindakan-tindakan mana yang telah diambil. Pada tanggal yang sama Ketua Pemerintah Darurat RI di Sumatra memberi tahu kepada rakyat Indonesia, bahwa untuk mencegah kesalahpahaman dan kekacauan telah diumumkan kepada seluruh anggota Angkatan Perang bahwa tembak-menembak hanya dapat dihentikan, jika perintah itu diumumkan oleh Ketua Pemerintah Darurat.

Pada tanggal 27 Desember telah disadap radiogram sebagai berikut :

Dari Soedirman

Kepada Mr. Soedarsono, India

"Harap segera membentuk Pemerintah di India".

Tembusan kepada Mr. Sjafroeddin.

Laporan Harian S.I. 1 Januari 1949

Pada tanggal 28 Desember 1948 Kolonel Hidajat mengumumkan perintah harian bahwa seluruh komando pasukan Republik berada di tangannya, dan pasukan diperintahkan untuk meneruskan pertempuran dan jangan menghentikan tembak-menembak sebelum dipenuhi syarat-syarat itu, yang telah ditentukan Pemerintah Darurat pada tanggal 23 Desember.

D.S.R.I. 16 Januari 1949

Pemberitahuan radio Pemerintah Jawa Timur kepada Pemerintah Darurat RI di Sumatra tertanggal 14 Januari 1949 berbunyi : "Dengan ini saya mengirimkan Saudara keputusan-keputusan Dewan Menteri selama sidang tanggal 19 Desember 1948 sebagai berikut :

1. Selama Presiden dan Wakil Presiden terhalang untuk menjalankan tugas mereka, pimpinan Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perhubungan.
2. Menteri Dalam Negeri berada di luar Yogya, juga Menteri Persediaan Makanan, serta Menteri Pembangunan dan Pemuda.
3. Dua Menteri tersebut di atas semuanya akan berusaha agar pemerintah selalu akan dapat berjalan.

D.R.S.I. 12 Januari 1949

Teks pemberitahuan dari Ketua Pemerintah Darurat RI kepada wakil Republik di UNO :

"Pada tanggal 26 Desember 1949 Pemerintah Darurat RI mengirim telegram kepada Komisi Jasa-Jasa Baik sebagai berikut :

Kepada Komisi Jasa-jasa Baik Jakarta.

Kami tidak dapat menerima Presiden, Wakil Presiden dan lain-lain yang telah ditangkap Belanda sebagai pembesar merdeka penuh, selama mereka belum diserahkan dengan selamat kepada Pemerintah Darurat oleh pembesar-pembesar Belanda, c.q. oleh perwakilan Anda.

Penghinaan yang dilakukan kepada bangsa kita tidak dapat dihapuskan tanpa kebebasan fisik yang lebih besar kepada pemimpin-pemimpin nasional kita yang tercinta. Anda dapat menghubungi kami melalui All India Radio".

Pada tanggal 10 Januari, Ketua mengumumkan kepada luar negeri bahwa Pemerintah Republik cenderung menuruti perintah "Hentikan tembak-menembak" Dewan Keamanan sebagai persiapan sebelum memulai perundingan kembali dengan Belanda di bawah pengawasan dan perlindungan Dewan Keamanan. Tetapi mereka mengutamakan perantaraan oleh Konferensi Asia di New Delhi, oleh karena menurut pendapatnya Dewan Keamanan ternyata tidak mampu mencegah agresi kolonial Belanda.

D.R.S.I. 21 Januari 1949. Gehagno. 454/AO. 20

Maramis pada tanggal 19 Januari 1949 diangkat Pemerintah Darurat menjadi Menteri Luar Negeri.

D.R.S.I. 26 Januari 1949. Gehagno. 612/AO. 20

Pada tanggal 24 Januari Pemerintah Darurat (Sjafroeddin) mengirim berita kepada Nehru melalui Maramis, bahwa dia telah mempelajari isi resolusi yang telah diterima pada Konferensi Asia, dan berikut ini komentar yang mungkin dibuat oleh Sjafroeddin:

"Keputusan itu menurut pendapat saya masih belum sesuai dengan tuntutan-tuntutan kami, terutama pengakuan de jure kepada Republik Indonesia tidak diberikan, yang benar-benar merupakan kepentingan utama, oleh karena hal itu menjamin penuh, bahwa Belanda tidak akan lagi menyerang Republik dan tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa perselisihan antara Belanda dan Indonesia adalah urusan dalam negeri. Akan tetapi karena saya yakin bahwa negara-negara Asia yang telah mengambil keputusan itu juga akan terus melanjutkan memberikan bantuan sepenuhnya, sampai akhirnya menjamin terbentuknya kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1950, saya menerima resolusi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab atas dasar setiakawan dengan negara-negara yang ikut serta dalam konferensi".

Adalah penting, bahwa saya masih mengajukan satu masalah lagi, yaitu pengembalian wilayah-wilayah Republik, dan pemerintah kembali dapat menjalankan tugas-tugasnya. Di dalam wilayah-wilayah itu terlihat kekurangan-kekurangan yang besar sekali, terutama di bidang keuangan, perhubungan, dan ekonomi pada umumnya, yang diakibatkan oleh aksi Belanda dan yang sulit untuk mengatasinya, jika kita tidak menerima bantuan dari negara-negara sahabat".

Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada Pemerintah India dan yang lainnya, dengan keikutsertaannya pemerintah-pemerintah dalam konferensi atas jasa-jasa yang telah diberikan dan harapan yang telah dikemukakan, sehingga keputusan-keputusan konferensi Asia yang telah diambil dengan suara umum, juga dapat diterima oleh Dewan Keamanan, sebab jika syarat-syarat di dalam resolusi Dewan Keamanan kurang sesuai dengan keputusan-keputusan kita, maka sulit akan dapat kita terima.



D.R.S.I. 27 Januari 1949. Gehagno. 633/AO.

Pada tanggal 25 Januari, Sjafroeddin mengirim berita kepada Maramis untuk meminta perhatian C.G.D. (Commissie van Goede Diensten, Red.) agar memperhatikan Sumatra, dan pengawas militer dikirimkan kesana. Keamanan pengawas militer di wilayah Republik akan dijamin. Selanjutnya Maramis diminta untuk menjelaskan kepada C.G.D. tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam usaha penghentian tembak-menembak dalam perang gerilya di beberapa wilayah, karena tidak dapatnya aparat pemerintah menjalankan tugas, yang diakibatkan oleh agresi Belanda.

D.R.S.I 28 Januari 1949. Gehagno. 675/AO.

Sjafroeddin meneruskan kepada Mr. Maramis telegram dari Pj. Kepala Staf Angkatan Perang di Jawa, Kolonel Simatupang tentang ketidakmampuan tentara Belanda untuk mengendalikan situasi di kota-kota besar dan untuk mengatur dengan baik tugas-tugas pemerintahan.

D.R.S.I. 2 Februari 1949. Gehagno. 771/AO.

Pada tanggal 31 Januari Sjafroeddin (Ketua Pemerintah Darurat) mengeluarkan perintah harian yang menyebutkan bahwa pertempuran hanya dapat dihentikan atas perintah Panglima Tertinggi (Hidajat?) yang mengenai hal itu akan diadakan perundingan dengan Pemerintah Darurat. Selama perintah itu masih belum diberikan, pertempuran harus dilanjutkan dengan se-penuh kekuatan.

Pada tanggal 1 Februari Pemerintah Darurat melalui perantara Soedarsono mengirim berita kepada Menteri Luar Negeri, Maramis, sebagai berikut :
31 Januari 1949

"Menurut keputusan Pemerintah Republik Indonesia perintah gencatan senjata hanya dapat diberikan oleh Presiden di dalam kedudukan sebagai Panglima Tertinggi setelah musyawarah antara Presiden, Wakil Presiden dan Pemerintah Darurat".

Selanjutnya pada tanggal 31 Januari, Ketua Pemerintah Darurat mengirim berita kepada berbagai pembesar Republik sebagai berikut :
"Saya telah memberitahukan dalam instruksi-instruksi kepada wakil Republik di UNO (PBB, Red.), bahwa resolusi Dewan Keamanan sulit untuk diterima, apabila isinya kurang luas daripada resolusi Konferensi Asia. Sikap saya tergantung kepada pembicaraan-pembicaraan saya dengan Presiden dan Wakil Presiden. Tingkatkan perjuangan".

D.R.S.I. 9 Februari 1949. Gehagno. 1013/AO.

Pada tanggal 5 Februari Kolonel Hidajat "Panglima Angkatan Perang Republik" mengirim berita kepada Gubernur Militer Aceh dan Sumatra Selatan sebagai berikut :

"Sehubungan dengan undangan Pemerintah Darurat kepada C.G.D. untuk berkunjung ke wilayah kekuasaan kami, saya memberitahukan Saudara, bahwa hal itu semata-mata didasarkan atas politik negara kami dan tidak mempunyai hubungan dengan masalah-masalah pertahanan. Agar Saudara memperhatikan hal ini serta mengizinkan rakyat berhubungan dengan C.G.D."

Pada tanggal 6 Februari Dinas Penerangan dari apa yang disebut Pemerintah Darurat mengeluarkan suatu berita yang antara lain berisi sebagai berikut :

"Untuk menghilangkan semua keragu-raguan, maka hal ini perlu dijelaskan, bahwa Pemerintah Darurat RI tidak dapat menerima resolusi dari Dewan Keamanan, yang tidak sejauh resolusi Konferensi Asia.

Dalam sebuah telegram tanggal 6 Februari yang ternyata untuk New Delhi, apa yang disebut Pemerintah Darurat meminta kepada Palar atau wakil Republik lainnya di luar negeri, untuk menyampaikan berita kepada Sukarno—Hatta bahwa sebelum mereka mengadakan suatu pertemuan dengan Pemerintah Darurat, tidak menjalankan perundingan resmi maupun tidak resmi dengan Pemerintah Belanda atau BFO.

D.R.S.I. 12 Februari 1949. Gehagno. 1029/AO.

Tertanggal 6 Februari 1949 telah disadap sebuah siaran dari Dinas Penerangan Pemerintah Darurat, yang menjelaskan bahwa rakyat Indonesia telah mempunyai pengalaman yang cukup pahit tentang sikap dan tindakan Belanda.

Kami tidak perlu untuk menunggu kegagalan yang baru. Dalam situasi yang (buruk?) bagi kami kelak sukar untuk dapat menjalankan perlawanan terhadap agresi Belanda. Sebaiknya kami melanjutkan pertempuran sekarang sampai Belanda mengabdikan tuntutan kami. Pemerintah Darurat pertama-tama menunggu suatu kesempatan untuk dapat berbicara, setidaknya dengan Presiden dan Wakil Presiden, sebelum beralih untuk menentukan suatu sikap yang pasti.

D.R.S.I. 13 Februari 1949. Gehagno. 1042/AO.

Tertanggal 11 Februari 1949 Dinas Penerangan Pemerintah Darurat mengabarkan, bahwa Komisi UNO untuk Indonesia telah memberikan suatu ultimatum kepada Pemerintah Belanda dan RI selama empat hari, yang berisi kedua pihak itu harus memulai suatu perjanjian seperti yang telah diusulkan Dewan Keamanan dalam resolusi terakhir. Bila berita ini benar, maka selanjutnya perlu diberitahukan pihak Republik bahwa keterlambatan itu tidak disalahkan kepada Pemerintah Republik.

Meskipun Pemerintah Darurat telah menerima wewenang sepenuhnya untuk menjalankan kekuasaan, namun tidak berani untuk mengambil suatu tindakan, sebelum perundingan diadakan dengan Sukarno dan Hatta.



D.R.S.I. 19 Februari 1949. Gehagno. 1224/AO.

Ketua Pemerintah Darurat pada tanggal 16 Februari 1949 menghubungi Pemerintahan Militer di Jawa Tengah dengan permohonan untuk memperhatikan bahwa Pemerintah Darurat di Sumatra harus dijadikan sebagai satu-satunya Pemerintah Pusat Sementara, dengan posisi tetap di luar negeri.

Pemerintahan ini menjalankan kekuasaan sepenuhnya baik ke dalam maupun ke luar di Indonesia dan akan melakukan hal itu sampai ada kepastian bahwa Pemerintahan Sukarno-Hatta akan dapat menjalankan tugasnya kembali.

Sehubungan dengan hal itu sesuai dengan keinginannya, Pemerintahan Pusat di Jawa disusun dalam bentuk sebagai Komisariat Pemerintah Darurat, dan bukan sebagai suatu Kabinet Darurat yang telah diberitakan.

D.R.S.I. 21 Februari 1949. Gehagno. 1251/AO.

Sehubungan dengan berita yang lalu, dengan keterangan Mr. Sjafroeddin tentang posisi Pemerintah Darurat di Sumatra, sekarang dibenarkan oleh Menteri Kasimo, bahwa dalam sidang kabinet tanggal 16 Desember 1948 telah diambil keputusan tentang pembentukan suatu Pemerintah Darurat di Sumatra di bawah pimpinan Mr. Sjafroeddin. Lima menteri (yang tidak ikut tertangkap Belanda) di Jawa hanya merupakan bagian dari Pemerintah Pusat di Sumatra.

D.R.S.I. 22 Februari 1949. Gehagno. 1353/AO.

Dinas Penerangan Pemerintah Darurat di Sumatra memberikan komentar berikut ini tentang rencana Beel :

Berhubung dengan diterimanya resolusi Dewan Keamanan, maka akhirnya Pemerintah Belanda mau tidak mau terpaksa harus menentukan pendiriannya. Resolusi Dewan Keamanan ketika itu dengan cara yang jelas telah ditolak, tetapi untuk menghindari akibat-akibatnya, sekarang telah diajukan rencana Belanda, yaitu apa yang disebut Rencana Beel, yang kelihatannya lebih luas dan lebih dapat diterima oleh rakyat Indonesia daripada penyelesaian seperti dikemukakan oleh Dewan Keamanan.

Jalan pikiran Pemerintah Belanda ialah bahwa Dewan Keamanan akan menerima Rencana Beel dan akan menarik lagi resolusinya tanggal 28 Januari 1949.

Bila rencana Belanda ini secara dangkal dilihat ingin menyerahkan kedaulatan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1949, maka hal itu seharusnya terjadi satu tahun sebelumnya dari ketentuan Dewan Keamanan. Di sini berarti telah terjadi perubahan arah politik radikal yang tidak diduga oleh pemerintah Nederland.

Maka kita juga tidak heran tentang hal ini, ketika Wakil Presiden B.F.O. ketika ia membaca apa yang dinamakan Rencana Beel, menamakan itu sebagai suatu kebohongan pendapat dunia.

Pernyataan ini dibuat oleh S.I. dari Staf Umum. (Belanda, Red.) bahwa *Waspada* tanggal 14 Februari 1949 memuat berita yang berbunyi, bahwa

Pemerintah Darurat di Sumatra telah menolak Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949.

D.R.S.I. 28 Februari 1949. Gehagno. 1416/AO.

Mr. Sjafroeddin, Ketua Pemerintah Darurat pada tanggal 25 Februari 1949 mengumumkan ke seluruh dunia tentang pendiriannya, sehubungan dengan apa yang dinamakan Rencana Beel.

Agar jangan memberi kesan bahwa Republik tidak bersedia untuk memasuki perundingan dengan Belanda, dia mulai dengan ringkasan kenyataan-kenyataan terutama yang sejak tahun 1945 telah terjadi, dan apa yang telah dimuat dalam perjanjian Linggarjati dan Renville.

Selanjutnya Belanda telah dituduh memulai Aksi Polisi Kedua pada saat Republik benar-benar berhasil menumpas pemberontakan Muso. Sekali lagi dengan menunjukkan bahwa Republik cenderung untuk mengadakan perundingan dengan Belanda, maka dikemukakan tuntutan berikutnya yang pada tingkat pertama harus dipenuhi :

- a. Rehabilitasi sepenuhnya Republik, terdiri dari :
 1. Pembebasan orang-orang penting Republik dari tahanan.
 2. Pengembalian wilayah Republik yang telah diambil dengan cara kekerasan walaupun bertentangan dengan perjanjian Linggarjati dan Renville.
- b. Pengakuan terhadap Republik, artinya TNI harus juga diakui, dan bahwa tentara Belanda harus ditarik mundur dari wilayah Republik.

Selanjutnya Sjafroeddin memberitahukan perintah "Hentikan tembakan-tembak" baru dapat diberikan, setelah dipenuhi syarat-syarat dalam a ad 1 dan ad 2.

D.R.S.I. 1 Maret 1949. Gehagno. 1433/AO.

Sebagai reaksi resmi terhadap keterangan Pemerintah Belanda sehubungan dengan Rencana Beel, Sjafroeddin, Ketua Pemerintah Darurat di Sumatra mengabarkan, bahwa pendirian yang telah diambil tetap dipertahankan.

Sebelum berunding dengan Belanda, tetap dipertahankan tuntutan yang diberitahukan lebih dulu bahwa :

- a. Pengakuan terhadap Republik oleh Belanda sesuai dengan perjanjian Linggarjati.
- b. Penarikan mundur tentara Belanda dari seluruh bekas wilayah Republik

Pendirian ini diumumkan ke seluruh dunia, sementara Angkatan Perang Republik dianjurkan terus melanjutkan perang dengan lebih intensif.

D.R.S.I. 3 Maret 1949. Gehagno. 1494/AO.

Hidajat telah mengabarkan kepada seluruh Komandan Angkatan Perang bahwa tidak boleh diadakan perundingan lokal, dan bahwa perintah "Hentikan tembak-menembak" hanya boleh ditaati jika ini berasal dari Panglima Tertinggi.

D.R.S.I. 7 Maret 1949 jam 10.00. Gehagno. 1561/AO.

Dari pihak Komisariat Pemerintah Darurat di Jawa timbul reaksi kepada Rencana Beel dengan penyerahan kedaulatan yang dipercepat dan dengan akan diadakannya Konferensi Meja Bundar.

Dengan telegram dari Mr. Moh. Roem yang dengan tegas menolak usul-usul Belanda, telah disetujui sepenuhnya.

Jurubicara Komisariat dan militer, ex Jenderal Mayor Soehardjo, memberitahukan bahwa dengan Rencana Beel, Belanda telah menolak resolusi Dewan Keamanan.

Telah didesak agar Pemerintah Darurat di Sumatra akan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang khusus guna membicarakan masalah-masalah yang muncul.

Pokok kedua adalah untuk meminta bantuan pada negara-negara Konferensi Pan-Asia yang dianjurkan untuk menerapkan sanksi ekonomi dan diplomatik.

Jurubicara militer Soehardjo memberitahukan bahwa Konferensi Meja Bundar yang diwakili oleh Sukarno dan kawan-kawan tidak akan berhasil, selama Sukarno dan kawan-kawan tidak dapat mengadakan musyawarah dengan kabinet dan KNIP, dan untuk itu syarat pertama ialah pemulihan kekuasaan Republik di Yogya.

Akhirnya dia memperingatkan pimpinan Republik dan Federal untuk tidak menyalahgunakan dan melakukan tekanan terhadap Angkatan Perang Republik.

Soehardjo memberikan petunjuk agar pada kesempatan perundingan dengan Belanda memberikan perhatian kepada pendapat pimpinan tertinggi Angkatan Perang, oleh karena pimpinan ini dalam tahap sekarang memegang kendali perang kemerdekaan.

Apabila Pemerintah Belanda melaksanakan rencana-rencananya antara lain dengan mengadakan Konferensi Meja Bundar tanpa Sukarno dan kawan-kawan, maka perjuangan bersenjata akan dilanjutkan sampai akhir yang lebih pahit, demikian kata Soehardjo.

D.R.S.I. 9 Maret 1949 jam 10.00 Gehagno. 1650/AO.

Tertanggal 7 Maret yang lalu Menteri Kasimo, memberitahukan Ketua Pemerintah Darurat Republik melalui bekas stasiun Gading, bahwa dengan Kolonel Simatupang telah dibicarakan susunan Komisariat. Hal ini diusulkan agar hal ini dapat terlaksana.

1. Komisariat Pusat Pemerintahan Jawa, disingkat KPPD didirikan berdasarkan keputusan Pemerintah Darurat RI yang menetapkan tugas dan kewajiban Komisariat dan mengumumkan satu dan lainnya baik ke luar maupun ke dalam.
2. Mengangkat Menteri-menteri sebagai anggota-anggota, antara lain Dr. Soekiman (Ketua), Kasimo, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Supeno dan Maskur. Komisariat dapat mengangkat pengganti untuk anggota-anggota yang harus bebergian dan selama Dr. Soekiman pergi, RP Soeroso adalah penggantinya.
3. Komandan Tentara Teritorial Jawa adalah anggota Penasehat KPPD.
4. KPPD menjalankan pemerintahan umum di Jawa dan Madura dengan tugas khusus untuk mengorganisasi kembali (?) dan untuk menggunakan semua sumber kekuatan bagi kepentingan perjuangan. KPPD bertanggung jawab kepada Pemerintah Darurat RI. KPPD memberikan nasehat dalam semua urusan kepada Pemerintah Darurat RI, dan Pemerintah Darurat akan mengambil keputusan yang penting, dan dengan meminta nasehat dari KPPD.
5. Komandan Tentara dalam kualitas sebagai Panglima Besar Angkatan Perang di seluruh Republik adalah anggota penasehat Pemerintah Darurat RI.

D.R.S.I. 9 Maret 1949 jam 10.00. Gehagno. 1650/AO.

Mr. Sjafruoeddin Prawiranegara, Ketua Pemerintah Darurat Republik di Sumatra mengumumkan melalui radio mobil Pemerintah Darurat tertanggal 8 Maret yang lalu, bahwa menurut pendapatnya, Konferensi Meja Bundar harus berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

1. Pembentukan Pemerintah Federal Sementara selambat-lambatnya bulan Juli 1949 dan perwakilan terdiri dari 50% Republik, 40% Negara Bagian dan 10% kelompok minoritas.
2. Kepada Pemerintahan Federal Belanda harus menyerahkan kedaulatan.
3. Sebelum pembentukan tentara federal, TNI harus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Republik, atas permohonan Pemerintah Federal. Di wilayah lainnya tentara Belanda harus memelihara keamanan dan ketertiban.
4. Untuk susunan Konstituante, Pemerintahan Federal Sementara harus mengadakan pemilihan umum dengan segera di bawah pengawasan Komisi PBB. Kemudian Konstituante itu harus menyusun Undang-undang Dasar dan memilih Pemerintah Federal yang definitif.
5. Tentara Belanda harus ditarik kembali dari seluruh Indonesia pada tanggal yang bersama-sama akan ditentukan oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Belanda, dan Komisi PBB.

6. Kemudian peraturan dasar Uni Indonesia-Belanda ditentukan dan dikukuhkan oleh Parlemen Indonesia dan Belanda.

D.R.S.I. 16 Maret 1949 jam 10.00 Gehagno. 1880/AO.

Pada tanggal 14 Maret, Ketua Pemerintah Darurat di Sumatra mengirim telegram secara luas kepada Komisariat RI di Jawa, dan mengajukan usul untuk mengubah dan melengkapi susunan Pemerintah Darurat RI sekarang dengan menambah Menteri-menteri yang sekarang masih melakukan tugasnya di Jawa, yang kemudian juga diangkat sebagai anggota dalam badan pemerintah ini.

Dengan demikian satu dan lainnya disusun sebagai berikut :

Mr. Sjafroeddi Prawiranegara, Ketua Pertahanan dan Penerangan

Mr. A.A. Maramis, Urusan Luar Negeri

Dr. Soekiman, Urusan Dalam Negeri dan Kesehatan

Mr. Lukman Hakim, Keuangan

I.J. Kasimo, Kemakmuran, termasuk Persediaan Makanan

Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Kehakiman

Maskur, Agama

Mr. Teuku Moh. Hassan, Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan

Ir. Indratjaja, Perhubungan

Ir. Sitompul, Pekerjaan Umum

Mr. St. Moh. Rasjid, Urusan Perburuhan dan Sosial

Supeno, Urusan Pembangunan dan Pemuda

Kementerian Persediaan Makanan Rakyat dibubarkan, dan tentang urusan ini dikerjakan oleh Kementerian Kemakmuran.

Dari sini timbul pekerjaan-pekerjaan bagi anggota-anggota di Jawa dan Sumatra yang dipikirkan sebagai berikut :

- a. Semua urusan yang berhubungan dengan "umum", khususnya di dalam "kebijaksanaan politik luar negeri" diatur berdasarkan atas "musyawarah bersama" antara anggota di Jawa dan Sumatra (terkecuali dalam situasi yang mendesak yang oleh anggota-anggota di Sumatra sendiri dapat diambil suatu keputusan).
- b. Semua urusan yang berhubungan dengan Jawa diatur oleh anggota yang berada di Jawa, dan juga mengerjakan urusan-urusan di samping tugas mereka, yang termasuk pekerjaan anggota Pemerintah Darurat RI di Sumatra. Demikian juga semua urusan yang berhubungan dengan Sumatra di samping tugas-tugasnya juga mengerjakan pekerjaan yang termasuk salah satu anggota Pemerintah Darurat RI di Jawa.
- c. Anggota di Jawa merupakan suatu Komisariat Pemerintah Darurat RI, dan Komisariat dalam masalah umum dapat mengambil suatu keputusan, termasuk yang berhubungan dengan Sumatra. Di sisi lain yang berada di Sumatra tidak dapat disebut sebagai Komisariat. Sebagai penasihat KPPD di Jawa dipikirkan Komandan Tentara Teritorial Jawa,

dan di Sumatra Kolonel Hidajat, Komandan Tentara Teritorial Sumatra. Kedudukan Sjafroeddin sendiri dengan disetujuinya rencana ini akan bertambah kuat dan makin penting.

D.R.S.I. 18 Maret 1949 jam 10.00 Gehagno. 1926/AO.

Menurut seorang intelektual Indonesia yang sarat informasi di kalangan atas Pemerintah Republik telah terjadi perbedaan pendapat yang serius, sehubungan dengan niat Maramis untuk membentuk "Pemerintah di Pengasingan" di New Delhi.

Pemerintah itu akan mempunyai Maramis sebagai Presiden, dan selanjutnya terdiri dari Sudarsono, Palar, Utoyo, dan Subandrio. Akan tetapi Moh. Hatta menginginkan Pemerintah Darurat di Sumatra tetap dipertahankan (berita ini belum dinilai).

D.R.S.I. 21 Maret 1949 jam 10.00 Gehagno. 2072/AO.

Sekitar tanggal 19 Februari yang lalu di Yogya dijumpai suatu pengumuman dan suatu instruksi "non koperasi" dari Kolonel A.H. Nasution.

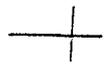
Dalam pengumuman (tertanggal 17 Januari 1949) Kolonel Nasution yang mengatakan dirinya sebagai Panglima Komando II (Jawa dan Madura) mengumumkan bahwa Hatta pada tanggal 19 Desember 1948 telah memberikan perintah untuk meneruskan perjuangan dalam keadaan apa pun. Selanjutnya dia memberitahukan bahwa di Jawa telah dibentuk badan perwakilan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan keputusan rapat Kabinet tertanggal 16 Desember 1948, dan bahwa Sudirman memegang pimpinan tertinggi Angkatan Perang.

Pengumuman itu diakhiri dengan pemberitahuan, bahwa Nasution sebagai Panglima Komando II pada tanggal 20 Desember 1948, untuk seluruh Pulau Jawa dan Madura, telah mendirikan suatu Pemerintahan Militer dipimpin oleh empat Gubernur Militer. Kita berusaha untuk mendirikan Pemerintahan Sipil Militer, demikian Nasution. Ada hubungan antara Pemerintah Pusat dan semua Gubernur Militer, demikian juga dengan Sumatra. Karena itu Nasution menganjurkan agar semua instansi terkait untuk tetap berada di posnya, dan untuk meneruskan perjuangan.

Dengan instruksi "non-koperasi" (tertanggal 5 Januari 1949), Kolonel Nasution berdasarkan perintah Wakil Presiden tersebut dimuka memerintahkan untuk meneruskan perang dalam keadaan apa pun. Instruksi itu berisi agar semua yang bekerja pada musuh sebagai pegawai negeri dan pegawai desa untuk memberitahukan pada Pemerintah Militer RI, yang sejak 22 Desember 1948 telah dibuka kembali untuk seluruh Pulau Jawa.

Semua yang tetap bekerja pada musuh sebagai warganegara Indonesia dianggap sebagai penjahat perang, dan mereka yang berada dalam keadaan demikian harus diadili menurut hukum perang militer.

Berdasarkan instruksi ini harus diambil tindakan oleh Gubernur Militer, Komando-komando Militer, KDM dan KODM, yang untuk itu bekerja sama dengan Komandan tentara dan pemerintahan sipil.



Instruksi itu berakhir dengan catatan, bahwa untuk suatu penyelesaian yang baik bagi perjuangan mutlak membuat garis pemisah antara patriotisme dan pengkhianat. Setiap KDM harus mencatat nama-nama pengkhianat dan meneruskan itu ke pihak atasan.

D.R.S.I. 28 Maret 1949 jam 10.00. Gehagno. 2111/AO.

Dalam sebuah siaran tertanggal 23 Maret (26 Maret telah disiarkan melalui bekas stasiun AURI Solo), Sudirman memberitahukan kepada Pemerintah Darurat, bahwa politik dan pertahanan tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu dia memprotes terhadap pengumuman Pemerintah Darurat, bahwa permusuhan hanya boleh dihentikan atas perintah Sukarno, setelah berunding dengan Pemerintah Darurat.

Dia menyebut hal itu tidak praktis dan mengkhawatirkan, dalam hal penggunaan pasal itu bagi "prestise" Pemerintah Darurat.

"Saya menganggap perlu untuk memberitahukan, bahwa di Jawa telah banyak timbul suara-suara untuk tidak tunduk pada perintah orang, yang berada dalam tawanan di bawah pengawasan Belanda", demikian Sudirman. (huruf miring dari pelapor Belanda, Red.)

Tentang akan adanya "Penghentian tembak-menembak", maka menurut Sudirman (lanjutan kalimat tidak ada, Red.) perlu adanya pertemuan antara Angkatan Perang, Sukarno (apabila dalam kebebasan) dan Badan Pekerja KNIP. Cara kerja lama, yang menyingkirkan pimpinan tentara dalam perundingan politik, telah menimbulkan penderitaan-penderitaan yang pahit.

Antara Pemerintah Darurat dan pimpinan tentara sejak sekarang harus ada kesatuan pendapat, niat, sikap, dan tindakan. Karena Kolonel Nasution terlalu sibuk, Sudirman mengusulkan agar Jenderal Mayor Soehardjo (yang berada di Jawa) duduk dalam Pemerintah Komisariat di Jawa. Soehardjo pada saat ini disertai tugas mengatur organisasi Pertahanan Rakyat dan mengkoordinasikan Pemerintahan Sipil dan Militer dengan penduduk.

Akhirnya Sudirman mendesak kepada Pemerintah Darurat untuk dengan lebih intensif berhubungan dengan pimpinan tentara di Jawa dan dengan luar negeri, dan mengumumkan "Communique Tentara" berikutnya ke seluruh dunia.

"Perjuangan dan perlawanan di Jawa setiap hari lebih teratur dan lebih hebat, dan seluruh rakyat memberikan bantuan penuh kepada tentara kami, karena mereka menyadari bahwa bagaimanapun tidak akan bersedia menjadi rakyat terjajah atau sekali lagi ditindas".

D.R.S.I. 30 Maret 1949 jam 10.00 Gehagno. 2167/AO.

Tertanggal 28 Maret Pemerintah Darurat (melalui Radio Mobil) mengirim kepada Maramis, Palar, dan Sudarsono tentang pendiriannya terhadap Resolusi Kanada, yang dengan disingkat diuraikan kembali :

Pada hakekatnya Pemerintah Darurat sedikit menaruh kepercayaan terhadap maksud perundingan-perundingan. Orang-orang Belanda sesungguhnya

telah berulang kali menjelaskan, bahwa mereka tidak bersedia membebaskan para pembesar Pemerintah Republik sesuai dengan resolusi tanggal 28 Januari yang lalu. Walaupun demikian Pemerintah Darurat tidak keberatan terhadap perundingan yang akan dijalankan oleh para pemimpin Republik yang ada di Bangka. Akan tetapi dengan syarat-syarat minimum berikut :

- a. Pemerintah Republik harus dikembalikan ke Yogya yang berarti : pengakuan terhadap dasar-dasar dan kekuasaannya di seluruh Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau sekitarnya, sesuai dengan Linggarjati.
- b. Ini berarti bahwa pasukan TNI yang sekarang tersebar di seluruh Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau sekitarnya tidak akan ditarik mundur sampai Pemerintah Federal Indonesia dibentuk.

Apabila Pemerintah Belanda tidak dapat menerima syarat-syarat ini, maka tertutuplah kemungkinan bahwa perundingan akan berhasil dengan memuaskan.

Setelah Pemerintah Republik dan Pimpinan Angkatan Perangnya kembali ke Yogya, maka "Penghentian tembak-menembak" dapat dilaksanakan dengan mudah.

Penerimaan kedua syarat tersebut akan mempermudah ikutsertanya Pemerintah Republik dalam Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Darurat yakin, bahwa bila Republik menerima syarat-syarat yang disebutkan, maka dapat diadakan pembicaraan dengan anggota-anggota dari BFO. Walaupun Belanda telah mengusulkan hal itu, seperti ada jurang pemisah antara Republik dan BFO, yang dalam kenyataannya mereka berada antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia.

P.D.R. No. 18 tertanggal 27 April 1949 Gehagno. 2902.

Dalam jawaban kepada uraian Sudirman di atas, Ketua Pemerintah Darurat memberitahukan kepada Sudirman tertanggal 15 April sebagai berikut:

Masalah politik dan militer sesungguhnya saling berhubungan rapat. Akan tetapi menurut pendapat saya adalah tidak benar jika Panglima Angkatan Perang mempunyai "suara yang menentukan" dalam soal-soal yang perlu ditentukan dengan suatu sikap politik. Ini adalah perjanjian dengan "sistem demokrasi", dan pemerintah diharuskan untuk bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja KNIP). Akan tetapi dalam soal-soal politik yang penting, selalu . . . (harus didengar pendapat Panglima Angkatan Perang, *Red.*).

Laporan D.C.M.I. Bagian VIII tertanggal 15 Mei 1949.

Dari Mr. S. Prawiranegara kepada seluruh stasiun.

Pemerintah Darurat tentang persetujuan sementara.

Sehubungan dengan persetujuan sementara Roem-Royen yang disepakati pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta, Pemerintah Darurat dalam sidang lengkap para anggota dan bersama-sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat,

Laut, dan Udara, yang telah mengadakan pembicaraan persetujuan tersebut, mengumumkan sebagai berikut :

Sebelum persamaan pendapat dicapai dan keterangan lanjutan diperoleh mengenai pelaksanaan instruksi kepada pemimpin-pemimpin di Bangka, tertanggal 27 Maret, yang berisi :

1. Kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta harus juga berarti, bahwa Belanda pada dasarnya "mengakui kekuasaan Pemerintah Republik di seluruh Pulau Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau sekitarnya, seperti yang telah mereka akui dalam Perjanjian Linggarjati.
2. Maksud pengakuan pada pokok 1 berarti, bahwa pasukan TNI yang sekarang tersebar di seluruh Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau sekitarnya, tidak akan ditarik kembali dari tempat tugas mereka masing-masing, sebelum Pemerintah Federal Indonesia didirikan. Pemerintah Darurat belum dapat menentukan pendiriannya terhadap persetujuan sementara ini, sebelum ia menerima keterangan yang cukup dari Presiden dan Wakil Presiden.

Karena alasan-alasan itu, Pemerintah Darurat belum dapat mengembalikan kekuasaannya kepada Sukarno-Hatta, meskipun para anggota pemerintah itu telah berkumpul di Yogya.

Selanjutnya pengembalian kekuasaan yang diperoleh dari pemerintah Sukarno-Hatta kepada Pemerintah Darurat akan terjadi setelah Pemerintah Darurat yakin, bahwa benar-benar telah merdeka dan bebas dari tekanan dan ancaman Belanda, sehingga dapat menjalankan tugasnya kembali.

Berlawanan dengan buletin Aneta, tertanggal 15 Mei yang U.P. (United Press, Red.) tanggal 14 Mei yang berbunyi :

Ketua delegasi RI, Roem mengumumkan bahwa dia telah menerima telegram-telegram dari Sjafroeddin, Ketua Pemerintah Darurat RI via New Delhi, yang berdiri di belakang keputusan yang tercapai dalam persetujuan di Batavia, demikian wartawan U.P. di Batavia. Sjafroeddin memberi perintah kepada Sultan Yogya untuk mengambil alih Pemerintahan di Yogya setelah orang-orang Belanda ditarik mundur. Selanjutnya Roem mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin partai Islam akan mendukung sepenuhnya, dan bahwa partai Komunis tidak akan menghalang-halangi kembalinya Pemerintah Republik. Ini memperbesar kemungkinan pelaksanaan persetujuan, bertalian dengan "Penghentian tembak-menembak", demikian menurut Roem.

C.M.I. sama sekali tidak mendapat sadapan, bahwa berita itu benar, dari telegram Pemerintah Darurat tersebut di atas juga tidak ada alasan kebenaran apa yang dikemukakan Roem. Lagipula dari sikap pemimpin-pemimpin militer di Sumatra tidak seluruhnya menunjukkan kerjasama untuk melaksanakan perjanjian, karena Hidajat, Gubernur Militer Sumatra Barat, pada tanggal 14 bulan ini memberikan isyarat untuk memulai serbuan ke seluruh garis depan terhadap musuh pada tanggal 17 bulan ini, untuk memperkuat politik pemerin-

tahan kami. Dia memerintahkan kepada seluruh Komandan dan Sub-Komandan untuk menyerang pada waktu yang bersamaan pada tanggal 17 Mei.

Dapat ditunjukkan bahwa Pemerintah Darurat dan TNI di Sumatra telah beralih ke pendirian yang ekstrim dari pimpinan perlawanan di Jawa di bawah Tan Malaka, dan bahwa "Penghentian tembak-menembak" baru dapat dilaksanakan setelah perarikan mundur tentara Belanda dari seluruh Jawa dan Sumatra.

P.D.R. 13 Mei 1949 Gehagno. 3227. ADOC.

Sehubungan dengan permintaan Pemerintah Darurat kepada semua pejabat pemerintahan militer dan sipil, A.K. Gani mengemukakan pendapatnya (A2) :

1. Bahwa kita harus percaya kepada kekuatan sendiri.
2. Bahwa susunan Pemerintah Darurat tidak memuaskan, karena pemimpin-pemimpin rakyat tidak ambil bagian.
3. Untuk mencapai suatu perjanjian gencatan senjata yang baru dan suatu persetujuan politik yang baru, perlu sebelumnya ada perundingan dengan para pemimpin militer dan sipil yang bertanggung jawab dari setiap propinsi secara sendiri.
4. Perjanjian gencatan senjata hanya akan diterima jika perjanjian itu didasarkan atas status quo sekarang. Hal ini akan membawa kerugian di beberapa tempat (kota) yang lebih besar dan jalan-jalan penghubung, yang menghubungkan kota-kota ini, tetapi sebaliknya ada keuntungan bahwa tidak beriak lagi garis-garis demarkasi, dan wilayah Belanda hanya merupakan "kantong-kantong" di wilayah Republik yang bersatu.
5. Suatu persetujuan politik akan dimulai jika persetujuan ini berisi pembentukan suatu Negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, dan Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
6. Keadaan perang pada mulanya akan berakhir setelah berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, dan alat-alat kekuasaan Negara Republik Indonesia diserahkan kepadanya.
7. Keadaan perang tetap dipertahankan selama perundingan-perundingan politik, karena perang gerilya dalam masa perundingan ini adalah senjata kita yang paling kuat.

Dalam sebuah telegram kepada Maramis, ketua Pemerintah Darurat mengatakan, bahwa walaupun perjanjian pun dapat dicapai antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Belanda untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949, dan keputusan Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949, hal ini tidak dapat menghapus kecurigaan orang-orang Indonesia ter-

hadap maksud dari pihak Belanda. Juga pernyataan Dr. Van Royen, bahwa Pemerintah Belanda akan melaksanakan dengan jujur apa yang telah dicapai dalam persetujuan sementara sambil menunggu pengesahan dari Pemerintah Darurat, tidak dapat menghapus kecurigaan, yang ditimbulkan oleh pengalaman-pengalaman pahit sejak abad ke-16.

Sjafroeddin memohon kepada UNO untuk mendesak dan mengambil langkah-langkah sendiri, yang mewajibkan Belanda memenuhi janji-janji mereka yaitu untuk menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Indonesia. Sebagai pedoman untuk itu perlu dimuat pendirian Pemerintah Darurat Republik.

Laporan Bagian VIII tertanggal 17 Mei 1949 jam 16.00

Dari : Ketua Pemerintah Darurat RI,

Kepada: Seluruh stasiun

Bantahan Terhadap berita bahwa Pemerintah Darurat RI seolah-olah telah mengesyahkan Persetujuan Roem—Van Royen.

Melalui siaran radio Belanda di Jakarta kemarin diumumkan sebuah berita, yang juga diambil alih oleh stasiun radio luar negeri, tentang penjelasan ketua delegasi RI, Mr. Moh. Roem kepada pers Jakarta yang berbunyi sebagai berikut : bahwa Ketua Pemerintah Darurat RI telah menyatakan persetujuannya terhadap persetujuan yang dicapai pada tanggal 7 Mei 1949 antara delegasi RI dan delegasi Belanda di Jakarta, yang dikenal dengan nama Persetujuan Roem—Van Royen.

Dengan ini dinyatakan dengan sungguh-sungguh, berita itu tidak sesuai dengan kebenaran. Pemerintah Darurat Republik hingga kini belum memastikan pendiriannya terhadap persetujuan Roem—Van Royen, dan sekarang sedang menunggu keterangan terinci dan lengkap dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan pendiriannya.

Sumatra, 16 Mei 1949 (16 - 5 - 21.30, diterima 16 - 5 - 22.05).

Laporan Harian Politik No. 38 tertanggal 21 Mei 1949 Gehagno. 3331/ADOC.

Sehubungan dengan permohonan Ketua Dinas Penerangan Kotaraja kepada Pemerintah Darurat untuk mendapat penjelasan mengenai pendiriannya sehubungan dengan keterangan-keterangan Roem—Van Royen, Ketua Pemerintah Darurat pada tanggal 19 Mei yang lalu menjawab (A2), bahwa Pemerintah Darurat RI untuk sementara belum dapat menyatakan pendiriannya terhadap persetujuan Roem—Van Royen. Mengenai itu Pemerintah Darurat RI masih selalu berpegang teguh pada pendirian semula, yang berkali-kali telah diumumkan dengan cara yang jelas.

4. DAFTAR ARSIP PDR:

1. Surat pernyataan Delegasi Belanda bahwa mereka sejak tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.00 tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. 18 Desember 1948.
2. Laporan Komisi Tiga Negara (KTN) tentang penyerbuan Belanda ke Yogya dan situasi pada waktu itu. 23 Desember 1948.
3. Kawat bagian Penerangan kepada PDRI dan Perwakilan Republik berisi laporan keberhasilan gerilya dalam melumpuhkan Belanda dan lain-lain. Yogya, 27 Februari 1949.
4. Kawat dari Ketua PDRI kepada seluruh Angkatan Perang RI berisi pernyataan sikap dan pendirian PDRI akan perjanjian Linggarjati. Sumatra, 27 Februari 1949.
5. Kawat Seksi Penerangan Komisariat Jawa kepada PDRI berisi tentang rencana Belanda yang menolak resolusi Dewan Keamanan PBB. Yogya, 4 Maret 1949.
6. Kawat Menteri Kasimo kepada Ketua PDRI berisi tentang reaksi atas penolakan Belanda terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan menyarankan agar wakil RI di PBB mendesak PBB mengadakan sidang untuk memecahkan masalah Indonesia. Yogya 4 Maret 1949.
7. Kawat dari Staf Angkatan Perang (Kolonel Simatupang) kepada PDRI dan Perwakilan di New Delhi berisi pandangan tentang sikap dan politik Belanda yang berbelit mengenai perundingan di PBB untuk pemecahan kedaulatan RI. 5 Maret 1949.
8. Kawat Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara kepada Panglima Besar Angkatan Perang berisi pemberitahuan tentang pembentukan pemerintah-pemerintah daerah militer (salinan). 5 Maret 1949.
9. Kawat Jawatan Penerangan PDRI kepada Kepala RRI berisi laporan singkat mengenai proses dan kesulitan tentang pengembalian Pemerintah Sukarno-Hatta. Sumatra, 10 Maret 1949.
10. Kawat dari bagian Penerangan kepada PDRI dan Perwakilan di New Delhi berisi pertanyaan sampai sejauh mana pengertian cease fire dan perjanjian Roem-Royen yang dimaksudkan oleh Belanda karena sering terjadi pelanggaran. 15 Maret 1949.
11. Kawat dari Kolonel Simatupang kepada PDRI dan Perwakilan di New Delhi berisi laporan akibat agresi Belanda setelah menerima resolusi untuk menghentikan agresi. 19 Maret 1949.
12. Kawat Ketua PDRI kepada Menteri Luar Negeri (Maramis), Perwakilan di PBB (LN. Palar), Perwakilan di New Delhi (dr. Sudarsono), berisi pendapat sehubungan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang baru mengenai segera mengadakan perundingan Indonesia-Belanda dan masalah-masalah lain yang berkaitan erat dengan kedaulatan pemerintah atas wilayah RI. Sumatra, 27 Maret 1949.
13. Kawat dari Jawatan Bea dan Cukai PDRI kepada Mr. Susanto Tirtoprodjo berisi permintaan laporan keadaan bea dan cukai sehubungan keadaan negara semakin tidak stabil. 7 April 1949.

14. Radiogram dari Kolonel Hidayat berisi kemungkinan diadakan perundingan Indonesia-Belanda. 19 April 1949.
15. Kawat dari WKSAP kepada PDRI Perwakilan New Delhi berisi laporan tentang pemuatan berita oleh mas media di Indonesia yang memutar-balikan kenyataan terutama masalah kekuasaan TNI yang ditulis sebagai gerilya. 22 April 1949.
16. Kawat dari Kolonel Simatupang kepada PDRI berisi laporan mengenai hasil perundingan tentang kembalinya Republik ke Yogya dan pengajuan syarat-syarat Belanda yang merugikan Indonesia. 6 Mei 1949.
17. Kawat edaran Ketua PDRI kepada anggota-anggota PDRI di Jawa, Panglima Besar Sudirman, Kol. Simatupang, berisi permohonan pemberian pandangan dan usul kepada anggota-anggota PDRI di Sumatra sehubungan dengan persetujuan sementara RI dengan Belanda di PBB. Sumatra, 10 Mei 1949.
18. Kawat Ketua PDRI kepada Mr. Maramis berisi petunjuk-petunjuk dan saran agar wakil Indonesia di PBB segera mendesak badan itu untuk mengadakan sidang sehubungan masih adanya kecurigaan Indonesia terhadap Belanda akan hasil sidang yang lalu dan lain-lain. Sumatra, 15 Mei 1949.
19. Surat dari Mayor Maladi kepada Kol. AH. Nasution berisi pandangan tentang politik Indonesia menghadapi Belanda sehubungan persetujuan Jakarta tanggal 7 Mei tentang kembalinya pemerintah Republik ke Yogyakarta dan pernyataan dari PDRI. Jawa, 20 Mei 1949.
20. Surat dari Mayor Maladi (Pewira Penerangan MBKD) kepada Ketua PDRI berisi permohonan mengadakan kontak dengan Perwakilan di New Delhi memakai cadangan hubungan telegraf sehubungan persetujuan Jakarta, 7 Mei. Jawa, 20 Mei 1949.
21. Radiogram dari Mayor Maladi kepada All Station tentang instruksi untuk mendengarkan siaran RRI dalam bahasa Indonesia dan Inggris setiap malam. 21 Mei 1949.
22. Kawat dari WKSAP (Kol. Simatupang) kepada para Gubernur Militer berisi permintaan laporan tentang reaksi musuh setelah adanya persetujuan Roem-Royen dan pertanyaan apakah ada perubahan sikap dari Belanda setelah persetujuan tersebut. 21 Mei 1949
23. Kawat edaran sekretaris PDRI berisi penjelasan pemusatan segala alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam tiap-tiap daerah militer istimewa berada di Gubernur Militer, dan lain-lain. 23 Mei 1949.
24. Kawat dari Gubernur Militer Sumatra Selatan (dr. AK. Gani) kepada PDRI berisi pandangan tentang keadaan sikap dan politik Indonesia sehubungan persetujuan Roem-Royen yang tidak mendapat dukungan rakyat dan PDRI. Sumatra Selatan, 2 Juni 1949.
25. Kawat dari Kol. AH. Nasution kepada PDRI dan Perwakilan di New Delhi berisi laporan dari masing-masing divisi tentang kemunduran moral Belanda, dan lain-lain. 1 Juni 1949.
26. Kawat dari PTTD (Kol. Nasution) kepada para Gubernur Militer berisi larangan mengadakan kontak senjata selama diadakan perundingan dengan pihak Belanda. 22 Juni 1949.

(1)

NEDERLANDSE DELIGATIE

BATAVIA, 18 December 1948.

No : 3897

Taleis Rijswijk

Ik heb de eer U mede te delen, dat aan de Commissie voor Goede Diensten op 18 December 1948 de navolgende mededeling is gedaan :

" I have the honour to refer to the numerous letters to the Committee of Good Offices from the Netherlands Delegation concerning violations of the Truce Agreement, a comprehensive list of which is appended, and furthermore to my letters of 11 and 16 December 1948 and the memorandum attached to the latter. From the abovementioned documents and the evidence in support thereof submitted to your Committee it is abundantly clear that the Truce Agreement between the Government of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia, signed on 17 January 1948 and the Truce Regulations are not being observed by the Government of the Republic of Indonesia. The Netherlands Government is reluctantly compelled to notify your Committee, according to the provision of article 10 of the Truce Agreement, that for this reason the said agreement should be terminated and is considered as no longer binding as from Sunday, 19 December, 1948, 00.00 hours Batavia time.

The Republican Government has been informed accordingly. "

U gelieve dit schrijven te beschouwen als kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Republikeinse Regering, uit hoofde van Artikel 10 van de Bestandsevereenkomst, dat de Nederlandse Regering van oordeel is, dat de bestandsovereenkomst en de bestandsregelingen niet worden nageleefd door de Republikeinse Regering, deze overeenkomst derhalve dient te worden beëindigd en niet langer als bindend wordt beschouwd met in gang van Zondag, 19 December 1948, 00.00 uur Batavia tijd.

Aan den Voorzitter der
Republikeinse Delegatie,
Parapattan 52,
BATAVIA.

De wnd. Voorzitter van de
Nederlandse Delegatie :

(T. Elink Schuurman)

(2)

RESTRICTED
S/AC. 10/225
23 December 1948
ORIGINAL: ENGLISH

SECURITY COUNCIL
COMMITTEE OF GOOD OFFICES THE INDONESIAN QUESTION
REPORT DATED 22 DECEMBER 1948 TELEGRAPHED TO THE
SECURITY COUNCIL ON SAME DATE

Sir,

1. At approximately 0640 Batavia time on Sunday, 19 December the members of the Committee of Good Offices were awakened by the sound of explosions from the direction of Maguwo—Airport, Jogjakarta. Present at Kaliurang, the Headquarters of the Committee at the time, were the Australian Representative, the Belgian Representative and the Deputy of the United States Representative. After the Committee had made a survey of the situation, it held a special meeting at 0845 Batavia-time and directed that the following telegram be transmitted to the United States Representative, who had gone to Batavia the day before with the Deputy of the Australian Representative :

" MOST IMMEDIATE STOP COCHRAN CMA HOTEL DES INDES CMA BATAVIA AND CARE UNITED STATES CONSUL GENERAL BATAVIA STOP COMMITTEE REQUESTS THE FOLLOWING MESSAGE BE TRANSMITTED TO THE SECURITY COUNCIL EARLIEST STOP QUOTE 6 A.M. TODAY DUTCH BEGAN LARGE SCALE BOMBING OF MAGUWO AIRPORT JOGJAKARTA REPUBLICAN CAPITAL STOP HATTA REPORTS BOMBING OF PARTS OF JOGJAKARTA ITSELF AND THE DROPPING OF PARATROOPERS STOP COMMITTEE CALLS FOR IMMEDIATE MEETING OF SECURITY COUNCIL FOR APPROPRIATE ACTION STOP UNQUOTE PARA COMMITTEE AUTHORIZES COCHRAN AND CUTTS TO SUPPLEMENT THIS MESSAGE AS THEY SEE FIT AND TAKE OTHER APPROPRIATE URGENT ACTION IN BATAVIA ON BEHALF OF THE COMMITTEE IF COMMUNICATIONS WITH COMMITTEE IMPRACTICABLE STOP HAVE AUTHORIZED SPECIAL RELEASE TO PRESS OF COMMITTEE'S SUPPLEMENTARY REPORT OF DECEMBER 18 STOP URGE MAINTENANCE OF COMMUNICATIONS BETWEEN BATAVIA AND JOGJAKARTA STOP CONFIRM RECEIPT STOP TK CRITCHLEY AUSTRALIA RH HERREMANS BELGIUM RE LISLE UNITED STATES "

2. Every effort was made to have this telegram transmitted to Batavia. When the Batavia radio failed to answer, a general call was sent out to all stations, including ships at sea. A further attempt to have the message broadcast by the Jogjakarta radio failed. Later efforts were made to transmit the message during that day, and on 20 and 21 December after the arrival of Netherlands forces. These efforts failed.

3. Late in the afternoon of December 19, the Delegations and the Secretariat, at the direction of Republican military officials, re-arranged and consolidated their residence, in order to be in a concentrated area which could more readily be protected.

4. During the night 20 - 21 December, the Republican garrison withdrew. The members of the Republican Delegation remained.

5. At 1510 Batavia time, Monday, 20 December, the Netherlands forces arrived in Kaliurang. With the exception of the servants and Hotel employees most of whom had remained to serve the Delegations, the area appeared deserted. There were a number of shots fired by the advancing Netherlands forces and gunfire was heard intermittently during the days that followed. There were reports of fatal shootings of civilians. The shooting of an unarmed boy by an Ambonese soldier of the Netherlands forces was personally witnessed by a member of the Secretariat Staff and his young daughter.

6. Effective communications between Kaliurang and Jogjakarta were not re-established through Monday and Tuesday, 20 and 21 December.

7. About 0900 hours on Wednesday, 21 December, the three Delegations and the Secretariat staff were removed in convoy to Jogjakarta and late in the afternoon began, in three divisions, to fly to Batavia. The Republican Delegation, at last reports, remained in Kaliurang confined to restricted limits. Netherlands officers stated, however, that the Republican Delegation would be shortly removed to Jogjakarta.

8. Throughout 19 - 20 - 21 December numerous explosion were heard and large columns of smoke were witnessed at many points in the valley below Kaliurang. Some twelve houses in Kaliurang were burned down before the arrival of the Netherlands forces. During the ride down from Kaliurang, it was observed that most of the houses were closed and that there were few or no workers to be seen in the fields or along the road. A number of the bridges had been demolished.

9. On its return to Batavia, the Committee took note of the reports which had been sent to the Security Council by the United States Representative and the Deputy of the Australian Representative on 19 - 21 December in the four day period during which communications between the Committee at Kaliurang on the one hand, and Batavia and the outside world on the other, were entirely broken. It was noted that the reports made, and other actions taken, by the United States Representative and the Deputy of the Australian Representative were fully authorized not only by the emergency situation that existed but by the expressed authority conferred on them to act for the Committee by the decision taken by the Committee at Kaliurang at its meeting of December, 1948.

To :
President Security Council,
United Nations,
Paris.

/s/

R. Herremans (Belgium)
Chairman
T.K. Critchley (Australia)
H. Merle Cochran (U.S.A.)

(3)

1. pemerintah darurat
2. perwakilan republik

no 154 djokja 27 - 2 12.00 plain

berita no 8/rdg/24/2/49 ttk dalam periode antara tgl 17/1 hingga tgl 7/2-49 ttk

1. serangan2 gerilja di poerworedjo dibawah pimpinan majoor suhardojo berhatsil :

- a. belanda menderita sedikitnja 145 orang diantaranya ada beberapa opsir ttk
- b. wedono angkatan belanda di poerworedjo bersama 2 orang pembantunja terbunuh ttk
- c. po an tui jang dibentuk belanda di poerworedjo sedikitnja 6 orang
- d. selama gerakan ini kita kehilangan 16 orang termasuk seorang komandan kompi koma dan delapan orang luka2 karena tembakan kanon/mortier belanda koma 15 orang penduduk tewas dan berpuluh2 rumah penduduk terbakar habis ttk
- e. tembakan tsb membabi buta koma serangan2 di kebumen dibawah majoor sudarno berhatsil sbb : 77 orang tentara belanda tewas pesawat terbang pi-pereup ditembak djatuh di gombang barat ttk
- f. 2 traktor dan 6 truck hantjur ttk 2 orang tni gugur ttk

sap kep bag penerangan

(4)

to all stns via cq

sumatra 213 27/2 23.15

kepada seluruh angkatan perang republik indonesia dan rakjat jang berdjoang ttk

no 4/p/pdri 27/2-49.ttk setelah kami mendengar keterangan pemerintah belanda berhubung dengan apa jang dinamakan rentjana asal koma maka pdri tidak melihat alasan sedikitpoen oentoek merobah pendiriannja ttk pengakuan republik oleh belanda menurut linggardjati dan penarikan tentara belanda dari seluruh daerah republik adalah sjarat mutlak bagi perdamaian dengan belanda ttk teruskan dan perhebat perdjoangan sampai kemenangan di fihak kita stop -

sumatra tgl 27/2-49 ketua
pdri mewakili panglima tertinggi
ang perang
n.r.i. mr sjafrudin prawiranegara

(5)

pdri sumatra
perwakilan luar negeri

no 100 djogja 4/3 18.05 seg

no 28/p n/s ttk tgl 3/3-'49 ttk terhadap rentjananja bld kalangan politik dan pemimpin2 lainnja mengeluarkan pendapatannja sbb : sangat menjetudjui kwt mr rum jg dgn tegas menolak rentjana bld jang dgn njata2 berikan suatu usaha bld otk menjingskirkan resolusi dk ttk kalangan tsb selandjutnja menjatakan koma bahwa solidariteit bangsa2 asia tjukup mendjadi anggauta keamanan dan ketentraman di seluruh dunia ttk rakjat dan tentara indonesia sanggup berdoang terus, sedangkan anggauta2 tentara bld mulai gelisah menghadapi gerilja2 kita jg menghebat ttk pendek kata republik dgn bantuan negara2 asia moreel dan materieel pasti dapat melaksanakan tjita2 bangsa indonesia seluruhnja ialah mereka penuh lepas dari segala kekuasaan dan pengaruh asing demikian pendapat kalangan politik ttk -

24.00
sjp

sektie penerangan komisariaat
pdri di djawa sumali

(6)

jm ketua pdri di sumatra

no 101 djokja 4/3 18.16 sgra

no 18/k/aer tgl 3/3-'49 ttk berhubung dgn keterangan pemerintah bld tentang penjelesaian masalah indonesia pada tgl 26 februari jbr saja berpendapat sbb. 1. rentjana bld termasuk dlm keterangan dan pada hakekatnja sangat menjimpang dari dasar2 termuat dlm resolusi dk tgl 28 januäri '49, sedang pandangan saja menerima resolusi itu oleh kedua fihak dalam keadaan sekarang merupakan djalan jang sungguh2 tepat otk mentjapai penjelesaian masalah indonesia ttk 2. saja berpendapat bahwa pemerintah republik harus dapat menuntut paling sedikit terpenuhinja sjarat2 dalam resolusi dk ttk 3. hendaknja diminta kepada wakil republik pada dk supaya mendesak dk selekas mungkin mengadakan sidang oentoek membitjarakan lagi masalah indonesia dan selandjutnja melakukan tekanan seperlunja pada fihak bld agar tunduk sama sekali kepada resolusi dk tgl 28 januari '49. 4. hendaknja dilaksanakan usaha seperlunja terhadap negara2 p.a.o. supaya melakukan tekanan djuga terhadap fihak bld (tdk terbaca) termasuk diatas ttk -

menteri kasimo

(7)

pdri di sum.
perwakilan new delhi

no 109 djokja 5/3 19.00

no 2- w/b ttk tentang rentjana bld. jbmt ini kalangan militer rep. indonesia mempunyai pandangan sbb : komentar2 didalam dan diluar angkatan perang terhadap kominike pemerintah bld dapat disimpulkan sbb : 1. otk kami diluar dari keadaan sulit dan katjau jg disebabkan agresi bld jg akibatnja rupanja tidak dipikirkan oleh pemerintah bld waktu dimulai dan otk mentjapai keadaan jg stabil di indonesia adalah sjarat2 mutlak : a. rahabilitasi pemerintah republik: b. penghentian pertempuran. rentjana bld tidak mengandung hal jg dua ini hanya mau memisah pemimpin2 republik dari rakjat dan tentara jang berdjoang dan mempergunakan pengaruh sukarno/hatta otk menindas perlawanan rakjat dan tentara ttk rentjana ini moreel akan membawa kekatjauan terus menerus ttk 2. bantuan dk sangat perlu otk mengaku krisis kepertjajaan jang timbul sebagai akibat politik bld jang maju mundur dan berbelit2 ttk kalau bld mempunyai niat djudjur dia akan mempunyai alasan otk menolak bantuan dk per-tjobaan bld menjimpangkan dk membersihkan ketjurigaan tentang maksud bld ttk 3. apa bld sungguh mau mempertjepat penjerahan kedaulatan itu dapat di-lakukan dalam batas2 melalui dk ttk 4. otk mendjalankan rentjana cochran jg sekarang dipakai duta bld di woshington sebagai alat propaganda republik harus di rehabiliseer dahulu ttk 5. pemerintah jang mungkin didirikan bld tidak dgn republik akan menerima tentangan umum ttk pengaruh republik dan kekuatan republik achirnja akan menggulingkan pemerintah demikian : perdjandjian2 jg diadakannja kelak tidak akan kita akui ttk

staf angk perang kolonel
t.b. simatupang.

23.00



(8)

Salinan

RADIOGRAM No. 222.
TANGGAL 5/3
DJAM 13.30
ALAMAT : kppd ttk panglima besar ap ttk ptt,

No. Pengirim 231/pdri tg. 5/3-49 ttk

I S I : ketetapan kami no. 8/pem/pdri hari ini sbb ttk dr sukima ketua kppd ttk ketetapan kami no.9/pert/pdri hari ini st ttd pembentukan pemerintahan2 daerah militer seper dimaksud dalam kawat ptt tg 12/2-49 no. 37 disjahkan ttk habis ttk

PENGIRIM : Ketua pdri mr s prawiranegara
DITERIMA : tgl. 5/3 dj. 21.15 oleh spn.

Sudah sependan dengan aselinya.
jng mengambil turunan :
ttd. Suprpto.

Jang menjalin dari
salinan,
Cop-23

(wakidjo) 1/4-49

(9)

to all stns.

no. 236 sumatra 10/3 20.30

no 9/pm tgl 10/3-49 ttk (Tentang pengembalian pemerintah sukarno-hatta ke djokja) ttk karena keadaan militernja jg buruk dan tekanan dunia luar maka nampaknja bld achirnja terpaksa menahan ludahnja kembali dan mengembalikan pemerintah sukarno-hatta di djokja tetapi untuk menutup mukanya mereka rupanja akan menggantungkan hal itu kepada kesanggupan rep. ikut serta dalam perundingan medja bundar ttk tentu sadja rep. tidak dapat dan tidak akan menerima sjarat demikian jg pula tidak terdapat dalam resolusi dk. ttk semangat tengkulak bld buat sekian kalinja mempersukar kalau tidak menghalangi penjelesaian masalah indonesia setjara adil dan djudjur ttk waktu bukan merugikan tetapi hanja menguntungkan rep ttk kapankah bld berpisah dengan semangat tengkulaknja (tanja) ttk

tr. 23-45
sjn.

djawatan penerangan pdri.

(10)

1. pem.darurat r.i. di sumatera.
2. perwakilan r.i. di nw-delhi.
3. komisariat djawa.
4. all station.

no 195 tgl 15/3 19.00

no 0108 03.15 16.00 nr 20/rdg/15-3 ttk menurut bld perintah cease-fire telah dikeluarkannya tgl. 31/12-48 ttk dan van rooyen dlm d.k. tgl 10 februari menjatakan keterangannya mengapa uno tidak memuat andjuran pdri tentang meneruskan perlawanan. ttk b. apakah jg dimaksud bld dgn perintah cease-fire djika dilinat tgl 11 januari wonogiri diserang 13 pswt terbang 6 djam lamanja, kemudian 150 tentara pajung diturunkan ttk tgl 25 februari 5 jagers dan 2 bombers menjerang desa ambal selama 2½ djam dan mendjatuhkan 30 bom dari 25 kg dan 50 bom dari 100 kg, jagers mitrailleur/melepaskan rocketbommen, 22 penduduk mati, pasar, mesdjid hantjur dan 32 rumah penduduk habis terbakar, tgl 26 februari 7 jagers dan 3 b-25 menjerang onderan bulu satu-seper-tiga djam, 6 penduduk mati dan banjak rumah hantjur ttk c. sedjak maart tiap hari desa kasuran, wates dekso samigaluh bantar diserang pswt terbang meski-pun jg diserang bukan millitair object ttk sasaran selalu bangunan jg besar seperti pasar, sekolahan, mesdjid dan rumah-gadai ttk sedjak bulan maart korban lebih dari 100 orang ttk d. apa jg dimaksud cease-fire djika tgl 10 maret bld menjerang wonosari dgn 30 pswt terbang menurunkan tentera pajung 500 orang ttk e. apakah pem. darurat tidak boleh mengandjurkan perlawanan thd serangan membabi buta jg mana penduduk dibunuh setjara kedjam ttk f. bukan sadja pswt terbang, pun patrolie bld terus menerus mengadakan pembunuhan ttk siarkan stop

kep sap bag pen/doc maj harjono.-
diterima tgl 15/3 22.30 Sjn

(11)

KUTIPAN

RADIOGRAM

Tgl. 19-3-1949

PRO : 1. P. D. R. I.
2. PERWAKILAN NEW DELHI.

1. 3 bln jll Bld memulai agressi didepan mata D.K. dan komisinja. Selama 3 bln Bld melandjutkan agressi itu dg disaksikan oleh Komisi P.B.B. sekalipun D.K. menerima 3 resolusi utk menghentikan agressi.

2. Setelah 3 bln agressi dapat ditjatat hal2 jg berikut :

a. Soal Indonesia semakin sulit utk dipetjahkan dan keadaan di Indonesia semakin katjau.

- b. Kerugian materieel sangat besar dan produksi sangat berkurang
 - c. Perhubungan2 dan angkutan sangat terganggu.
 - d. Ditaksir 150.000 rakyat Indonesia mati di Djawa dan Sumatra sbg akibat keganasan Bld : bombardemen, mitrallemen, kanonnade desa2, kanonnade pasar2 jg sedang ramai, pembakaran desa2, pembunuhan sewenang-wenang.
 - e. Djumlah serdadu2 Bld jg mati dan orang2 Bld lainnja djuga besar.
 - f. Kebentjiaan rakyat thd Bld dan semangat perdjjoangan bertambah luas dan dalam sebagai akibat terreur Bld. Terreur Bld agaknja dimaksud utk mematahkan semangat rakyat tetapi akibatnja adalah sebaliknja.
 - g. Bagean terbesar dari Djawa dan Sumatra berada dibawah pemerintah Republik: alat2 Republik terutama tentera, pamong pradja dan pengadilan masih utuh.
 - h. Bld hanja menguasai daerah ketjil2; bukti antara lain uang O.R.I beredar dibagean terbesar Djawa dan Sumatra sekalipun undang undang militer Bld melarang.
 - i. Bld tidak sanggup mendjjamin keamanan didaerah2 jg dianggapnja dibawah kekuasaannja.
3. Dg singkat: agresi Bld menjebabkan kematian banjak orang di kedua fihak, menjebabkan kerusakan2 besar, membahajakan prestige D.K., sedangkan penjelesaian di Indonesia semakin sulit oleh agresi itu. Agresi itu tih merugikan Bld, Indonesia dan dunia umumnja.
 4. Ada dua djalan kearah penjelesaian :
 - a. pertempuran terus-menerus sampai satu fihak habis tenaga.
 - b. perundingan.

Djalan a berarti antara lain kerusakan totaal dari negeri ini. Kita siap dan sedia mendjalani djalan ini apabila tidak ada kemungkinan lain. Utk djalan b adalah sjarat pertama bh Rep. kembali kedaerahnja dahulu. Tidak mungkin perundingan atas dasar legalisasi hasil2 agresi dan dlm kedudukan sbg tawanan seperti diusulkan res. Canada.
 5. Kalau D.K. mau membitjarakan res. Canada seharusnya terlebih dahulu diterima suatu res. bahwa res. 28 Jan. 49 dibatalkan.
 6. Kalau pertempuran2 diteruskan kita yakin kita akan menang walaupun akan sangat banjak korban terutama diantara rakyat jg tiap hari dibunuh dg sendjata2 jg paling modern.

Mohon dg hormat akan dapat dikawatkan ke alamat tsb.

Kep. Staf GM/Div. II
 anb. Sec.
 (Ltn. Sugiri)

Kol. Simatupang.

RADIOGRAM

nr 268 27/3 14.00 =

1. pjm mr. maramis, menteri luar negeri ttk
2. palar wk ri di dewan keamanan ttk
3. dr sudarsono wk ri di New-delhi India ttk
4. all stns ttk =

no 300/pdri tgl 27/3-49 ttk berhubung dgn putusan ak jg paling baru jg memerintahkan kpđ panitya pbb utk indonesia utk mengadakan perundingan dgn fihak indonesia dan bld guna perlaksanaan resolusi dk tg 28 djanuari terutama mengenai patsal 1 dan 2, yakni penghentian tembak-menembak dan pengembalian pemerintah republik ke jogja, pdri menjatakan pendiriannya sbb: walaupun pdri pada hakekatnja tidak menaruh banjak kepertjajaan tentang manfaatnja perundingan jg dimaksud, oleh karena pihak berkali-kali telah menerangkan tidak bersedia membebaskan pembesar2 republik dlm arti mengembalikan mereka ke jogja seperti jg dimaksud di resolusi dk tgl 28/1-49 itu, pdri tidak berkeberatan diadakannya perundingan itu oleh pemimpin2 republik jg berada di. bangka dgn ketentuan, bahwa: a. pengembalian pemerintah republik ke jogja berarti implicited pengakuan pada azasnja oleh bld dari pada kekuasaan pemerintah republik atas seluruh djawa dan sumatra dan pulau2 disekitarnya seperti diakui oleh bld dlm persetudjuan linggardjati, b. pengakuan jg dimaksud sub berarti bahwa pasukan2 tni jg sekarang tersebar diseluruh djawa sumatra dan pulau2 disekitarnya, tidak akan ditarik kembali dari tempatnja masing2 sampai terbentuk pemerintah federaal indonesia, kalau pemerintah bld dapat menerima pokok jg tsb diatas, maka perundingan tidak mustahil akan dapat membawa hasil jg memuaskan bagi kedua beiah fihak,

djuga perlaksanaan penghentian tembak-menembak, sesudah pemerintah republik serta pimpinan angkatan perangnya kembali ke jogja akan mudah ter-tjapai, penerimaan kedua pokok tsb diatas itu akan memudahkan pula ikut sertanja republik dlm konperensi medja bundar seperti jg diusulkan oleh bld, dlm pada itu pdri yakin, bahwa apabila pemerintah bld mau menerima hal2 jg diatas, republik akañ mudah pula mendapat kata sepakat dgn anggauta2 b.f.o., sebab sekalipun oleh bld telah diberi gambaran seolah-olah ada djurang antara republik dan b.f.o., djurang jg principieel sebenarnya letaknja antara bangsa bld dan bangsa indonesia ttk=

ketua pdri mr. s. prawiranegara.

Terima
tgl 28/3-49
djam 00.10
oleh sgt/sug

 10

+

(13)

kppd d/a mr. susanto tirtoprodjo

nr. 024 7/4 11.25= pl=

No 371/ku/p-3 tgl 7/4-49 ttk diminta dgn hormat pt memberi ta
kan ttg keadaan bea dan tjukai didaerah pt koma ttg susunan ktr bea dan tjuk
koma perubahan tempat2 kantor dan peraturan2 jg diadakan oleh pt bhb d
suasana sekarang ini ttk kalau sekiranya perdagangan diperkenankan oleh
karena keadaan memaksa koma antara daerah jg diduduki bld dan daerah
sekarang kita kuasai koma harap diperhatikan soal2 pabean ttg itu ttk kal
mungkin harap kirim penerimaan bea dan tjukai tiap2 bulan mulai dari b
december 1948 ttk hbs=

Terima : pq
8/4 21.45
sugjo,-

pdri keuangan djawt. bea dan tjuk
mr Lukman hakim.-

(14)

nota dinas/segera.
tgl. 19 april 1949.
Kepada : Jth. Pd. Tn. Maj. Maladi.
Dari : Adjudant Plm. Besar.
Lamp : 3 (tiga).

M E R D E K A

- 1). dg ini kami lampirkan doea boeah tilgram ke Sumatra, dg permintaan aga
radio gr2 tsb segera dikirimkan kepada jg berkepentingan. Mengingat pen
tingnja rdgr2 tsb, maka dg sangat kami minta agar betoel2 sampai keadres
nja. Kepada Pd. kami pinta djoega, agar Pd. menanjakan ke Pdri, apakat
Ketoea Pdri telah menerima kawat2 dari Jm Plm dikirimkan via zendel
Wonosari dahoeloe.-
- 2). Bhb dg kekurangan alat pada kami, maka selain hal2 tsb dlm punt (1)
soedikah Pd. memperbanjak toeroenan perintah Jm Plm Besar kepada ang.
Angk. Perang dan spj Pd mengirimkannya kepada kesatoean2 teristimewa
segera ke mbkd. (lamp2).
- 3). Temboesan berita2 in boekvorm dari Pd. telah kami terima dan dg ini kami
mengharap pada diberikannya berita2 landjoetnja (mulai begini april sampai
sekarang) dan kranten2 dari daerah pendoeoekan dan spj Pd memberikan
nja kepada pembawa surat ini. Atas oesaha Pd jg tiada ketjil artinja kami
oetjapkan diperbanjak terima kasih.-
Teroes tetap berdjoang dan tetap merdeka.

Adjudant Plm. Besar.
Kpt. Soepardjo

Radiogram kilat pada :

Paduka tuan Kol. Hidajat

p/a Pemerintah Pusat Dharurat Sumatra

Isi :

Berhubung dengan berita2 radio tentang besar kemungkinan akan diadakannya perundingan lagi dengan belanda, maka saja pesankan pada pt. supaya dalam menghadapi kemungkinan perundingan jad, angkatan Perang kita harus bulat satu lahir dan bathinnja, djangan lagi terpetjah-belah seperti dimasa lampau, jang mana akibatnja hanja merugikan angk. Perang serta perdjoangan kita belaka. Dalam masa lampau angk. Perang kita dalam menghadapi perundingan terbagi atas 3 (tiga) golongan :

1. pro perundingan.
2. contra perundingan.
3. setengah pro dan setengah contra perundingan.

Golongan mana jang benar, hanja sedjarah jang dapat menentukan, tetapi keadaan semendjak tg. 19 Dec. '48 mendjadi bukti jang njata, bahwa semua perundingan masa lampau hatsilnja hanja penderitaan pahit belaka jang tidak dapat dilupakan oleh tiap2 orang jang benar2 berdjoang. Pokoknja dalam menghadapi kemungkinan perundingan jad jang merupakan perundingan terachir, jang akan menentukan nasib negara dan bangsa kita, kita harus bulat satu, teliti dan hati2. Segenap anggauta staf jang merupakan putjuk Pimpinan Angk. Perang Republik Indonesia harus mempunjai satu tekad- satu faham, satu sikap dan satu tindak. Hanja dengan djalan demikian Putjuk Pimpinan Angk. Perang dapat merupakan satu front jang kuat dalam menghadapi siapapun djuga, pula akan ditaati oleh para komnd2 bawahan. Seterusnja kita bersama harus bekerdja terang-terangan. Djangan lagi ada gcrombolan atau kliek systeem. Kita harus bekerdja dengan kartu terbuka, tidak lagi dengan sembunji tangan. Dengan djalan demikian angk. Perang kita dapat utuh bulat satu dan dapat mendjamin keselamatan Nusa bangsa. Tentang pimpinan pertahanan dan gerakan di Sumatra saja pertjajakan penuh pada Paduka tuan, dengan mengingat segala perintah instruksi dan pedoman perdojoangan jang dahulu telah dikirimkan ke Sumatra. Kami pertjaja, bahwa pt. telah bekerdja dengan giat dalam memimpin perdojoangan di Sumatra, sehingga Sumatra merupakan suatu benteng jang kuat. Harap diperintahkan pada para kmd. bawahan, supaya mereka djangan mengadakan perundingan lokal. Sampaikan salam doa saja pada anak buah sekalian. Semoga Tuhan tetap melindungi kita besama. Amien ! Tetap merdeka.

Panglima Besar A.P.R.I.

(Lt. Djendral Soedirman).

Radiogram kilat sekali ke :
Pemerintah Pusat Dharurat (P.D.R.I.)
di Sumatra.

Menurut berita2 jang saja terima tentang pengosongan Djokja, belanda hanja akan mengosongkan djarak strook 5 (lima) kilometer sahadja. Djika berita tersebut benar, maka Pemerintah Pusat wadjib bersikap jang tegak dan tegas, ialah menolak hal tersebut, karena dalam daerah strook 5 km, Pemerintah Pusat tidak mungkin mendjalankan tugas kewadjabannja. Sedangkan usul wakil P.B.B., untuk mengosongkan daerah Djokja, jg lalu mendjadi keputusan Dewan Keamanan sebenarnja merupakan usul dan keputusan jang sangat rendahnja. Andaikata belanda tetap pada usul-pendiriannja jang mengenai pengosongan Djokja, maka kitapun wadjib tetap teguh pada pendirian kita sendiri, jang mana kesemuanja itu berarti perundingan jad. harus dibatalkan. Dalam akan menentukan sikap, Pemeritah Pusat hendaknja meninjau keadaan gerakan didalam negeri dan pergolakan diluar negeri, terutama dinegara2 tetangga. Perlu saja kemukakan, bahwa menurut tindjauah saja, kedudukan kita pada dewasa ini tambah kuat, baik dilapangan militer maupun dilapangan poelitiek. Pertahanan kita makin hari makin tambah kuat dan teratur, pula semangat perdjoangan rakjat dan tentara kita makin tambah naik dan berkobar-kobar, lebih2 setelah pasukan2 belanda pada saat jang achir2 ini terpaksa versplinterd, terbagi atas pasukan ketjil2. Factor2 tersebut diatas hendaknja djangan dilupakan dalam akan menentukan sikap terhadap status kedudukan Negara kita. Riwayat masa lampau jang menjebakkan penderitaan pahit seperti jang kita alami bersama semendjak 19 Dec '48. Seharusnja djangan sampai terulang kembali. Minta keterangan apakah prang2 jang masih dalam tawanan atau pengawasan belanda berhak merundingkan, lebih2 memutuskan sesuatu hal jang berhubungan dengan poelitiek, untuk menentukan status Negara kita, sedangkan telah ada Pemerintah Pusat Dharurat jang telah diresmikan sendiri oleh P.J.M. Presiden keseluruh dunia pada tg : 19 Dec '48. Semendjak tanggal tersebut kekuasaan pimpinan Negara dan Pemerintah diserahkan pada Pemerintah Pusat Dharurat di Sumatra jang dipimpin oleh Jm. Mr. Sjafruddin Prawira Negara. Semoga Pemerintah Pusat Dharurat tetap mendapat perlindungan Tuhan, sehingga senantiasa tegak-tegas dan tepat dalam tindakannja. Amien.

Plm. Besar Angk. Perang R.I.

(Lt. Djendral Soedirman)

1. pdri ttk
2. perwkl new delhi ttk
3. res. maj maladi ttk

jogja nr 411 22/4 18.00

nr 0202/pl 0422 1500 ttk
nr 25/sum gsap tgl 21/4 ttk

1. koran2 tionghoa achir2 ini memuat kabar2 jg membuktikan bhw didaerah2 dimana kekuasaan tni bertambah koma keamanan bertambah pula ttk
2. sin po tgl 15/4 memuat berita tentang sekitar purwokerto antara lain : quote dgn dapat dikuasainja (keadaan) oleh guerilla (seharusnja tni) jg tulen koma jg betul2 melaksanakan perdjongan utk nusa dan bangsa koma ada dikeluarkan larangan (oleh tni) utk mengganggu djiwa dan milik preman unquote ttk selandjutnja dikabarkan disekitar purwokerto penduduk tidak mau lagi turut dim convooi mil bld seperti dahulu oleh karena merasa tidak aman ttk.
3. sin po tgl 15/4 djuga memuat berita dibeberapa bag kota jogja keamanan bertambah oleh karena quote fihak guerilla (seharusnja tni) sendiri bantu mendjaga keamanan penduduk unquote ttk selandjutnja koran tsb tulis quote pekerdjaan dari kaum guerilla (seharusnja tni) harus diakui ada sangat berat, karena disampingnja mereka musti berdjoang utk tanah air pun musti membrantas perampokan jg mengganggu keamanan penduduk unquote ttk hbs —

w2 ksap simatupang kol

12/3



G.M. S/S/P/M.
DI. Co.—

No : 083/sal.
084/sal.

Kepada : jth : 1 pdri 6 gm—III
2. ptts 7 gm—IV
3 ptt 8 maj maladi
4 gm—I 9 semua station =
5 gm—II

Dari : d k =

png. C.K			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.
0232	3/5	14.00	=	4/5	20.45	083	5/5	13.30	083	6/5	10.15.
0233	4/5	08.00	=	4/5	21.55	084	5/5	13.30	084	6/5	15.00.

Isi :

= no 27 ... tgl 30 april 49 (.)

tentang perundingan mengenai belanda keluar dari daerah jogja
diberitakan sbb (.)

1. pada pokoknja perundingan sekarang mengenai pertanjaan apakah pemerintah republik akan kembali ke jogja dalam kedudukan kuat atau lemah (.) belanda mengadjukan sjarat2 jang bermaksud agar pemerintah republik berada dalam kedudukan lemah sekembalinja di jogja dan agar timbul pertentangan antara kita sama kita (.) belanda mengharap dengan demikian republik mendjadi lemah (,) sehingga belanda dapat mendjalankan rentjananja sendiri (.) sebaliknya delegasi republik menuntut kembali di jogja dengan tidak bersjarat (,) sehingga sekembalinja dapat tersusun kembali kebulatan jang kuat antara semua golongan republik jang terpisah-pisah sebagai akibat agressive belanda* (.) faktor penting dalam penjusunan kembali kebulatan jang kuat ialah angkatan perang (.)
2. berhubung itu belum tentu apakah perundingan akan berhasil (.)
3. sekalipun perundingan berhasil dan jogja ditinggalkan oleh belanda (,) ini tidak berarti bahwa perdjjuangan telah selesai atau keganasan jang diringani (.) kembalinja jogja hanja berarti tingkatan baru dalam perdjjuangan jang harus dipergunakan sebaik2-nja (.)
4. jang pergi ke jogja hanja mereka jang diperintahkan untuk mendjalankan tugas (.) jang tidak bertugas akan dilarang

- masuk jogja (.) usaha memperkuat kedudukan dan menjempurnakan organisasi disemua tempat dan daerah diteruskan seperti biasa (,) sekalipun belum meninggalkan jogja (.)
- 5. kalau jogja ditinggalkan oleh belanda (,) tentu akan diperjuangkan agar daerah2 lain djuga segera ditinggalkan (,) disamping itu akan tetap ada kemungkinan bahwa belanda pada satu ketika akan menyerbu jogja lagi (,) hingga keadaan kembali seperti sekarang (,) berhubungan dengan itu (,) supaya tetap diperhitungkan perjuangannya djarak lama (.)
- 6. dalam pada itu belanda terus menerus mengirimkan pasukan2 baru (.) habis =

tembusan Dico :
jth. pt kppd.

= kol simatupang wk sap =
ditempat tgl. 6 mei 49.-

(17)

G.M.S/S/P/M.
Di. Co.

Kepada: 1 angg-2 pdri di djwa d/a
mr susantotirtoprodjo -
2 panglima besar sudirman -
3 kolonel simatupang --
4 p t t s -

nr. : 097/sal.-

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.
015	9/5	18.00	-	9/5	22.15	097	9/5	10.00	-	plain	-

Isi :

- no. 449/per/pdri tgl 9/5-49 (.)
berhubung dengan persetujuan sementara antara delegasi republik dan belanda yang isinja mungkin sudah diketahui oleh jm (,) diharap segera memberi pandangan dan usul kepada kami (.) anggauta-2 pdri di sumatra sedang lengkap berkumpul (.) habis -
- ket pdri mr sjafruddin prawiranegara-

Tembusan Di.Co :

- 1 Jth. gm II -
 - 2 Jth. pt maj maladi -
- KDI.Co :

Ditempat tgl. : 10 - mei - 49 -
Cdo :

(18)

G.M. S/S/P/M.
Di.Co.

Kepada : 1 all stns
2 Jm mr maramis
menteri luar negeri
pdri —

Dari : sumtr —

Nr. 0128/sal.
0129 /sal.—

Pn. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.
018	9/5	18.00	—	14/5	24.00	0128	15/5	12.00			
924	14/5	18.00	—	14/5	—	0129	15/5	12.00			
									Plain		
									Plain		

Isi:

— no 450/pol/pdri tgl 9/5—49 (.) sekalipun mitsalnja (,) didapat perset
djuan antara pem republik indonesia dengan pemerintah belanda unti
memenuhi resolusi dk tgl 23 maret 1949 (,) namun bangsa indones
tetap tjuriga terhadap maksud belanda (,) sekalipun dr van royen keti
delegasi belanda menjatakan kepada mr rum ketua delegasi republik
bahwa pemerintah belanda akan mendjalankan persetudjuan jang s
mentara telah tertjapai menunggu permufakatan dari pdri (,) denga
djudjur (,) tetapi pengalaman2 jng pahit dimasa jang lampau (,) da
abad keenam belas sampai saat sekarang (,) ta dapat menghapuskan ras
tjuriga itu (,) oleh karena itu harap mendesak kepada sidang uno (,
supaja mengambil tindakan2 jang njata jang memberi djaminan jang
tegas terhadap belanda (,) hingga mereka benar2 menepati djandjinja (,
menjerahkan kedaulatan kepada bangsa indonesia dengan tiada bersjara
sepenuhnja (,) ambil sebagai pedoman pendirian pdri jang sudah dike
tahui oleh sdr (,) habis —

— ketua pdri mr s prawiranegara —

(pendirian pdri tentang persetudjuan sementara)

no 452/pol/pdri tgl 14/5—49 (,) berhubung dengan persetudjuan se
mentara van royen—rum pada tgl 7 mei 1949 di djakarta (,) maka pdr
setelah anggauta2nja beserta kepala2 staf angkatan darat (,) laut (,
udara (,) lengkap berkumpul dan merundingkan persetudjuan (:). se

belum mendapat pendjelasan terhadap penglaksanaan instruksinja ke-
pada pemimpin2 jang ada di bangka tgl 27 maret 1949 (,) jaitu (:)
1. pengembalian pemerintah republik ke djogja (,) berarti implicit (,) termasuk pengakuan pada azasnja oleh belanda dan kekuasaan pemerin-
tah republik atas daerah djawa dan sumatra dan pulau2 sekeliling se-
perti diakui oleh belanda dalam persetudjuan linggardjati(.) 2 pengakuan
jang dimaksud dalam sub satu berarti (,) bahwa pasukan2 tni jang se-
karang tersebar diseluruh djawa sumatra dan pulau2 sekitarnja tidak
akan ditarik kembali dari tempatnja masing2 sampai terbentuk peme-
rintah federal indonesia dan selandjutnja sebelum mendapat pendje-
lasan jang tjukup dari persetudjuan sementara itu dan presiden dan
wakil presiden (,) maka pdri belum dapat menjerahkan kekuasaan
kembali kepada pemerintah sukarno hatta meskipun anggauta2 peme-
rintah itu sudah berkumpul di djogja (,) djika pendjelasan itu belum di-
berikan kepada pdri (,) selandjutnja penjerahan kembali oleh pdri
dari pada kekuasaan jang telah diberikan oleh pemerintah sukarno-
hatta kepada pdri hanja akan dilakukan setelah pdri mendapat kejakin-
an (,) bahwa pemerintah sukarno-hatta benar2 sudah merdeka dan
dapat mendjalankan kewadajibannja kembali bebas dari pada tekanan
atau antjaman belanda (,) habis —

— ketua pdri mr s prawiranegara —

Tembusan di.co :

- 1 jth gm II —
- 2 jth maj maladi —
- 3 stn phb II —

Ditempat tgl. 15 - mei - 49
Cdo :

KDi.Co :

(19)

Nota kilat

pro : kol ah nasution ptt
dari : major maladi perwira penerangan mbkd
tg : 20 mei 1949

isi :

1. mengingat pengalaman sudah2 dng bld berhubung persetudjuan djakarta 7 mei jbl menghadapi kembalinja pemerintah republik ke jogja dan mengingat pernyataan pdri baru2 ini koma kami berpendapat ttk dua

- a. pemerintah republik de facto tetap berdjombang diluar jogja (pemerintah militer) ttk
- b. pemerintah di jogja nanti harus dipandang sbg pemerintah republik jg formeel sadja koma melulu guna perdjongan politisch keluar ttk dng perkataan lain merupakan politisch pion dari pemerintah militer koma atau lebih tegas sbg illegal representative kita didlm dunia internasional ttk
- c. sifat dan bentuk pemerintahan di jogja harus darurat koma baik dlm personeelsbezetting maupun dlm material aquipment ttk oleh karena itu sebanjak mungkin alat2 keperluan perdjongan dikirim ke luar seperti alat2 tulis koma drukpers koma roneo toestel koma films koma kertas koma alat2 radio dsb ttk
- d. spj pemerintah jogja mengusahakan pemantjar2 siaran dan telegrafie dng segala perlengkapannya dari india jg selandjutnja diteruskan ke luar sedang perlengkapan di jogja sendiri diusahakan dari persediaan kita di luar ttk daftar kebutuhan ini sudah kami sampaikan kpd jm menteri kasimo utk diteruskan kpd ir djuanda atau ir laoh ttk
- e. dlm menetapkan sjarat2 utk konperensi den haag hendaknya pemerintah jogja nanti mendjaga spj selalu dipandang redelijk tetapi tjukup kuat utk menggagalkan usaha bld guna mentjapai negara indonesia sarekat boneka ttk
tetapi dlm soal2 mengenai pembentukan tentera nasional indonesia sarekat pemerintah tidak boleh menjimpang dari concepsie angk perang kita ttk

2. selain dari pada itu utk menguatkan permintaan kami kpd pdri spj diusahakan agar new delhi dapat hubungan telegrafisch dng pemantjar kami koma mohon spj pt mengirim nota kpd mr sjafrudin dan dr soedarsono atau mr maramis seperti kami maksudkan itu ttk
3. contact dng div/gm I sampai sekarang sangat sukar ttk pun dng perwakilan2 mbkd disana belum ada hubungan ttk
4. guna fondsen kami mohon mabdaat utk usaha bahan2 dari regie tjandu/garam jg masih mempunjai persediaan agak banjak didaerah selatan ttk major soehardi sedang mengichtiarkan kearah itu bagi kami ttk

perwira penerangan mbkd
major maladi

(20)

pro : ketua pdri mr sjafrudin prawiranegara
dari : major maladi perwira penerangan mbkd
tg : 20 mei 1949

isi :

menghadapi kembalinya pemerintah republik di jogja dan kemungkinan2 dng bld maka perlu adanya tjadangan hubungan telegrafisch dng new delhi ttk utk persiapan itu mohon diusahakan spj new delhi mengadakan hubungan dng pemantjar kami ttk djika sudah ada ketetapan segera akan kami beritahukan waktu dan gelomb pemantjar kami melulu utk hubungan dng india ttk mohon kabar ttk tetap merdeka ttk

Perwira penerangan mbkd
major maladi

tembusan kpd kol ah nasution

(21)

no 15 md/49
pro : all station
dari : major maladi
perwira penerangan mbkd
tg : 21 mei 49
sifat : penting

isi :

harap mendengarkan siaran2 rri glb 30,4 mtr tiap malam dari dj 19.00 – 21.00 dlm bhs indonesia dan inggris ttk minta laporan tent penerimaan ttk tetap merdeka ttk

perwira penerangan mbkd
maj maladi

(22)

G.M. S/S/P/M.
Di. Co.

Kepada : 1 ptts
2 gm-1,2,3,4 -
Dari : dk -

nr. 0187/sal -

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
Nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.
0009/dr	21/5	12.00	-	31/5	14.13	0187	31/5	18.30	0187	1/6	12.00

Isi :

- nr 30 sap tgl 20 mei (.)
- minta laporan ptn tentang soal2 berikut (:)-
- a activiteit musuh setelah acc rum - V royen diumumkan (.)
- b apakah ada perobahan dlm sifit (.) tudjuan2 dan intensiteit dari activiteit tsb setelah persetudjuan diumumkan (.) habis

- wk sap kol simatupang -

- temb : 1. ptt
- 2. sap pen
- 3. maj maladi -

Ditempat tgl 1 djuni 1949 -
Cdo :

(23)

G.M. S/S/P/M.
Di.Co.

Kepada: 1. pbap
2. ptt
3. ptts
4. semua gm di djw dan sum
5. kppd
6. semua gub di djw dan sum

Nr. 0168/sal. Dari : sumatra -

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.
-	-	-	-	23/5	00.35	0168	23/5	10.30	-	Plain	-

Isi :

- salinan keputusan pdri tgl 17 mei 49 nr 21/pem/pdri (.) pdri (,) menimbang (:): bahwa (:)

1. bbb dgn pengalaman2 jg telah diperoleh dgn adanya instituit gub mil (,) utk memperkokoh dan menjempurnakan pertahanan (,) perlu memusatkan segala alat2 kekuasaan civiel dan mil dlm tiap2 daerah mil istimewa dlm satu tangan (,) yakni gub mil (.)
2. oleh karena keperluan kedudukan dan tugas dewan pertahanan daerah dan cdt2 sub terr didaerah2 karesidenan perlu dipertegas (,) mengingat undang2 tentang keadaan bahaya serta keputusan plm terr sum tgl 24/1-49 (,) memutuskan (:) menetapkan peraturan sbb (:) peraturan sementara tentang kedudukan dan tugas gub mil dalam daerah2 mil istimewa dpd dan cdt sub terr dlm daerah karesidenan2 (,) futsal-1 dlm daerah2 mil istimewa segala kekuasaan civiel dan mil dilakukan oleh gub mil (.)
fatsal 2 gub mil mempunyai tugas kewadajiban (:)
 - a. mendjalankan pem civiel menurut peraturan negara dan instruksi2 dari pem pusat dan bertanggung djawab dlm hal ini kpd pem pusat (.)
 - b. lapangan mil jg dianggapnya perlu dgn memperhatikan pertimbangan cdt sub terr jg bersangkutan dan pd umumnja atas pimpinan dan petundjuk ptt (.)fatsal 3 pem civiel dlm karesidenan2 didjalankan oleh dpd atas nama dan bertanggung djawab kpd gub mil jg bersangkutan (.)
urusan mil di karesidenan2 didjalankan oleh cdt sub terr atas nama dan bertanggung djawab kpd gub mil jg bersangkutan (.)
fatsal 4 dpd dlm daerahnja berhak atas nama gub mil jg bersangkutan mengambil tindakan2 dan mengadakan peraturan2 jg tidak berlawanan dgn peraturan2 jg berlaku atau jg akan dikeluarkan oleh badan2 pemerintahan jg lebih tinggi (.)
fatsal 5 sekalian peraturan2 gub mil selama ini terus berlaku sampai diadakan perobahan2 atau peraturan2 baru (.)
fatsal 6 ketetapan pdri tgl 7 /1-49 bag keempat sub 1 dan 2 ditjabut kembali (.)
fatsal 7 peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan (,) ditetapkan pada tgl 16 mei 1949 (,) pdri (,) ket dto mr sjafrudin prawiranegara (.) habis -

diumumkan pada tgl 19 mei 1949
secr pdri dto r marjono danubroto-

Temb Di.Co :

1 maj maladi -
KDiCo :

Ditempat tgl 23 mei 1949 -

G.M.S/S/P/M.

Di. Co.—

Kepada : 1 pdri 2 ptts
 3 ptt d/a menteri s tirtoprodjo

No : 0197/sal. Dari : sum selatan. —

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.
102/1	31/5	—	—	1/6	23.30	0197	2/6	14.00	—	Plain	—

Isi :

— — dimaklumkan sbb (:) dan permintaan spj diteruskan kpd pres dan wk pres rep (,) ketua bpknip (,) del rep dan pbn ap (:))

1. usaha apakah mendirikan perumahan nasional sbg tanda tjinta kpd bangsa dan tanah air (:) ketjintaan ini dgn setiap para pemimpin sbg motor gerakan rakjat buktikan dgn memberikan pengorbanan lahir dan batin dgn tidak dibatasi oleh waktu (,) berat atau banjaknja pengorbanan sampai perumahan nasional berupa negara rep indon jg merdeka dan berdaulat tertjapai (,) sekiranya beberapa pemimpin sdh putus asa dan lesu berdjung sebab keadaan persoon pd waktu sekarang tak mau lagi berkorban dgn setia sbg tanda tjinta kpd bangsa dan tanah airnja (,) lebih baik pemimpin seperti ini mengundurkan diri dari lapangan perdjungan dari pada menjetudjuj sesuatu persetudjuan dgn bld jg nanti terbukti akan membunuh rep (.)
2. keadaan2 jg njata sekarang (:)
 - a. meskipun ada ketua darurat jg diberikan oleh kepala negara dan dewan perwkl rakjat pusat kpd pdri (,) masih terbukti bhw pempst rep belum berpusat (,) sebab persetudjuan sementara rum (-) v royen diterima dgn tidak dirundingkan terlebih dulu dgn pdri di sum atau komisariat-komisariat di djwa (.)
 - b. kep negara dan del rep mengambil sesuatu keputusan totaal (()) jaitu persetudjuan rum (-) v royen (()) dgn tak mengetahui situasi lokal dari seluruh daerah rep terlebih dahulu (.)
 - c. kep negara dan del rep mengambil sesuatu keputusan totaal dgn minta terlebih dahulu advies dari pemimpin2 daerah jg ikut actief berperang (.)
 - d. pres (,) wk pres (,) beberapa menteri (,) ketua knip (,) del rep (,) adalah orang tawanan di prapat (:) bangka (,) djakarta dan jogja (:))

pemimpin2 indon jg musti mengambil sesuatu keputusan totaal dlm suasana dwang positie djuga ketua party2 politiek jg tersebar jg berada di jogja sbg de facto tawanan perang mengeluarkan satu pendirian partynja dlm suasana dwang positie dgn tidak terlebih dahulu minta advies dari tjabang2-nja didaerah2 (.)

e. sesudah perdjandjian renville ditanda tangani maka pst pertahanan rep bukan lagi di pulau djawa ((ibu kota rep jogja ())) terletak dua djam bermotor dari garis demarcatie (,) tetapi di pulau sum (,) diwaktu bulan jbl thn 48 terbukti uitvoering perstudjuan renville sdh kandas seperti anak baji berpenjakitan (,) kita mengusulkan spj pres ataw wk pres serta pst ap berada dipulau sum (,) pres dan wk pres tidak menjetudju pendirian ini (,) meskipun pd 19 dec 48 perhitungan ini betul dlm praktyknja (.)

f. meskipun sbg akibat perstudjuan rum (-) v royen karesidenan jogja dikembalikan kpd rep maka ini masih sesuatu daerah ketjil jg dikepunjai oleh tentara bld dan ini berarti pres (,) del rep ataw bpknip dan dewan party politiek akan mengambil keputusan di dlm suasana dwang positie (,) keputusan pintjang sbg reproductie dari suasana jng pintjang dari daerah jg ditawan oleh bld (.)

spj diperhatikan (:)

a. tudjuan perdjuangan rakjat jalah membentuk negara jg merdeka dan berdaulat (:); bentuk negara jg dimaksud matjam tjoraknja (.)

b. tenaga jg terpenting dlm perdjuangan kemerdekaan jalah tenaga lahir dan batin dari rakjat umum (,) ini berarti beleid para pemimpin jalah mengorganiseer tenaga dalam negeri ini terutama ((pokok tenaga dlm negeri ini terutama, bantuan tenaga dari luar negeri adalah tenaga tambahan (,) bukan pokok tenaga ())) (.)

c. pem daerah jg mengetahui tjita2 (,) keinginan dan kekuatan rakjat disesuatu daerah (,) kekuasaan jg dipakai oleh pem pst adalah del dari kekuasaan jg dikumpulkan oleh pem daerah (.)

d. sesuatu perstudjuan totaal jg diambil zonder mengadakan perembukan terlebih dahulu antara pem pst dan pem daerah tdk demokratisch dan tdk disetudju oleh daerah2 (.)

e. spj ditentukan dgn njata menurut undang2 dasar badan legislatief dan executief rep jg tertinggi pd waktu sekarang dan jg berhak mengadakan perstudjuan atas nama rep dgn negara lain (,) sekiranya benar bhw kekuasaan ini pd tgl 18 dec 48 sdh diberikan pd pdri (,) ini berarti bhw perstudjuan rum (-) v royen blm disetudju pem pst (,) sekiranya menurut comentaar radio bhw pres sukarno dan wk pres hatta tjukup mempunjai gezag sehingga penerimaan perstudjuan itu repressief dpt disetudju oleh rakjat indon (,) itu

blm tentu (,) sebab terbukti peperangan gerilja bertambah lama bertambah hebat dgn tdk d'pimpin atau diikuti oleh para pemimpin indon jg sedjak tgl 19 dec 48 mendjadi tawanan perang atau berdiam di kota2 jg diduduki bld (.)

- f. tudjuan perdjoangan kemerdekaan ialah mendirikan negara rep indon jg merdeka dan berdaulat (;) apa itu rep berupa negara unit aristic seperti negara rep indon jg diproklamirkan pd tgl 17 aug 45 atau negara federalistis seperti negara rep indon serikat (,) itu soal scundair dan terserah kpd keinginan rakjat indon jg terbanjak (.)
- g. sekiranya diadakan gentjatan sendjata (,) itu tdk didasarkan kpd truce-agreement linggardjati atau renville tetapi didasarkan situasi de facto jaitu cease fire and standrast ditempat2 jg dikuasainja de facto sekarang dgn tdk mengadakan aksi militer atau aksi kepolisian atau patroli atau mopping up operations (,) blockade dilaut (,) darat dan udara dsb (.)
- h. situasi mil sekarang ialah beberapa kota besar djatuh ketangan bld dan sebagian djalan raja jg menghubungkan kota2 besar itu dikuasai siang hari oleh bld akan tetapi diluar ini kita menguasai seluruh daerah pocket jg dikosongkan dahulu menurut persetujuan renville
- i. del bld tetap mendesak sbg tjara mulai utk sesuai persetujuan politiek spj peperangan gerilja totaal diperhentikan oleh rep dan peperangan gerilja totaal ialah troef jg terpenting ditangan rep jg musti dipakai se-effectief2-nja oleh del rep (,) satu2-nja djaminan spj rep berdiri terus sbg negara jg merdeka (.)
- k. segala rentjana musti didasarkan kpd perhitungan bhw agar rakjat indonesialah jg terutama menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dan bhw bld akan memakai kekuasaan mil-nja utk aksi mil-nja jg ketiga djika mereka merasa rugi dlm perundingan politiek atau mau memaksakan kepada rep sesuatu bentukan organisasi ketatanegaraan (.)
- l. diusulkan buat sementara waktu spj kedudukan kep negara atau wakilnja (,) knip dan pem pst didaerah2 rep jg merdeka dan mengadakan sidang didaerah2 jg merdeka jaitu dipulau sum (()) sum utara atau sum selatan (()) (;) daerah rep jg merdeka di sum selatan atau sum utara dan seluruh pulau dan economisch lebih kuat (.) habis—

temb Dico :

1. pt gm-2
2. pt maj maladi
3. pt soemali.

— gub mil daerah mil istimewa
sum selatan
dr ak gani —

KDico :

Ditempat tgl : 2 Juni 49.—

15

(25) /

RADIOGRAM

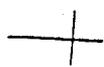
Kepada : 1).PDRI, 2, New Delhi
Tembusan : 1. Jm PB, 2, KPPD, 3. Para GM, 4. Mj Maladi, 5. KSTD,
6. Jm S.P. Hamengku Buwono, 7. WKSAP.
Tanggal : 1-6-1949.

no. 350 /rdg.

- I s i -

dari laporan dari div I, II, III, dan IV kami njatakan situasi sedjak 7 mei sbb. :

1. kemunduran moreel jg hebat dikalangan bld koma terbukti dari pergaulan dg anak-anak kita di jogja koma surat-2 prive soldadu2 jg kita rampas dlm pertempuran koma dan usaha-2 lokal utk cease fire dg djandji-2 jg menarik ttk keketjewakan terutama olh karena aflossingsplan jg baru diumumkan olh pem bld koma sdg umumnja mereka menduga bhw kini sdh bisa demobilisasi ttk faktor lain jalah memuntjaknja gerilja koma pengembalian jogja koma soal supply koma dll ttk
2. usaha jg actief olh recomba utk menjusun lurah dan aw sepanjang djalan besar dg patroli beberapa km koma rupanja utk de facto ttk p prodjo umumnja tjuma tinggal di kota kabupaten dan kalau berdjalan diantar olh patroli dan tiap malam kembali ke kota ttk
3. kegiatan disekitar jogja dg kanonnade kesemua djurusan dg membabi buta jg membikin banjak korban dikalangan rakjat ttk
4. dibandingkan dg mrt dan april maka activiteit mil bld berkurang karena kurang tenaga ttk kerugian bld mnrt surat-2 mereka jg terdapat 5% sampai sekarang sdg jg luka lebih dari 10% ttk angka dari kmd-kmd pihak kita menundjukkan korban bld resp 10% dan 30% ttk
5. berita dari djawa barat menjatakan koma bhw utk fed leger bld umumnja tidak bisa dpt tjalon opsir dan recruut ttk dlm kesulitan ini mereka menawarkan kpd opsir-2 tni jg tertawan atau arrest di kota utk membentuk bataljon dg mengumpul sendiri opsir dan bawahannja ttk
6. documenten dari ondernemers menundjukkan pula kesukaran mentjari tenaga utk ondernemingswachten dan polisi ttk
7. semendjak kegagalan siasat 19 dec dan kegagalan pembersihan jan - febr - mrt koma maka kemunduran dlm activiteit dan moreel bld semangkin tjepat ttk sebaliknja konsolidasi pasukan-2 gerilja dan pemerintahan mil kita kini tih pesat sehingga mengalirkan potensi jg lebih tinggi dari bermula ttk
8. activiteit d.i. di djawa barat semangkin tertindas olh kita ttk hq dari d.i. tih diduduki dan kesatuan jg teratur tidak ada lagi ttk pemberontakan murba di djawa timur tih dibereskan bln febr jl dan kesatuannja tinggal 2.cie digunung kawi jg kini tunduk kpd perintah tni ttk hanja sekitar solo



agak bertambah kegiatan kombinasi murba dan pki koma tapi tetap dikuasai oleh pemerintah

9. spj pdri mempergunakan dengan baik posisi r.i. jg semangkin baik ini.

p t t d
ttd.
kol a.h. nasution

diterima di Phb/mbkd
tanggal : 5 - 6 - 1949
djam : 11.00.

secr. ph b/mbkd.

(26)

R A D I O G R A M

Kepada: para Gm, Kstm, Kstd, Wkau, Pos X,
Mj Maladi, Per Mob Pol, K-1 S U, Be 16.
Temb. : Jm Pb, Wksap, Pdri, Ptts.
Tanggal: 22 - 6 - 1949.

Pengiriman :			Penerimaan :			Penerimaan :			Selesai.		
Nr.	Tgl.	Djm.	Nr.	Tgl.	Djm.	Nr.	Tgl.	Djm.	Nr.	Tgl.	Djm.

ISI Kawat

no. 60/X 12/rdg/49 ttk.
bhb tngkatan perundingan djak mungkin banjak usaha bld utk locale cease fire atau kontakt langsung locaal ttk supaja sekali lagi diperingatkan bawahan bhw dilarang kontakt langsung locaal koma apalagi ttg cease fire koma kalau tidak ada perintah jm pb dg melalui hierarchie apri . pelanggaran dianggap penghianatan.

- p t t d -
kol a.h. nasution.

diterima :
tanggal : 23 - 6 - 1949
djam : 10.00

sekretariaat phb/mbkd.

(.....)

121
(27)

MARKAS BESAR KOMANDO DJAWA
SECRETARIAAT MBKD/HCGT. -

No. : V. 256/MBKD/HCGT/49.
Tanggal : 24 - 6 - 1949.
Kepada : P.T. Majoor Maladi,
Perwira penerangan MBKD.
Dari : Secretariaat MBKD/HCGT.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Kedatangan PJM.Wk. Presiden di Atjeh.

Merdeka !

Dibawah ini kami menjampaikan turunan radiogram
P.T. W2KSAP kepada PDRI, ttg. 4 - 6 - 1949 No. 34 Sum gsap, -
untuk "insiden information".

MARKAS BESAR KOMANDO DJAWA
Secretaris MBKD/HCGT.

(Lt. I. Sumantri).

TURUNAN.

Alamat : ketua pdri.

Berita : no 34 sum gsap tg 4 djun (.) bhb kedatangan pjm wpres ke atjeh
dikemukakan hal2 berikut (:) (1) utk kedudukan rep kedlm sangat
perlu bhw angkatan perang membantu pol pem sepenuhnya dan dg
sungguh (.) kalau ini tak tertjapai dan soal ap hanja dipandang soal
formeel (-) disiplinair maka kedudukan rep kedlm tak akan begitu
kuat (.) dg sendirinja kedudukan keluar lemah (2) bhb itu telah saja
usulkan agar soal2 pokok mengenai penghentian permusuhan dan
mengenai soal pertahanan dan keamanan umumnja dicitjarkan ber-
sama oleh pjm pres (,) pjm wpres (,) jm ketua pdri (,) kppd (,) jm
pbap dan pimpinan ap lainnja dlm dewan siasat militer setlh pem-
kembali dijogja (3) sesdh sidang dewan siasat militer demikian pe-
rintah2 penghentian permusuhan dan putusan-2 lain akan mem-
punjai dasar kuat (4) seblm sidang demikian sukar bagi anggauta ap

utk turut serta perundingan spt diminta oleh del dari saja (,) sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan-2 dlam solidariteit pimpinan ap (5) saja pertimbangkan usul saja dahulu spj pdri tetap berkedudukan ditempatnja setlh pem kembali dijogja (6) dlm segala tindakan agar diusahakan spj kekuatan kita jang sekarang ada dibawah pdri termasuk kemampuan utk mendjalankan perang rakjat jg lama djangan ulangi djangan hilang atau dilemahkan seblm tertjapai penerjahan kedaulatan (.) hbs -

w2ksap

Sesuai dengan aselinja.
Secretariaat MBKD/HCGT.

(Sriharto).

(28)

G.M. D.M.I.-II

D.C.-

no : 0339/sal,

Kepada: para gm (,) wksu dan x-pos ten

Dari : dk =

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.
0077/dr	1/7	14.00	=	7/7	23.15	0339	8/7	20.00	0339	9/7	12.00

Isi :

= no 53/x-12/rdg (.)

utk pendjelasan kami tegaskan (,) bhw dalam perundingan ttg cease fire ternjata bhw bld berpendirian bhw ri tinggal atjeh dan jogja (,) dan tak mempunjai tentara lagi (.) habis ±

= ptttd =

- temb: 1 pdri
2 ptts
3 maj maladi

Ditempat tgl : 9 juli 49.-

G.M. D.M.I. - II
D.C.-

Kepada: para gm
temb : maj maladi =
Dari : dk =

No : 0340/sal.

Png. C.K.			Pn. O.S.			Pn. C.K.			Selesai C.K.		
no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.	no.	tgl.	djm.
0075/88	30/6	09.00	[tdk terbaca]		03.40	0340	8/7	20.00	0340	10/7	22.30

Isi :

NO 56 /x-12/rdg (.) tgl 21/6 (.) penting (.) bhh pertanjaan2 ttg cease fire
jg menjatakan masih ada keragu-raguan di 1 - 2 inst (,) kami tegaskan lagi
sbb (:)

- 1 pegang teguh perintah siasat jm pb dan instr pengelaksanaan mbkd (.)
walaupun bagaimana berita atau maklumat dari luar pimpinan apri (.)
djanganlah ragu2 dan tetap terus pada kewadajibanmu jg sekarang se-
lama tidak ada perintah lain dari jm pb (.)
2. seperti dlm maklumat2 jg sjah ditegaskan bhw musuh tih gagal siasat
(,) tih berdesak defensief dan meneruskan tjara mundur jg paling en-
teng baginja (.) karena itu ia butuh adempauze (.)
3. tetap sedar isjarat dari pdri dan amanatnja tetap tjuriga pd musuh (.)
habis =

= ptt d kol ah nasution =

Ditempat tgl : 10 juli 49 .-

Cdo :

Kdc..

d/a BA. PHB.Cie Bant :



G.M.D.M.I - II.
BAT.PHB. D.C.

Kepada : jth gm 1 - 4
 : jth ptts
 : maj maladi =
Nr.: 018/sal. Dari : dj k =

Pengiriman C.K.			Penerimaan O.S.			Penerimaan C.K.			Selesai C.K.		
nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.	nr.	tgl.	djm.
0066	16/8	18.00	=	16/8	2128	018	20/8	18.00	018	20/8	21.00

Isi :

= nr 04/pen/sec/16-8-1949 (.) dari fihak up central joint board diwakili oleh kol djatikusumo (,) kol nasution (,) kol hidajat (,) mr ali budiardjo dan diketuai oleh mr wongsonegoro (.) tgl 9 - 8 - 1949 telah diadakan rapat formeel dengan bld di djakarta diketuai oleh unci (.) persetudjuan terdapat mengenai local joint committees jang akan berdjumlah 13 (.) tgl 14 - 8 - 1949 rapat formeel kedua diadakan di djakarta dimana fihak rep diwakili oleh mr wongsonegoro (,) mr alibudiardjo dan kol djatikusumo mengenai soal solo dan surabaja (.) karena itu soal mengenai petundjuk2 untuk menetapkan batas2 daerah patroli ditunda (,) sehingga soal2 di atas beres (.) habis =

= pem sap bag penerangan/penerbitan
kol wijono =

Hal. 294 kosong

LAMPIRAN

182

1. RUMUSAN SEMINAR SEJARAH
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) tanggal 25 - 26 September 1989 di Gedung Krida Bhakti, SETNEG di Jakarta, setelah mendengarkan :

1. Sambutan tertulis Presiden RI yang dibacakan Menteri Sekretaris Negara;
2. Sambutan mantan Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Mr. Teuku Mohammad Hasan;
3. Laporan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Dr. Abdurachman Surjomihardjo;
4. Makalah-makalah :
 - a. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, "Makna Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Studi Sejarah Indonesia";
 - b. Drs. JR. Chaniago, "Lintasan Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia";
 - c. Drs. Machfudi Mangkudilaga, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Sumber Belanda";
 - d. Drs. Ishaq Thaher/Drs. Adrial Adly, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat";
 - e. Dr. Nazaruddin Syamsudin, "Aceh Pada Masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia";
 - f. Drs. Saleh A. Djamhari, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Jawa";
 - g. Prof. Dr. Yuwono Sudarsono, "Segi-segi Luar Negeri Pemerintah Darurat Republik Indonesia";
 - h. Dr. Taufik Abdullah, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Sejarah Perang Kemerdekaan".
5. Catatan/pengalaman para pelaku Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
6. Tanggapan, catatan, dan saran para peserta, maka seminar mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Seminar menerima dan menyadari sepenuhnya pandangan Presiden Republik Indonesia dalam sambutan tertulis beliau, bahwa kearifan sejarah memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu hal, tanpa dia harus mengalami sendiri peristiwa itu. Perjuangan singkat Pemerintah Darurat Republik Indonesia waktu itu menanamkan kearifan sejarah mengenai arti

pentingnya perjuangan dan kekuatan rakyat dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Seminar juga mencatat ketepatan pandangan Mr. T. Mohammad Hasan bahwa dari sudut sejarah peristiwa tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah berlalu. Namun sebagai alat untuk membina wawasan kebangsaan, sebagai alat perekat integrasi bangsa, kenangan terhadap Pemerintah Darurat Republik Indonesia akan tetap aktual.
3. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan total yang melibatkan seluruh kekuatan sosial serta seluruh sumberdaya manusia dan alamiah dengan tujuan tunggal membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Dalam perjuangan kemerdekaan tergambar secara jelas cita-cita kesatuan bangsa yang telah disemai sejak periode sebelumnya. Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak saja merupakan legitimasi keberadaan negara Republik Indonesia, tetapi juga memperlihatkan berbagai dinamika sosial, inisiatif lokal dalam konteks nasional, integrasi kota dan desa, manajemen sosial yang dijalankan, bentuk hubungan sipil militer, corak politik internasional, peranan komunikasi, dan lain sebagainya.
4. Dari segi moral, sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia memberikan masukan kepada kita bagaimana kepentingan bersama harus didahulukan, dan perjuangan tanpa pamrih telah diperlihatkan. Karena itulah studi yang mendalam tentang sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia sangat relevan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembinaan generasi muda Indonesia.

REKOMENDASI

Sejarah perjuangan bangsa perlu digali secara luas dan mendalam dan disebarluaskan. Untuk maksud itu seminar merekomendasikan agar :

1. Melakukan usaha pengumpulan bahan-bahan sejarah baik tertulis maupun lisan (oral history).
2. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil seminar.
3. Menjadikan hasil seminar ini sebagai masukan kepada pemerintah untuk kepentingan pendidikan.
4. Merintis usaha-usaha yang dapat memperdalam pengetahuan akan sejarah perjuangan bangsa dan mempertinggi kesadaran sejarah.

Jakarta, 26 September 1989

Tim Perumus Seminar Sejarah
Pemerintah Darurat Republik
Indonesia.

Penasehat : *Prof. Dr. Emil Salim*

Ketua : *Dr. Abdurrachman Surjomihardjo*

Anggota : 1. *Brigjen TNI Soedarko*

2. *Dr. Taufik Abdullah*

3. *Dr. AB. Lopian*

4. *Prof. Dr. Ibrahim Alfian*

5. *Dr. Muchlis Paini*

6. *Prof. Dr. Hamid Abdullah*

7. *Drs. Amrin Imran*

8. *Drs. Yusmar Basri*

9. *Drs. A. Syamsurizal*

Sekretaris : *Drs. JR. Chaniago*

2. DAFTAR SUMBANGAN TULISAN PARA PELAKU

I. BUKU DAN ARTIKEL

- Amin, SM, Mr, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*. tk: tp, 1978.
-----, *Atjeh sepintas Lalu*. tk: tp, 1950.
- Basri, Hasan, "Catatan mengenai Perjalanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sekitar Tanggal 22 Desember 1948 sampai 2 Januari 1949", 2 halaman. Jakarta, 11 Desember 1988.
-----, "Riau Dibagi Dalam Dua Wilayah : Riau Selatan dan Riau Utara", *Catatan Seorang Pejuang Menegakkan Merah Putih di Riau*, bab X, halaman 214 - 219. tk: tp, tt.
- Bustamam, H, SH, "Kedudukan Ibukota Negara Indonesia Selama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)", 8 halaman. Jakarta, 18 September 1989.
- Halim, Abdul, "Ketidaktekeltian Dinas Intelijens Militer Belanda mengakibatkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia bisa dilahirkan dengan selamat", 13 halaman. Jakarta, 15 September 1989.
- Harun, Lukman, "Hari-hari Terakhir PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)", *Pak Natsir 80 Tahun : Buku Pertama Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*, halaman 3 - 14. Jakarta : Media Da'wah, 1988.
- Hasan, ^(THM) Mr, "PDRI: Mandat Yang Terbatas?", 5 halaman. Jakarta, 27 Juli 1989.
- Hidajat, HR, "Catatan Pribadi mengenai Hari-hari Sebelum Pengumuman Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Pada Tanggal 22 Desember 1948", 4 halaman. Jakarta, 12 September 1989.
- Husein, Ahmad, "Kesan dan Pengalaman Berjuang dan Bergerilya Bersama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Tengah", 23 halaman. Jakarta, 14 September 1989.
- Hutasoit, M, Dr, "PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)", 4 halaman. Jakarta, 21 September 1989.
-----, *Percikan Revolusi di Sumatera*. tk: tp, tt.
- Hutasoit, M, Ny, "Beberapa Catatan Pengalaman Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera", 10 halaman.
- Ismael, Amir, "Penggelapan Tjandu di Desa Waras", 3 halaman. Desa Waras, 31 Desember 1949.
- Jaka, Baharuddin, "Menyelamatkan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945", 29 halaman. Jakarta, 26 - 27 September 1989.

Karim, Eny, "Sekitar Pemerintah Darurat Republik Indonesia", 17 halaman. Jakarta, 2 September 1989.

Kawilarang, AE, Let.Kol, "Pengalaman bulan-bulan Ahir 1948 s/d akhir 1949", 5 halaman.

Malay, Ani Marni, SH, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia Benang Merah Proklamasi", 65 halaman. Padang: Yayasan Bagindo Aziz Chan, 1989.

Maradjo, Alwie St, H, "Kenang-kenangan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", 142 halaman. Padang, 15 Mei 1979.

Moehammad, Djoeir, "Perihal Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia", 20 halaman. Jakarta, 29 Juni 1989.

-----, "Beberapa Catatan Tambahan dan Perbaikan terhadap Naskah Pertama Disekitar PDRI", 8 halaman. Jakarta, 17 September 1989.

Nasution, AH, Jend. TNI (Purn), "Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)", 9 halaman. Jakarta, September 1989.

Nazir, Moh, "Butir Renungan Pada Masa Revolusi di Sumatera Barat", 6 halaman. Jakarta, 21 Maret 1975.

-----, "Armada Perang dan Strategi Maritim", 7 halaman. Jakarta, 26 Oktober 1981.

Noor, Umar Said, "Data Peranan PHB/Sandi AURI Pada PDRI 1948/1949 di Sumatera Barat", 9 halaman. Jakarta, 9 September 1989.

Pane, Mustafa, H, "Pengalaman Kami Menjelang Pembentukan PDRI Sewaktu PDRI dan Sesudah PDRI Di Sumatera", 18 halaman.

Panitia Pusat Peringatan Lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, "Beberapa Catatan Tentang: Lahirnya, tugas, dan Perjuangan PDRI", 7 halaman. Jakarta 17 November 1969.

-----, "Keadaan Sebelum PDRI dibentuk", 3 halaman.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat, *Sumatra Barat*, halaman 210 - 212. tk: tp, 1978.

Pratigny, Imam, Drs, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya : Perjuangan Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17 - 8 - 1945*. halaman 27 - 28. Jakarta: Yayasan Bhakti T.P. Kedu, 1983. (Dari koleksi Paguyuban Keluarga Pelajar Pejuang Kemerdekaan Kedu-Selatan).

Prawiranegara, Sjafruddin, "Tugas Pemerintah Darurat Republik Indonesia", 3 halaman. Jakarta, 12 November 1969.

-----, "Saran-saran guna memberikan isi kepada peringatan P.D.R.I. (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)", 3 halaman. Jakarta, 11 November 1969.

- Rasjid, Sutan Muhammad, Mr. H, "Aceh Daerah Kantong PDRI", 20 halaman.
- Ronodipuro, Jusuf, "Menjelang Hari Minggu Tanggal 19 Desember 1948 di Jakarta", 7 halaman. Jakarta, 15 Desember 1980.
- "Beberapa Catatan Tambahan dan Perbaikan Terhadap Naskah Pertama Disekitar PDRI", 8 halaman.
Jakarta, 17 September 1989.
- Rosjad, Effendi, "Catatan Perjalanan KCVRI DKI Jaya di Sumatera Barat", 3 halaman.
- , "Perjalanan Tim Cacat Veteran DKI Jakarta di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota", 2 halaman.
- Salim, Leon, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia Lahir", 27 halaman. Jakarta, 25 September 1989.
- Situmorang, MK, SH, "Laporan Singkat Perjalanan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Selama Perang Kemerdekaan ke-II 1948 - 1950 Berkedudukan di Sumatra Barat dari Segi Pengawasan/Pengamanannya Yang Dilakukan Pasukan Mobile Brigade (Polisi)", 3 halaman. Jakarta, 20 September 1989.
- Soepono, Wiweko, "Kegiatan AURI Selama PDRI di Burma", 2 halaman.
- Soejono, H, "Sekedar Pengalaman Pelaku Dalam Perang Kemerdekaan '49 oleh KSAU Kabinet RI ke-VII Dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia", 42 halaman. Jakarta, 22 September 1989.
- Sub Direktorat Sejarah, Direktorat Personil Markas Besar Kepolisian RI, *Perjuangan Polisi di Sumatra Barat 1945 - 1949*, Bab I, halaman 1 - 7 dan halaman 89 - 92. tk: tp, 1987.
- Tjokropranolo, "Suatu Tulisan Mengenai PDRI", 2 halaman. Jakarta 12 September 1989.
- , "Pidato Dr. Moh. Hatta Pada Upacara Pemakaman Panglima Besar Soedirman", 1 halaman.
- Widjaja, I. Wangsa, "PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)", 2 halaman.

II. ARSIP DAN FOTO

- Ismael, Amir, "Fotokopi: Surat Keterangan dari Letnan I Kamarudin dan Sersan Mayor Amir Ismael tanggal 10 Januari 1950 tentang pencurian candu yang dilakukan oleh Namak cs, surat timbang terima dari Amir Ismael kepada Kamarudin tanggal 15 April 1950 tentang candu beserta surat dan dokumentasinya, surat perintah dari Komandan Sub Komando B kepada Kamarudin tanggal 28 April 1949 tentang penjagaan terhadap candu di daerah pertempuran Timur Lima Puluh Kota, surat kuasa me-

nyimpan candu negara dari Gubernur Militer Sumatra Barat kepada Kamarudin tanggal 10 Mei 1949, dan surat ketetapan dari Komandan Pertempuran L.Kota Sub Terr IX Sumatra kepada Sersan Mayor Amir Ismael tanggal 26 Oktober 1949 tentang penetapan kepala bagian siasat D.P.T.L. menjadi kepala bagian siasat sect. I D.P.L."

Nasroen, Nasrullah, "Fotokopi : surat mandat dari Syafruddin Prawira Negara kepada Mr. M. Nasroen tanggal 18 September 1949 untuk memimpin daerah Ampalu sehubungan dengan kemungkinan Belanda menduduki Halaban, dan uraian riwayat hidup Prof. Mr. M. Nasroen".

Laporan Liaison Officer, "Pengiriman laporan perjalanan dan harian Liaison committee tanggal 13 Oktober 1949, persalah pertemuan antara Wk. KPL dengan komandan tentara Belanda Payakumbuh di Payakumbuh tanggal 18 September 1949, laporan perjalanan Letnan II Rasidin Rasjid ke Ladang Lawas dan Baso—Padang Tarab tanggal 11 Oktober 1949, laporan perjalanan Letnan II Rasjiddin Rasjid ke Baso tanggal 11 Oktober 1949, laporan perjalanan ke Ladang Lawas dari Letan II Rasjidin Rasjid tanggal 13 September 1949, verslag perjalanan Liaison Officer Let. II Rasjidin Rasjid tanggal 5 Oktober 1949, laporan harian Liaison Committee mulai tanggal 10 September sampai 30 September 1949, laporan harian Officer in Charge Liaison-Committee tanggal 1 Oktober 1949 sampai 11 Oktober 1949, laporan harian Officer in Charge Liaison-Committee tanggal 27 September 1949 sampai 30 September 1949, verslag dinas ke L. Loto dari tanggal 6 Oktober sampai 11 Oktober 1949, verslag dinas ke daerah 50 Koto oleh Letnan II M. Yunus tanggal 26 September 1949 sampai 4 Oktober 1949, dan verslag perjalanan Liaison Officer Let. II Rasjidin Rasjid tanggal 30 September 1949 sampai 4 Oktober 1949". (Fotokopi).

Ronodipuro, Jusuf, "Fotokopi: surat dari delegasi Belanda No. 3897 tanggal 18 Desember 1948 (dalam bahasa Belanda), radiogram dari Presiden RI Jogjakarta kepada Syafrudin Prawiranegara Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948 tentang mandat untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatra, radiogram dari Wk. Presiden RI Jogjakarta kepada Dr. Sudarsono-Palaar-Mr. Maramis New Delhi tanggal 19 Desember 1948 tentang mandat untuk membentuk exile government republic Indonesia di India, amanat PJM. Wk. Presiden Moh. Hatta tanggal 19 Desember 1948, amanat Presiden PJM. Presiden Sukarno tanggal 19 Desember 1948, pesan Menteri Penerangan Natsir tanggal 19 Desember 1948, dan surat dinas rahasia tanggal 23 Desember 1948 (bahasa Inggris)".

I. ARTIKEL

- Jacobi, Tengku A.K, "Butir Sejarah PDRI Selintas", *Pelita*, No. 4687, Senin 25 September 1989, halaman IV dan VII kol. 6.
- Pour, Julius, "PDRI, antara Setan dan Lautan Ganas I", *Kompas*, No. 94 tahun ke-25, Senin 2 Oktober 1989, halaman XVI kol.3.
- , "PDRI, antara Setan dan Lautan Ganas II", *Kompas*, No. 95 tahun ke-25, Selasa 3 Oktober 1989, halaman XVI kol. 3.
- Sunaryo, G, "PDRI Dalam Revolusi Indonesia", *Jayakarta*, No. 455 tahun ke-2, Senin 25 September 1989, halaman IV kol. 2.

II. BERITA

- "Peranan PDRI Perlu Segera Direkonstruksi", *Kompas*, Selasa 23 Agustus 1988, halaman VI.
- "Suatu Tim dari Jakarta Cari Fakta Tentang PDRI", *Harian Umum Semangat*, Padang, Senin 21 Agustus 1989.
- "Sejarah Pemerintah Darurat RI Hampir Dilupakan Masyarakat", *Pelita*, No. 4682, Rabu 20 September 1989.
- "Sejarawan akan Bahas Perjuangan Pemerintah Darurat RI", *Antara*, A-12, Rabu 20 September 1989.
- "Presiden: Masih Banyak Bagian Penting Sejarah Belum dipahami", *Antara*, B-8, Senin 25 September 1989.
- "Sambutan Presiden Pada Seminar PDRI: Banyak Generasi Muda Kurang Rasakan Relevansi Perjuangan", *Suara Pembaruan*, No. 929 tahun ke-3, Senin 25 September 1989, halaman I kol. 7.
- "Generasi Muda Kurang Rasakan Relevansi Perjuangan", *Terbit*, Senin 25 September 1989, halaman I dan XI kol. 2.
- "Presiden Suharto: Jangan Lupakan Sejarah, Agar Tak Jadi Bangsa Kerdil", *Kompas*, No. 68 tahun ke-25, Selasa 26 September 1989, halaman I kol. 1 dan VII kol. 1.
- "Presiden Nilai Generasi Muda Kurang Rasakan Relevansi Perjuangan", *Sinar Pagi*, No. 5513, Selasa 26 September 1989.
- "Diperlukan Kearifan Sejarah", *Jayakarta*, No. 456 tahun ke-2, Selasa 26 September 1989.
- "Soeharto Calls for Study of Nation's History", *The Jakarta Post*, No. 128, 26 September 1989.
- "Dari Seminar Sejarah PDRI: Pembentukan Pemerintah Darurat RI dapat

- Mencegah Perebutan Kekuasaan", *Pelita*, No. 4688, Selasa 26 September 1989, halaman I dan XI kol. 7.
- "Sejarah Dibuat Untuk Generasi Muda", *Merdeka*, No. 372203, Selasa 26 September 1989.
- "Banyak Bagian Penting Yang Belum Terekam: Dari Seminar I Pemerintah Darurat RI", *Jawa Pos*, No. 085, Selasa 26 September 1989.
- "Sejarah Dibuat Untuk Generasi Muda", *Berita Yudha*, No. 34, Selasa 26 September 1989, halaman I dan X kol. 7.
- "Presiden Suharto: Sejarah PDRI Belum Terekam Dengan Baik, Generasi '45 Perlu Selesaikan Tugas Sejarah", *Singgalang*, Selasa 26 September 1989, halaman I dan XI kol. 5.
- "Presiden Imbau Semua Pihak Kembangkan Kearifan Sejarah", *Sriwijaya Pos*, Selasa 26 September 1989, halaman VIII.
- "Presiden Soeharto Imbau Kembangkan Kearifan Sejarah", *Serambi*, Selasa 26 September 1989, halaman VIII.
- PDRI Benang Merah Perjuangan Kemerdekaan", *Jayakarta*, No. 457, Rabu 27 September 1989.
- "Prof. DR. Emil Salim: PDRI Bukan Perjuangan Lokal Rakyat Sumbar, tapi Perjuangan Nasional", *Singgalang*, Rabu 27 September 1989, halaman I dan XII kol. 1.
- "Tajuk Rencana : PDRI Kenyataan Sejarah Yang Pantas Diakui Bersama", *Singgalang*, Rabu 27 September 1989.
- "Catatan Redaksi: Perjuangan PDRI dihargai", *Majalah Harmonis*, No. 411 tahun ke-20, 15 - 31 Oktober 1989, halaman 3.
- "Rumusan Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia", *Majalah Harmonis*, No. 411 tahun ke-20, 15 - 31 Oktober 1989, halaman 40.

2

+

4. SUSUNAN PANITIA SEMINAR SEJARAH PDRI
JAKARTA 25 - 26 SEPTEMBER 1989

PENASEHAT

Prof. Dr. Emil Salim

PANITIA SEMINAR :

A. Panitia Pengarah :

1. Ketua : Dr. Abdurrachman Surjomihardjo (MSI/LIPI)
2. Anggota : 1. Brigjen TNI Soedarjo (Pusat Sejarah dan Nilai Tradisi ABRI)
2. Dr. AB. Lopian (MSI/LIPI)
3. Prof. Dr. Budi Santoso (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisionil Ditjen Kebudayaan P & K)
4. Dr. Alwi Dahlan (HIPPIIS/KLH)
5. Dr. Taufik Abdullah (LIPI)

3. Sekretaris : Drs. JR. Chaniago (Arsip Nasional RI)

B. Peiaksana Seminar :

1. Koordinator : Drs. Ariantara A. Zainal

2. Sekretariat : Drs. Ariantara A. Zainal

Drs. Mokhammad Aris
Drs. Sudiyono
Dra. Aat Siti Mulyati

3. Akomodasi dan Transportasi : Drs. Indra Laksana
Drs. Badrul Fadhil

4. Persidangan/
Protokol dan Perumus : Drs. Amrin Imran
Drs. A. Syamsurizal
Drs. Moh. Nasir
Drs. Moh. Wasith
Drs. Yusmar Basri
Dra. Sintia Soetopo

Konsumsi : Dra. Ratnaisih Maulana
Dra. Rochmani Santoso

Dokumentasi : Drs. Sauki Hadiwardoyo
Drs. Machi Suhadi

Jakarta, 29 Agustus 1989

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)



Mencegah Perebutan Kekuasaan", *Pelita*, No. 4688, Selasa 26 September 1989, halaman I dan XI kol. 7.

"Sejarah Dibuat Untuk Generasi Muda", *Merdeka*, No. 372203, Selasa 26 September 1989.

"Banyak Bagian Penting Yang Belum Terekam: Dari Seminar I Pemerintah Darurat RI", *Jawa Pos*, No. 085, Selasa 26 September 1989.

"Sejarah Dibuat Untuk Generasi Muda", *Berita Yudha*, No. 34, Selasa 26 September 1989, halaman I dan X kol. 7.

"Presiden Suharto: Sejarah PDRI Belum Terekam Dengan Baik, Generasi '45 Perlu Selesaikan Tugas Sejarah", *Singgalang*, Selasa 26 September 1989, halaman I dan XI kol. 5.

"Presiden Imbau Semua Pihak Kembangkan Kearifan Sejarah", *Sriwijaya Pos*, Selasa 26 September 1989, halaman VIII.

"Presiden Soeharto Imbau Kembangkan Kearifan Sejarah", *Serambi*, Selasa 26 September 1989, halaman VIII.

PDRI Benang Merah Perjuangan Kemerdekaan", *Jayakarta*, No. 457, Rabu 27 September 1989.

"Prof. DR. Emil Salim: PDRI Bukan Perjuangan Lokal Rakyat Sumbar, tapi Perjuangan Nasional", *Singgalang*, Rabu 27 September 1989, halaman I dan XII kol. 1.

"Tajuk Rencana : PDRI Kenyataan Sejarah Yang Pantas Diakui Bersama", *Singgalang*, Rabu 27 September 1989.

"Catatan Redaksi: Perjuangan PDRI dihargai", *Majalah Harmonis*, No. 411 tahun ke-20, 15 - 31 Oktober 1989, halaman 3.

"Rumusan Seminar Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia", *Majalah Harmonis*, No. 411 tahun ke-20, 15 - 31 Oktober 1989, halaman 40.

2



4. SUSUNAN PANITIA SEMINAR SEJARAH PDRI
JAKARTA 25 - 26 SEPTEMBER 1989

PENASEHAT

Prof. Dr. Emil Salim

PANITIA SEMINAR

A. Panitia Pengarah :

1. Ketua : Dr. Abdurrachman Surjomihardjo (MSI/LIPI)
2. Anggota :
 1. Brigjen TNI Soedarko (Pusat Sejarah dan Nilai Tradisi ABRI)
 2. Dr. AB. Lopian (MSI/LIPI)
 3. Prof. Dr. Budi Santoso (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisionil Ditjen Kebudayaan P & K)
 4. Dr. Alwi Dahlan (HIPPIIS/KLH)
 5. Dr. Taufik Abdullah (LIPI)

3. Sekretaris : Drs. JR. Chaniago (Arsip Nasional RI)

B. Peiaksana Seminar :

1. Koordinator : Drs. Ariantara A. Zainal

2. Sekretariat : Drs. Ariantara A. Zainal

Drs. Mokhammad Aris

Drs. Sudiyono

Dra. Aat Siti Mulyati

3. Akomodasi dan

Transportasi : Drs. Indra Laksmna
Drs. Badrul Fadhil

4. Persidangan/
Protokol dan
Perumus

: Drs. Amrin Imran
Drs. A. Syamsurizal
Drs. Moh. Nasir
Drs. Moh. Wasith
Drs. Yusmar Basri
Dra. Sintia Soetopo

Konsumsi : Dra. Ratnaisih Maulana
Dra. Rochmani Santoso

Jakarta, 29 Agustus 1989

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)

SUSUNAN ACARA SEMINAR SEJARAH
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Senin, 25 September 1989

A. Acara Pembukaan

1. 09.00 – 09.15 Laporan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
2. 09.15 – 09.30 Sambutan Mr. Teuku Moh. Hasan, mantan wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
3. 09.30 – 09.45 Sambutan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bapak. Drs. Murdiono, diteruskan dengan pembukaan seminar oleh Menteri Sekretaris Negara.
4. 09.45 – 10.45 Istirahat + minum kopi.

B. Acara Seminar

5. 10.45 – 12.15 Sidang I
Pembicara : Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo
"Makna Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam studi Sejarah Indonesia" *)
Moderator : Dr. Abdurrachman Surjomihardjo.
6. 12.15 – 13.15 Istirahat + makan siang.
7. 13.15 – 14.15 Sidang II
Pembicara : Drs. JR. Chaniago
"Lintasan Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia".
Moderator : Brigjen TNI Soedarko
8. 14.45 – 15.00 Istirahat + minum kopi.
9. 15.00 – 16.30 Sidang III
Pembicara : Drs. Machfudi Mangkudilaga
"PDRI dalam Sumber-sumber Belanda".
Moderator : Dr. Taufik Abdullah.

Selasa, 26 September 1989

A. Acara Seminar

1. 09.00 – 10.30 Sidang IV
Pembicara : a. Dr. Nazaruddin Sjamsudin
"PDRI di Sumatra bagian Utara".

*) Makalah dibacakan oleh Prof. Dr. Ibrahim Alfian (red.).